

Perseroan Terbatas

1. Pesan Nama

a. Pesan Nama Oleh Umum

- Masuk ke halaman Website AHU ke alamat <http://ahu.go.id>
- klik menu Perseroan Terbatas



- Untuk melakukan Pesan Nama oleh Publik, Klik tombol  Pesan Nama oleh Umum



- Maka akan muncul form Pesan Nama Perseroan seperti berikut.

The image shows the 'Pesan Nama Perseroan' form on the AHU website. At the top, there are three buttons: 'Pesan Nama Perseroan' (selected), 'Pesan Nama Yayasan', and 'Pesan Nama Perkumpulan'. Below these is a green button labeled 'Cek nama yang telah dipesan'. The main form area is titled 'Pesan Nama Perseroan' and contains several input fields: 'Kode pembayaran / Kode Voucher *' with a placeholder 'MASUKKAN KODE PEMBAYARAN / KODE VOUCHER' and a note 'Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, klik [disini](#)'; 'Nama Perseroan yang diinginkan *' with a placeholder 'MASUKKAN NAMA PERSEROAN'; 'Singkatan Perseroan yang diinginkan' with a placeholder 'MASUKKAN NAMA SINGKATAN PERSEROAN'; 'Jenis Perseroan *' with a dropdown menu showing 'Pilih'; and 'Nama Domain Perseroan' with a placeholder 'MASUKKAN NAMA DOMAIN PERSEROAN'. A red 'Cari' button is at the bottom of the form.

1). Pemesanan Nomor Voucher

- Klik [disini](#) pada form Pesan Nama Perseroan diatas untuk membeli Kode Voucher. Kemudian muncul halaman Pemesanan Nomor Voucher seperti berikut.



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



[Website Ditjen AHU](#) [Beranda](#) [Login](#)

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM *

BADAN HUKUM

- Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

NAMA PEMOHON *

a →

EMAIL PEMOHON *

b →

NOMOR HP *

c →

JUMLAH PEMBELIAN *

1

Tahap selanjutnya membayar ke Bank Persepsi untuk pemesanan voucher sebesar **Rp 100.000** paling lambat **7** hari sejak pemesanan. Apabila Anda setuju silahkan klik tombol **SIMPAN** untuk melanjutkan proses. Pembayaran PNBPN dapat dilakukan melalui teller, internet banking, ATM dan mini ATM (*disarankan untuk membayar di bank yang telah bekerjasama dengan Ditjen AHU).

d → ☒ Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

e → **SIMPAN**

- Pada form Pemesanan Nomor Voucher, terdapat beberapa field yang harus diisi, diantaranya ialah :
 - a. Isikan Nama Pemohon
 - b. Isikan Email Pemohon
 - c. Isikan Nomor HP
 - d. Ceklis pernyataan syarat dan ketentuan
 - e. Klik tombol **SIMPAN** untuk menampilkan bukti Pemesanan Nomor Voucher


DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 

Website Ditjen AHU Beranda Login

[Cek Pemesanan Voucher](#)

BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER



DIREKTORAT JENDERAL AHU
 BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
BADAN HUKUM
Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

KODE VOUCHER	: 0201000400000000
NAMA PEMOHON	: TEO
EMAIL PEMOHON	: teo@teobank.com
NOMOR HP	: 081234567890
TANGGAL TRANSAKSI	: 01 Mei 2019 10:00:00
TANGGAL EXPIRED	: 01 Mei 2019 23:59:59
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	
TAGIHAN	: Rp 100.000
STATUS	: BELUM BAYAR

Silahkan download dan print Bukti Pemesanan Nomor Voucher, kemudian lanjutkan pembayaran pada Bank Perserpsi dengan membawa Bukti Pemesanan Nomor Voucher dimaksud.
 Selanjutnya klik **CEK PEMESANAN VOUCHER** untuk mengetahui status pembayaran.

Masa Berlaku Voucher 60 Hari Setelah Dilakukan Pembayaran

[Download](#)

- f. Pemohon juga mendapatkan notifikasi email berupa bukti pemesanan nomor voucher

Terima kasih telah melakukan pemesanan Nomor Voucher **BADAN HUKUM** Item PNPB Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan. Berikut adalah rincian detail Bukti Pemesanan Nomor Voucher.

Nomor Voucher: 0201000400000000
 Nama Pemohon: TEO
 Email Pemohon: teo@teobank.com
 Nomor HP: 081234567890
 Tanggal Transaksi: 01 Mei 2019 10:00:00
 Tanggal Expired: 01 Mei 2019 23:59:59
 Tagihan: Rp 100.000
 Status: **BELUM BAYAR**

Salam,
 Administrator Ditjen AHU

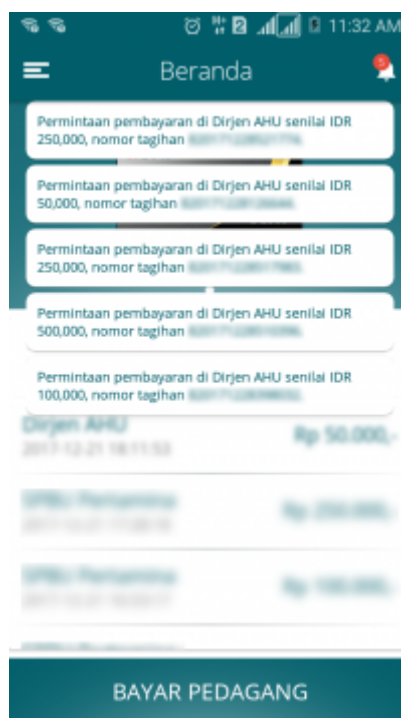
2). Pembayaran Nomor Voucher

a. Login



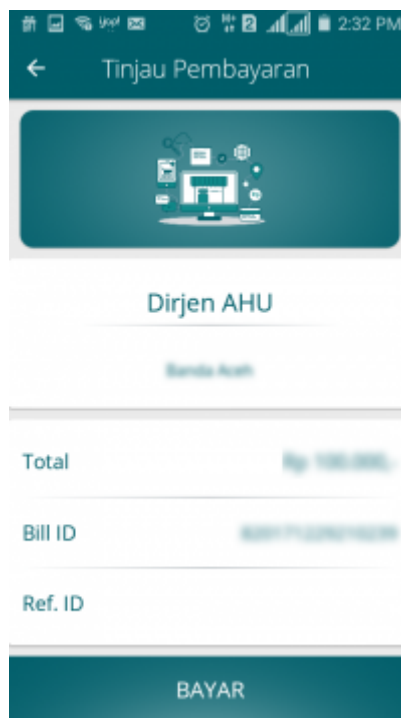
- Masukkan email dan kata sandi yang telah terdaftar pada Aplikasi YAP! Klik tombol untuk masuk ke dalam Beranda YAP!

b. Notifikasi



- Klik icon  untuk melihat notifikasi pemesanan nomor voucher. klik nomor voucher yang akan dibayar. Maka akan menampilkan halaman Tinjau Pembayaran

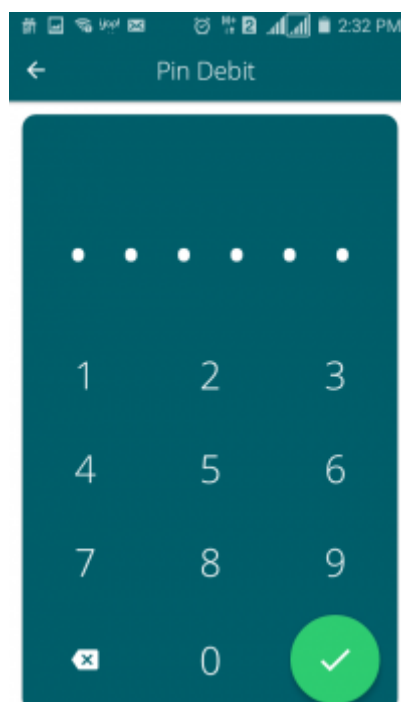
c. Tinjau Pembayaran



- Pada halaman tinjau pembayaran, klik tombol **BAYAR** untuk melakukan pembayaran pemesanan voucher

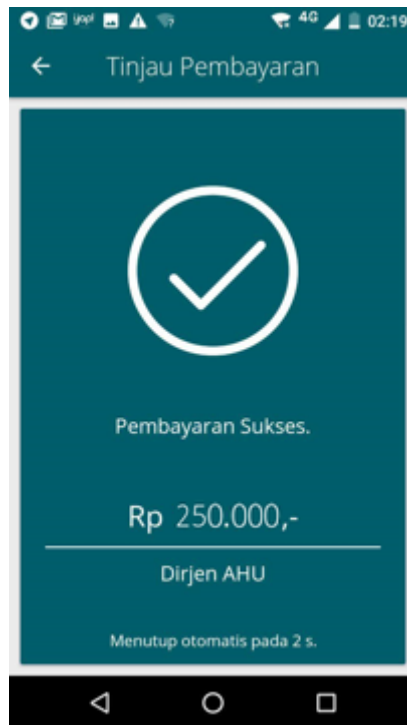
d. Pilih Sumber Dana

- Ceklis Sumber Dana, lalu klik **Lanjut** maka akan menampilkan Halaman Input PIN Debit



e. Masukan Pin Debit

- Masukan pin debit, lalu klik tombol  maka akan tampil halaman berikut yang menyatakan bahwa pembayaran telah berhasil.



3). Pengisian Form Pesan Nama Perseroan

- Setelah melakukan pembayaran nomor voucher, lakukan pengisian pada form Pesan Nama Perseroan.



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



[Website Ditjen AHU](#) [Beranda](#) [Login](#)

Pesan Nama Perseroan

Pesan Nama Yayasan

Pesan Nama Perkumpulan

Cek nama yang telah dipesan

Pesan Nama Perseroan

Kode pembayaran / Kode Voucher *

1

Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, klik [disini](#)

Nama Perseroan yang diinginkan *

2

Singkatan Perseroan yang diinginkan

3

Jenis Perseroan *

4

Nama Domain Perseroan

5

6

- Pada form tersebut terdapat beberapa field yang harus diisi, diantaranya ialah :

- 1. Isikan **Kode Pembayaran/Kode Voucher**
- 2. Isikan **Nama Perseroan** yang diinginkan
- 3. Isikan **Singkatan Perseroan** yang diinginkan
- 4. Pilih **Jenis Perseroan**

--PILIH--

--PILIH--

SWASTA NASIONAL

PMDN FASILITAS

BUMN

BUMD

PMA

- Jika memilih Jenis Perseroan “PMDN FASILITAS”, akan muncul keterangan seperti dibawah ini

Jenis Perseroan *

PMDN FASILITAS

☒ Untuk PMDN wajib menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 mengenai pesan nama perseroan

- 5. Isikan **Nama Domain Perseroan**
- 6. Klik tombol
- Kemudian masuk ke proses nama, muncul beberapa pilihan domain Website Perseroan dan daftar kemiripan nama yang telah didaftarkan seperti tampilan berikut.



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



Website Dijelajahi AHU

Beranda

Login

Pesan Nama Perseroan

Pesan Nama Yayasan

Pesan Nama Perkumpulan

Cek nama yang telah dipesan

Pesan Nama Perseroan

Kode pembayaran / Kode Voucher *

Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, klik [disini](#)

Nama Perseroan yang diinginkan *

Singkatan Perseroan yang diinginkan

Jenis Perseroan *

PMA

Nama Domain Perseroan

Car

Proses Pesanan Nama Domain Website Perseroan

*Nama Domain Perseroan yang kita pesan

*Harap anda periksa kembali penulisan sebelum melanjutkan

*Dibawah ini adalah tabel domain Perseroan yang tersedia, pemohon dapat memilih lebih dari satu dengan check pada domain yang diinginkan

Tarif Pesan nama Domain Website

100000

	Nama Domain	Status	Harga
☐	.id	AVAILABLE	2000000
☒	.co.id	AVAILABLE	100000
☐	.my.id	AVAILABLE	50000
☐	.web.id	AVAILABLE	50000
☐	.or.id	AVAILABLE	50000
☐	.biz.id	AVAILABLE	50000

Proses Pesan Nama Perseroan

*Nama Perseroan yang Anda pesan adalah " " disingkat " "

*Harap Anda periksa kembali penulisan sebelum melanjutkan.

Untuk diperhatikan!

Terdapat kemiripan nama " " dan kemiripan singkatan " " yang ada pada database AHU (lihat pada tabel dibawah)

No.	Nama Perseroan Terbatas yang telah terdaftar	Nama Singkatan yang telah terdaftar	Status
1	SRI JAYA BARU		terdaftar
2	TRI KUSUMA BARU		antrian
3	SAN PRIMA BARU		terdaftar
4	ERA CAHAYA BARU		terdaftar
5	GEN CAHAYA BARU		terdaftar
6	SRI JOHOR BARU		terdaftar
7	TRI USAHA BARU		terdaftar
8	AAN JAYA BARU		terdaftar
9	TRI EKA BARU		terdaftar
10	TRI KUSUMA BARU		terdaftar

PERINGATAN

1. Nama yang bertentangan dengan PP NOMOR 43 TAHUN 2011 mengenai pesan nama merupakan tanggung jawab pemohon.

2. Pemohon diwajibkan membaca PP terkait ketentuan Pasal 5, Pasal 11 (Lihat syarat pesan nama Pasal 5 dan Pasal 11). Peraturan Pemerintah mengenai pesan nama Perseroan (Lihat PP NOMOR 43 Tahun 2011).

3. Jika nama yang Anda pilih memiliki **persamaan pada pokoknya** dengan nama Perseroan Terbatas yang sudah terdaftar, maka disarankan memilih nama lain untuk menghindari gugatan pihak ke 3.

4. Segala bentuk gugatan pihak ke 3 terkait pesan nama ini menjadi tanggung jawab pemohon.

5. Kementerian Hukum dan HAM RI berhak untuk membatalkan pemesanan nama yang tidak sesuai dengan PP NOMOR 43 TAHUN 2011.

6. Biaya PNBPN pesan nama yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.

7. Pembatalan pesan nama karena melanggar ketentuan PP NOMOR 43 TAHUN 2011, maka biaya PNBPN pesan nama yang sudah dibayar tidak dapat diminta kembali.

☒ Saya mengerti dan telah membaca peringatan tersebut diatas

☒ Apabila nama tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, siap menerima segala bentuk sanksi termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

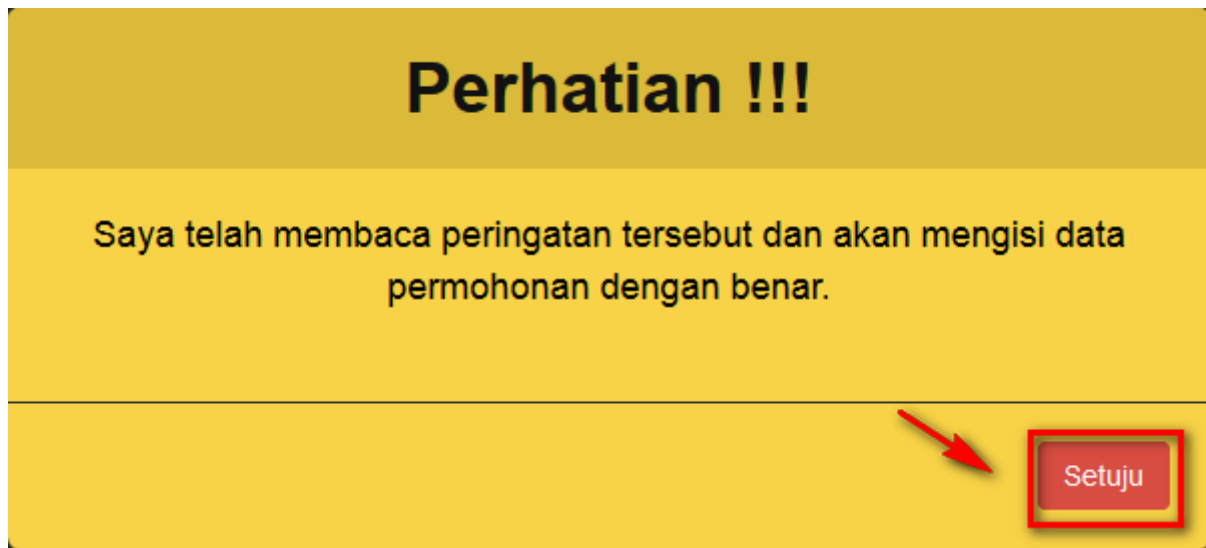
☐ Apabila nama yang saya pesan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang di sebut pada angka 1 sampai 7, maka saya bersedia pengesahan badan hukum yang menggunakan nama yang saya pesan untuk DICABUT oleh Menteri. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

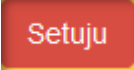
KEMBALI

http://panduan.ahu.go.id/

Printed on 2024/05/01 19:44

- Ceklis domain website perseroan yang tersedia untuk menggunakan domain tersebut sebagai website perseroan.
- Ceklis semua pernyataan syarat dan ketentuan. Kemudian muncul popup allert Perhatian!!!



- Klik tombol . Kemudian akan tampil form Pengisian Data Pemohon seperti berikut.



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



[Website Ditjen AHU](#) [Beranda](#) [Login](#)

Pesan Nama Perseroan

Pesan Nama Yayasan

Pesan Nama Perkumpulan

Cek nama yang telah dipesan

Pesan Nama Perseroan

Kode pembayaran / Kode Voucher *

ⓘ Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, klik [disini](#)

Nama Perseroan yang diinginkan *

Singkatan Perseroan yang diinginkan

Jenis Perseroan *

PMA

Nama Domain Perseroan

Cari

Proses Pesanan Nama Domain Website Perseroan

*Nama Domain Perseroan yang kita pesan

*Harap anda periksa kembali penulisan sebelum melanjutkan

*Dibawah ini adalah tabel domain Perseroan yang tersedia, pemohon dapat memilih lebih dari satu dengan check pada domain yang diinginkan

Tarif Pesan nama Domain Website

100000

	Nama Domain	Status	Harga
☐	.id	AVAILABLE	2000000
☒	.co.id	AVAILABLE	100000
☐	.my.id	AVAILABLE	50000
☐	.web.id	AVAILABLE	50000
☐	.or.id	AVAILABLE	50000
☐	.biz.id	AVAILABLE	50000

Proses Pesan Nama Perseroan

*Nama Perseroan yang Anda pesan adalah " " disingkat " "

*Harap Anda periksa kembali penulisan sebelum melanjutkan.

Untuk diperhatikan!

Terdapat kemiripan nama " " dan kemiripan singkatan " " yang ada pada database AHU (lihat pada tabel dibawah)

No.	Nama Perseroan Terbatas yang telah terdaftar	Nama Singkatan yang telah terdaftar	Status
1	SRI JAYA BARU		terdaftar
2	TRI KUSUMA BARU		antrian
3	SAN PRIMA BARU		terdaftar
4	ERA CAHAYA BARU		terdaftar
5	GEN CAHAYA BARU		terdaftar
6	SRI JOHOR BARU		terdaftar
7	TRI USAHA BARU		terdaftar
8	AAN JAYA BARU		terdaftar
9	TRI EKA BARU		terdaftar
10	TRI KUSUMA BARU		terdaftar

PERINGATAN

1. Nama yang bertentangan dengan PP NOMOR 43 TAHUN 2011 mengenai pesan nama merupakan tanggung jawab pemohon.

2. Pemohon diwajibkan membaca PP terkait ketentuan Pasal 5, Pasal 11 (Lihat syarat pesan nama Pasal 5 dan Pasal 11). Peraturan Pemerintah mengenai pesan nama Perseroan (Lihat PP NOMOR 43 Tahun 2011)

3. Jika nama yang Anda pilih memiliki **persamaan pada pokoknya** dengan nama Perseroan Terbatas yang sudah terdaftar, maka disarankan memilih nama lain untuk menghindari gugatan pihak ke 3.

4. Segala bentuk gugatan pihak ke 3 terkait pesan nama ini menjadi tanggung jawab pemohon.

5. Kementerian Hukum dan HAM RI berhak untuk membatalkan pemesanan nama yang tidak sesuai dengan PP NOMOR 43 TAHUN 2011.

6. Biaya PNPB pesan nama yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.

7. Pembatalan pesan nama karena melanggar ketentuan PP NOMOR 43 TAHUN 2011, maka biaya PNPB pesan nama yang sudah dibayar tidak dapat diminta kembali.

☒ Saya mengerti dan telah membaca peringatan tersebut diatas

☒ Apabila nama tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, siap menerima segala bentuk sanksi termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

☒ Apabila nama yang saya pesan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang di sebut pada angka 1 sampai 7, maka saya bersedia pengesahan badan hukum yang menggunakan nama yang saya pesan untuk DICABUT oleh Menteri. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama Pemohon

Masukkan nama pemohon

1

Telepon Pemohon

Masukkan nomor telepon pemohon

2

Email Pemohon

Masukkan email Pemohon

3

4

PESAN SEKARANG

KEMBALI

5

AHU ONLINE - <http://panduan.ahu.go.id/>

- 1. Isikan **Nama Pemohon**.
- 2. Isikan **Telepon Pemohon**.
- 3. Isikan **Email Pemohon**.
- 4. Klik Tombol **KEMBALI** jika nama PT yang dipesan tidak sesuai.
- 5. Klik tombol **PESAN SEKARANG** maka akan keluar allert Pratinjau Pesan Nama yang meyakinkan bahwa nama yang dipesan sudah sesuai.



Pra Tinjau

Nama PT yang Anda pesan adalah

"-----"

disingkat

"-----"

Kembali Lanjut

- Klik tombol **KEMBALI** akan tampil ke halaman awal pesan nama.
- Klik tombol **Lanjut** akan tampil halaman persetujuan menteri seperti berikut.

**DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Website Ditjen AHU Beranda Login

Pesan Nama Perseroan

Pesan Nama Yayasan

Pesan Nama Perkumpulan

Cek nama yang telah dipesan

Pesan Nama Perseroan

"Nama Perseroan - **PT LUPATRA BAKU CENDAKAT TUBAN** - telah memperoleh persetujuan Menteri."

Nomor pemesanan nama	:	XXXXXXXXXX
Nama Perseroan	:	LUPATRA BAKU
Nama Singkatan	:	LUPATRA
Jenis Perseroan	:	PMA
Tanggal pemesanan	:	14 Mei 2024
Tanggal kadaluarsa	:	14 Mei 2025
Kode pembayaran	:	XXXXXXXXXX
Nama pemesan	:	...
Nomor telepon pemesan	:	XXXXXX
Email pemesan	:	XXXXXXXXXX@...
Domain yang dipesan	:	...co.id

Klik download bukti pesan untuk mendownload bukti pesan nama

Anda dapat menggunakan kode pembayaran dan alamat email untuk mencetak kembali bukti pemesanan nama

Download bukti pesan

Lihat daftar nama yang telah dipesan

- Klik tombol **Download bukti pesan**. Lampiran Bukti pesan nama diberikan kepada notaris untuk melanjutkan pada saat proses pendirian.


DITJEN AHU
BUKTI PESAN NAMA PERSEROAN
TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN MENTERI

Nomor Pemesanan Nama	: 2019
	<i>nomor ini untuk pengisian data pendirian</i>
Nama Perseroan	:
Nama Singkatan	:
Jenis Perseroan	:
Tanggal Pemesanan	:
Tanggal Kadaluarsa	:
Nomor Kode Pembayaran	: 820
Nama Pemesan	:
Nomor Telepon Pemesan	:
Email Pemesan	:
Domain yang Dipesan	:

- Klik tombol **Lihat daftar nama yang telah dipesan**. Masukkan Kode Voucher pesan nama, lalu klik tombol **Cari**.

**DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Website Ditjen AHU Beranda Login

Pesan Nama **Cek nama yang telah dipesan**

CEK NAMA PERSEROAN YANG TELAH ANDA PESAN

Kode pembayaran / Kode Voucher **Cari**

- Kemudian akan tampil data Perseroan yang dicari, lalu klik [Lanjutkan Transaksi](#)


DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 

[Website Ditjen AHU](#)
[Beranda](#)
[Login](#)

Pesan Nama

Cek nama yang telah dipesan

TABEL DAFTAR PESAN NAMA PERSEROAN

No.	No Pesan Nama	Kode Pembayaran	Nama PERSEROAN	Nama Pemohon	Tanggal Pesan	Tanggal Kadaluarsa	Perpanjang Masa Kadaluarsa	Aksi
1	2019	820					60 hari lagi	Lanjutkan Transaksi Download Bukti Pesan

- Maka akan muncul halaman Login untuk masuk sebagai Notaris. Kemudian masukkan User ID dan Password, lalu Klik tombol **MASUK**.

LOGIN

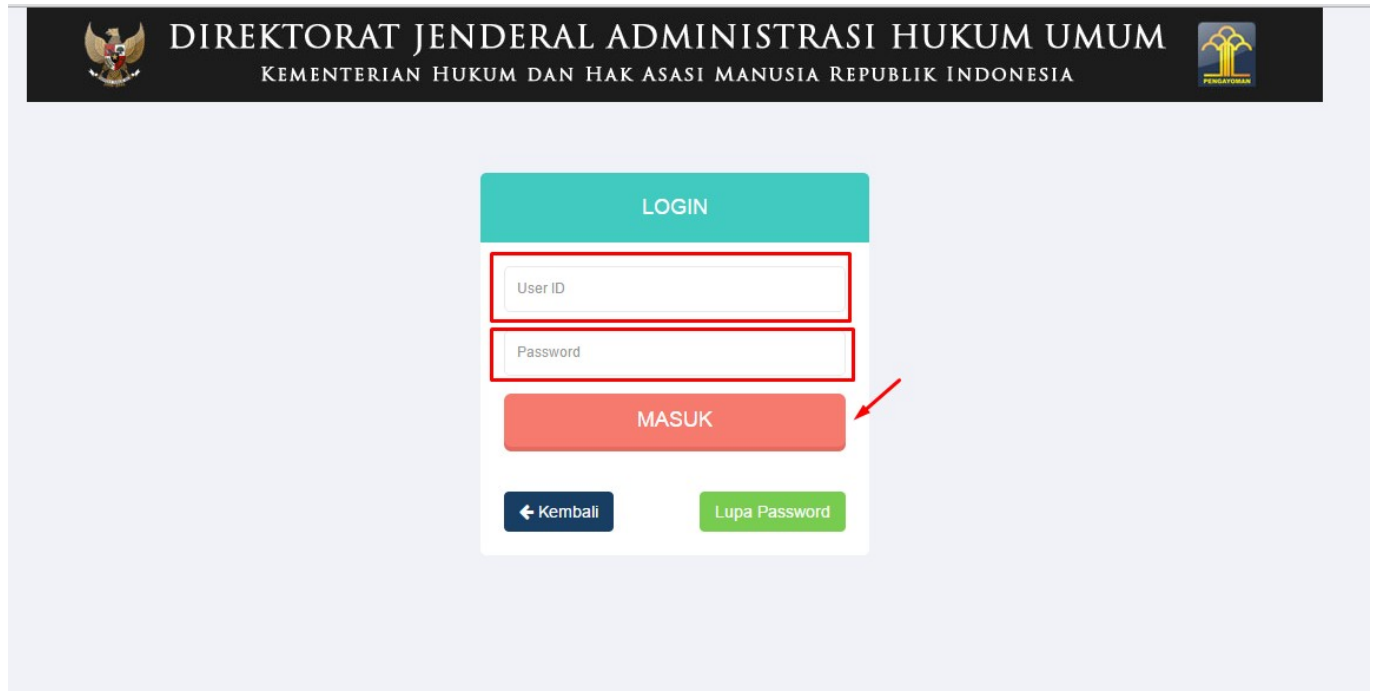
MASUK

[← Kembali](#)

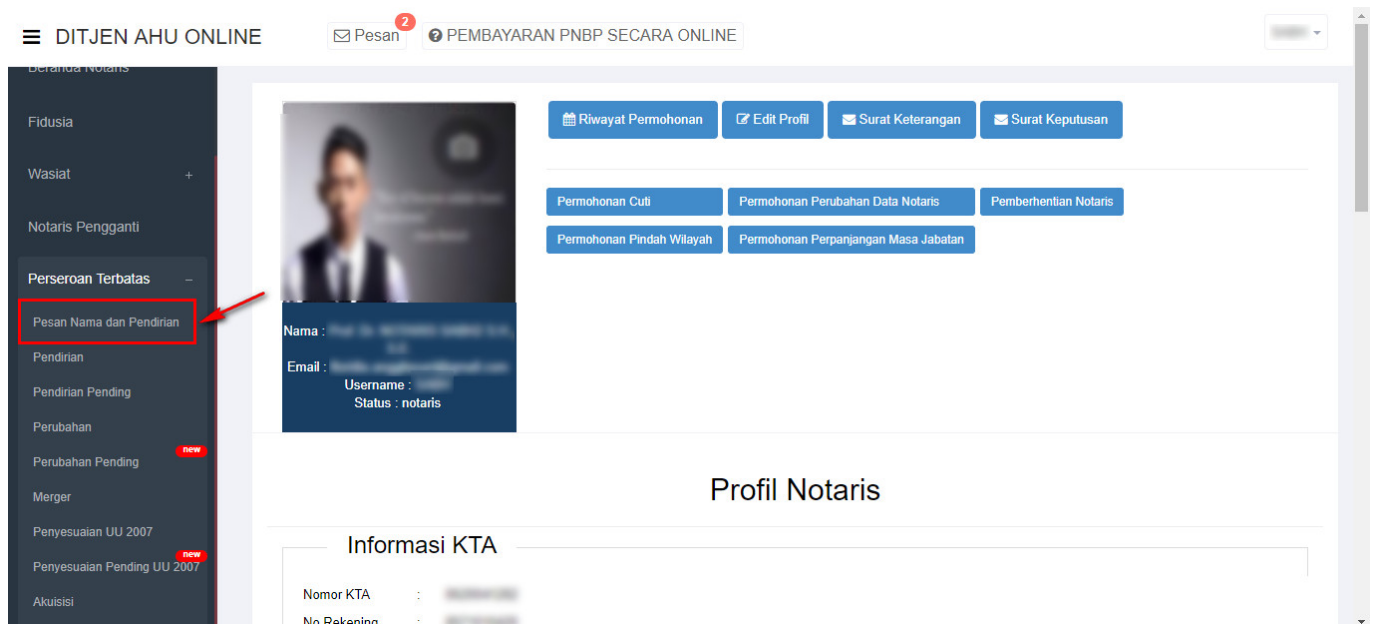
[Lupa Password](#)

2. Pesan Nama dan Pendirian Secara Langsung

- Login sebagai notaris



- Klik Menu **Perseroan Terbatas** → **Pesan Nama dan Pendirian**



- Kemudian tampil halaman **Pemesanan Nomor Voucher**

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas

TOTAL MODAL DASAR *

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

- Isikan Total Modal Dasar, lalu muncul kolom keterangan dan pesan disclaimer seperti berikut

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas

TOTAL MODAL DASAR *

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

Keterangan :
Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan : Rp. 100.000
Pengesahan Badan Hukum Perseroan : Rp. 200.000

Pembelian voucher sebesar **Rp 300.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.
Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNBPN yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

☒ Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

- Ceklis disclaimer dan klik tombol . Kemudian tampil bukti Pemesanan Nomor Voucher seperti gambar dibawah ini

[Cek Pemesanan Voucher](#)[List Voucher](#)

DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
**Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan
Badan Hukum Perseroan Terbatas**
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua
Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	:	
BILL ID ⁽¹⁾	:	
NAMA PEMOHON	:	
NOMOR REKENING	:	
EMAIL PEMOHON	:	
NOMOR HP	:	
TANGGAL TRANSAKSI	:	
TANGGAL EXPIRED	:	
(PEMBAYARAN TERAKHIR)		
TAGIHAN	:	Rp 300.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :

1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

[Kirim Ulang](#)[Download](#)

- Setelah itu lakukan Pembayaran Tagihan Pemesanan Nomor Voucher pada aplikasi YAP! seperti yang sudah dijelaskan pada point Pembayaran Nomor Voucher diatas.
- Setelah melakukan pembayaran nomor voucher, lakukan pengisian pada form Pesan Nama Perseroan.

Pesan Nama Perseroan

Pesan Nama Yayasan

Pesan Nama Perkumpulan

Cek nama yang telah dipesan

Pesan Nama Perseroan

Kode pembayaran / Kode Voucher *

1

Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, klik [disini](#)

Nama Perseroan yang diinginkan *

2

Singkatan Perseroan yang diinginkan

3

Jenis Perseroan *

4

PMA

Nama Domain Perseroan

5

6

Cari

- Pada form tersebut terdapat beberapa field yang harus diisi, diantaranya ialah :

- 1. Isikan **Kode Pembayaran/Kode Voucher**
- 2. Isikan **Nama Perseroan** yang diinginkan
- 3. Isikan **Singkatan Perseroan** yang diinginkan
- 4. Pilih **Jenis Perseroan**

--PILIH--

--PILIH--

SWASTA NASIONAL

PMDN FASILITAS

BUMN

BUMD

PMA

- Jika memilih Jenis Perseroan “PMDN FASILITAS”, akan muncul keterangan seperti dibawah ini

Jenis Perseroan *

PMDN FASILITAS

☒ Untuk PMDN wajib menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 mengenai pesan nama perseroan

- 5. Isikan **Nama Domain Perseroan**
- 6. Klik tombol **Cari**
- Kemudian masuk ke proses nama, muncul beberapa pilihan domain Website Perseroan dan daftar kemiripan nama yang telah didaftarkan seperti tampilan berikut.

Pesan Nama Perseroan

Pesan Nama Yayasan

Pesan Nama Perkumpulan

Cek nama yang telah dipesan

Pesan Nama Perseroan

Kode pembayaran / Kode Voucher *

Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, klik [disini](#)

Nama Perseroan yang diinginkan *

Singkatan Perseroan yang diinginkan

Jenis Perseroan *

PMA

Nama Domain Perseroan

Cari

Proses Pesanan Nama Domain Website Perseroan

*Nama Domain Perseroan yang kita pesan

*Harap anda periksa kembali penulisan sebelum melanjutkan

*Dibawah ini adalah tabel domain Perseroan yang tersedia, pemohon dapat memilih lebih dari satu dengan check pada domain yang diinginkan

Tarif Pesan nama Domain Website

100000

	Nama Domain	Status	Harga
☐	.id	AVAILABLE	2000000
☒	.co.id	AVAILABLE	100000
☐	.my.id	AVAILABLE	50000
☐	.web.id	AVAILABLE	50000
☐	.or.id	AVAILABLE	50000
☐	.biz.id	AVAILABLE	50000

Proses Pesan Nama Perseroan

*Nama Perseroan yang Anda pesan adalah "PT. SRI JAYA BARU" disingkat "SJB"

*Harap Anda periksa kembali penulisan sebelum melanjutkan.

Untuk diperhatikan!

Terdapat kemiripan nama "PT. SRI JAYA BARU" dan kemiripan singkatan "SJB" yang ada pada database AHU (lihat pada tabel dibawah)

No.	Nama Perseroan Terbatas yang telah terdaftar	Nama Singkatan yang telah terdaftar	Status
1	SRI JAYA BARU		terdaftar
2	TRI KUSUMA BARU		antrian
3	SAN PRIMA BARU		terdaftar
4	ERA CAHAYA BARU		terdaftar
5	GEN CAHAYA BARU		terdaftar
6	SRI JOHOR BARU		terdaftar
7	TRI USAHA BARU		terdaftar
8	AAN JAYA BARU		terdaftar
9	TRI EKA BARU		terdaftar
10	TRI KUSUMA BARU		terdaftar

PERINGATAN

1. Nama yang bertentangan dengan PP NOMOR 43 TAHUN 2011 mengenai pesan nama merupakan tanggung jawab pemohon.

2. Pemohon diwajibkan membaca PP terkait ketentuan Pasal 5, Pasal 11 (Lihat syarat pesan nama **Pasal 5** dan **Pasal 11**). Peraturan Pemerintah mengenai pesan nama Perseroan (Lihat **PP NOMOR 43 Tahun 2011**)

3. Jika nama yang Anda pilih memiliki **persamaan pada pokoknya** dengan nama Perseroan Terbatas yang sudah terdaftar, maka disarankan memilih nama lain untuk menghindari gugatan pihak ke 3.

4. Segala bentuk gugatan pihak ke 3 terkait pesan nama ini menjadi tanggung jawab pemohon.

5. Kementerian Hukum dan HAM RI berhak untuk membatalkan pemesanan nama yang tidak sesuai dengan **PP NOMOR 43 TAHUN 2011**.

6. Biaya PNPB pesan nama yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.

7. Pembatalan pesan nama karena melanggar ketentuan **PP NOMOR 43 TAHUN 2011**, maka biaya PNPB pesan nama yang sudah dibayar tidak dapat diminta kembali.

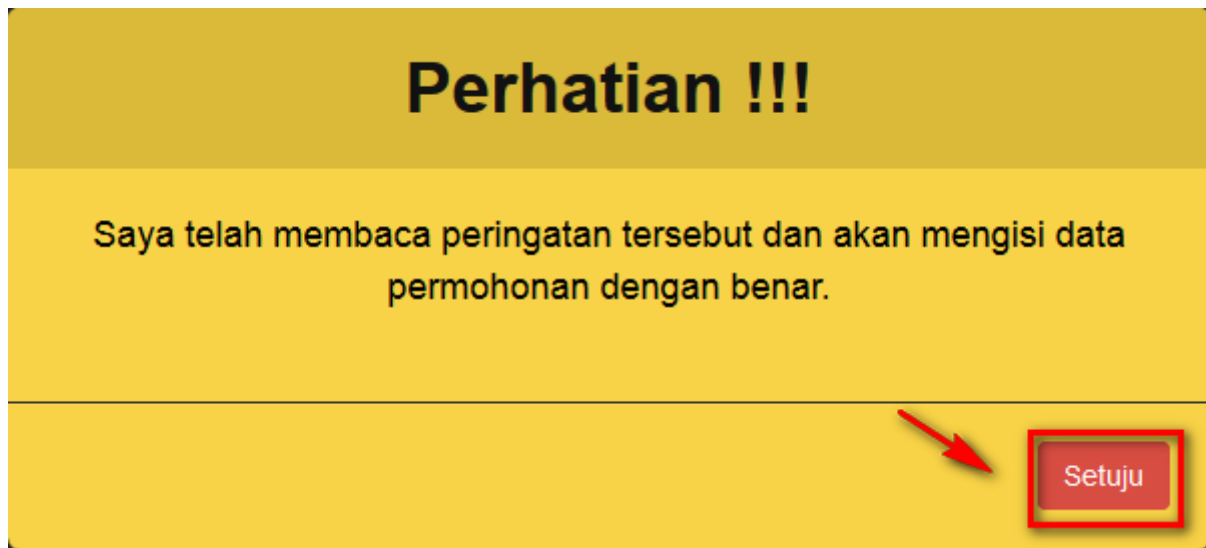
☒ Saya mengerti dan telah membaca peringatan tersebut diatas

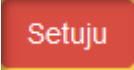
☒ Apabila nama tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, siap menerima segala bentuk sanksi termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

☐ Apabila nama yang saya pesan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang di sebut pada angka 1 sampai 7, maka saya bersedia pengesahan badan hukum yang menggunakan nama yang saya pesan untuk DICABUT oleh Menteri. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEMBALI

- Ceklis domain website perseroan yang tersedia untuk menggunakan domain tersebut sebagai website perseroan.
- Ceklis semua pernyataan syarat dan ketentuan. Kemudian muncul popup allert Perhatian!!!



- Klik tombol . Kemudian akan tampil form Pengisian Data Pemohon seperti berikut.

Pesan Nama Perseroan

Pesan Nama Yayasan

Pesan Nama Perkumpulan

Cek nama yang telah dipesan

Pesan Nama Perseroan

Kode pembayaran / Kode Voucher *

Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, klik [disini](#)

Nama Perseroan yang diinginkan *

Singkatan Perseroan yang diinginkan

Jenis Perseroan *

PMA

Nama Domain Perseroan

Car

Proses Pesanan Nama Domain Website Perseroan

*Nama Domain Perseroan yang kita pesan

*Harap anda periksa kembali penulisan sebelum melanjutkan

*Dibawah ini adalah tabel domain Perseroan yang tersedia, pemohon dapat memilih lebih dari satu dengan check pada domain yang diinginkan

Tarif Pesan nama Domain Website

100000

	Nama Domain	Status	Harga
☐	.id	AVAILABLE	2000000
☒	.co.id	AVAILABLE	100000
☐	.my.id	AVAILABLE	50000
☐	.web.id	AVAILABLE	50000
☐	.or.id	AVAILABLE	50000
☐	.biz.id	AVAILABLE	50000

Proses Pesan Nama Perseroan

*Nama Perseroan yang Anda pesan adalah " " disingkat " ".

*Harap Anda periksa kembali penulisannya sebelum melanjutkan.

Untuk diperhatikan

Terdapat kemiripan nama " " dan kemiripan singkatan " " yang ada pada database AHU (lihat pada tabel dibawah)

No.	Nama Perseroan Terbatas yang telah terdaftar	Nama Singkatan yang telah terdaftar	Status
1	SRI JAYA BARU		terdaftar
2	TRI KUSUMA BARU		antrian
3	SAN PRIMA BARU		terdaftar
4	ERA CAHAYA BARU		terdaftar
5	GEN CAHAYA BARU		terdaftar
6	SRI JOHOR BARU		terdaftar
7	TRI USAHA BARU		terdaftar
8	AAN JAYA BARU		terdaftar
9	TRI EKA BARU		terdaftar
10	TRI KUSUMA BARU		terdaftar

PERINGATAN

1. Nama yang bertentangan dengan PP NOMOR 43 TAHUN 2011 mengenai pesan nama merupakan tanggung jawab pemohon.

2. Pemohon diwajibkan membaca PP terkait ketentuan Pasal 5, Pasal 11 (Lihat syarat pesan nama Pasal 5 dan Pasal 11). Peraturan Pemerintah mengenai pesan nama Perseroan (Lihat PP NOMOR 43 Tahun 2011)

3. Jika nama yang Anda pilih memiliki **persamaan pada pokoknya** dengan nama Perseroan Terbatas yang sudah terdaftar, maka disarankan memilih nama lain untuk menghindari gugatan pihak ke 3.

4. Segala bentuk gugatan pihak ke 3 terkait pesan nama ini menjadi tanggung jawab pemohon.

5. Kementerian Hukum dan HAM RI berhak untuk membatalkan pemesanan nama yang tidak sesuai dengan PP NOMOR 43 TAHUN 2011.

6. Biaya PNPB pesan nama yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.

7. Pembatalan pesan nama karena melanggar ketentuan PP NOMOR 43 TAHUN 2011, maka biaya PNPB pesan nama yang sudah dibayar tidak dapat diminta kembali.

☒ Saya mengerti dan telah membaca peringatan tersebut diatas

☒ Apabila nama tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, siap menerima segala bentuk sanksi termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

☒ Apabila nama yang saya pesan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang di sebut pada angka 1 sampai 7, maka saya bersedia pengesahan badan hukum yang menggunakan nama yang saya pesan untuk DICABUT oleh Menteri. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama Pemohon

XXXXXXXXXX

Telepon Pemohon

XXXXXXXXXX

Email Pemohon

XXXXXXXXXX

PESAN SEKARANG

KEMBALI

- 1. Isikan **Nama Pemohon**.
- 2. Isikan **Telepon Pemohon**.
- 3. Isikan **Email Pemohon**.
- 4. Klik Tombol **KEMBALI** jika nama PT yang dipesan tidak sesuai.
- 5. Klik tombol **PESAN SEKARANG** maka akan keluar allert Pratinjau Pesan Nama yang meyakinkan bahwa nama yang dipesan sudah sesuai.



Pra Tinjau

Nama PT yang Anda pesan adalah

"-----"

disingkat

"-----"

Kembali Lanjut

- Klik tombol **KEMBALI** akan tampil ke halaman awal pesan nama.
- Klik tombol **Lanjut** akan tampil popup disclaimer seperti dibawah ini

Perhatian!!!

Saya, Notaris telah mengingatkan kepada pemesan nama/pendiri PT bahwa nama yang dipesan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka pemesan nama/pendiri PT wajib mengganti nama tersebut atau Menteri Hukum dan HAM dapat membatalkan karena hukum

☒ anda harus mencentang untuk melanjutkan

Kembali Lanjutkan

Pratinjau Pesan Nama

Nama Pemesan: [redacted]

Nomor pemesanan: [redacted]

Nama Pendiri: [redacted]

Tanggal pemesanan: [redacted]

Tanggal kadaluarsa: 29 Juli 2019

Kode pembayaran: 820190521569387

Nama pemesan: NOTARIS SABH2 S.H., S.E. S.H., S.E.

Nomor telepon pemesan: 99999999

Email pemesan: ferdinan@yopmail.com

Klik download bukti pesan untuk mengunduh bukti pesan nama

- Ceklis disclaimer dan klik tombol **Lanjut** maka akan tampil halaman Pratinjau Pesan Nama dan form Pendirian Perseroan seperti dibawah ini.

Pratinjau Pesan Nama

Nama Perseroan **PT ABCD** disingkat **PT** telah memperoleh persetujuan Menteri

Nomor pemesanan nama

XXXXXXXXXXXX

Nama Perseroan

PT ABCD

Nama Singkatan

PT

Tanggal pemesanan

21 Mei 2024

Tanggal kadaluarsa

21 Mei 2025

Kode pembayaran

XXXXXXXXXXXX

Nama pemesan

XXXXXXXXXXXX

Nomor telepon pemesan

XXXXXXXX

Email pemesan

XXXXXXXXXXXX@XXXXXX

Klik download bukti pesan untuk mengunduh bukti pesan nama

Anda dapat menggunakan kode pembayaran dan alamat email untuk mencetak kembali bukti pemesanan nama

Download Bukti Pesan

Link daftar nama yang telah opsi

Ketikkan atau yang berbeda * wajib diisi

Data Perseroan

Nama Perseroan *

PT ABCD

Nama Singkatan

PT

Jenis Perseroan *

-- PILIH --

NPWP

Jangka Waktu *

-- PILIH --

Domisili Perseroan

Alamat *

RT *

RW *

Provinsi *

-- PILIH PROVINSI --

Kabupaten/Kota *

-- PILIH KABUPATEN --

Kecamatan *

-- PILIH --

Kelurahan/Desa *

-- PILIH --

Kode Pos

Nomor Telepon *

Email *

Tahun Buka *

*Masa berlaku sampai dengan 12 bulan ke depan

Maksud dan Tujuan

MAKSUD

-- PILIH --

TUJUAN

Tampilkan Data

Akta Notaris

Notaris

XXXXXXXXXXXX

No Akta *

Tanggal Akta *

☐ Jika Akta Saudara Dibawah 16 Agustus 2007

Tampilkan Data

Modal Dasar *

Tampilkan Data

Klasifikasi Saham	Nilai Nominal Saham Perlembar	Jumlah Lembar Saham	Total Modal	Aksi
-------------------	-------------------------------	---------------------	-------------	------

Modal Ditempatkan *

Tampilkan Data

Klasifikasi Saham	Nilai Nominal Saham Perlembar	Jumlah Lembar Saham	Total Modal	Aksi
-------------------	-------------------------------	---------------------	-------------	------

Modal disetor *

☐ Dalam bentuk uang.

☐ Dalam bentuk lainnya.

Pengurus dan Pemegang Saham *

Tampilkan Data

Pesangggang Jeneb	Name	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Jabatan/Pemegang Saham	Total Modal	Aksi
-------------------	------	-------------------	---------------------	------------------------	-------------	------

Selain Perseroan BUNN dan BUND pemegang saham wajib lebih dari satu.

Pemilik Manfaat

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perseroan menerapkan sistem mengenal pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikatkan diri sebagai berikut: Pemilik Manfaat adalah orang perorangan yang dapat mengikatkan atau memberikan diikatkan, dengan berkecuali, pengurus, pemilik, atau pemegang saham Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berkah atau diikatkan menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari data atau saham Korporasi dan/atau memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2016.

☐ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.

Notaris Pengganti

☐ Apakah Anda Notaris Pengganti?

Surat Keterangan/Pernyataan Dokumen yang harus dimiliki

☐ Akta pendirian Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.

☐ Asli setor modal atau bukti lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

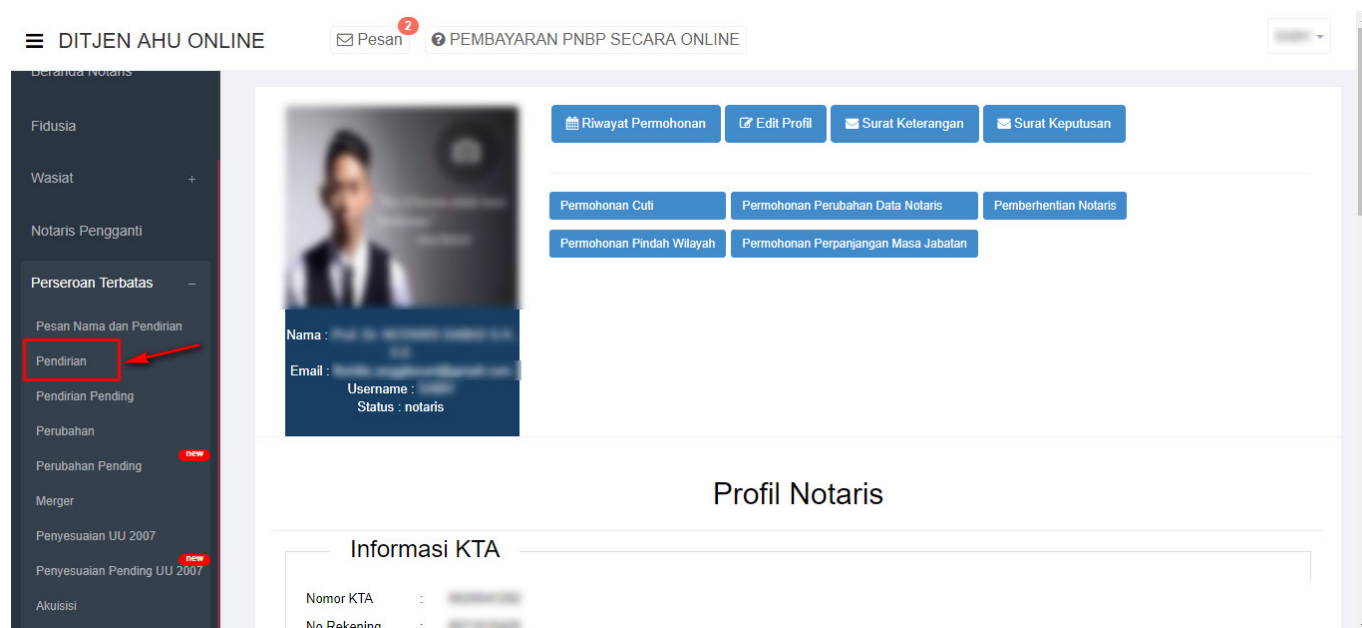
Kembali

LAKUKAN

- Kemudian lakukan pengisian data pada form Pendirian Perseroan seperti langkah yang sudah dijelaskan pada tautan link dibawah ini dari **Pengisian Data Perseroan hingga tahap Download Bukti Setor**
- http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas&#a_data_perseroan

3. Pendirian

- Menu pendirian digunakan oleh Notaris untuk melakukan input data pendirian suatu PT (Perseroan Terbatas). Untuk mengakses Menu Pendirian, Klik Menu **Perseroan Terbatas** → **Pendirian** seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.



- Kemudian akan muncul halaman Pemesanan Nomor Voucher Pendirian dibawah ini untuk mengesahkan Badan Hukum Perseroan yang akan didirikan.

Cek Nomor Voucher

Daftar Voucher

Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM *

Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas

TOTAL MODAL DASAR *

20.000.000

NAMA PEMOHON *

PT. ABCD KAWASAN BUKIT BARU

EMAIL PEMOHON *

abc@panganbaru.com

NOMOR HP *

081234567890

Pembelian voucher sebesar **Rp 200.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNPB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

☒ Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI

Pada form tersebut terdapat beberapa *field*, diantaranya:

- 1. **Pelayanan Jasa Hukum** Sudah Otomatis Muncul
- 2. Isikan **Total Modal Dasar**. Jumlah pembelian voucher tergantung dari besarnya Modal Dasar. Jika Modal Dasar tidak diisi, maka akan muncul notifikasi seperti berikut.

Modal dasar tidak boleh Rp.0

- 3. **Nama Pemohon** Sudah Otomatis Muncul
- 4. **Email Pemohon** Sudah Otomatis Muncul
- 5. **Nomor Hp** Sudah Otomatis Muncul
- 6. Klik tombol **BELI**. Maka akan muncul Bukti Pemesanan Nomor Voucher Pendirian Perseroan seperti berikut

[Cek Pemesanan Voucher](#) [List Voucher](#)



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	:	-
BILL ID ^[1]	:	99
NAMA PEMOHON	:	PT. ABCD EFGH IJK LMN OPQ
NOMOR REKENING	:	8571010xxx
EMAIL PEMOHON	:	pt.abcde@panduan.ahu.go.id
NOMOR HP	:	08123456789
TANGGAL TRANSAKSI	:	11 Mei 2019 14:35:45
TANGGAL EXPIRED	:	31 Mei 2019 23:59:59
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	
TAGIHAN	:	Rp 200.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

[Download](#) [Kirim Ulang](#)

- Setelah itu lakukan Pembayaran Tagihan Pemesanan Nomor Voucher untuk Pendirian Perseroan pada aplikasi YAP! seperti yang sudah dijelaskan pad link berikut ini
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas#pembayaran_nomor_voucher
- Jika sudah melakukan Pembayaran Tagihan Pemesanan Nomor Voucher untuk Pendirian Perseroan, maka pengguna dapat mengklik tombol [Sudah Punya Voucher](#)

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas

TOTAL MODAL DASAR *

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

[BELI](#)

- Maka sistem akan menampilkan halaman Pengisian Data Perseroan seperti berikut. kemudian

masukkan **Nomer Voucher Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Nomor Pemesanan Nama dan Nomor Kode Pembayaran**. Lalu klik tombol **Lanjut**

PENGISIAN DATA PERSEROAN

Nomor Voucher Pengesahan Badan Hukum Perseroan * 8201810249
Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pengesahan Badan Hukum Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

Nomor Pemesanan Nama * 2018102216
klik **disini** untuk informasi Nomor Pemesanan Nama.

Nomor Kode Pembayaran *
klik **disini** untuk informasi Nomor Kode Pembayaran.

Lanjut

- Setelah itu sistem akan memuat halaman Cek Nama Perseroan berisi informasi nama perseroan yang telah dipesan dan daftar nama perseroan yang mirip.
- Checklist pernyataan dibawah halaman dan Klik tombol **KIRIM** untuk melanjutkan Pemesanan Nama Perseroan.

Cek Nama Perseroan

NAMA PERSEROAN YANG TELAH DIPESAN

Nama : PT. BUKU BANGUNAN
Tanggal Pemesanan : 24 Oktober 2018
Tanggal Kadaluarsa : 23 Desember 2018
Nama Pemohon : Notaris Agung S.H., S.E.
Email Pemohon : notaris@notaris.com

No.	Nama Perseroan yang mirip	Nama Singkatan yang mirip	Status
1	PT. BUKU BANGUNAN (nama mirip)		Terdaftar
2	PT. BUKU BANGUNAN (nama mirip)		Terdaftar
3	PT. BUKU BANGUNAN (nama mirip)		Terdaftar
4	PT. BUKU BANGUNAN (nama mirip)		Terdaftar
5	PT. BUKU BANGUNAN (nama mirip)		Terdaftar
6	PT. BUKU BANGUNAN (nama mirip)		Terdaftar
7	PT. BUKU BANGUNAN (nama mirip)		Terdaftar
8	PT. BUKU BANGUNAN (nama mirip)		Terdaftar
9	PT. BUKU BANGUNAN (nama mirip)		Terdaftar



Dengan mengklik ini, maka tanggung jawab pesan nama merupakan tanggung jawab Notaris sepenuhnya.

Anda harus mencentang sebagai bukti bahwa anda sepakat dengan pernyataan tersebut.

KEMBALI

KIRIM



- Maka akan keluar *popup disclaimer* seperti berikut.

Perhatian!!!

Saya, Notaris telah mengingatkan kepada pemesan nama/pendiri PT bahwa nama yang dipesan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka pemesan nama/pendiri PT wajib mengganti nama tersebut atau Menteri Hukum dan HAM dapat membatalkan karena hukum

☒ anda harus mencentang untuk melanjutkan

Kembali Lanjutkan

Data Perseroan

Nama Perseroan *

Nama Singkatan

Jenis Perseroan *

NPWP

Jangka Waktu *

--PILIH--

Domisili Perseroan

Alamat *

- Kemudian ceklis pernyataan pada *popup disclaimer* tersebut dan klik tombol **Lanjutkan** untuk melanjutkan proses Pendirian.

Setelah menyetujui pesan pemberitahuan, sistem akan menampilkan *Form* Pendirian seperti gambar dibawah ini.

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Data Perseroan

Nama Perseroan *

Nama Singkatan

Jenis Perseroan *

NPWP

Jangka Waktu *

Domisili Perseroan

Alamat *

RT * RW *

Provinsi * Kabupaten/Kota *

Kecamatan * Kelurahan/Desa *

Kode Pos Nomor Telepon *

Email * Tahun Buku *

*Masa berlaku sampai dengan 12 bulan ke depan

Maksud dan Tujuan

MAKSUD

TUJUAN

[Tambah Data](#)

Akta Notaris

Notaris

No Akta * Tanggal Akta *

☐ Jika Akta Sautara Dibawah 16 Agustus 2007

[Tambah Data](#)

Modal Dasar *

[Tambah Data](#)

Klasifikasi Saham	Nilai Nominal Saham Perlembar	Jumlah Lembar Saham	Total Modal	Aksi

Modal Ditempatkan *

[Tambah Data](#)

Klasifikasi Saham	Nilai Nominal Saham Perlembar	Jumlah Lembar Saham	Total Modal	Aksi

Modal disetor *

☐ Dalam bentuk uang.

☐ Dalam bentuk lainnya.

Pengurus dan Pemegang Saham *

[Tambah Data](#)

Penanggung Jawab	Nama	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Jabatan/Pemegang Saham	Total Modal	Aksi

Selain Perseroan BUMN dan BUMD pemegang saham wajib lebih dari satu.

Pemilik Manfaat

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenal pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberikan/diwakili, dengan komite/komis, pengurus, pemegang, atau penguasa (atau Korporasi), memiliki kewenangan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☐ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.

Notaris Pengganti

☐ Apakah Anda Notaris Pengganti?

Surat Keterangan/Pernyataan Dokumen yang harus dimiliki

☐ Akta pendirian Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.

☐ Asli setor modal atau bukti lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Kembali](#) [LANJUTKAN](#)

Dalam form pendirian terdapat beberapa fitur diantaranya :

a. Data Perseroan

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Data Perseroan

Nama Perseroan *

Nama Singkatan

Jenis Perseroan *

NPWP

Jangka Waktu *

PMA

pastikan anda sudah memahami perka no 13 th 2017, klik "disini" untuk mendownload/mengunduh file.

TIDAK TERBATAS

Pada Form tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

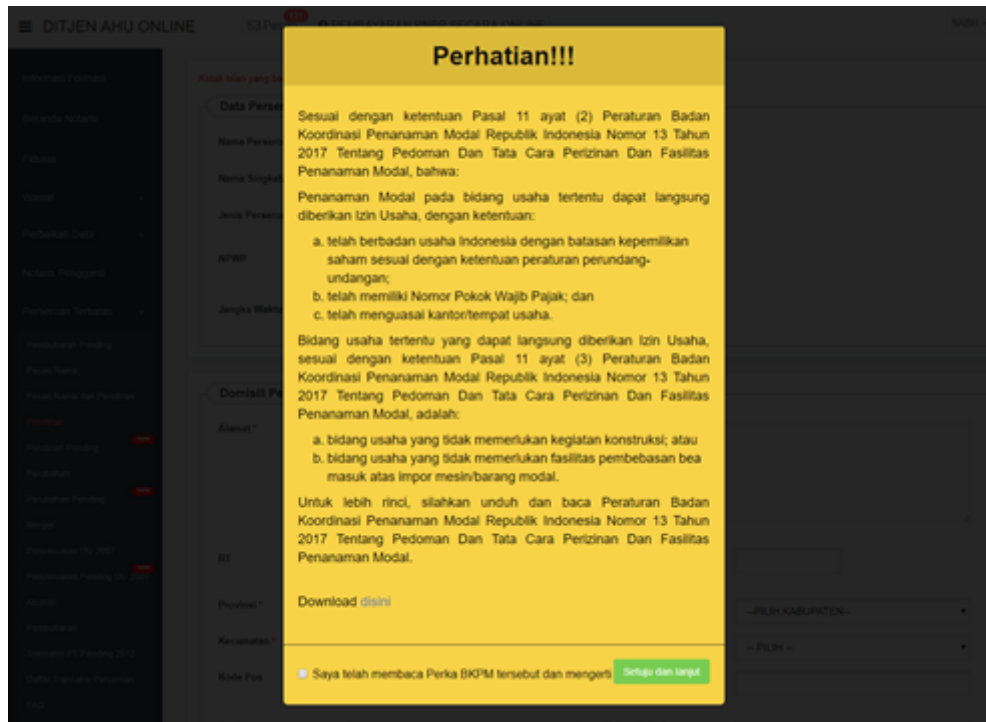
- 1. Nama Perseroan : Tampil secara otomatis nama perseroan yang dipesan
- 2. Nama Singkatan : Tampil secara otomatis nama perseroan yang dipesan
- 3. Jenis Perseroan : Pilih Jenis Perseroan

--PILIH--

--PILIH--
SWASTA NASIONAL
PMDN FASILITAS
BUMN
BUMD
PMA

- Pada saat memilih Jenis Perseroan, akan muncul popup disclaimer seperti berikut mengenai syarat ketentuan sesuai Pasal yang berlaku. Kemudian ceklist pernyataan tersebut dan Klik tombol

Setuju dan lanjut



- 4. NPWP Perseroan : Masukkan nomor NPWP
- 5. Jangka Waktu : Pilih Jangka Waktu

--PILIH--

--PILIH--
 TIDAK TERBATAS
 TERBATAS

- Jika pilih Jangka Waktu "TERBATAS", maka akan muncul *field* tahun seperti berikut

Jangka Waktu *

TERBATAS

Tahun

b. Domisili Perseroan

Domisili Perseroan

Alamat *

RT *

RW *

Provinsi *

BANTEN

Kabupaten/Kota *

KABUPATEN TANGERANG

Kecamatan *

TIGARAKSA

Kelurahan/Desa *

TIGARAKSA

Kode Pos

Nomor Telepon *

Email *

Tahun Buku *

December sampai November

*Masa berlaku sampai dengan 12 bulan ke depan

Pada *Form* tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

1. Masukkan alamat perseroan
2. Masukkan RT
3. Masukkan RW

4.

--PILIH PROVINSI--

--PILIH PROVINSI--

ACEH

BALI

BANTEN

BENGKULU

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DKI JAKARTA

GORONTALO

JAMBI

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

JAWA TIMUR

KALIMANTAN BARAT

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN UTARA

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPULAUAN RIAU

LAMPUNG

Pilih Provinsi :

5.

Pilih Kabupaten/Kota :

--PILIH--

--PILIH--

KEPULAUAN SERIBU

JAKARTA PUSAT

JAKARTA UTARA

JAKARTA BARAT

JAKARTA SELATAN

JAKARTA TIMUR

6.

Pilih Kecamatan :

--PILIH--

--PILIH--

GAMBIR

SAWAH BESAR

KEMAYORAN

SEKEN

CEMPAKA PUTIH

MENTENG

TANAH ABANG

JOHAR BARU

7.

Pilih Kelurahan/desa :

--PILIH--

--PILIH--

KENARI

PASEBAN

KRAMAT

KWITANG

SEKEN

BUNGUR

8. Masukkan Kode Pos

9. Masukkan Nomor Telepon perseroan

10. Masukkan *email*

11. Pilih Tahun Buku

c. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan

MAKSUD

-- PILIH --

TUJUAN

Tambah Data

Pada *Form* tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

1.

-- PILIH --

-- PILIH --

PERTANIAN, KEMUKATAN DAN PERIKANAN

PERTAMBANGAN DAN PENGALIAN

INDUSTRI PENGOLAHAN

PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/UR PANAS DAN UDARA DINGIN

PENGLOLOAN AIR, PENGLOLOAN AIR LIMBAH, PENGLOLOAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI KONSTRUKSI

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN

PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI

REAL ESTATE

AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIK

AKTIVITAS PENYERAHAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB

PENDIDIKAN

AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL

KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI

AKTIVITAS JASA LAINNYA

Pilih Maksud
2. Pilih Tujuan

-- PILIH --

-- PILIH --

AKTIVITAS PENERBITAN

AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK

AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN

TELEKOMUNIKASI

AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

AKTIVITAS JASA INFORMASI

Kategori I

-- PILIH --

-- PILIH --

AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

Kategori II

-- PILIH --

-- PILIH --

AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER

AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA

Kategori III

-- PILIH --

-- PILIH --

AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA

Kategori IV

Maksud dan Tujuan dapat dipilih lebih dari satu, Pengguna bisa menambahkan Maksud dan Tujuan dengan cara Klik Tombol

Tambah Data

Maksud dan Tujuan

MAKSUD

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

TUJUAN

AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA

Tambah Data

Maka akan muncul *field* maksud dan tujuan baru seperti berikut

Maksud dan Tujuan

MAKSUD

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

TUJUAN

AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAIINYA

MAKSUD

-- PILIH --

Hapus

TUJUAN

Tambah Data

- Klik tombol **Hapus** untuk membatalkan penambahan maksud dan tujuan baru.

d. Akta Notaris

Akta Notaris

Notaris

NOTARIS SUDARMA S.H., S.E.

No Akta *

Tanggal Akta *

☐ Jika Akta Saudara Dibawah 16

Agustus 2007

Tambah Data

Pada *Form* tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

- No Akta
- Tanggal Akta (Tanggal akta akan tampil 60 hari sebelum hari penginputan)

Penginputan Akta Notaris dapat dipilih lebih dari satu, Pengguna bisa menambahkan Akta Notaris

dengan cara Klik tombol **Tambah Data**

- Maka akan muncul *field* Akta Notaris baru seperti berikut

Akta Notaris

Notaris

No Akta *

Tanggal Akta *

☐ Jika Akta Saudara Dibawah 16

Agustus 2007

Notaris

No Akta

Tanggal Akta

☐ Jika Akta Saudara Dibawah 16

Agustus 2007

Hapus

- Klik tombol

Hapus

 untuk membatalkan penambahan Akta Notaris baru.

e. Modal Dasar

Modal Dasar *

Tambah Data

Klasifikasi Saham	Nilai Nominal Saham Perlembar	Jumlah Lembar Saham	Total Modal	Aksi
-------------------	-------------------------------	---------------------	-------------	------

Untuk menginput Modal Dasar, pengguna dapat Klik tombol

Tambah Data

. Maka akan muncul Form Tambah Modal Dasar seperti berikut.

TAMBAH MODAL DASAR

Total Modal Dasar Rp. 4.000.000

Klasifikasi Saham

Tanpa Klasifikasi ▼

Total Modal *

4000000

4.000.000

Lembar Saham *
4000

Modal Dasar Currency

Rupiah ▼

Harga Perlembar

1000

1,000

SIMPAN

Pada *Form* tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

1. Klasifikasi Saham terdiri dari :

- Jika memilih Klasifikasi Saham “Tanpa Klasifikasi”, maka *field* Total Modal akan menampilkan nilai *default* sesuai dengan Total Modal Dasar yang dimiliki.

2. Total Modal

- *Field* Total Modal diisi jika memilih Klasifikasi Saham “Seri-N”.

3. Modal Dasar *Currency*

- *Field* Modal Dasar *Currency* otomatis tampil rupiah
4. Harga Perlembar
- *Field* harga perlembar diisikan berapa harga saham per lembarnya.
5. Setelah semua *field* terisi, klik tombol  untuk menyimpan modal dasar.

f. Modal Ditempatkan

Modal Ditempatkan *

Tambah Data

Klasifikasi Saham	Nilai Nominal Saham Perlembar	Jumlah Lembar Saham	Total Modal	Aksi
-------------------	-------------------------------	---------------------	-------------	------

Untuk menginput Modal Ditempatkan, pengguna dapat Klik tombol . Maka akan muncul *Form* Tambah Modal Ditempatkan seperti berikut.

TAMBAH MODAL DITEMPATKAN

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi ▼

Harga Perlembar *

Rp 1.000

Jumlah Lembar Saham
Keseluruhan*

4.000

Lembar Saham *

4000

4.000

SIMPAN

Pada *Form* tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

1. Klasifikasi Saham

- *Field* Klasifikasi Saham sudah ditampilkan secara default dari pemilihan Klasifikasi Saham di Form Modal Dasar sebelumnya.

2. Harga Perlembar

- *Field* Harga Perlembar sudah ditampilkan secara default dari pengisian Harga Perlembar di Form Modal Dasar sebelumnya.

3. Jumlah Lembar Saham Keseluruhan

- *Field* Jumlah Lembar Saham Keseluruhan sudah ditampilkan secara default dari pembagian antara Total Modal dengan Harga Perlembar di Form Modal Dasar sebelumnya.

4. Lembar Saham

- *Field* Lembar Saham diisi berdasarkan jumlah modal yang ditempatkan. Jika modal yang ditempatkan kurang 25% dari modal dasar, maka akan tampil notifikasi seperti berikut.

Modal ditempatkan tidak boleh kurang
25% dari modal dasar

5. Setelah semua *field* terisi, klik tombol **SIMPAN** untuk menyimpan modal ditempatkan.

g. Modal Disetor

Pada *Form* tersebut terdapat cara penyetoran modal :

1. Modal disetor dalam bentuk uang akan otomatis tercekli.
2. Ceklis Dalam bentuk Lainnya, jika ada modal yang disetorkan dalam bentuk lainnya.

h. Pengurus dan Pemegang Saham

- Pengurus dan Pemegang Saham bisa merupakan Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

- Untuk menginput Pengurus dan Pemegang Saham, pengguna dapat klik tombol **Tambah Data**. Maka akan muncul *form* seperti dibawah ini :

1). Warga Negara Indonesia

- Jika Pemegang Saham merupakan Warga Negara Indonesia, maka isikan form dibawah ini.

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

☐ Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham
PERORANGAN

Nama *

☐ Di bawah umur

NIK*

NPWP*

Sebagai *

☒ Pemegang Saham

☒ Direksi/Komisaris

Penanggung Jawab Pajak

☐ Ya

☐ Tidak

Klasifikasi Saham *

Lembar Saham *

Jabatan Pengurus *

--PILIH--

Tempat Lahir*

Tanggal Lahir*

Alamat *

Rt

Rw

Provinsi*

--PILIH PROVINSI--

Kabupaten*

--PILIH KABUPATEN--

Kecamatan*

--PILIH KECAMATAN--

Kelurahan/Desa*

--PILIH KELURAHAN--

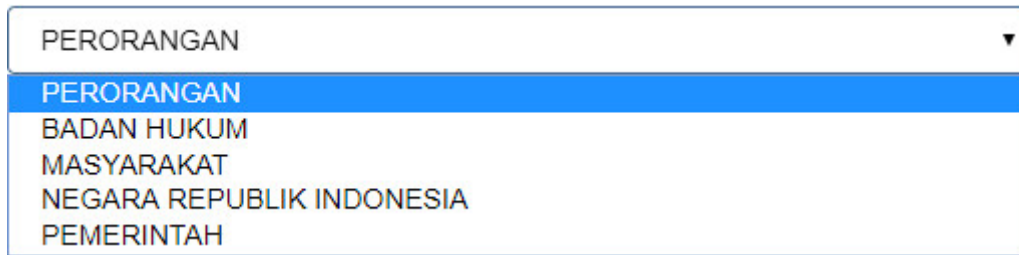
Nomor HP*

Email*

SIMPAN

Pada **form** tersebut terdapat beberapa **field** yang harus diisi, yaitu :

- Pilih Jenis Pemegang saham WNI yang terdiri dari :



PERORANGAN	▼
PERORANGAN	
BADAN HUKUM	
MASYARAKAT	
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
PEMERINTAH	

1. PERORANGAN

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “PERORANGAN”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

☐ Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

PERORANGAN ▼

Nama *

☐ Di bawah umur

NIK *

NPWP *

NPWP Valid - VALID

Sebagai *

☒ Pemegang Saham☒ Direksi/Komisaris

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi ▼

Lembar Saham *

500

500

Jabatan Pengurus *

KOMISARIS ▼

Tempat Lahir *

Tanggal Lahir *

Alamat *

Rt

Rw

Provinsi *

DKI JAKARTA ▼

Kabupaten *

JAKARTA PUSAT ▼

Kecamatan *

MENTENG ▼

Kelurahan/Desa *

MENTENG ▼

Nomor HP *

Email *

SIMPAN

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- NIK : Masukkan NIK pemegang saham dan direksi/komisaris
- NPWP : Masukkan NPWP wajib untuk pemegang saham dan direksi/komisaris, jika tidak memiliki NPWP bisa di isi dengan angka "0".
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *	Klasifikasi Saham *
☒ Pemegang Saham	
☐ Direksi/Komisaris	Lembar Saham *
	0

- Jika memilih Direksi/Komisaris, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *	Penanggung Jawab Pajak
☐ Pemegang Saham	☐ Ya
☒ Direksi/Komisaris	☐ Tidak
Jabatan Pengurus *	
--PILIH--	

- Jika memilih Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *	Penanggung Jawab Pajak
☒ Pemegang Saham	☐ Ya
☒ Direksi/Komisaris	☐ Tidak
Klasifikasi Saham *	Lembar Saham *
	0
Jabatan Pengurus *	
--PILIH--	

- Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir
- Tanggal Lahir : Masukkan Tanggal Lahir
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

--PILIH PROVINSI-- ▼

--PILIH PROVINSI-- ▲

ACEH
BALI
BANTEN
BENGKULU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DKI JAKARTA
GORONTALO
JAMBI
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPULAUAN RIAU
LAMPUNG ▼

- Pilih Kabupaten

--PILIH-- ▼

--PILIH--

KEPULAUAN SERIBU
JAKARTA PUSAT
JAKARTA UTARA
JAKARTA BARAT
JAKARTA SELATAN
JAKARTA TIMUR

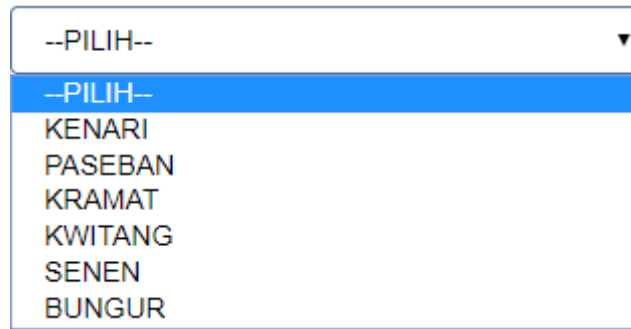
- Pilih Kecamatan

--PILIH-- ▼

--PILIH--

GAMBIR
SAWAH BESAR
KEMAYORAN
SENEN
CEMPAKA PUTIH
MENTENG
TANAH ABANG
JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa



A dropdown menu with a light gray background and a blue border. The menu is open, showing a list of options. The top option is "--PILIH--" with a small downward arrow on the right. Below it, the option "--PILIH--" is highlighted in blue. The other options are KENARI, PASEBAN, KRAMAT, KWITANG, SENEN, and BUNGUR, listed in black text.

--PILIH--
--PILIH--
KENARI
PASEBAN
KRAMAT
KWITANG
SENEN
BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

2. BADAN HUKUM

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “BADAN HUKUM”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

☐ Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

BADAN HUKUM ▼

Nama *

NPWP *

NPWP Valid - VALID

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi ▼

Lembar Saham *

1000

1,000

Tanggal SK

Nomor SK

Alamat *

Rt

Rw

Provinsi *

DKI JAKARTA ▼

Kabupaten *

JAKARTA SELATAN ▼

Kecamatan *

KEBAYORAN BARU ▼

Kelurahan/Desa *

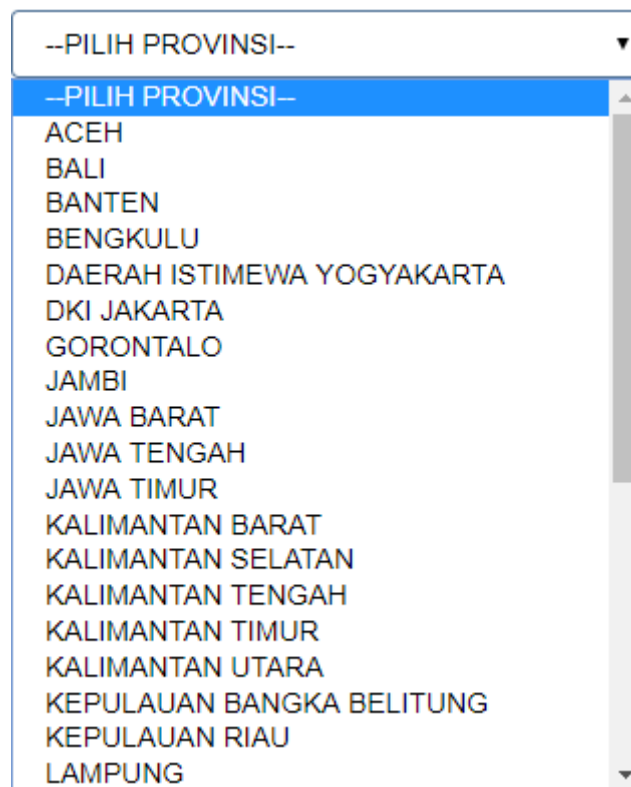
GANDARIA UTARA ▼

Nomor HP *

Email *

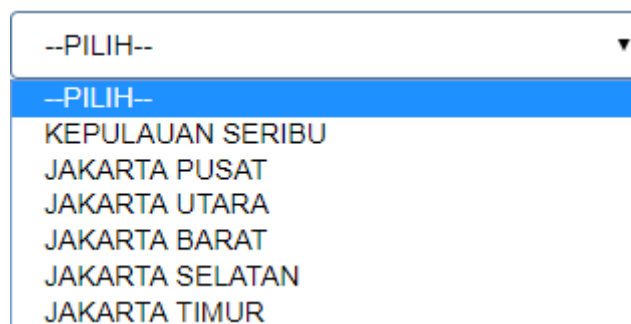
SIMPAN

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- NPWP : Masukkan NPWP wajib untuk pemegang saham dan direksi/komisaris, jika tidak memiliki NPWP bisa di isi dengan angka "0"
- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Nomor SK : Masukkan Nomor SK
- Pilih Tanggal SK
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi



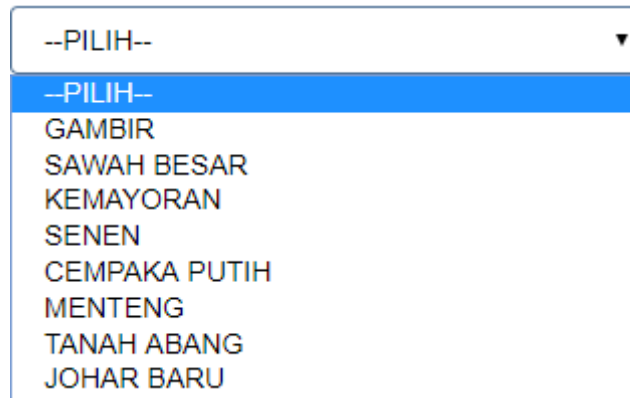
A screenshot of a web form's dropdown menu for selecting a province. The menu is open, showing a list of Indonesian provinces. The header of the dropdown is "--PILIH PROVINSI--". The list includes: ACEH, BALI, BANTEN, BENGKULU, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DKI JAKARTA, GORONTALO, JAMBI, JAWA BARAT, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TENGAH, KALIMANTAN TIMUR, KALIMANTAN UTARA, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, KEPULAUAN RIAU, and LAMPUNG. A scrollbar is visible on the right side of the list.

- Pilih Kabupaten



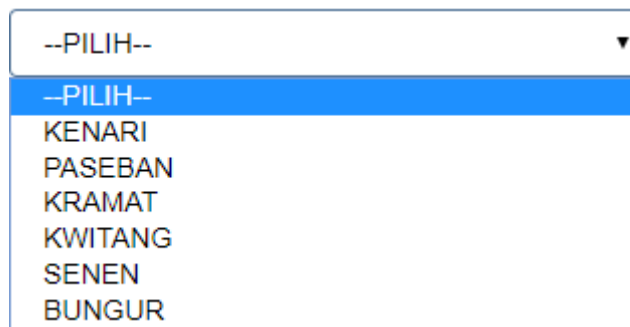
A screenshot of a web form's dropdown menu for selecting a district. The menu is open, showing a list of districts in Jakarta. The header of the dropdown is "--PILIH--". The list includes: KEPULAUAN SERIBU, JAKARTA PUSAT, JAKARTA UTARA, JAKARTA BARAT, JAKARTA SELATAN, and JAKARTA TIMUR.

- Pilih Kecamatan



A dropdown menu with a light gray background and a blue border. The top bar is white with the text "--PILIH--" and a downward arrow. The menu is open, showing a blue header bar with "--PILIH--". Below the header, the following options are listed in black text: GAMBIR, SAWAH BESAR, KEMAYORAN, SENEN, CEMPAKA PUTIH, MENTENG, TANAH ABANG, and JOHAR BARU.

- Pilih Kelurahan/desa



A dropdown menu with a light gray background and a blue border. The top bar is white with the text "--PILIH--" and a downward arrow. The menu is open, showing a blue header bar with "--PILIH--". Below the header, the following options are listed in black text: KENARI, PASEBAN, KRAMAT, KWITANG, SENEN, and BUNGUR.

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

3. MASYARAKAT

Jika memilih Jenis Pemegang Saham "MASYARAKAT", maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Jenis Pemegang Saham

MASYARAKAT ▼

Nama

☐ Di bawah umur

NIK*

NPWP

NPWP Valid - VALID

Sebagai *

☒ Pemegang Saham

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi ▼

Lembar Saham *

300

300

Tempat Lahir*

Tanggal Lahir*

Alamat *

Rt

Rw

Provinsi*

DKI JAKARTA ▼

Kabupaten*

JAKARTA PUSAT ▼

Kecamatan*

MENTENG ▼

Kelurahan/Desa*

MENTENG ▼

Nomor HP

Email

SIMPAN

- Nama : (Disable)
- NIK : (Disable)
- NPWP : (Disable)
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *☒ Pemegang Saham☐ Direksi/Komisaris**Klasifikasi Saham *****Lembar Saham ***

- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Tempat Lahir : Masukkan Tempat Lahir
- Tanggal Lahir : Masukkan Tanggal Lahir
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

--PILIH PROVINSI--

--PILIH PROVINSI--
ACEH
BALI
BANTEN
BENGKULU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DKI JAKARTA
GORONTALO
JAMBI
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPULAUAN RIAU
LAMPUNG

- Pilih Kabupaten

--PILIH-- ▼

--PILIH--

KEPULAUAN SERIBU
JAKARTA PUSAT
JAKARTA UTARA
JAKARTA BARAT
JAKARTA SELATAN
JAKARTA TIMUR

- Pilih Kecamatan

--PILIH-- ▼

--PILIH--

GAMBIR
SAWAH BESAR
KEMAYORAN
SENEN
CEMPAKA PUTIH
MENTENG
TANAH ABANG
JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa

--PILIH-- ▼

--PILIH--

KENARI
PASEBAN
KRAMAT
KWITANG
SENEN
BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

4. NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “NEGARA REPUBLIK INDONESIA”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Jenis Pemegang Saham

NEGARA REPUBLIK INDONESIA ▼

Nama

☐ Di bawah umur

NIK*

NPWP

NPWP Valid - VALID

Sebagai *

☒ Pemegang Saham

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi ▼

Lembar Saham *

500

500

Tempat Lahir*

Tanggal Lahir*

Alamat *

Rt

Rw

Provinsi*

DKI JAKARTA ▼

Kabupaten*

JAKARTA SELATAN ▼

Kecamatan*

KEBAYORAN BARU ▼

Kelurahan/Desa*

GANDARIA UTARA ▼

Nomor HP

Email

SIMPAN

- Nama : (*Disable*)
- NIK : (*Disable*)
- NPWP : (*Disable*)
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *

☒ Pemegang Saham

Klasifikasi Saham *

- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Tempat Lahir : (*Disable*)
- Tanggal Lahir : (*Disable*)
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

--PILIH PROVINSI--

--PILIH PROVINSI--

ACEH

BALI

BANTEN

BENGKULU

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DKI JAKARTA

GORONTALO

JAMBI

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

JAWA TIMUR

KALIMANTAN BARAT

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN UTARA

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPULAUAN RIAU

LAMPUNG

- Pilih Kabupaten

--PILIH-- ▼

--PILIH--

KEPULAUAN SERIBU
JAKARTA PUSAT
JAKARTA UTARA
JAKARTA BARAT
JAKARTA SELATAN
JAKARTA TIMUR

- Pilih Kecamatan

--PILIH-- ▼

--PILIH--

GAMBIR
SAWAH BESAR
KEMAYORAN
SENEN
CEMPAKA PUTIH
MENTENG
TANAH ABANG
JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa

--PILIH-- ▼

--PILIH--

KENARI
PASEBAN
KRAMAT
KWITANG
SENEN
BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

5. PEMERINTAH

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “PEMERINTAH”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Jenis Pemegang Saham

PEMERINTAH

Nama

PEMERINTAH

☐ Di bawah umur

NIK*

NPWP

NPWP Valid - VALID

Sebagai *

☒ Pemegang Saham

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi

Lembar Saham *

1000

1,000

Tempat Lahir*

Tanggal Lahir*

Alamat *

Rt

Rw

Provinsi*

DAERAH ISTIMEWA YOGYAK

Kabupaten*

KABUPATEN KULON PROGO

Kecamatan*

WATES

Kelurahan/Desa*

TRIHARJO

Nomor HP

Email

SIMPAN

- Nama : (otomatis terisi “PEMERINTAH”)
- NPWP : (*Disable*)
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *

☒ Pemegang Saham

Klasifikasi Saham *

- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Tempat Lahir : (*Disable*)
- Tanggal Lahir : (*Disable*)
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

--PILIH PROVINSI--

--PILIH PROVINSI--

ACEH
BALI
BANTEN
BENGKULU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DKI JAKARTA
GORONTALO
JAMBI
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPULAUAN RIAU
LAMPUNG

- Pilih Kabupaten

--PILIH--

--PILIH--

KEPULAUAN SERIBU
JAKARTA PUSAT
JAKARTA UTARA
JAKARTA BARAT
JAKARTA SELATAN
JAKARTA TIMUR

- Pilih Kecamatan

--PILIH--

--PILIH--

GAMBIR

SAWAH BESAR

KEMAYORAN

SENEN

CEMPAKA PUTIH

MENTENG

TANAH ABANG

JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa

--PILIH--

--PILIH--

KENARI

PASEBAN

KRAMAT

KWITANG

SENEN

BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

Setelah semua data pengurus dan pemegang saham WNI terisi, Klik tombol [SIMPAN](#) untuk menyimpan data pemegang saham, komisaris dan direksi WNI.

2). Warga Negara Asing

- Jika Pemegang Saham merupakan Warga Negara Asing, Ceklis Warga Negara Asing. Kemudian isikan form Pemegang Saham dibawah ini.

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

☒ Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham
PERORANGAN

Nama *

☐ Di bawah umur

Passport* KITAS

Negara Asal*

Sebagai *

☒ Pemegang Saham

☒ Direksi/Komisaris

Klasifikasi Saham *

Lembar Saham *

0

Jabatan Pengurus *

--PILIH--

Alamat *

Nomor HP* Email*

SIMPAN

Pada form tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

- Pilih Jenis Pemegang saham yang terdiri dari :

PERORANGAN

PERORANGAN

BADAN HUKUM

1. PERORANGAN

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “PERORANGAN”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

☒ Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

PERORANGAN ▼

Nama *

☐ Di bawah umur

Passport*

KITAS

Negara Asal*

Sebagai *

☒ Pemegang Saham☒ Direksi/Komisaris

Penanggung Jawab Pajak

☐ Ya☐ Tidak

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi ▼

Lembar Saham *

500

500

Jabatan Pengurus *

KOMISARIS ▼

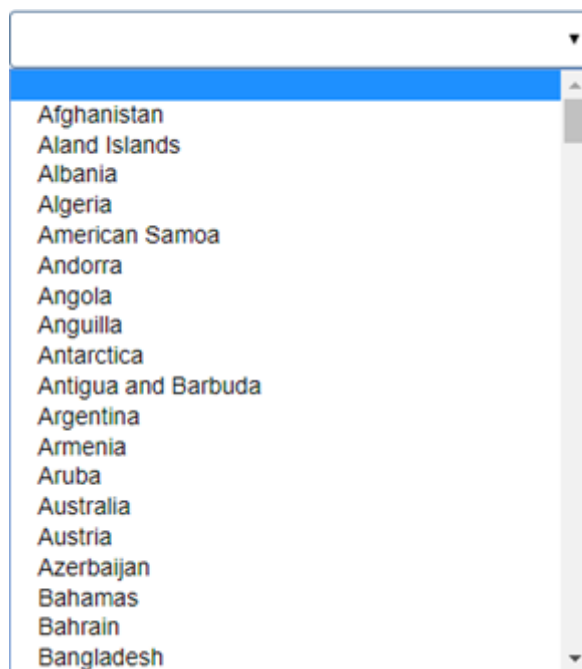
Alamat *

Nomor HP*

Email*

SIMPAN

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- Pasport : Masukkan Pasport
- KITAS : Masukkan KITAS
- Pilih Negara Asal



A dropdown menu with a list of countries. The list is scrollable and includes the following countries: Afghanistan, Aland Islands, Albania, Algeria, American Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antarctica, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, and Bangladesh. The menu is currently open, showing the list of countries.

- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul field berikut



Form fields for 'Sebagai' and 'Klasifikasi Saham'. The 'Sebagai' field has two radio buttons: 'Pemegang Saham' (checked) and 'Direksi/Komisaris'. The 'Klasifikasi Saham' field is a dropdown menu. Below it is a 'Lembar Saham' field with the value '0'.

- Jika memilih Direksi/Komisaris, maka akan muncul field berikut



Form fields for 'Sebagai' and 'Jabatan Pengurus'. The 'Sebagai' field has two radio buttons: 'Pemegang Saham' (unchecked) and 'Direksi/Komisaris' (checked). Below it is a 'Jabatan Pengurus' field with a dropdown menu showing '--PILIH--'.

- Jika memilih Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris, maka akan muncul field berikut

Sebagai *	Klasifikasi Saham *
☒ Pemegang Saham	
☒ Direksi/Komisaris	Lembar Saham *
	0
Jabatan Pengurus *	
--PILIH--	

- Alamat : Masukkan alamat
- Nomor HP : Masukkan Nomor HP
- *Email* : Masukkan *email*

2. BADAN HUKUM

Jika memilih Jenis Pemegang Saham "BADAN HUKUM", maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

☒ Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

BADAN HUKUM ▼

Nama *

PT. Cipta Karya Indonesia

Negara Asal*

American Samoa ▼

Klasifikasi Saham *



Lembar Saham *

2

2

Nomor SK

0000000000

Tanggal SK

2024-05-01

Alamat *

PT. Cipta Karya Indonesia

Nomor HP*

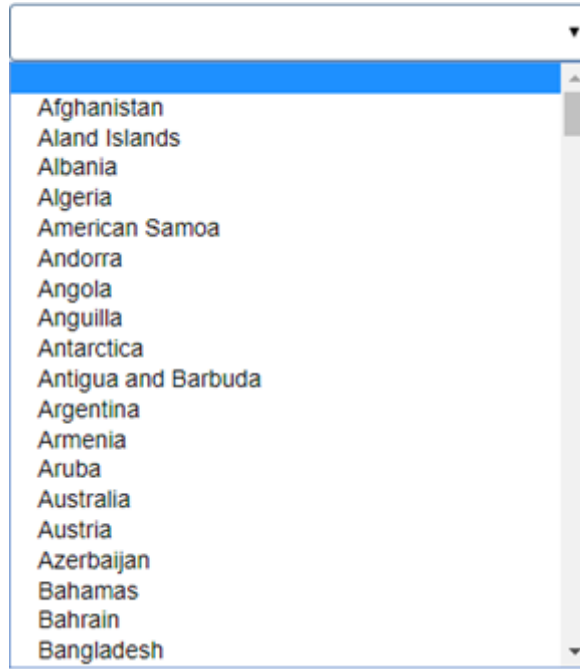
08123456789

Email*

info@ciptakarya.co.id

SIMPAN

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- Pilih Negara Asal



- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Nomor SK : Masukkan Nomor SK
- Pilih Tanggal SK
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

Setelah semua data pengurus dan pemegang saham WNA terisi, Klik tombol  untuk menyimpan pemegang saham, komisaris dan direksi WNA.

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

☒ Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

PERORANGAN

Nama *

☐ Di bawah umur

Passport*

KITAS

Negara Asal*

Canada

Sebagai *

☒ Pemegang Saham

☒ Direksi/Komisaris

Penanggung Jawab Pajak

☒ Ya

☐ Tidak

Klasifikasi Saham *

Lembar Saham *

2

2

Jabatan Pengurus *

DIREKTUR

Alamat *

Nomor HP*

Email*

SIMPAN

i. Pemilik Manfaat

- Setelah melakukan penginputan Pengurus dan Pemegang Saham, maka selanjutnya dilakukan pemahaman terhadap Pemilik Manfaat pada Form dibawah ini.

Pemilik Manfaat

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☐ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.

- Ceklis pada kolom centang yang ada. Maka akan muncul tampilan seperti berikut.

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.



Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DOWNLOAD

☐ Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

☐ Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

☐ Notaris menyimpan Surat Pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat (sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018)

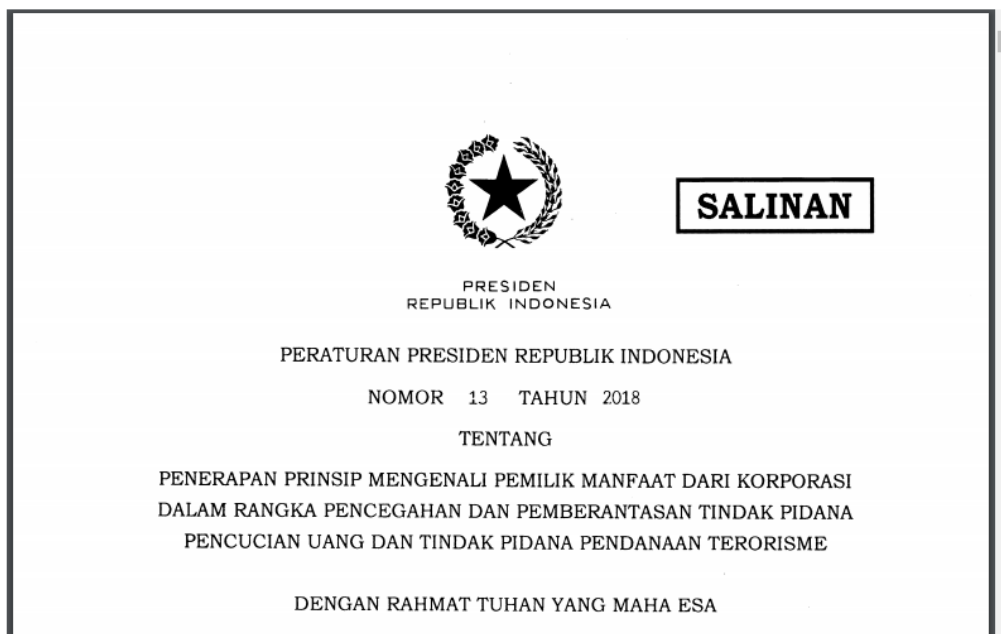
- Ceklis 2 kolom centang untuk menyetujui Peraturan Presiden yang berlaku. Kemudian akan muncul tampilan untuk menambahkan pemilik manfaat seperti berikut.

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☒ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



DOWNLOAD

☒ Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

☒ Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

☐ Notaris menyimpan Surat Pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat (sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018)

Tambah Data

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
------	-----------------	------------------------	-----------------	--------	------	----------	------

Tambah Data

Untuk memilih Pemilik Manfaat, pengguna dapat Klik tombol **Tambah Data**. Maka akan muncul Form Tambah Pemilik Manfaat seperti berikut.

Tambah Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- ☐ a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☐ b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☐ c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- ☐ d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- ☐ e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- ☐ f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- ☐ g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

KEMBALI **OK**

- Pengguna dapat memilih beberapa manfaat untuk Pemilik Saham. Jika semua field sudah terisi, Klik tombol  untuk melanjutkan proses pengisian pendirian Perseroan.

Tambah Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- ☒ a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☐ b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☐ c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- ☐ d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- ☐ e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- ☒ f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- ☐ g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

KEMBALI**OK** 

- Kemudian isikan data pemilik manfaat pada form dibawah ini. Setelah semua field terisi, Klik tombol

SIMPAN

Tambah Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- ☒ a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☐ b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☐ c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- ☐ d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- ☐ e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- ☒ f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- ☐ g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

KEMBALI

OK

Data Pemilik Manfaat Perorangan :

Nama Lengkap *

Jenis Identitas *

☒ NIK ☐ SIM ☐ Paspor

NIK / SIM / Paspor *

Tempat Lahir *

Tanggal Lahir *

Alamat sesuai kartu identitas *

Kewarganegaraan *

☒ WNI ☐ WNA

NPWP *

Hubungan Antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat *

☒ Notaris wajib memiliki berkas dokumen data dari pemilik manfaat tersebut.

SIMPAN

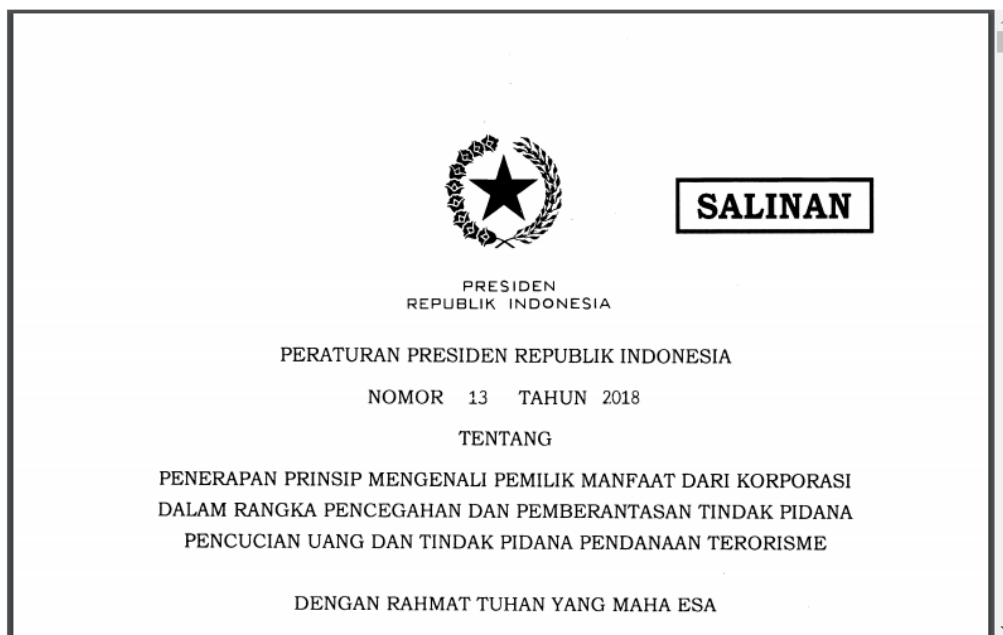
- Ceklis kolom disclaimer biru jika data pemilik manfaat belum ditetapkan/tidak perlu melakukan pengisian pemilik manfaat maka tombol **Tambah Data** akan terdisable seperti berikut.

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☒ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



DOWNLOAD

☒ Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

☒ Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

☒ Notaris menyimpan Surat Pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat (sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018)

Tambah Data

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
------	-----------------	------------------------	-----------------	--------	------	----------	------

j. Notaris Pengganti

Jika pemohon merupakan notaris pengganti, maka ceklis kolom Notaris pengganti pada *form* pendirian

Notaris Pengganti

☐ Apakah Anda Notaris Pengganti? 1

Kemudian tampil Halaman Daftar Notaris Pengganti seperti dibawah ini

DITJEN AHU ONLINE Pesan SABH

Beranda
Daftar Permohonan
Wasiat +
Perseroan Terbatas +
Yayasan +
Perkumpulan +
Notaris Pengganti 1
Login SABH

Daftar Notaris Pengganti

Tambah Pengganti 4

No.	Nama Lengkap	Nomor SK	Tanggal SK	Mulai Aktif	Selesai Aktif	Aktif	Aksi
1	ARYO DARMO KUSUMA	4567/89/DC/90974R	01 April 2014	01 April 2014	30 Juni 2014	Aktifkan	Perbaharui
2	aryo dk	085467888	01 April 2014	01 April 2014	02 Juni 2014	Pengganti Aktif	Perbaharui
3	DARYOO	AHU-4566 AH.01.01.2014	23 April 2014	23 April 2014	30 September 2014	Aktifkan	Perbaharui
4	Ello	8089234083209	01 April 2014	08 April 2014	30 April 2014		Perbaharui

2 3

1. Masuk ke halaman menu Notaris Pengganti disebelah kiri.
2. Menampilkan status notaris pengganti.
3. Menampilkan aksi perbaharui untuk mengupdate status notaris pengganti.
4. Klik tombol Tambah Pengganti akan tampil form pengisian data notaris pengganti seperti dibawah ini :

DITJEN AHU ONLINE Pesan SABH

Beranda
Daftar Permohonan
Wasiat +
Perseroan Terbatas +
Yayasan +
Perkumpulan +
Notaris Pengganti
Login SABH

PENGISIAN DATA NOTARIS PENGGANTI

Nama Lengkap * Masukan Nama Lengkap Notaris Pengganti 1

Nomor SK * Masukan Nomor SK 2

Tanggal SK * Masukan Tanggal SK 3

Masa Aktif Notaris Pengganti Masukan Tanggal Mulai Aktif Masukan Tanggal Selesai Aktif 4

Aktif ☐ 5

TAMBAH 6 KEMBALI 7

1. Masukkan nama lengkap notaris.
2. Masukkan Nomor SK Notarisnya.
3. Masukkan Tanggal SK.
4. Masukkan tanggal mulai aktif.
5. Masukkan tanggal selesai aktif.
6. Ceklis ketika notaris tersebut ingin diaktifkan sebagai notaris pengganti.

7. Klik tombol **TAMBAH** untuk menambah notaris pengganti.
8. Klik tombol **Kembali** untuk kembali ke menu awal.

k. Surat Keterangan/Pernyataan Dokumen yang harus dimiliki

- Ceklis semua kolom centang yang tersedia pada tampilan berikut. Kemudian klik tombol **LANJUTKAN** jika data pendirian sudah lengkap.

Surat Keterangan/Pernyataan Dokumen yang harus dimiliki

☐ Akta pendirian Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.

☐ Asli setor modal atau bukti lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kembali **LANJUTKAN**

- Setelah itu halaman akan menampilkan *popup disclaimer* seperti berikut.

Perhatian!!!

Saya, notaris NOTARIS SABH2 S.H., S.E. yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

- ☐ 1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya
- ☐ 2. Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dg ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- ☐ 3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- ☐ 4. Dengan memperhatikan hal tersebut diatas berarti saya siap bertanggungjawab penuh.

Dengan Mengklik tombol setuju, saya telah memahami dan siap bertanggung jawab.

Tidak Setuju **Setuju**

- Ceklis semua kolom centang dan klik tombol **Setuju**. Kemudian tampil halaman Pratinjau Pengisian Data Perseroan

PRA TINJAU PENGISIAN DATA PERSEROAN

JENIS PERSEROAN : **SWASTA NASIONAL**

DATA PERSEROAN

NAMA PERSEROAN :
 NAMA SINGKATAN :
 NPWP PERSEROAN :
 JANGKA WAKTU :
 KEDUDUKAN :
 KECAMATAN :
 ALAMAT :
 RT : 005 RW : 003
 KODE POST : 40291 NOMOR TELEPON :

MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD DAN TUJUAN : INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KEGIATAN :
 AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI
 AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI
 AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER
 AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA

AKTA NOTARIS

NO. AKTA : TANGGAL AKTA : 30-08-2018

Modal Dasar

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Saham (Lembar)	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp 500,000	5	Rp 2,500,000

Modal Ditempatkan

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Saham (Lembar)	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp 500,000	2	Rp 1,000,000

MODAL DISETOR : **RP. 1,000,000.00**
 LAINNYA :

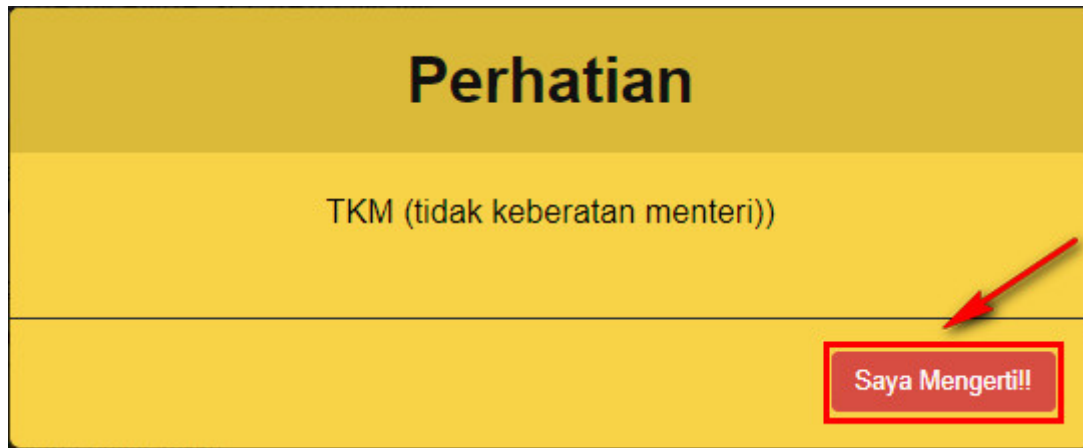
Pengurus dan Pemegang Saham

Penanggung Jawab	Nama	Modal Ditempatkan	Lembar Saham	Jabatan	Total
YA		TANPA KLASIFIKASI	1	KOMISARIS	RP 500.000,00
TIDAK		TANPA KLASIFIKASI	1	DIREKTUR UTAMA	RP 500.000,00

Kembali
Lanjutkan

* Fungsi halaman pratinjau adalah untuk dilihat kembali adanya data yang tidak sesuai dengan akta pada saat penginputan atau data yang salah saat melakukan penginputan sebelum tersimpan.

- Jika data Pendirian sudah sesuai, klik tombol Lanjutkan. Setelah itu muncul popup tidak keberatan menteri seperti gambar dibawah ini, kemudian klik tombol Saya Mengerti!!.



I. Upload Akta

- Selanjutnya aplikasi akan memuat halaman Daftar Transaksi Perseroan.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30 hari kalender** **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**.

Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun 2019 ▼

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Pendirian	PMA		SUDAH BAYAR		Pratinjau & Cetak SK/SP Waktu Upload : 30 hari Tanggal Jatuh Tempo : 10-08-2019 Sisa Pratinjau : 7 hari Tanggal Habis Pratinjau : 17-08-2019 Tagihan PNRI Permohonan Status Penerbitan NPWP : Menunggu Cetak SK

Pada halaman Daftar Transaksi Perseroan, terdapat beberapa fungsi diantaranya :

1. Tombol **Pratinjau & Cetak SK/SP** untuk melihat data pendirian. **PRATINJAU AKAN BERLAKU SELAMA 7 HARI**

2. Tombol **Tagihan PNRI** untuk mengunduh bukti pembayaran. * **Bukti Tagihan PNRI ini sebagai bukti pembayaran BNRI langsung ke pada pihak BNI, cukup hanya dengan menunjukkan bukti tagihan PNRI.**

SURAT PERINTAH BAYAR BN/TBN TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN		
No. Transaksi	:	
Virtual Account TBNRI & BNRI	:	
Nama NOTARIS	:	
Nama PERSEROAN	:	
Nama Singkatan	:	
Propinsi Wilayah Pendaftaran	:	
Kabupaten/Kota Pendaftaran	:	
Jenis Permohonan	:	Pendirian Perseroan
Biaya BNRI	:	RP 30.000
Biaya TBNRI	:	RP 200.000
Total	:	RP 230.000

Link Tagihan PNRI merupakan link untuk melakukan download Perintah Bayar BN/TBN RI ke PNRI. Link tersebut tetap akan tampil walaupun pembayaran telah dilakukan karena belum tersedianya Sistem Elektronik di PNRI sehingga antara Sistem AHU dan PNRI belum terhubung.

3. Tombol **Permohonan** untuk mengunduh Bukti Permohonan Pendirian Perseroan Terbatas.

BUKTI PENDIRIAN PERSEROAN	
No. Pesan	: nomor ini untuk pengisian data pendirian
Nama NOTARIS	:
Nama PERSEROAN	:
Nama Singkatan	:
Propinsi Wilayah Pendaftaran	: DKI JAKARTA
Kabupaten/Kota Pendaftaran	: JAKARTA SELATAN
Tanggal Pesan	:
Tanggal Kadaluarsa	:
Nomor Voucher	:

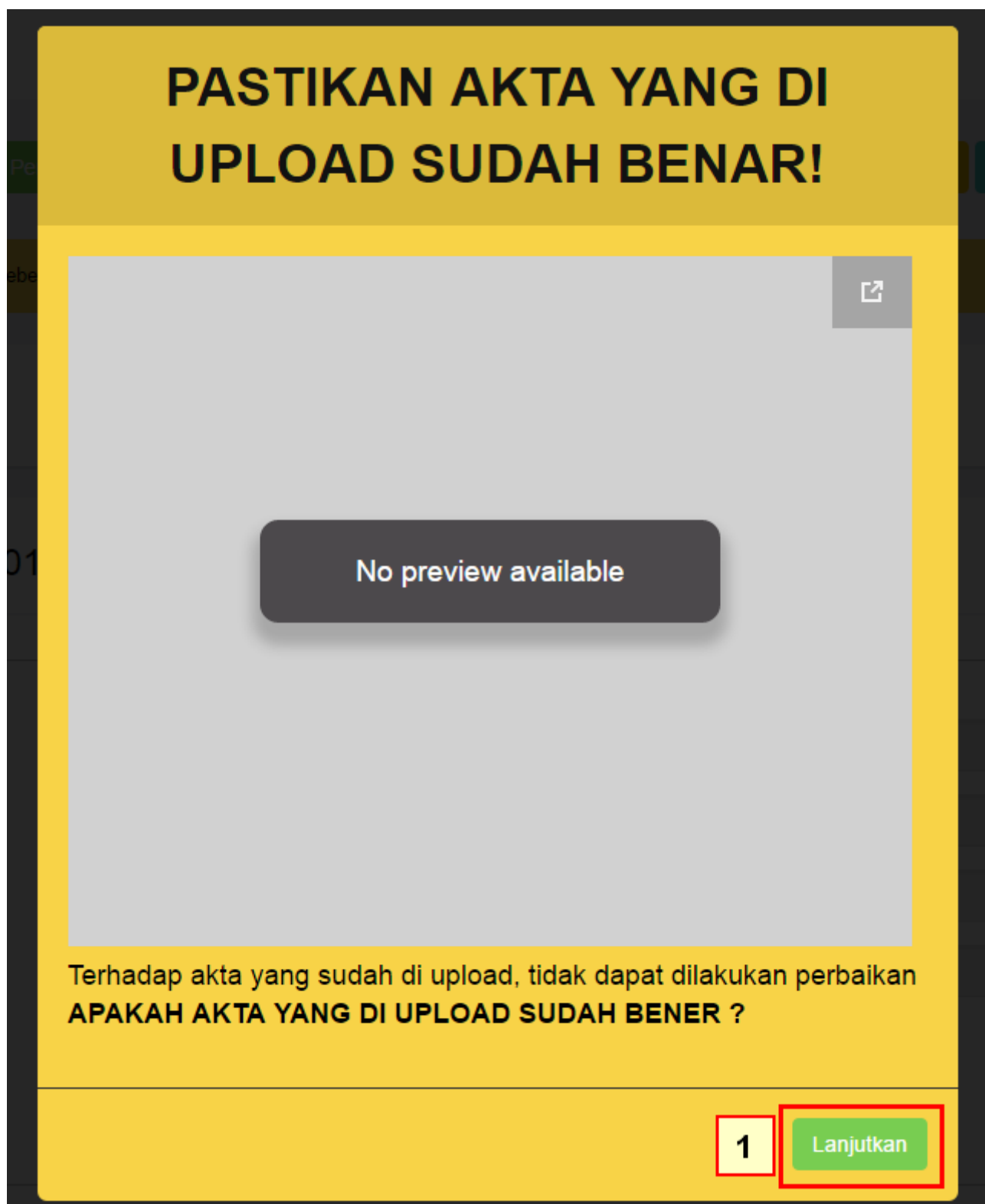
Untuk mengakses form Pratinjau, klik

Pratinjau & Cetak SK/SP

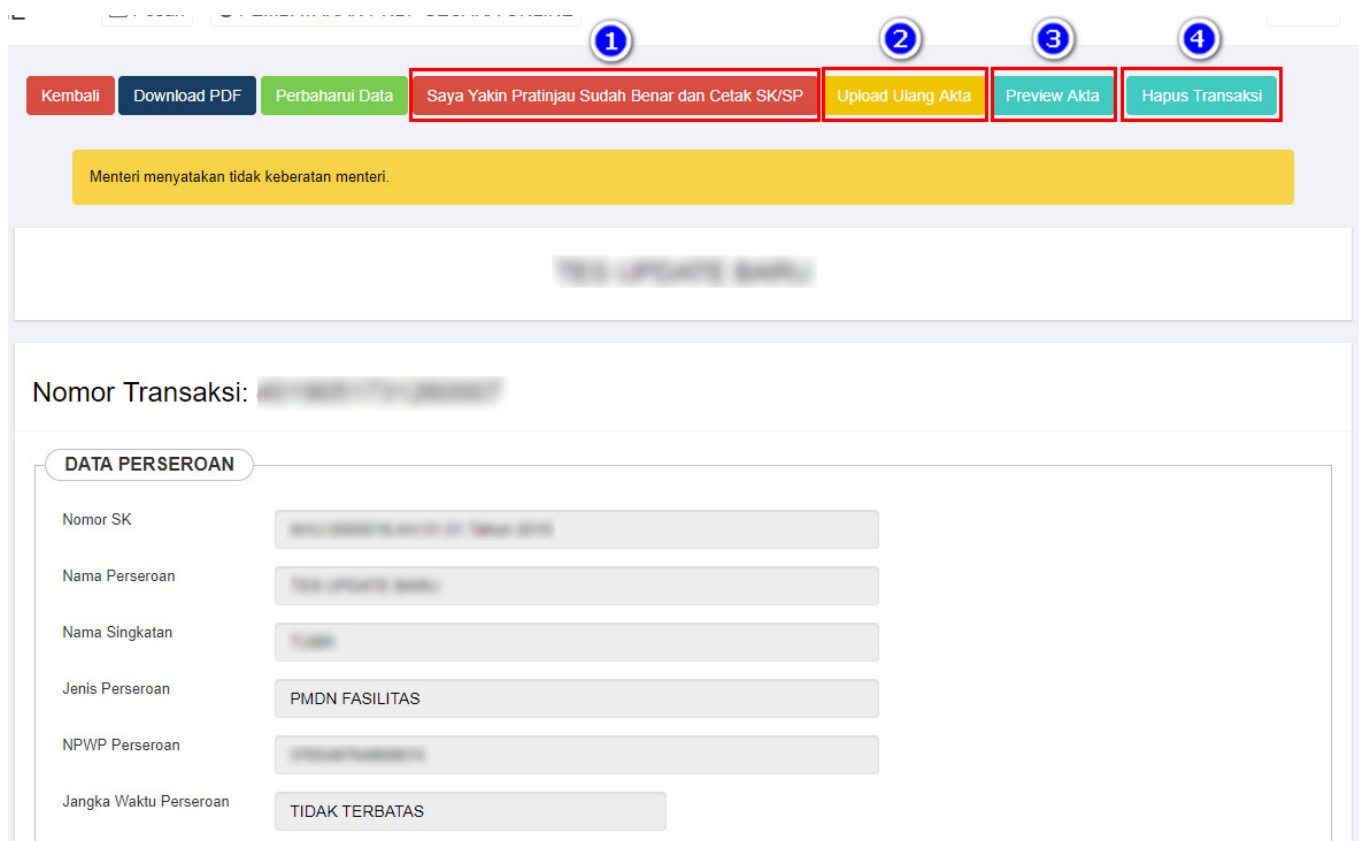
, maka akan tampil halaman pratinjau data perseroan.

1. Klik tombol **Perbaharui Data** jika masih ada perubahan data/Edit data
2. Jika sudah tidak ada perubahan data/Edit Klik tombol **Upload Akta** maka akan masuk ke halaman upload akta.

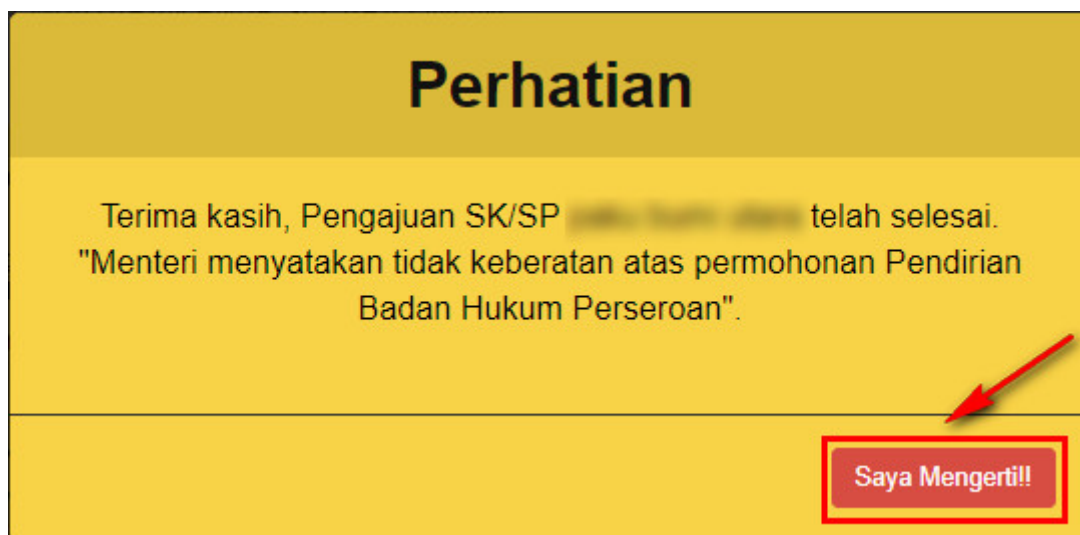
1. Ceklis semua pernyataan diatas.
2. Klik tombol **Choose Files** lalu cari file akta yang akan di upload.
3. Klik tombol **Upload**, maka akan tampil pop up preview seperti gambar dibawah ini.



- Klik tombol **Lanjutkan** setelah itu akan tampil halaman dibawah ini:



1. Tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP** untuk mengakhiri transaksi.
 2. Tombol **Upload Ulang Akta** untuk mengulangi proses upload akta jika terjadi kesalahan upload file.
 3. Tombol **Preview Akta** untuk menampilkan file akta yang telah di upload.
 4. Tombol **Hapus Transaksi** untuk menghapus transaksi.
- Setelah klik tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP**, maka akan muncul popup seperti berikut.



- Klik tombol **Saya Mengerti!!**, lalu tampil halaman daftar transaksi perseroan.

m. Download SK Pengesahan Pendirian

- Klik **SK Pengesahan** untuk mendownload SK Pengesahan Pendirian.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30 hari kalender** **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri.**

Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNBPN tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun **2019**

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Pendirian	PMA		SUDAH BAYAR		Tagihan PNRI SK Pengesahan Upload Bukti Setor Waktu Upload Bukti Setor : 60 hari Upload Akta Waktu Perbaikan : 89 hari Status Penerbitan NPWP : Input By Sistem Nomor :

- Kemudian tampil SK Pengesahan Pendirian seperti gambar dibawah ini.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [REDAKSI]
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
[REDAKSI]

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris [REDAKSI] sesuai salinan Akta Nomor [REDAKSI] Tanggal [REDAKSI] yang dibuat oleh [REDAKSI] tentang Pendirian Badan Hukum [REDAKSI] disingkat [REDAKSI] tanggal [REDAKSI] dengan Nomor Pendaftaran [REDAKSI] telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum [REDAKSI] disingkat [REDAKSI].

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - [REDAKSI] disingkat [REDAKSI] - yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor [REDAKSI] Tanggal [REDAKSI] yang dibuat oleh [REDAKSI], yang berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan PMA.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal [REDAKSI].

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL [REDAKSI]
DAFTAR PERSEROAN NOMOR [REDAKSI] TANGGAL [REDAKSI]



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [REDACTED]
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
[REDACTED]**

1. Modal Dasar : Rp. 4.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 4.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
[REDACTED]	DIREKTUR	-	1.000	Rp. 1.000.000
[REDACTED]	BADAN HUKUM	-	1.000	Rp. 1.000.000
MASYARAKAT	-	-	300	Rp. 300.000
PEMERINTAH	-	-	700	Rp. 700.000
[REDACTED]	KOMISARIS	-	500	Rp. 500.000
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	-	-	500	Rp. 500.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal [REDACTED].



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED]
DAFTAR PERSEROAN NOMOR [REDACTED]

TANGGAL [REDACTED]

n. Upload Bukti Setor

- Klik [Upload Bukti Setor](#) untuk mengupload bukti setor.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30 hari kalender dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**.
Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun 2019

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Pendirian	PMA		SUDAH BAYAR		Tagihan PNRI SK Pengesahan Upload Bukti Setor Waktu Upload Bukti Setor : 60 hari Upload Akta Waktu Perbaikan : 89 hari Status Penerbitan NPWP : Input By Sistem Nomor :

Keterangan :

- Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar.
 - Jika Notaris belum melakukan Upload Bukti Setor, maka perseroan yang telah didirikan tidak bisa mengakses transaksi Perubahan.
- Kemudian tampil halaman upload bukti setor seperti gambar dibawah ini.

Upload Bukti Penyetoran Modal

1. ☒ Bukti Penyetoran yang sah wajib disampaikan dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal Akta. Sesuai Ketentuan pasal 2 Ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

☒ Bukti Penyetoran yang Sah adalah Bukti Setor Modal Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Ayat(4) huruf C Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata cara pengajuan permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan terbatas.

☒ Notaris wajib meneliti isi dari Bukti Setor Modal. Kesalahan terhadap upload penyetoran modal sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris.

Pada Upload Bukti Penyetoran Modal (sesuai dengan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 4 C) dibuat pilihan berseri :

2. ☒ Fotokopi slip setoran

☐ Fotokopi surat keterangan bank atas nama perseroan

☐ Rekening bersama atas nama para pendiri

☐ Neraca Laba Rugi

☐ Asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang.

3. **Upload Bukti Penyetoran**

pdf

pdf

Bukti Penyetoran Modal yang diupload berbentuk file pdf dengan kapasitas maksimal 10 MB

4

1. Ceklis semua syarat dan ketentuan
2. Pilih jenis bukti penyetoran modal yang ingin diupload
3. Klik **Choose File** untuk memilih file bukti setor
4. Klik **Upload** untuk mengupload bukti setor

o. Download Bukti Setor

- Klik **Download Bukti Setor** pada halaman daftar transaksi perseroan.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :

Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560

Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30 hari kalender dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**. Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun 2019 ▾

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Pendirian	PMA		SUDAH BAYAR		Tagihan PNRI SK Pengesahan Download Bukti Setor  Upload Akta Waktu Perbaikan : 89 hari Status Penerbitan NPWP : Input By Sistem Nomor :

4. Pendirian Pending

- Pendirian Pending dilakukan oleh Notaris untuk melakukan pendirian pada perseroan yang tertunda.
- Klik Menu **Perseroan Terbatas** → **Pendirian Pending** seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

≡ DITJEN AHU ONLINE Pesan ² PEMBAYARAN PNPB SECARA ONLINE

Beranda Notaris

Fidusia

Wasiat

Notaris Pengganti

Perseroan Terbatas

Pesan Nama dan Pendirian

Pendirian

Pendirian Pending

Perubahan

Perubahan Pending ^{NEW}

Merger

Penyesuaian UU 2007

Penyesuaian Pending UU 2007 ^{NEW}

Akuisisi

Riwayat Permohonan

Edit Profil

Surat Keterangan

Surat Keputusan

Permohonan Cuti

Permohonan Perubahan Data Notaris

Pemberhentian Notaris

Permohonan Pindah Wilayah

Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan

Nama : [REDACTED]

Email : [REDACTED]

Username : [REDACTED]

Status : notaris

Profil Notaris

Informasi KTA

Nomor KTA : [REDACTED]

No Rekening : [REDACTED]

- Kemudian akan muncul halaman **Pemesanan Nomor Voucher** Pendirian dibawah ini untuk mengesahkan Badan Hukum Perseroan yang akan didirikan.

Cek Nomor Voucher Daftar Voucher Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas

TOTAL MODAL DASAR * 20.000.000

NAMA PEMOHON * [REDACTED]

EMAIL PEMOHON * [REDACTED]

NOMOR HP * [REDACTED]

Pembelian voucher sebesar **Rp 200.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNPB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

☒ Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI

Pada form tersebut terdapat beberapa *field*, diantaranya:

- 1. **Pelayanan Jasa Hukum** Sudah Otomatis Muncul
- 2. Isikan **Total Modal Dasar**. Jumlah pembelian voucher tergantung dari besarnya Modal Dasar. Jika Modal Dasar tidak diisi, maka akan muncul notifikasi seperti berikut.

Modal dasar tidak boleh Rp.0

- 3. **Nama Pemohon** Sudah Otomatis Muncul

- 4. **Email Pemohon** Sudah Otomatis Muncul
- 5. **Nomor Hp** Sudah Otomatis Muncul

- 6. Klik tombol **BELI**. Maka akan muncul Bukti Pemesanan Nomor Voucher Pendirian Perseroan seperti berikut

Cek Pemesanan Voucher

List Voucher



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	:	-
BILL ID ^[1]	:	99
NAMA PEMOHON	:	
NOMOR REKENING	:	8571010xxx
EMAIL PEMOHON	:	
NOMOR HP	:	
TANGGAL TRANSAKSI	:	
TANGGAL EXPIRED	:	
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	
TAGIHAN	:	Rp 200.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :

1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Download

Kirim Ulang

- Setelah itu lakukan Pembayaran Tagihan Pemesanan Nomor Voucher untuk Pendirian Perseroan pada aplikasi YAP! seperti yang sudah dijelaskan pad link berikut ini
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas#pembayaran_nomor_voucher
- Jika sudah melakukan Pembayaran Tagihan Pemesanan Nomor Voucher untuk Pendirian Perseroan, maka pengguna dapat mengklik tombol **Sudah Punya Voucher**

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas

TOTAL MODAL DASAR *

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

[BELI](#)

- Maka sistem akan menampilkan halaman **Permohonan Pendirian Pending Perseroan** berikut Nomer Voucher Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

PERMOHONAN PENDIRIAN PENDING PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

! Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pengesahan Badan Hukum Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

NAMA PERSEROAN * 1

NOMOR SURAT * 2

NOTARIS TERAKHIR * 3

[Cari](#) 4

- Masukkan **Nama Perseroan**
 - Masukkan **Nomor Surat** yang tertera pada surat yang dikirim oleh Kementrian
 - Masukkan **Notaris Terakhir yang terdapat pada SK PT**
 - Klik tombol [Cari](#)
- Maka akan keluar *popup disclaimer* seperti berikut.

Perhatian!!!

Saya, Notaris telah mengingatkan kepada pemesan nama/pendiri PT bahwa nama yang dipesan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka pemesan nama/pendiri PT wajib mengganti nama tersebut atau Menteri Hukum dan HAM dapat membatalkan karena hukum

☒ anda harus mencentang untuk melanjutkan

Kembali Lanjutkan

Data Perseroan

Nama Perseroan *

Nama Singkatan

Jenis Perseroan *

NPWP

Jangka Waktu *

--PILIH--

Domisili Perseroan

Alamat *

- Kemudian ceklis pernyataan pada *popup disclaimer* tersebut dan klik tombol **Lanjutkan** untuk melanjutkan proses Pendirian.

Setelah menyetujui pesan pemberitahuan, sistem akan menampilkan *Form* Pendirian seperti gambar dibawah ini.

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Data Perseroan

NAMA PERSEROAN *

paku bumi utara

Jenis Perseroan *

-- PILIH --

NPWP

Jangka Waktu *

-- PILIH --

Domisili Perseroan

Alamat

RTRW

Provinsi *

-- PILIH PROVINSI--

Kabupaten/Kota *

-- PILIH KABUPATEN--

Kecamatan Id Perseroan *

-- PILIH --

Kelurahan Id Perseroan *

-- PILIH --

Kode PosNomor Telepon

EmailTahun Buku *

Masa berlaku sampai dengan 12 bulan ke depan

Maksud dan Tujuan

MAKSUD

-- PILIH --

TUJUAN

Tambah Data

Akta Notaris

Notaris

NOTARIS SABHQ S.H., S.E. S.H., S.E.

No Akta *

12

Tanggal Akta *

☐ Jika Akta Saudara Dibawah 16

Agustus 2007

2019-04-01

Modal Dasar *

Tambah Data

Klasifikasi Saham	Nilai Nominal Saham Perlembar	Jumlah Lembar Saham	Total Modal	Aksi
-------------------	-------------------------------	---------------------	-------------	------

Modal Ditempatkan *

Tambah Data

Klasifikasi Saham	Nilai Nominal Saham Perlembar	Jumlah Lembar Saham	Total Modal	Aksi
-------------------	-------------------------------	---------------------	-------------	------

Modal disetor *

☐ Dalam bentuk uang.

☐ Dalam bentuk lainnya.

Pengurus dan Pemegang Saham *

Tambah Data

Penanggung Jawab	Nama	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Jabatan/Pemegang Saham	Total Modal	Aksi
------------------	------	-------------------	---------------------	------------------------	-------------	------

Selain Perseroan BUMN dan BUMD pemegang saham wajib lebih dari satu.

Pemilik Manfaat

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenal pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseroan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☐ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.

Notaris Pengganti

☐ Apakah Anda Notaris Pengganti?

Surat Keterangan/Pernyataan Dokumen yang harus dimiliki

☐ Akta pendirian Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.

☐ Asli setor modal atau bukti lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kembali

LAKUKAN

*** Perhatikan pada Akta Notaris***

- Pada akta notaris untuk **nomor akta**, **tanggal akta** dan **nama notaris** sudah otomatis terisi sesuai dengan data Perseroan Pending.

Dalam form pendirian terdapat beberapa fitur diantaranya :

a. Data Perseroan

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Data Perseroan

NAMA PERSEROAN *

paku bumi utara

Jenis Perseroan *

PMA

pastikan anda sudah memahami perkara no 13 th 2017, klik "disini" untuk mendownload/mengunduh file.

NPWP

Jangka Waktu *

TIDAK TERBATAS

Pada *Form* tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

- 1. Nama Perseroan : Tampil secara otomatis nama perseroan yang dipesan
- 3. Jenis Perseroan : Pilih Jenis Perseroan

--PILIH--

--PILIH--

SWASTA NASIONAL

PMDN FASILITAS

BUMN

BUMD

PMA

- Pada saat memilih Jenis Perseroan, akan muncul popup disclaimer seperti berikut mengenai syarat ketentuan sesuai Pasal yang berlaku. Kemudian ceklist pernyataan tersebut dan Klik tombol

Setuju dan lanjut

Perhatian!!!

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal, bahwa:

Penanaman Modal pada bidang usaha tertentu dapat langsung diberikan Izin Usaha, dengan ketentuan:

- a. telah berbadan usaha Indonesia dengan batasan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- c. telah menguasai kantor/tempat usaha.

Bidang usaha tertentu yang dapat langsung diberikan Izin Usaha, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal, adalah:

- a. bidang usaha yang tidak memerlukan kegiatan konstruksi; atau
- b. bidang usaha yang tidak memerlukan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin/barang modal.

Untuk lebih rinci, silahkan unduh dan baca Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal.

[Download disini](#)

☐ Saya telah membaca Perka BKPM tersebut dan mengerti [Setuju dan lanjut](#)

- 4. NPWP Perseroan : Masukkan nomor NPWP
- 5. Jangka Waktu : Pilih Jangka Waktu

--PILIH--

--PILIH--

TIDAK TERBATAS

TERBATAS

- Jika pilih Jangka Waktu "TERBATAS", maka akan muncul *field* tahun seperti berikut

Jangka Waktu *

TERBATAS

Tahun

b. Domisili Perseroan

Domisili Perseroan

Alamat

RT

RW

Provinsi *

BANTEN

Kabupaten/Kota *

KABUPATEN TANGERANG

Kecamatan Id Perseroan *

TIGARAKSA

Kelurahan Id Perseroan *

TIGARAKSA

Kode Pos

Nomor Telepon

Email

Tahun Buku *

December sampai November

*Masa berlaku sampai dengan 12 bulan ke depan

Pada *Form* tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

1. Masukkan alamat perseroan
2. Masukkan RT
3. Masukkan RW

4.

--PILIH PROVINSI--

--PILIH PROVINSI--

ACEH

BALI

BANTEN

BENGKULU

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DKI JAKARTA

GORONTALO

JAMBI

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

JAWA TIMUR

KALIMANTAN BARAT

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN UTARA

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPULAUAN RIAU

LAMPUNG

Pilih Provinsi :

5.
Pilih Kabupaten/Kota :

--PILIH--
--PILIH--
KEPULAUAN SERIBU
JAKARTA PUSAT
JAKARTA UTARA
JAKARTA BARAT
JAKARTA SELATAN
JAKARTA TIMUR

6.
Pilih Kecamatan :

--PILIH--
--PILIH--
GAMBIR
SAWAH BESAR
KEMAYORAN
SENEN
CEMPAKA PUTIH
MENTENG
TANAH ABANG
JOHAR BARU

7.
Pilih Kelurahan/desa :

--PILIH--
--PILIH--
KENARI
PASEBAN
KRAMAT
KWITANG
SENEN
BUNGUR

8. Masukkan Kode Pos
9. Masukkan Nomor Telepon perseroan
10. Masukkan *email*
11. Pilih Tahun Buku

c. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan

MAKSUD -- PILIH --

TUJUAN

Tambah Data

Pada *Form* tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

1.

Pilih Maksud

2. Pilih Tujuan

-- PILIH --

- PERTANIAN, KEMUKATAN DAN PERIKANAN
- PERTAMBANGAN DAN PENGALIAN
- INDUSTRI PENGOLAHAN
- PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/PAU PANAS DAN UDARA DINGIN
- PENGLOLAAN AIR, PENGLOLAAN AIR LIMBAH, PENGLOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI KONSTRUKSI
- PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
- PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN
- PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM
- INFORMASI DAN KOMUNIKASI
- AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI
- REAL ESTATE
- AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMU DAN TEKNIK
- AKTIVITAS PENYERAHAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA
- ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB
- PENDIDIKAN
- AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL
- KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI
- AKTIVITAS JASA LAINNYA

○

Kategori I

-- PILIH --

- AKTIVITAS PENERBITAN
- AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK
- AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN
- TELEKOMUNIKASI
- AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI
- AKTIVITAS JASA INFORMASI

○

Kategori II

-- PILIH --

- AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

○

Kategori III

-- PILIH --

- AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER
- AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER
- AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA

○

Kategori IV

-- PILIH --

- AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI
- AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA

Maksud dan Tujuan dapat dipilih lebih dari satu, Pengguna bisa menambahkan Maksud dan Tujuan

dengan cara Klik Tombol

Tambah Data

Maksud dan Tujuan

MAKSUD: INFORMASI DAN KOMUNIKASI

TUJUAN: AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA

Tambah Data

Maka akan muncul *field* maksud dan tujuan baru seperti berikut

Maksud dan Tujuan

MAKSUD

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

TUJUAN

AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAIINYA

MAKSUD

-- PILIH --

Hapus

TUJUAN

Tambah Data

- Klik tombol **Hapus** untuk membatalkan penambahan maksud dan tujuan baru.

d. Akta Notaris

Akta Notaris

Notaris

NOTARIS

No Akta *

12

Tanggal Akta *

☐ Jika Akta Saudara Dibawah 16

Agustus 2007

2019-04-01

Pada *Form* tersebut telah terisi **Nama Notaris, No Akta dan Tanggal Akta**

e. Modal Dasar

Modal Dasar *

Tambah Data

Klasifikasi Saham	Nilai Nominal Saham Perlembar	Jumlah Lembar Saham	Total Modal	Aksi
-------------------	-------------------------------	---------------------	-------------	------

Untuk menginput Modal Dasar, pengguna dapat Klik tombol **Tambah Data**. Maka akan muncul *Form* Tambah Modal Dasar seperti berikut.

TAMBAH MODAL DASAR

Klasifikasi Saham
Tanpa Klasifikasi ▼

Total Modal *
20000000
20,000,000

Lembar Saham *
4

Harga Perlembar
5000000|
5,000,000

SIMPAN

Pada *Form* tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

1. Klasifikasi Saham terdiri dari :

- Jika memilih Klasifikasi Saham “Tanpa Klasifikasi”, maka *field* Total Modal akan menampilkan nilai

default sesuai dengan Total Modal Dasar yang dimiliki.

2. Total Modal

- *Field* Total Modal diisi jika memilih Klasifikasi Saham “Seri-N”.

3. Harga Perlembar

- *Field* harga perlembar diisi dengan berapa harga saham per lembarnya.

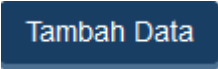
4. Setelah semua *field* terisi, klik tombol  untuk menyimpan modal dasar.

f. Modal Ditempatkan

Modal Ditempatkan *

Tambah Data

Klasifikasi Saham	Nilai Nominal Saham Perlembar	Jumlah Lembar Saham	Total Modal	Aksi
-------------------	-------------------------------	---------------------	-------------	------

Untuk menginput Modal Ditempatkan, pengguna dapat klik tombol . Maka akan muncul *Form* Tambah Modal Ditempatkan seperti berikut.

TAMBAH MODAL DITEMPATKAN

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi ▼

Harga Perlembar *

Rp 1.000

Jumlah Lembar Saham
Keseluruhan*

4.000

Lembar Saham *

4000

4.000

SIMPAN

Pada *Form* tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

1. Klasifikasi Saham

- *Field* Klasifikasi Saham sudah ditampilkan secara default dari pemilihan Klasifikasi Saham di Form Modal Dasar sebelumnya.

2. Harga Perlembar

- *Field* Harga Perlembar sudah ditampilkan secara default dari pengisian Harga Perlembar di Form Modal Dasar sebelumnya.

3. Jumlah Lembar Saham Keseluruhan

- *Field* Jumlah Lembar Saham Keseluruhan sudah ditampilkan secara default dari pembagian antara Total Modal dengan Harga Perlembar di Form Modal Dasar sebelumnya.

4. Lembar Saham

- *Field* Lembar Saham diisi berdasarkan jumlah modal yang ditempatkan. Jika modal yang ditempatkan kurang 25% dari modal dasar, maka akan tampil notifikasi seperti berikut.

Modal ditempatkan tidak boleh kurang
25% dari modal dasar

5. Setelah semua *field* terisi, klik tombol **SIMPAN** untuk menyimpan modal ditempatkan.

g. Modal Disetor

Pada *Form* tersebut terdapat cara penyetoran modal :

1. Modal disetor dalam bentuk uang akan otomatis tercekli.
2. Ceklis Dalam bentuk Lainnya, jika ada modal yang disetorkan dalam bentuk lainnya.

h. Pengurus dan Pemegang Saham

- Pengurus dan Pemegang Saham bisa merupakan Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

- Untuk menginput Pengurus dan Pemegang Saham, pengguna dapat klik tombol **Tambah Data**. Maka akan muncul *form* seperti dibawah ini :

1). Warga Negara Indonesia

- Jika Pemegang Saham merupakan Warga Negara Indonesia, maka isikan form dibawah ini.

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

☐ Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

PERORANGAN

Nama *

☐ Di bawah umur

NIK*

NPWP*

Sebagai *

☒ Pemegang Saham

☒ Direksi/Komisaris

Penanggung Jawab Pajak

☐ Ya

☐ Tidak

Klasifikasi Saham *

Lembar Saham *

0

Jabatan Pengurus *

--PILIH--

Tempat Lahir*

Tanggal Lahir*

Alamat *

Rt

Rw

Provinsi*

--PILIH PROVINSI--

Kabupaten*

--PILIH KABUPATEN--

Kecamatan*

--PILIH KECAMATAN--

Kelurahan/Desa*

--PILIH KELURAHAN--

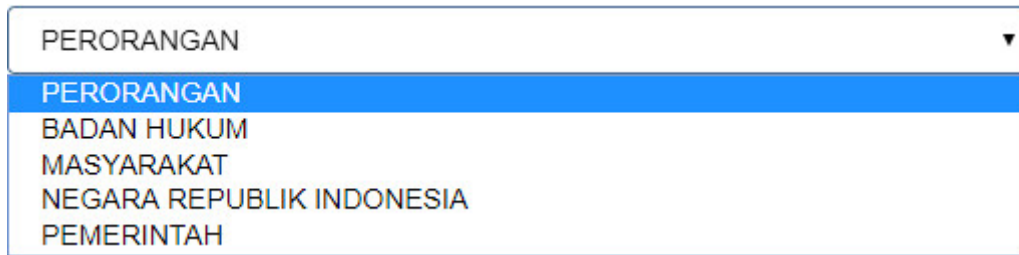
Nomor HP*

Email*

SIMPAN

Pada **form** tersebut terdapat beberapa **field** yang harus diisi, yaitu :

- Pilih Jenis Pemegang saham WNI yang terdiri dari :



PERORANGAN ▼
PERORANGAN
BADAN HUKUM
MASYARAKAT
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH

1. PERORANGAN

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “PERORANGAN”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

☐ Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

PERORANGAN ▼

Nama *

☐ Di bawah umur

NIK *

NPWP *

NPWP Valid - VALID

Sebagai *

☒ Pemegang Saham☒ Direksi/Komisaris

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi ▼

Lembar Saham *

500

500

Jabatan Pengurus *

KOMISARIS ▼

Tempat Lahir *

Tanggal Lahir *

Alamat *

Rt

Rw

Provinsi *

DKI JAKARTA ▼

Kabupaten *

JAKARTA PUSAT ▼

Kecamatan *

MENTENG ▼

Kelurahan/Desa *

MENTENG ▼

Nomor HP *

Email *

SIMPAN

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- NIK : Masukkan NIK pemegang saham dan direksi/komisaris
- NPWP : Masukkan NPWP wajib untuk pemegang saham dan direksi/komisaris, jika tidak memiliki NPWP bisa di isi dengan angka "0".
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *	Klasifikasi Saham *
☒ Pemegang Saham	
☐ Direksi/Komisaris	Lembar Saham *
	0

- Jika memilih Direksi/Komisaris, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *	Penanggung Jawab Pajak
☐ Pemegang Saham	☐ Ya
☒ Direksi/Komisaris	☐ Tidak
Jabatan Pengurus *	
--PILIH--	

- Jika memilih Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *	Penanggung Jawab Pajak
☒ Pemegang Saham	☐ Ya
☒ Direksi/Komisaris	☐ Tidak
Klasifikasi Saham *	Lembar Saham *
	0
Jabatan Pengurus *	
--PILIH--	

- Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir
- Tanggal Lahir : Masukkan Tanggal Lahir
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

--PILIH PROVINSI-- ▼

--PILIH PROVINSI-- ▲

ACEH
BALI
BANTEN
BENGKULU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DKI JAKARTA
GORONTALO
JAMBI
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPULAUAN RIAU
LAMPUNG ▼

- Pilih Kabupaten

--PILIH-- ▼

--PILIH--

KEPULAUAN SERIBU
JAKARTA PUSAT
JAKARTA UTARA
JAKARTA BARAT
JAKARTA SELATAN
JAKARTA TIMUR

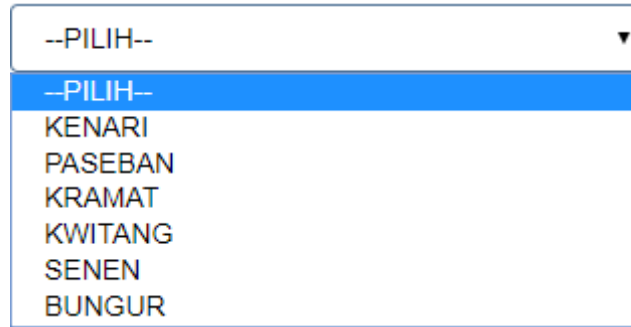
- Pilih Kecamatan

--PILIH-- ▼

--PILIH--

GAMBIR
SAWAH BESAR
KEMAYORAN
SENEN
CEMPAKA PUTIH
MENTENG
TANAH ABANG
JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa



A dropdown menu with a light gray background and a blue border. The menu is open, showing a list of options. The top option is "--PILIH--" with a small downward arrow on the right. Below it, the option "--PILIH--" is highlighted in blue. The other options are KENARI, PASEBAN, KRAMAT, KWITANG, SENEN, and BUNGUR, listed in black text.

--PILIH--
--PILIH--
KENARI
PASEBAN
KRAMAT
KWITANG
SENEN
BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

2. BADAN HUKUM

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “BADAN HUKUM”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

☐ Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

BADAN HUKUM ▼

Nama *

PT ABC Korp

NPWP *

00000000000000000000

NPWP Valid - VALID

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi ▼

Lembar Saham *

1000

1,000

Tanggal SK

Nomor SK

00000000000000000000

0000-00-00

Alamat *

Jl. Sudirman No. 123

Rt

001

Rw

001

Provinsi *

DKI JAKARTA ▼

Kabupaten *

JAKARTA SELATAN ▼

Kecamatan *

KEBAYORAN BARU ▼

Kelurahan/Desa *

GANDARIA UTARA ▼

Nomor HP *

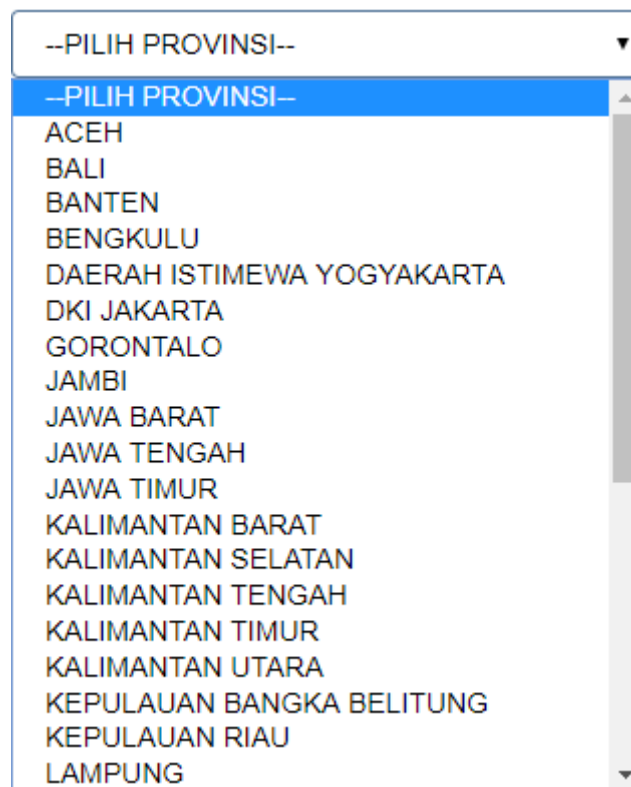
081234567890

Email *

info@abc.co.id

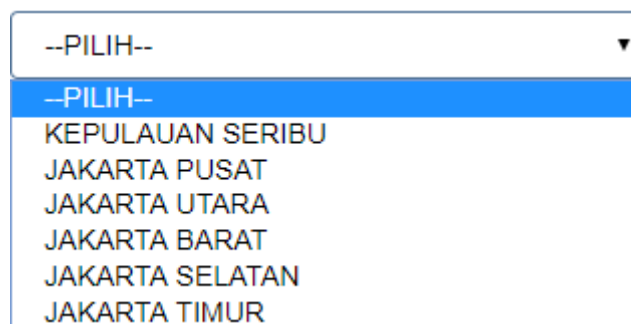
SIMPAN

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- NPWP : Masukkan NPWP wajib untuk pemegang saham dan direksi/komisaris, jika tidak memiliki NPWP bisa di isi dengan angka "0"
- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Nomor SK : Masukkan Nomor SK
- Pilih Tanggal SK
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi



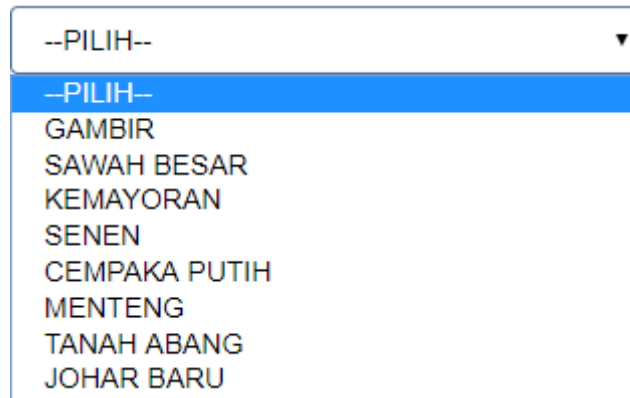
A screenshot of a web form's dropdown menu for selecting a province. The menu is open, showing a list of Indonesian provinces. The header of the dropdown is "--PILIH PROVINSI--". The list includes: ACEH, BALI, BANTEN, BENGKULU, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DKI JAKARTA, GORONTALO, JAMBI, JAWA BARAT, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TENGAH, KALIMANTAN TIMUR, KALIMANTAN UTARA, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, KEPULAUAN RIAU, and LAMPUNG. A scrollbar is visible on the right side of the list.

- Pilih Kabupaten



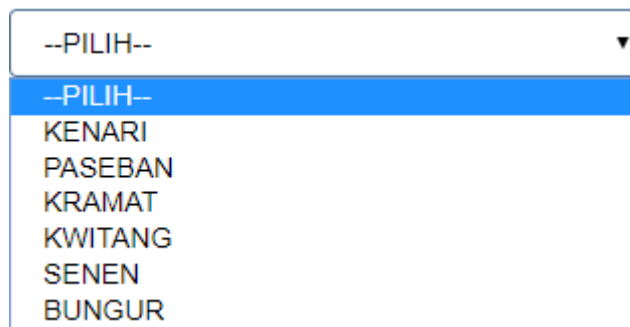
A screenshot of a web form's dropdown menu for selecting a district. The menu is open, showing a list of districts in Jakarta. The header of the dropdown is "--PILIH--". The list includes: KEPULAUAN SERIBU, JAKARTA PUSAT, JAKARTA UTARA, JAKARTA BARAT, JAKARTA SELATAN, and JAKARTA TIMUR.

- Pilih Kecamatan



A dropdown menu with a light gray background and a blue border. The top bar is white with the text "--PILIH--" and a downward arrow. The menu is open, showing a blue header bar with "--PILIH--". Below the header, the following options are listed in black text: GAMBIR, SAWAH BESAR, KEMAYORAN, SENEN, CEMPAKA PUTIH, MENTENG, TANAH ABANG, and JOHAR BARU.

- Pilih Kelurahan/desa



A dropdown menu with a light gray background and a blue border. The top bar is white with the text "--PILIH--" and a downward arrow. The menu is open, showing a blue header bar with "--PILIH--". Below the header, the following options are listed in black text: KENARI, PASEBAN, KRAMAT, KWITANG, SENEN, and BUNGUR.

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

3. MASYARAKAT

Jika memilih Jenis Pemegang Saham "MASYARAKAT", maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Jenis Pemegang Saham

MASYARAKAT ▼

Nama

☐ Di bawah umur

NIK*

NPWP

NPWP Valid - VALID

Sebagai *

☒ Pemegang Saham

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi ▼

Lembar Saham *

300

300

Tempat Lahir*

Tanggal Lahir*

Alamat *

Rt

Rw

Provinsi*

DKI JAKARTA ▼

Kabupaten*

JAKARTA PUSAT ▼

Kecamatan*

MENTENG ▼

Kelurahan/Desa*

MENTENG ▼

Nomor HP

Email

SIMPAN

- Nama : (*Disable*)
- NIK : (*Disable*)
- NPWP : (*Disable*)
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *☒ Pemegang Saham☐ Direksi/Komisaris**Klasifikasi Saham *****Lembar Saham ***

- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Tempat Lahir : Masukkan Tempat Lahir
- Tanggal Lahir : Masukkan Tanggal Lahir
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

--PILIH PROVINSI--

--PILIH PROVINSI--
ACEH
BALI
BANTEN
BENGKULU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DKI JAKARTA
GORONTALO
JAMBI
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPULAUAN RIAU
LAMPUNG

- Pilih Kabupaten

--PILIH-- ▼

--PILIH--

KEPULAUAN SERIBU
JAKARTA PUSAT
JAKARTA UTARA
JAKARTA BARAT
JAKARTA SELATAN
JAKARTA TIMUR

- Pilih Kecamatan

--PILIH-- ▼

--PILIH--

GAMBIR
SAWAH BESAR
KEMAYORAN
SENEN
CEMPAKA PUTIH
MENTENG
TANAH ABANG
JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa

--PILIH-- ▼

--PILIH--

KENARI
PASEBAN
KRAMAT
KWITANG
SENEN
BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

4. NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “NEGARA REPUBLIK INDONESIA”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Jenis Pemegang Saham

NEGARA REPUBLIK INDONESIA ▼

Nama

☐ Di bawah umur

NIK*

NPWP

NPWP Valid - VALID

Sebagai *

☒ Pemegang Saham

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi ▼

Lembar Saham *

500

500

Tempat Lahir*

Tanggal Lahir*

Alamat *

Rt

Rw

Provinsi*

DKI JAKARTA ▼

Kabupaten*

JAKARTA SELATAN ▼

Kecamatan*

KEBAYORAN BARU ▼

Kelurahan/Desa*

GANDARIA UTARA ▼

Nomor HP

Email

SIMPAN

- Nama : (*Disable*)
- NIK : (*Disable*)
- NPWP : (*Disable*)
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *

☒ Pemegang Saham

Klasifikasi Saham *

- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Tempat Lahir : (*Disable*)
- Tanggal Lahir : (*Disable*)
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

--PILIH PROVINSI--

--PILIH PROVINSI--

ACEH

BALI

BANTEN

BENGKULU

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DKI JAKARTA

GORONTALO

JAMBI

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

JAWA TIMUR

KALIMANTAN BARAT

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN UTARA

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPULAUAN RIAU

LAMPUNG

- Pilih Kabupaten

--PILIH-- ▼

--PILIH--

KEPULAUAN SERIBU
JAKARTA PUSAT
JAKARTA UTARA
JAKARTA BARAT
JAKARTA SELATAN
JAKARTA TIMUR

- Pilih Kecamatan

--PILIH-- ▼

--PILIH--

GAMBIR
SAWAH BESAR
KEMAYORAN
SEKEN
CEMPAKA PUTIH
MENTENG
TANAH ABANG
JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa

--PILIH-- ▼

--PILIH--

KENARI
PASEBAN
KRAMAT
KWITANG
SEKEN
BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

5. PEMERINTAH

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “PEMERINTAH”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

Jenis Pemegang Saham

PEMERINTAH

Nama

PEMERINTAH

☐ Di bawah umur

NIK*

NPWP

NPWP Valid - VALID

Sebagai *

☒ Pemegang Saham

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi

Lembar Saham *

1000

1,000

Tempat Lahir*

Tanggal Lahir*

Alamat *

Rt

Rw

Provinsi*

DAERAH ISTIMEWA YOGYAK

Kabupaten*

KABUPATEN KULON PROGO

Kecamatan*

WATES

Kelurahan/Desa*

TRIHARJO

Nomor HP

Email

SIMPAN

- Nama : (otomatis terisi “PEMERINTAH”)
- NPWP : (*Disable*)
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai *

☒ Pemegang Saham

Klasifikasi Saham *

- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Tempat Lahir : (*Disable*)
- Tanggal Lahir : (*Disable*)
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

--PILIH PROVINSI--

--PILIH PROVINSI--

ACEH
BALI
BANTEN
BENGKULU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DKI JAKARTA
GORONTALO
JAMBI
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPULAUAN RIAU
LAMPUNG

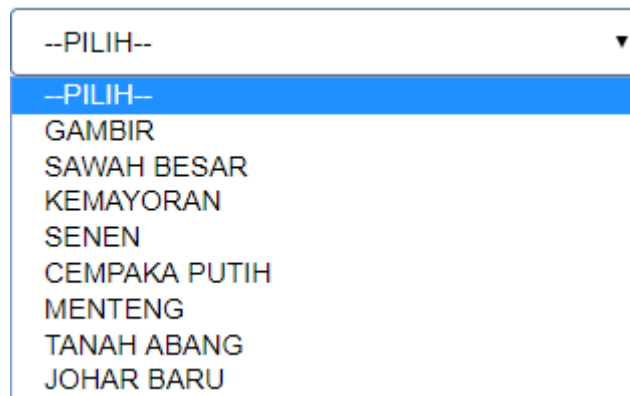
- Pilih Kabupaten

--PILIH--

--PILIH--

KEPULAUAN SERIBU
JAKARTA PUSAT
JAKARTA UTARA
JAKARTA BARAT
JAKARTA SELATAN
JAKARTA TIMUR

- Pilih Kecamatan



--PILIH--

--PILIH--

GAMBIR

SAWAH BESAR

KEMAYORAN

SENEN

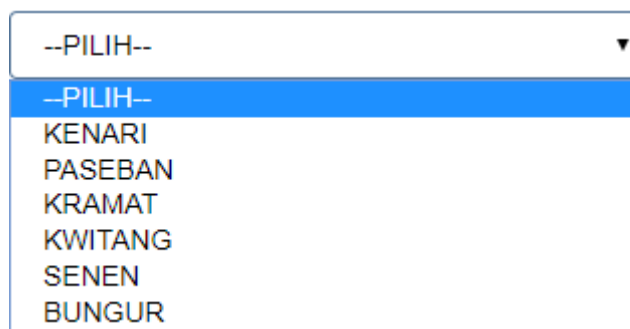
CEMPAKA PUTIH

MENTENG

TANAH ABANG

JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa



--PILIH--

--PILIH--

KENARI

PASEBAN

KRAMAT

KWITANG

SENEN

BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

Setelah semua data pengurus dan pemegang saham WNI terisi, Klik tombol  untuk menyimpan data pemegang saham, komisaris dan direksi WNI.

2). Warga Negara Asing

- Jika Pemegang Saham merupakan Warga Negara Asing, Ceklis Warga Negara Asing. Kemudian isikan form Pemegang Saham dibawah ini.

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

☒ Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham
PERORANGAN

Nama *

☐ Di bawah umur

Passport* KITAS

Negara Asal*

Sebagai *

☒ Pemegang Saham

☒ Direksi/Komisaris

Klasifikasi Saham *

Lembar Saham *

Jabatan Pengurus *
--PILIH--

Alamat *

Nomor HP* Email*

SIMPAN

Pada form tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

- Pilih Jenis Pemegang saham yang terdiri dari :

PERORANGAN

PERORANGAN

BADAN HUKUM

1. PERORANGAN

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “PERORANGAN”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

☒ Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

PERORANGAN ▼

Nama *

☐ Di bawah umur

Passport*

KITAS

Negara Asal*

Sebagai *

☒ Pemegang Saham☒ Direksi/Komisaris

Penanggung Jawab Pajak

☐ Ya☐ Tidak

Klasifikasi Saham *

Tanpa Klasifikasi ▼

Lembar Saham *

500

500

Jabatan Pengurus *

KOMISARIS ▼

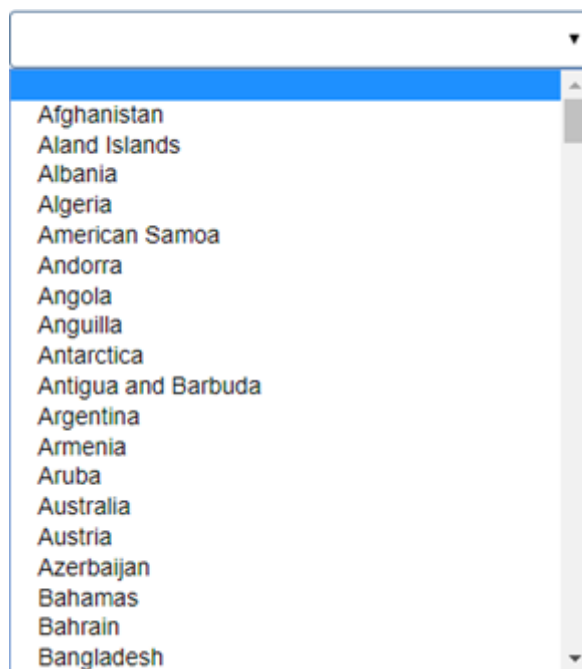
Alamat *

Nomor HP*

Email*

SIMPAN

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- Pasport : Masukkan Pasport
- KITAS : Masukkan KITAS
- Pilih Negara Asal



A dropdown menu with a list of countries. The list is scrollable and includes the following countries: Afghanistan, Aland Islands, Albania, Algeria, American Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antarctica, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, and Bangladesh. The menu is currently open, showing the list.

- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul field berikut



Form fields for 'Sebagai' and 'Klasifikasi Saham'. The 'Sebagai' field has two radio buttons: 'Pemegang Saham' (checked) and 'Direksi/Komisaris'. The 'Klasifikasi Saham' field is a dropdown menu. Below it is a 'Lembar Saham' field with the value '0'.

- Jika memilih Direksi/Komisaris, maka akan muncul field berikut



Form fields for 'Sebagai' and 'Jabatan Pengurus'. The 'Sebagai' field has two radio buttons: 'Pemegang Saham' (unchecked) and 'Direksi/Komisaris' (checked). Below it is a 'Jabatan Pengurus' field with a dropdown menu showing '--PILIH--'.

- Jika memilih Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris, maka akan muncul field berikut

Sebagai *	Klasifikasi Saham *
☒ Pemegang Saham	
☒ Direksi/Komisaris	Lembar Saham *
	0
Jabatan Pengurus *	
--PILIH--	

- Alamat : Masukkan alamat
- Nomor HP : Masukkan Nomor HP
- *Email* : Masukkan *email*

2. BADAN HUKUM

Jika memilih Jenis Pemegang Saham "BADAN HUKUM", maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

☒ Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

BADAN HUKUM ▼

Nama *

PT. CENDANA BUNDA CENDANA

Negara Asal*

American Samoa ▼

Klasifikasi Saham *



Lembar Saham *

2

2

Nomor SK

0000000000

Tanggal SK

2024-05-14

Alamat *

PT. CENDANA BUNDA CENDANA

Nomor HP*

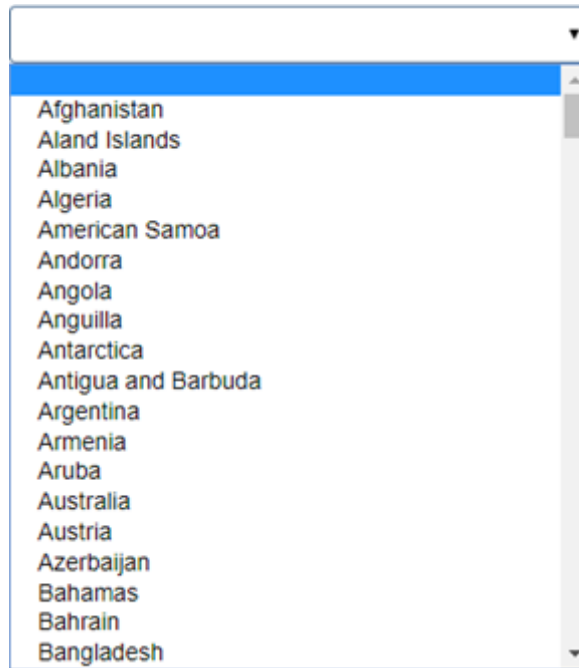
08123456789

Email*

info@cendana.com

SIMPAN

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- Pilih Negara Asal



A screenshot of a web form showing a dropdown menu for selecting a country. The menu is open, displaying a list of countries from Afghanistan to Bangladesh. The first item, Afghanistan, is highlighted in blue.

Country
Afghanistan
Aland Islands
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh

- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Nomor SK : Masukkan Nomor SK
- Pilih Tanggal SK
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

Setelah semua data pengurus dan pemegang saham WNA terisi, Klik tombol  untuk menyimpan pemegang saham, komisaris dan direksi WNA.

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

☒ Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

PERORANGAN ▼

Nama *

☐ Di bawah umur

Passport*



KITAS



Negara Asal*

Canada ▼

Sebagai *

☒ Pemegang Saham☒ Direksi/Komisaris

Penanggung Jawab Pajak

☒ Ya☐ Tidak

Klasifikasi Saham *

▼

Lembar Saham *

2

2

Jabatan Pengurus *

DIREKTUR ▼

Alamat *



Nomor HP*



Email*

**SIMPAN** 

i. Pemilik Manfaat

- Setelah melakukan penginputan Pengurus dan Pemegang Saham, maka selanjutnya dilakukan pemahaman terhadap Pemilik Manfaat pada Form dibawah ini.

Pemilik Manfaat

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☐ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.

- Ceklis pada kolom centang yang ada. Maka akan muncul tampilan seperti berikut.

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.



Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.

**SALINAN**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DOWNLOAD

☐ Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

☐ Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

☐ Notaris menyimpan Surat Pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat (sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018)

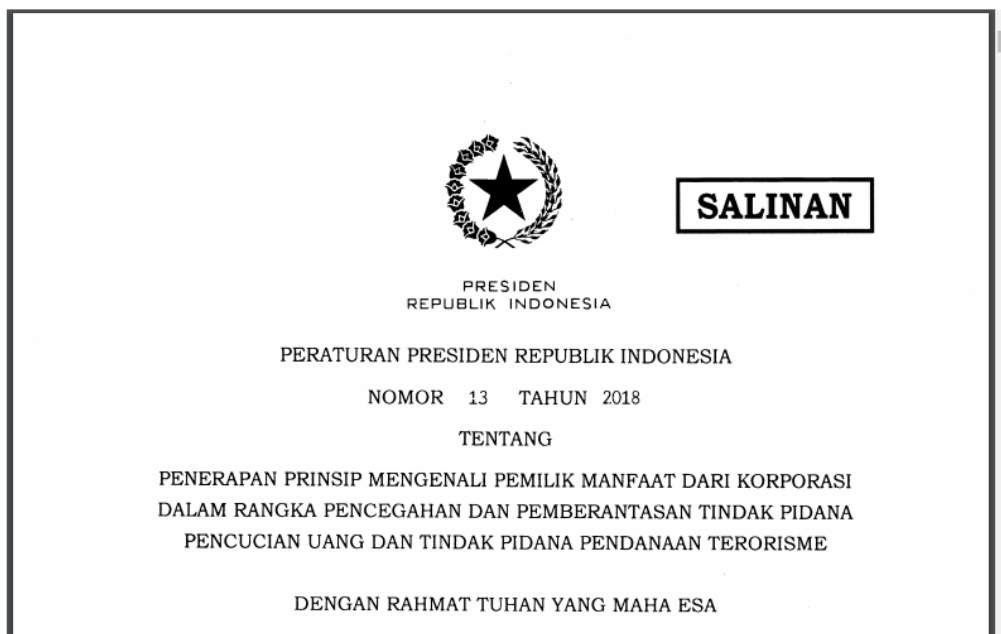
- Ceklis 2 kolom centang untuk menyetujui Peraturan Presiden yang berlaku. Kemudian akan muncul tampilan untuk menambahkan pemilik manfaat seperti berikut.

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☒ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



DOWNLOAD

☒ Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

☒ Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

☐ Notaris menyimpan Surat Pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat (sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018)

Tambah Data

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
------	-----------------	------------------------	-----------------	--------	------	----------	------

Tambah Data

Untuk memilih Pemilik Manfaat, pengguna dapat Klik tombol **Tambah Data**. Maka akan muncul Form Tambah Pemilik Manfaat seperti berikut.

Tambah Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- ☐ a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☐ b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☐ c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- ☐ d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- ☐ e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- ☐ f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- ☐ g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

KEMBALI **OK**

- Pengguna dapat memilih beberapa manfaat untuk Pemilik Saham. Jika semua field sudah terisi, Klik tombol  untuk melanjutkan proses pengisian pendirian Perseroan.

Tambah Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- ☒ a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☐ b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☐ c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- ☐ d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- ☐ e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- ☒ f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- ☐ g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

KEMBALI**OK** 

- Kemudian isikan data pemilik manfaat pada form dibawah ini. Setelah semua field terisi, Klik tombol

SIMPAN

Tambah Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- ☒ a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☐ b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☐ c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- ☐ d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- ☐ e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- ☒ f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- ☐ g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

KEMBALI

OK

Data Pemilik Manfaat Perorangan :

Nama Lengkap *

Jenis Identitas *

☒ NIK ☐ SIM ☐ Paspor

NIK / SIM / Paspor *

Tempat Lahir *

Tanggal Lahir *

Alamat sesuai kartu identitas *

Kewarganegaraan *

☒ WNI ☐ WNA

NPWP *

Hubungan Antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat *

☒ Notaris wajib memiliki berkas dokumen data dari pemilik manfaat tersebut.

SIMPAN

- Ceklis kolom disclaimer biru jika data pemilik manfaat belum ditetapkan/tidak perlu melakukan pengisian pemilik manfaat maka tombol **Tambah Data** akan terdisable seperti berikut.

Pemilik Manfaat

** Wajib Diisi*

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☒ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DOWNLOAD

☒ Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

☒ Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

☒ Notaris menyimpan Surat Pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat (sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018)

Tambah Data

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
------	-----------------	------------------------	-----------------	--------	------	----------	------

j. Notaris Pengganti

Jika pemohon merupakan notaris pengganti, maka ceklis kolom Notaris pengganti pada *form* pendirian

Notaris Pengganti

☐ Apakah Anda Notaris Pengganti? 1

Kemudian tampil Halaman Daftar Notaris Pengganti seperti dibawah ini

≡ DITJEN AHU ONLINE Pesan SABH

Beranda

Daftar Permohonan

Wasiat +

Perseroan Terbatas +

Yayasan +

Perkumpulan + 1

Notaris Pengganti

Login SABH

Daftar Notaris Pengganti

Tambah Pengganti 4
2
3

No.	Nama Lengkap	Nomor SK	Tanggal SK	Mulai Aktif	Selesai Aktif	Aktif	Aksi
1	ARYO DARMO KUSUMA	4567/89/DC/90974R	01 April 2014	01 April 2014	30 Juni 2014	Aktifkan	Perbaharui
2	aryo dk	085467888	01 April 2014	01 April 2014	02 Juni 2014	Pengganti Aktif	Perbaharui
3	DARYOO	AHU-4566 AH.01.01.2014	23 April 2014	23 April 2014	30 September 2014	Aktifkan	Perbaharui
4	Ello	8089234083209	01 April 2014	08 April 2014	30 April 2014		Perbaharui

- Masuk ke halaman menu Notaris Pengganti disebelah kiri.
- Menampilkan status notaris pengganti.
- Menampilkan aksi perbaharui untuk mengupdate status notaris pengganti.
- Klik tombol Tambah Pengganti akan tampil form pengisian data notaris pengganti seperti dibawah ini :

≡ DITJEN AHU ONLINE Pesan SABH

Beranda

Daftar Permohonan

Wasiat +

Perseroan Terbatas +

Yayasan +

Perkumpulan +

Notaris Pengganti

Login SABH

PENGISIAN DATA NOTARIS PENGGANTI

Nama Lengkap *

1

Nomor SK *

2

Tanggal SK *

3

Masa Aktif Notaris Pengganti4

Aktif

☐
5

TAMBAH
6
KEMBALI
7

- Masukkan nama lengkap notaris.
- Masukkan Nomor SK Notarisnya.
- Masukkan Tanggal SK.
- Masukkan tanggal mulai aktif.
- Masukkan tanggal selesai aktif.
- Ceklis ketika notaris tersebut ingin diaktifkan sebagai notaris pengganti.

7. Klik tombol **TAMBAH** untuk menambah notaris pengganti.
8. Klik tombol **Kembali** untuk kembali ke menu awal.

k. Surat Keterangan/Pernyataan Dokumen yang harus dimiliki

- Ceklis semua kolom centang yang tersedia pada tampilan berikut. Kemudian klik tombol **LANJUTKAN** jika data pendirian sudah lengkap.

Surat Keterangan/Pernyataan Dokumen yang harus dimiliki

☐ Akta pendirian Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.

☐ Asli setor modal atau bukti lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kembali
LANJUTKAN

- Setelah itu halaman akan menampilkan *popup disclaimer* seperti berikut.

Perhatian!!!

Saya, notaris NOTARIS SABH2 S.H., S.E. yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

- ☐ 1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya
- ☐ 2. Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dg ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- ☐ 3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- ☐ 4. Dengan memperhatikan hal tersebut diatas berarti saya siap bertanggungjawab penuh.

Dengan Mengklik tombol setuju, saya telah memahami dan siap bertanggung jawab.

Tidak Setuju
Setuju

- Ceklis semua kolom centang dan klik tombol **Setuju**. Kemudian tampil halaman Pratinjau Pengisian Data Perseroan

PRA TINJAU PENGISIAN DATA PERSEROAN

JENIS PERSEROAN : **SWASTA NASIONAL**

DATA PERSEROAN

NAMA PERSEROAN : [REDACTED]
 NAMA SINGKATAN : [REDACTED]
 NPWP PERSEROAN : [REDACTED]
 JANGKA WAKTU : [REDACTED]
 KEDUDUKAN : [REDACTED]
 KECAMATAN : [REDACTED]
 ALAMAT : [REDACTED]
 RT : **005** RW : **003**
 KODE POST : **40291** NOMOR TELEPON : [REDACTED]

MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD DAN TUJUAN : INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KEGIATAN : AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI
 AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI
 AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER
 AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA

AKTA NOTARIS

NO. AKTA : [REDACTED] TANGGAL AKTA : 30-08-2018

Modal Dasar

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Saham (Lembar)	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp 500,000	5	Rp 2,500,000

Modal Ditempatkan

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Saham (Lembar)	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp 500,000	2	Rp 1,000,000

MODAL DISETOR : **RP. 1,000,000.00**
 LAINNYA :

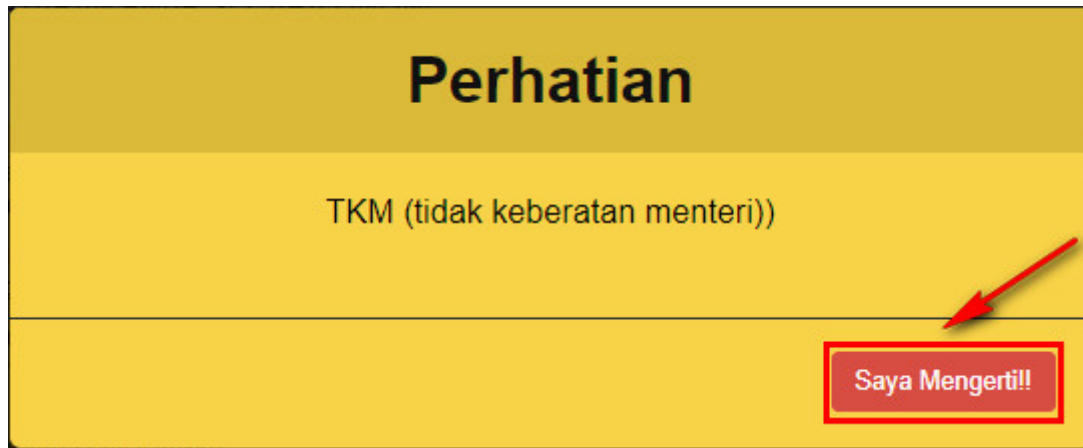
Pengurus dan Pemegang Saham

Penanggung Jawab	Nama	Modal Ditempatkan	Lembar Saham	Jabatan	Total
YA	[REDACTED]	TANPA KLASIFIKASI	1	KOMISARIS	RP 500.000,00
TIDAK	[REDACTED]	TANPA KLASIFIKASI	1	DIREKTUR UTAMA	RP 500.000,00

Kembali
Lanjutkan

* Fungsi halaman pratinjau adalah untuk dilihat kembali adanya data yang tidak sesuai dengan akta pada saat penginputan atau data yang salah saat melakukan penginputan sebelum tersimpan.

- Jika data Pendirian sudah sesuai, klik tombol Lanjutkan. Setelah itu muncul popup tidak keberatan menteri seperti gambar dibawah ini, kemudian klik tombol Saya Mengerti!!.



I. Upload Akta

- Selanjutnya aplikasi akan memuat halaman Daftar Transaksi Perseroan.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30 hari kalender** **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**.

Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun 2019 ▼

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Pendirian	PMA		SUDAH BAYAR		Pratinjau & Cetak SK/SP Waktu Upload : 30 hari Tanggal Jatuh Tempo : 14-08-2019 Sisa Pratinjau : 7 hari Tanggal Habis Pratinjau : 21-08-2019 Tagihan PNRI Permohonan Status Penerbitan NPWP : Menunggu Cetak SK

Pada halaman Daftar Transaksi Perseroan, terdapat beberapa fungsi diantaranya :

1. Tombol **Pratinjau & Cetak SK/SP** untuk melihat data pendirian. **PRATINJAU AKAN BERLAKU SELAMA 7 HARI**

2. Tombol **Tagihan PNRI** untuk mengunduh bukti pembayaran. * **Bukti Tagihan PNRI ini sebagai bukti pembayaran BNRI langsung ke pada pihak BNI, cukup hanya dengan menunjukkan bukti tagihan PNRI.**

SURAT PERINTAH BAYAR BN/TBN TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN	
No. Transaksi	:
Virtual Account TBNRI & BNRI	:
Nama NOTARIS	:
Nama PERSEROAN	:
Nama Singkatan	:
Propinsi Wilayah Pendaftaran	:
Kabupaten/Kota Pendaftaran	:
Jenis Permohonan	:
Biaya BNRI	:
Biaya TBNRI	:
Total	:

Link Tagihan PNRI merupakan link untuk melakukan download Perintah Bayar BN/TBN RI ke PNRI. Link tersebut tetap akan tampil walaupun pembayaran telah dilakukan karena belum tersedianya Sistem Elektronik di PNRI sehingga antara Sistem AHU dan PNRI belum terhubung.

3. Tombol **Permohonan** untuk mengunduh Bukti Permohonan Pendirian Perseroan Terbatas.

BUKTI PENDIRIAN PERSEROAN	
No. Pesan	:
Nama NOTARIS	:
Nama PERSEROAN	:
Nama Singkatan	:
Propinsi Wilayah Pendaftaran	:
Kabupaten/Kota Pendaftaran	:
Tanggal Pesan	:
Tanggal Kadaluarsa	:
Nomor Voucher	:

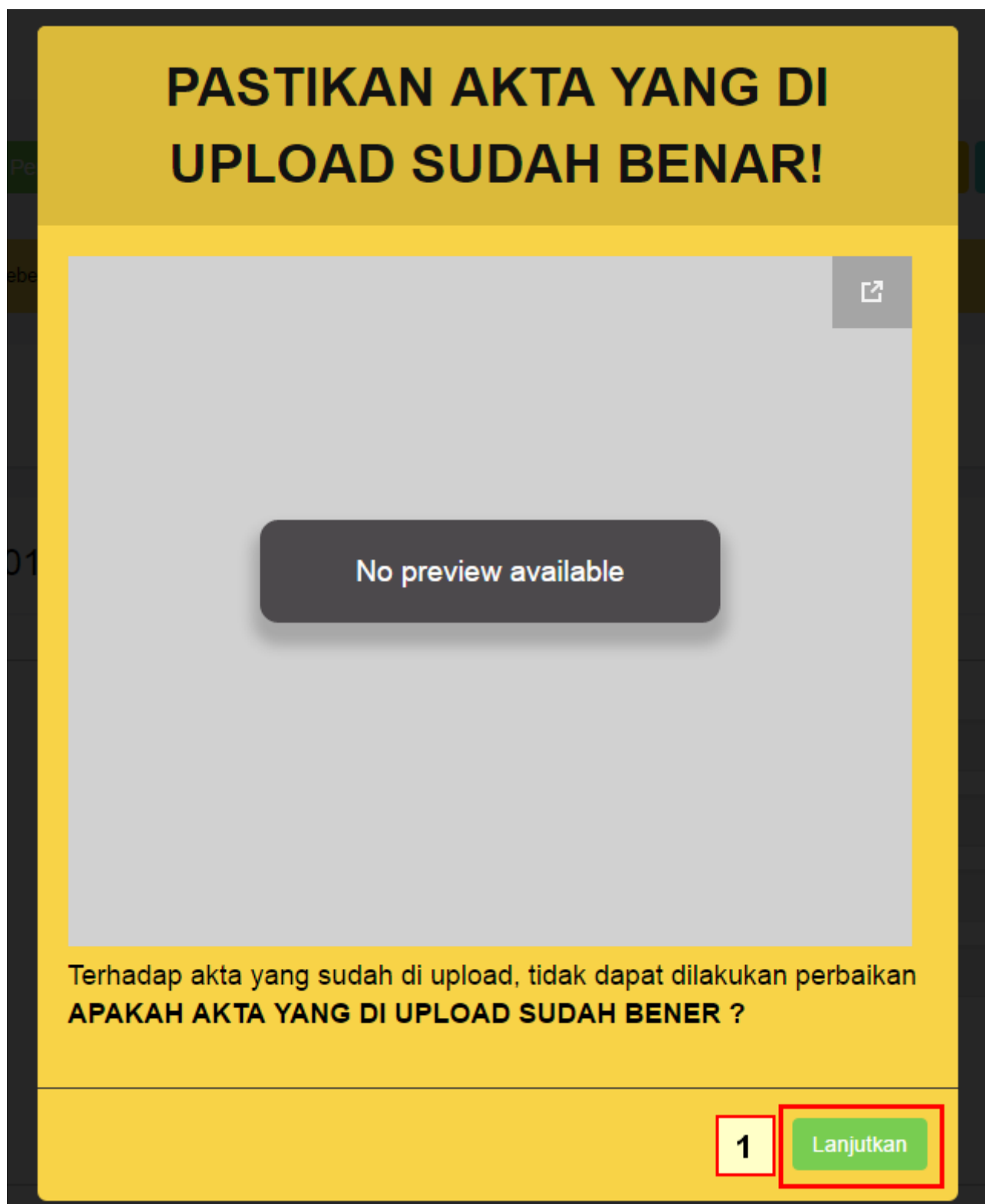
Untuk mengakses form Pratinjau, klik

Pratinjau & Cetak SK/SP

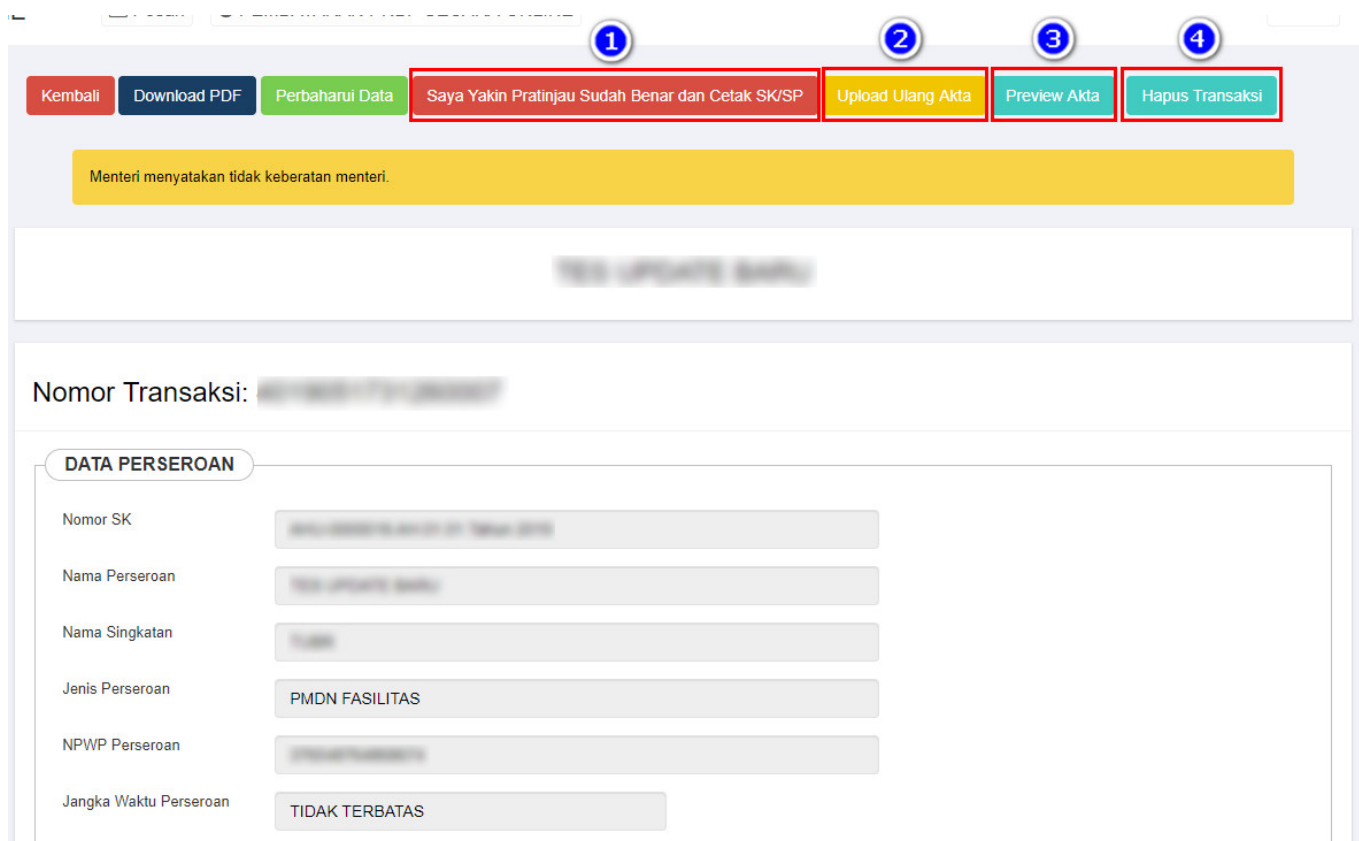
, maka akan tampil halaman pratinjau data perseroan.

1. Klik tombol **Perbaharui Data** jika masih ada perubahan data/Edit data
2. Jika sudah tidak ada perubahan data/Edit Klik tombol **Upload Akta** maka akan masuk ke halaman upload akta.

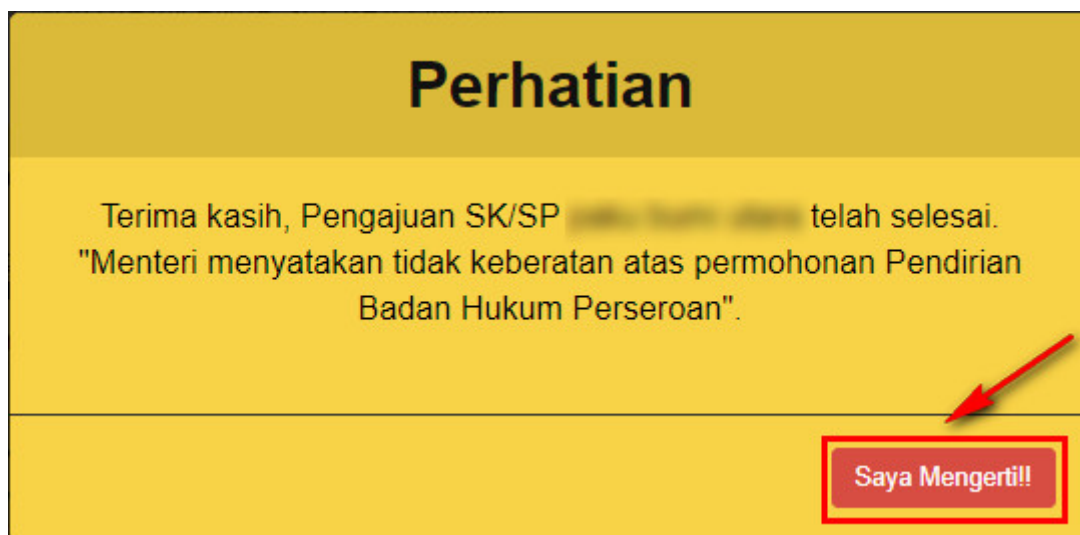
1. Ceklis semua pernyataan diatas.
2. Klik tombol **Choose Files** lalu cari file akta yang akan di upload.
3. Klik tombol **Upload**, maka akan tampil pop up preview seperti gambar dibawah ini.



- Klik tombol **Lanjutkan** setelah itu akan tampil halaman dibawah ini:



1. Tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP** untuk mengakhiri transaksi.
 2. Tombol **Upload Ulang Akta** untuk mengulangi proses upload akta jika terjadi kesalahan upload file.
 3. Tombol **Preview Akta** untuk menampilkan file akta yang telah di upload.
 4. Tombol **Hapus Transaksi** untuk menghapus transaksi.
- Setelah klik tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP**, maka akan muncul popup seperti berikut.



- Klik tombol **Saya Mengerti!!**, lalu tampil halaman daftar transaksi perseroan.

m. Download SK Pengesahan Pendirian

- Klik **SK Pengesahan** untuk mendownload SK Pengesahan Pendirian.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :
 Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
 Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30 hari kalender** **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**.
 Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNBPN tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun 2019

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Pendirian	PMA		SUDAH BAYAR		Tagihan PNRI SK Pengesahan Upload Bukti Setor Waktu Upload Bukti Setor : 60 hari Upload Akta Waktu Perbaikan : 89 hari Status Penerbitan NPWP : Input By Sistem Nomor :

- Kemudian tampil SK Pengesahan Pendirian seperti gambar dibawah ini.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [REDAKSI]
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
[REDAKSI]

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris [REDAKSI], sesuai salinan Akta Nomor [REDAKSI] Tanggal [REDAKSI] yang dibuat oleh [REDAKSI] tentang Pendirian Badan Hukum [REDAKSI] disingkat [REDAKSI] tanggal [REDAKSI] dengan Nomor Pendaftaran [REDAKSI] telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum [REDAKSI] disingkat [REDAKSI].

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - [REDAKSI] disingkat [REDAKSI] - yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor [REDAKSI] Tanggal [REDAKSI] yang dibuat oleh [REDAKSI], yang berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan PMA.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal [REDAKSI].

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL [REDAKSI]
DAFTAR PERSEROAN NOMOR [REDAKSI] TANGGAL [REDAKSI]





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [REDAKSI]
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
[REDAKSI]**

1. Modal Dasar : Rp. 4.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 4.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
[REDAKSI]	DIREKTUR	-	1.000	Rp. 1.000.000
[REDAKSI]	BADAN HUKUM	-	1.000	Rp. 1.000.000
MASYARAKAT	-	-	300	Rp. 300.000
PEMERINTAH	-	-	700	Rp. 700.000
[REDAKSI]	KOMISARIS	-	500	Rp. 500.000
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	-	-	500	Rp. 500.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal [REDAKSI].



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL [REDAKSI]
DAFTAR PERSEROAN NOMOR [REDAKSI] TANGGAL [REDAKSI]

n. Upload Bukti Setor

- Klik [Upload Bukti Setor](#) untuk mengupload bukti setor.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30 hari kalender dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**.
Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun 2019

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Pendirian	PMA		SUDAH BAYAR		Tagihan PNRI SK Pengesahan Upload Bukti Setor Waktu Upload Bukti Setor : 60 hari Upload Akta Waktu Perbaikan : 89 hari Status Penerbitan NPWP : Input By Sistem Nomor :

Keterangan :

- Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar.
 - Jika Notaris belum melakukan Upload Bukti Setor, maka perseroan yang telah didirikan tidak bisa mengakses transaksi Perubahan.
- Kemudian tampil halaman upload bukti setor seperti gambar dibawah ini.

Upload Bukti Penyetoran Modal

1. ☒ Bukti Penyetoran yang sah wajib disampaikan dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal Akta. Sesuai Ketentuan pasal 2 Ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

☒ Bukti Penyetoran yang Sah adalah Bukti Setor Modal Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Ayat(4) huruf C Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata cara pengajuan permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan terbatas.

☒ Notaris wajib meneliti isi dari Bukti Setor Modal. Kesalahan terhadap upload penyetoran modal sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris.

Pada Upload Bukti Penyetoran Modal (sesuai dengan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 4 C) dibuat pilihan berseri :

2. ☒ Fotokopi slip setoran

☐ Fotokopi surat keterangan bank atas nama perseroan

☐ Rekening bersama atas nama para pendiri

☐ Neraca Laba Rugi

☐ Asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang.

3. **Upload Bukti Penyetoran**

pdf

pdf

Bukti Penyetoran Modal yang diupload berbentuk file pdf dengan kapasitas maksimal 10 MB

4

1. Ceklis semua syarat dan ketentuan
2. Pilih jenis bukti penyetoran modal yang ingin diupload
3. Klik **Choose File** untuk memilih file bukti setor
4. Klik **Upload** untuk mengupload bukti setor

o. Download Bukti Setor

- Klik **Download Bukti Setor** pada halaman daftar transaksi perseroan.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :

Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560

Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30 hari kalender dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**. Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun 2019 ▾

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Pendirian	PMA		SUDAH BAYAR		Tagihan PNRI SK Pengesahan Download Bukti Setor Upload Akta Waktu Perbaikan : 89 hari Status Penerbitan NPWP : Input By Sistem Nomor :

5. Perubahan

Menu Perubahan digunakan oleh Notaris untuk melakukan input data perubahan suatu PT (Perseroan Terbatas).

- Untuk mengakses menu ini klik menu **Perseroan Terbatas → Perubahan** seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

≡ DITJEN AHU ONLINE Pesan ² PEMBAYARAN PNPB SECARA ONLINE

Informasi Formasi

Beranda Notaris

Fidusia

Wasiat

Notaris Pengganti

Perseroan Terbatas

Pesan Nama dan Pendirian

Pendirian

Pendirian Pending

Perubahan

Perubahan Pending

Merger

Penyesuaian UU 2007

Riwayat Permohonan

Edit Profil

Surat Keterangan

Surat Keputusan

Permohonan Cuti

Permohonan Perubahan Data Notaris

Pemberhentian Notaris

Permohonan Pindah Wilayah

Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan

Nama :

Email :

Username :

Status : notaris

Profil Notaris

Informasi KTA

Nomor KTA :

No Rekening :

- Kemudian tampil halaman **Permohonan Perubahan Perseroan** dibawah ini.

Informasi PNB:
Kami memohon maaf. Terjadi kesalahan penginputan penagihan PNB.
Sistem sudah diperbaiki, bagi Notaris yang telah mencetak Tagihan, harap mencetak ulang.

Perincian PNB:
1. Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Persetujuan Menteri
- Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan Rp. 1.000.000,-
- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
2. Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Pemberitahuan
- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
3. Perubahan data Perseroan gratis tidak dipungut biaya

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
 ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
 ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
 ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NAMA PERSEROAN *

NOMOR SK TERAKHIR *
Nomor SK merupakan Nomor Surat Keputusan Menteri. Bukan Nomor Surat Pemberitahuan.

NOTARIS TERAKHIR *
Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Pada halaman Permohonan Perubahan Perseroan terdapat fitur untuk memesan nomor *voucher* perubahan perseroan sekaligus dengan beberapa ketentuan, diantaranya :

- Jika ingin memesan **nomor voucher point 1 sampai 3**, maka akan muncul *field* nomor voucher sesuai yang dipilih dan **otomatis point 4 disable** atau **tidak bisa dipilih** seperti gambar dibawah ini.

☒ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN ☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN ☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN	MASUKKAN NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN D/ ❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik disini untuk pembelian voucher.
NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN	MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN ❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik disini untuk pembelian voucher.
NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN	MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSE ❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, klik disini untuk pembelian voucher.

- Jika ingin memesan **nomor voucher point 1 dan 4**, maka akan muncul *field* nomor voucher sesuai yang dipilih dan **otomatis point 2 dan 3 disable atau tidak bisa dipilih** seperti gambar dibawah ini.

☒ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN ☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN	MASUKKAN NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN D/ ❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik disini untuk pembelian voucher.
NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN	MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN ❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggara Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik disini untuk pembelian voucher.

Untuk melakukan pemesanan Nomor Voucher Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan dengan cara :

1. ceklis **Nomor Voucher Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**
2. lalu tampil kolom pengisian Nomor Voucher

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN	
☒ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN	MASUKKAN NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGAR ❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik disini untuk pembelian voucher.
NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN	

3. klik **disini**
4. kemudian tampil *form* **Pemesanan Nomor Voucher Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas**

Cek Nomor Voucher

Daftar Voucher

Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM *

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

NAMA PEMOHON *

PT. ABC KAWAN BUKU BUKU BUKU

EMAIL PEMOHON *

abc@anggaran@gmail.com

NOMOR HP *

08123456789

Pembelian voucher sebesar **Rp 1.000.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNBP yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

☒ Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI

- Ceklis *disclaimer* dan klik tombol

BELI

, lalu tampil form **Bukti Pemesanan Nomor Voucher**

Cek Pemesanan Voucher

List Voucher



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
BADAN HUKUM
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

KODE VOUCHER	:	12345678901234567890
BILL ID ^[1]	:	12345678901234567890
NAMA PEMOHON	:	PT. ABC KAWAN BUKU BUKU BUKU
NOMOR REKENING	:	08123456789
EMAIL PEMOHON	:	abc@anggaran@gmail.com
NOMOR HP	:	08123456789
TANGGAL TRANSAKSI	:	17 Mei 2024 15:45:00
TANGGAL EXPIRED	:	31 Mei 2024 23:59:59
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	
TAGIHAN	:	Rp 1.000.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Download

- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor voucher pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada point **Pembayaran Nomor Voucher**

- Jika tagihan sudah terbayar, klik tombol **List Voucher**, maka akan tampil halaman **Daftar Voucher**

Daftar Voucher

Riwayat Transaksi

Tanggal Transaksi: Dari Sampai Kode Voucher/Bill ID: Pelayanan Jasa Hukum: Status:

*** Keterangan :**

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 960 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1			Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas		Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi

- Klik [Lanjutkan Transaksi](#) untuk menampilkan halaman **Pemohonan Perubahan Perseroan** dengan nomor voucher yang sudah dipesan

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

☒ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

820

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

Untuk melakukan pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan dengan cara :

- ceklis **Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**
- lalu tampil kolom pengisian Nomor Voucher

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGG/

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

- klik [disini](#)

4. kemudian tampil *form* **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

Cek Nomor Voucher

Daftar Voucher

Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM *

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

--PILIH--

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

BELI

Pada halaman **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan** terdapat pilihan Modal Dasar, yaitu :

--PILIH--

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

- Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

- Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

- Kemudian pilih **Modal Dasar** untuk Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM *

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

Pembelian voucher sebesar **Rp 150.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNPB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

☒ Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI

- Ceklis *disclaimer* dan klik tombol 
- Maka tampil *form* **Bukti Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas**

http://panduan.ahu.go.id/

Printed on 2024/05/01 19:44

[Cek Pemesanan Voucher](#) [List Voucher](#)



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
**Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas**
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua
Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	:	-
BILL ID ^[1]	:	XXXXXXXXXXXX
NAMA PEMOHON	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOMOR REKENING	:	XXXXXXXXXXXX
EMAIL PEMOHON	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOMOR HP	:	XXXXXXXXXXXX
TANGGAL TRANSAKSI	:	18 Agustus 2019 10:00:00
TANGGAL EXPIRED	:	21 Agustus 2019 23:59:59
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	
TAGIHAN	:	Rp 150.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

[Download](#) [Kirim Ulang](#)

- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor voucher pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada point **Pembayaran Nomor Voucher**.

- Jika tagihan sudah terbayar, klik tombol [List Voucher](#), maka akan tampil halaman **Daftar Voucher**

Daftar Voucher

Riwayat Transaksi

Tanggal Transaksi
 Dari Sampai

Kode Voucher/Bill ID

Pelayanan Jasa Hukum

Status

*** Keterangan :**

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 1121 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1			Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas		Rp. 150.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi

- Klik [Lanjutkan Transaksi](#) untuk menampilkan halaman **Permohonan Perubahan Perseroan** dengan nomor voucher yang sudah dipesan

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

NOMOR VOUCHER
 PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
 ANGGARAN DASAR PERSEROAN

820

ⓘ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

Untuk melakukan pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dapat dilakukan dengan cara :

- ceklis **Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan**
- lalu tampil kolom pengisian Nomor Voucher

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

NOMOR VOUCHER
 PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
 DATA PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☒ **NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN**
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA F

ⓘ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

- klik [disini](#)
- kemudian tampil form **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas**

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas

--PILIH--

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

[BELI](#)

Pada halaman **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas** terdapat pilihan Modal Dasar, yaitu :

--PILIH--

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

- Kemudian pilih **Modal Dasar** untuk Perubahan Data Perseroan Terbatas

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

Pembelian voucher sebesar **Rp 150.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNPB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

☒ Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

[BELI](#)

- Ceklis *disclaimer* dan klik tombol

[BELI](#)

- Maka tampil *form* **Bukti Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas**

[Cek Pemesanan Voucher](#) [List Voucher](#)



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	:	-
BILL ID ^[1]	:	XXXXXXXXXXXX
NAMA PEMOHON	:	PT. ABCD, Jalan No. 123, Jakarta
NOMOR REKENING	:	0011111111
EMAIL PEMOHON	:	admin@abcd.co.id
NOMOR HP	:	08123456789
TANGGAL TRANSAKSI	:	15 Agustus 2019 10:30:00
TANGGAL EXPIRED	:	31 Agustus 2019 23:59:59
(PEMBAYARAN TERAKHIR)		
TAGIHAN	:	Rp 150.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

[Download](#) [Kirim Ulang](#)

- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor voucher pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada point **Pembayaran Nomor Voucher**.

- Jika tagihan sudah terbayar, klik tombol [List Voucher](#), maka akan tampil halaman **Daftar Voucher**

Daftar Voucher

Riwayat Transaksi

Tanggal Transaksi
 Dari Sampai

Kode Voucher/Bill ID

Pelayanan Jasa Hukum

Status

[Cari](#)

*** Keterangan :**

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 1122 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1	820		Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas		Rp. 150.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi

- Klik [Lanjutkan Transaksi](#) untuk menampilkan halaman **Permohonan Perubahan Perseroan** dengan nomor voucher yang sudah dipesan

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

NOMOR VOUCHER
 PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
 DATA PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☒ **NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN**
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

820

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

Untuk melakukan pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan dapat dilakukan dengan cara :

- ceklis **Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan**
- lalu tampil kolom pengisian Nomor Voucher

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

NOMOR VOUCHER
 PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
 ANGGARAN DASAR PERSEROAN
 DAN DATA PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
☒ **NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN**

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGG/

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

- klik [disini](#)
- kemudian tampil form **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dan Data Perseroan Terbatas**

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas

--PILIH--

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

[BELI](#)

Pada halaman **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dan Data Perseroan Terbatas** terdapat pilihan Modal Dasar, yaitu

--PILIH--

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

- Kemudian pilih **Modal Dasar** untuk Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

Pembelian voucher sebesar **Rp 150.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNPB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

☒ Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

[BELI](#)

- Ceklis *disclaimer* dan klik tombol [BELI](#)
- Maka tampil form **Bukti Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran**

Dasar Perseroan Terbatas Dan Data Perseroan Terbatas

[Cek Pemesanan Voucher](#) [List Voucher](#)



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	:	
BILL ID ^[1]	:	
NAMA PEMOHON	:	
NOMOR REKENING	:	
EMAIL PEMOHON	:	
NOMOR HP	:	
TANGGAL TRANSAKSI	:	
TANGGAL EXPIRED	:	
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	
TAGIHAN	:	Rp 150.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

[Download](#) [Kirim Ulang](#)

- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor voucher pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada point **Pembayaran Nomor Voucher**.
- Jika tagihan sudah terbayar, klik tombol [List Voucher](#), maka akan tampil halaman **Daftar Voucher**

Daftar Voucher

[Riwayat Transaksi](#)

Tanggal Transaksi
 Dari Sampai

Kode Voucher/Bill ID

Pelayanan Jasa Hukum

Status

*** Keterangan :**

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 1011 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^(*)	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1			Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas		Rp. 150.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi

- Klik [Lanjutkan Transaksi](#) untuk menampilkan halaman **Permohonan Perubahan Perseroan** dengan nomor voucher yang sudah dipesan

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

ⓘ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik disini untuk pembelian voucher.

- Kemudian lakukan pengisian data pada halaman **Permohonan Perubahan Perseroan** dengan mengisi
 - Nama Perseroan**
 - Nomor SK Terakhir**
 - Lalu klik tombol

Informasi PNB:

Kami memohon maaf. Terjadi kesalahan penginputan penagihan PNB.

Sistem sudah diperbaiki, bagi Notaris yang telah mencetak Tagihan, harap mencetak ulang.

Perincian PNB sbb:

1. Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Persetujuan Menteri

- Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan Rp. 1.000.000,-

- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-

- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-

2. Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Pemberitahuan

- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-

- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-

3. Perubahan data Perseroan harus bayar

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

- ☒ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- ☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

820

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

820

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

NAMA PERSEROAN *

PT. LIPATSI BANG

NOMOR SK TERAKHIR *

AHU

Nomor SK merupakan Nomor Surat Keputusan Menteri. Bukan Nomor Surat Pemberitahuan.

NOTARIS TERAKHIR *

NOTARIS BERNAMA SIA, SIA, SIA, SIA

❗ Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Cari

- Setelah itu tampil halaman **Persyaratan Utama Perubahan**

Informasi PINBP:

Kami memohon maaf. Terjadi kesalahan penginputan penagihan PINBP.
Sistem sudah diperbaiki, bagi Notaris yang telah mencetak Tagihan, harap mencetak ulang.

Perincian PINBP sbb:

1. Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Persetujuan Menteri
 - Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan Rp. 1.000.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
2. Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Pemberitahuan
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
3. Perubahan data Perseroan harus bayar

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

- ☒ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

820

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

820

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

NAMA PERSEROAN

PT. JAYA BAKTI

NOMOR SK TERAKHIR

AHU

Nomor SK merupakan Nomor Surat Keputusan Menteri. Bukan Nomor Surat Pemberitahuan.

NOTARIS TERAKHIR

NOTARIS JAYA BAKTI, S.S., S.H., S.E.

❗ Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Cari

NOMOR SK TERAKHIR: AHU

NAMA	JABATAN
PT	DIREKTUR
MASYARAKAT	BADAN HUKUM
PEMERINTAH	
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	KOMISARIS

Persyaratan Utama

- ☒ Berita acara rapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution)
☐ RUPS
- ☒ Akta Notaris dalam bahasa Indonesia
- ☒ Tanggal RUPS / Berita Acara Rapat / Notulen Rapat
- ☒ Keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau keterangan domisili dari kelurahan/desa atau nama lain setempat
- ☒ NPWP

☒ Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya

LANJUTKAN

- Ceklis Persyaratan Utama
- Ceklis disclaimer
- Klik tombol **LANJUTKAN** maka muncul popup disclaimer



- Kemudian klik tombol **Saya Yakin** lalu masuk ke halaman **Permohonan Perubahan Ringkasan Perseroan**.

Permohonan Perubahan PT [REDACTED] disingkat PT [REDACTED]

Ringkasan Perseroan

Jenis Perseroan	PMA
Status Perseroan	Tertutup

Jenis Perubahan

- ☒ Persetujuan perubahan anggaran dasar 1
- ☒ Pemberitahuan perubahan anggaran dasar 1
- ☒ Pemberitahuan perubahan data Perseroan 1

Akta Notaris yang dibuat untuk permohonan sekarang.

Nama Notaris: [REDACTED]

Nomor Akta: [REDACTED] Tanggal Akta: [REDACTED] Tambah

Tanggal RUPS / Berita Acara / Notulen Rapat

Tanggal: [REDACTED]

Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kehadiran RUPS	NAMA	JABATAN
☒	[REDACTED]	DIREKTUR
☐	PT [REDACTED]	BADAN HUKUM
☒	MASYARAKAT [REDACTED]	
☒	PEMERINTAH	
☐	[REDACTED]	KOMISARIS
☐	NEGARA REPUBLIK INDONESIA	

☒ Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya

KEMBALI LANJUTKAN

Pada halaman **Permohonan Perubahan Ringkasan Perseroan** akan tampil menu fitur untuk jenis perubahan yang diantaranya ialah :

1. Jenis Perubahan yang telah otomatis tercekis terdiri dari 3 bagian diantaranya :

- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.
- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar.
- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

2. Masukkan Nomor Akta notaris yang dibuat untuk permohonan sekarang.
3. Masukkan Tanggal Akta notaris yang dibuat untuk permohonan sekarang.
4. Masukkan Tanggal RUPS/Berita Acara Rapat/Notulen Rapat yang disesuaikan dengan akta PT.
5. Ceklist Kehadiran RUPS pada Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.
6. Masukkan jumlah masyarakat yang hadir dalam RUPS
7. Ceklist jika notaris memberikan semua informasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Klik tombol **LANJUTKAN** maka akan keluar allert perhatian!!!



- Klik tombol **Saya Yakin** akan masuk ke halaman **Permohonan Perubahan**

Permohonan Perubahan

PT BERSAMA SAMA

Silahkan pilih jenis perubahan yang di inginkan:

Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri

- ☐ Nama
- ☐ Tempat kedudukan
- ☐ Maksud dan tujuan serta kegiatan
- ☐ Jangka waktu
- ☐ Peningkatan Modal dasar
- ☐ Pengurangan Modal dasar
- ☐ Pengurangan modal ditempatkan dan disetor
- ☐ Status Perseroan

Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan

- ☐ Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor
- ☐ Jenis Perseroan
- ☐ Pasal 1 ayat 1
- ☐ Pasal 1 ayat 2
- ☐ Pasal 4 ayat 1
- ☐ Pasal 4 Ayat 2
- ☐ Pasal 4 ayat 3
- ☐ Pasal 4 ayat 4
- ☐ Pasal 4 ayat 5
- ☐ Pasal 4 ayat 6
- ☐ Pasal 4 ayat 7
- ☐ Pasal 4 ayat 8
- ☐ Pasal 4 ayat 9
- ☐ Pasal 4 ayat 10
- ☐ Pasal 4 ayat 11
- ☐ Pasal 4 ayat 12
- ☐ Pasal 4 ayat 13
- ☐ Pasal 4 ayat 14
- ☐ Pasal 4 ayat 15
- ☐ Pasal 5
- ☐ Pasal 6
- ☐ Pasal 7
- ☐ Pasal 8
- ☐ Pasal 9
- ☐ Pasal 10
- ☐ Pasal 11
- ☐ Pasal 11 ayat 3
- ☐ Pasal 11 ayat 2.a(4)
- ☐ Pasal 12
- ☐ Pasal 13
- ☐ Pasal 14
- ☐ Pasal 14 Ayat 3
- ☐ Pasal 14 Ayat 5
- ☐ Pasal 15
- ☐ Pasal 16
- ☐ Pasal 17
- ☐ Pasal 18
- ☐ Pasal 19
- ☐ Pasal 20
- ☐ Pasal 21
- ☐ Pasal 22
- ☐ Pasal 23
- ☐ Pasal 24
- ☐ Pasal 25
- ☐ Pasal 26
- ☐ Pasal 27
- ☐ Pasal 28
- ☐ Pasal 29
- ☐ Pasal 30
- ☐ Pasal 31
- ☐ Pasal 32
- ☐ Pasal 33
- ☐ Pasal 34
- ☐ Pasal 35
- ☐ Pasal 36
- ☐ Pasal 37
- ☐ Pasal 38
- ☐ Pasal 39
- ☐ Pasal 40
- ☐ Pasal 41
- ☐ Pasal 42
- ☐ Pasal 43
- ☐ Pasal 44
- ☐ Pasal 45
- ☐ Pasal 46
- ☐ Pasal 47
- ☐ Pasal 48
- ☐ Pasal 49
- ☐ Pasal 50
- ☐ Pasal 51
- ☐ Pasal 52
- ☐ Pasal 53
- ☐ Pasal 54
- ☐ Pasal 55
- ☐ Pasal 56
- ☐ Pasal 57
- ☐ Pasal 58
- ☐ Pasal 59
- ☐ Pasal 60
- ☐ Pasal 61
- ☐ Pasal 62
- ☐ Pasal 63
- ☐ Pasal 64
- ☐ Pasal 65
- ☐ Pasal 66
- ☐ Pasal 67
- ☐ Pasal 68
- ☐ Pasal 69
- ☐ Pasal 70
- ☐ Pasal 71
- ☐ Pasal 72
- ☐ Pasal 73
- ☐ Pasal 74
- ☐ Pasal 75
- ☐ Pasal 76
- ☐ Pasal 77
- ☐ Pasal 78
- ☐ Pasal 79
- ☐ Pasal 80
- ☐ Pasal 81
- ☐ Pasal 82
- ☐ Pasal 83
- ☐ Pasal 84
- ☐ Pasal 85
- ☐ Pasal 86
- ☐ Pasal 87
- ☐ Pasal 88
- ☐ Pasal 89
- ☐ Pasal 90
- ☐ Pasal 91
- ☐ Pasal 92
- ☐ Pasal 93
- ☐ Pasal 94
- ☐ Pasal 95
- ☐ Pasal 96
- ☐ Pasal 97
- ☐ Pasal 98
- ☐ Pasal 99
- ☐ Pasal 100

Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan

- ☐ 1. Direksi dan Komisaris
- ☐ 2. Peralihan saham
- ☐ 3. Ganti nama pemegang saham
- ☐ 4. Pengangkatan Kembali
- ☐ 5. Alamat Lengkap Perseroan

KEMBALI

LANJUTKAN

Tampilan Form **Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri.**

Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri

☒ Nama

Persyaratan Perubahan Nama

☒ Bukti Persetujuan Pemakaian Nama

☒ Tempat kedudukan

Persyaratan Perubahan Tempat Kedudukan

☒ Surat keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung yang dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan setempat atau surat keterangan domisili dari kelurahan atau desa setempat

☒ Maksud dan tujuan serta kegiatan

Persyaratan Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

☒ 1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha harus sesuai dengan Nama Perseroan

☒ 2. Untuk kegiatan usaha khusus agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait seperti :

- Kementerian Pariwisata
- Kementerian ESDM
- Kementerian Komunikasi dan Informasi
- Kementerian Kesehatan terkait Rumah Sakit dan Apotik
- Kementerian Perhubungan
- Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Dan lain-lain

☒ Jangka waktu

☒ Peningkatan Modal dasar

Peringatan Perubahan Peningkatan Modal Dasar

Untuk kegiatan usaha khusus seperti Lembaga Keuangan, PMA, PT Terbuka agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait seperti :
Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Koordinasi Penanaman Modal

☐ Pengurangan Modal dasar

☒ Pengurangan modal ditempatkan dan disetor

☒ Permohonan

Pengumuman Surat Kabar yang telah dilakukan 7 hari setelah RUPS

☒ Setelah jangka waktu 60 hari

1. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor
2. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor
3. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Untuk kegiatan usaha khusus seperti Lembaga Keuangan, PMA, PT Terbuka agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait seperti :
- Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Koordinasi Penanaman Modal

Apabila ada keberatan yang tidak dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Tidak ada keberatan
30 hari (setelah masa pengumuman 60 hari di surat kabar) data akan di hapus

Tanggal RUPS

Tanggal

Pengumuman Surat Kabar

Tanggal Cetak

Nama Surat Kabar

☒ Status Perseroan

☒ Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pada form **Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri** :

1. Ceklis **Nama** jika ada perubahan pada Nama Perseroan
 - Ceklis Persyaratan Perubahan Nama
2. Ceklis **Tempat Kedudukan** jika ada perubahan pada Tempat Kedudukan Perseroan
 - Ceklis Persyaratan Perubahan Tempat Kedudukan
3. Ceklis **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan** jika ada perubahan pada Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan
 - Ceklis Persyaratan Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan
4. Ceklis **Jangka Waktu** jika ada perubahan pada Jangka Waktu Perseroan
5. Ceklis **Peningkatan Modal Dasar** jika ada Peningkatan Modal Dasar Perseroan
6. Ceklis **Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor** jika ada Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor pada Perseroan
 - Ceklis Permohonan
 - Ceklis Setelah jangka waktu 60 hari
 - Isi tanggal RUPS
 - Isi Tanggal Cetak Surat Kabar
 - Isi Nama Surat Kabar
7. Ceklis **Status Perseroan** jika ada perubahan pada Status Perseroan
 - Ceklis Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Tampilan form **Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan**.

Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan

☒ Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor

Peringatan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor

1. Bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal disetor/ditempatkan Perseroan
2. Bukti lainnya selain dengan uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan
3. Bukti lainnya selain dengan uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan benda tidak bergerak ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan
4. Bilaman PMA: Harus memiliki Izin Prinsip BKPM

☒ Jenis Perseroan

Persyaratan Perubahan Jenis Perseroan

☒ Izin Prinsip BKPM

☒ Pasal 1 ayat 1

☒ Pasal 1 ayat 2

☒ Persetujuan Dewan Komisaris

☒ Pasal 4 ayat 1 ⓘ

☐ Pasal 4 Ayat 2 ⓘ

- ☐ Pasal 4 ayat 3
- ☐ Pasal 4 ayat 4
- ☐ Pasal 4 ayat 5
- ☐ Pasal 4 ayat 6
- ☐ Pasal 4 ayat 7
- ☐ Pasal 4 ayat 8
- ☐ Pasal 4 ayat 9
- ☐ Pasal 4 ayat 10
- ☐ Pasal 4 ayat 11
- ☐ Pasal 4 ayat 12
- ☐ Pasal 4 ayat 13
- ☐ Pasal 4 ayat 14
- ☐ Pasal 4 ayat 15
- ☐ Pasal 5
- ☐ Pasal 6
- ☐ Pasal 7
- ☐ Pasal 8
- ☐ Pasal 9
- ☐ Pasal 10
- ☐ Pasal 11
- ☐ Pasal 11 ayat 3
- ☐ Pasal 11 ayat 2.a(4)
- ☐ Pasal 12
- ☐ Pasal 13
- ☐ Pasal 14
- ☐ Pasal 14 Ayat 3
- ☐ Pasal 14 Ayat 5
- ☐ Pasal 15
- ☐ Pasal 16
- ☐ Pasal 17
- ☐ Pasal 18
- ☐ Pasal 19
- ☐ Pasal 20
- ☐ Pasal 21
- ☐ Pasal 22
- ☐ Pasal 23
- ☐ Pasal 24
- ☐ Pasal 25
- ☐ Pasal 26
- ☐ Pasal 27
- ☐ Pasal 28
- ☐ Pasal 29
- ☐ Pasal 30
- ☐ Pasal 31
- ☐ Pasal 32
- ☐ Pasal 33
- ☐ Pasal 34
- ☐ Pasal 35
- ☐ Pasal 36
- ☐ Pasal 37
- ☐ Pasal 38
- ☐ Pasal 39
- ☐ Pasal 40
- ☐ Pasal 41
- ☐ Pasal 42
- ☐ Pasal 43
- ☐ Pasal 44
- ☐ Pasal 45
- ☐ Pasal 46
- ☐ Pasal 47
- ☐ Pasal 48
- ☐ Pasal 49
- ☐ Pasal 50
- ☐ Pasal 51
- ☐ Pasal 52
- ☐ Pasal 53
- ☐ Pasal 54
- ☐ Pasal 55
- ☐ Pasal 56
- ☐ Pasal 57
- ☐ Pasal 58
- ☐ Pasal 59
- ☐ Pasal 60
- ☐ Pasal 61
- ☐ Pasal 62
- ☐ Pasal 63
- ☐ Pasal 64
- ☐ Pasal 65
- ☐ Pasal 66
- ☐ Pasal 67
- ☐ Pasal 68
- ☐ Pasal 69
- ☐ Pasal 70
- ☐ Pasal 71
- ☐ Pasal 72
- ☐ Pasal 73
- ☐ Pasal 74
- ☐ Pasal 75
- ☐ Pasal 76
- ☐ Pasal 77
- ☐ Pasal 78
- ☐ Pasal 79
- ☐ Pasal 80
- ☐ Pasal 81
- ☐ Pasal 82
- ☐ Pasal 83
- ☐ Pasal 84
- ☐ Pasal 85
- ☐ Pasal 86
- ☐ Pasal 87
- ☐ Pasal 88
- ☐ Pasal 89
- ☐ Pasal 90
- ☐ Pasal 91
- ☐ Pasal 92
- ☐ Pasal 93
- ☐ Pasal 94
- ☐ Pasal 95
- ☐ Pasal 96
- ☐ Pasal 97
- ☐ Pasal 98
- ☐ Pasal 99
- ☐ Pasal 100

Pada form **Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan** :

1. Ceklis **Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor** jika ada Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan
2. Ceklis **Jenis Perseroan** jika ada perubahan pada Jenis Perseroan
 - Ceklis Persyaratan Perubahan Jenis Perseroan
3. Ceklis **Pasal** yang mengatur Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan

Tampilan form **Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan**.

Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan

☒ 1. Direksi dan Komisaris

Peringatan Perubahan Data Perseroan

Mohon untuk diperhatikan bahwa untuk beberapa jenis usaha memerlukan Persetujuan tertentu dari Instansi lain. Seperti:

- Fit and Proper Test untuk Jenis Usaha Bank dan Jasa Keuangan
- Izin ESDM untuk Perseroan yang menjalankan Kontrak Karya
- Untuk jenis Usaha lainnya mohon untuk diperhatikan dan di koordinasikan dengan Instansi lain

☒ 2. Peralihan saham

Persyaratan Perubahan Peralihan Saham

Bilamana Perseroan dengan status PMA, izin prinsip BKPM

Bilamana PT Tertutup, Akta pemindahan Hak atas Saham

Bilamana PT Tertutup, Daftar Pemegang Saham

☒ 3. Ganti nama pemegang saham

☒ 4. Pengangkatan Kembali

☒ 5. Alamat Lengkap Perseroan

Persyaratan Perubahan Lengkap Perseroan

☒ Surat keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau nama lain setempat

[KEMBALI](#)[LANJUTKAN](#)

Pada form **Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan** :

1. Ceklis **Direksi dan Komisaris** jika ada perubahan data Direksi dan Komisaris Perseroan
2. Ceklis **Peralihan Saham** jika ada perubahan Peralihan Saham Perseroan
3. Ceklis **Ganti Nama Pemegang Saham** jika ada perubahan Nama Pemegang Saham Perseroan
4. Ceklis **Alamat Lengkap Perseroan** jika ada perubahan Alamat Lengkap Perseroan
 - Ceklis Persyaratan Perubahan Lengkap perseroan

- Klik tombol **LANJUTKAN** maka akan keluar alert perhatian!!!



- Klik tombol **Saya Yakin** untuk menampilkan halaman **Format Isian Perubahan Perseroan Terbatas**

Format Isian Perubahan Perseroan Terbatas

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan

Nama Singkatan

Jenis Perseroan

PMDN FASILITAS

NPWP Perseroan *

Jangka Waktu Perseroan

TIDAK TERBATAS

Status Perseroan

tertutup

KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi

DKI JAKARTA

Kabupaten

JAKARTA SELATAN

DOMISILI PERSEROAN

Alamat Perseroan

RT

RW

Kecamatan

KEBAYORAN BARU

Kelurahan

MELAWAI

Kode Pos

Nomor Telepon

Maksud dan Tujuan

MAKSUD

REAL-ESTAT

TUJUAN

REAL-ESTAT

REAL-ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DARI KAWASAN PERMUKAAN

REAL-ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA

REAL-ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA

MAKSUD

AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS

TUJUAN

AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS

AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI

AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI

AKTIVITAS ARSITEKTUR

Tambah Data

Hapus

AKTA NOTARIS

Nama Notaris

Nomor Akta

Tanggal Akta

MODAL DASAR *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	4.000	Rp. 4.000.000

Total modal dasar Rp. 4.000.000

MODAL DITEMPATKAN *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	4.000	Rp. 4.000.000

Total modal ditempatkan Rp. 4.000.000

MODAL DISETOR *

4.000.000

☒ Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM *

Tambah Data

Nama	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total	Aksi
PT	Tanpa Klasifikasi	1.000	DIREKTUR	Rp. 1.000.000	Perbahani Hapus
PT	Tanpa Klasifikasi	1.000	BADAN HUKUM	Rp. 1.000.000	Perbahani Hapus
Masyarakat	Tanpa Klasifikasi	300		Rp. 300.000	Perbahani Hapus
PEMERINTAH	Tanpa Klasifikasi	700		Rp. 700.000	Perbahani Hapus
PT	Tanpa Klasifikasi	500	KOMISARIS	Rp. 500.000	Perbahani Hapus
Negara Republik Indonesia	Tanpa Klasifikasi	500		Rp. 500.000	Perbahani Hapus

TOTAL LEMBAR SAHAM 4,000

TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR Rp 4,000,000

http://panduan.ahu.go.id/

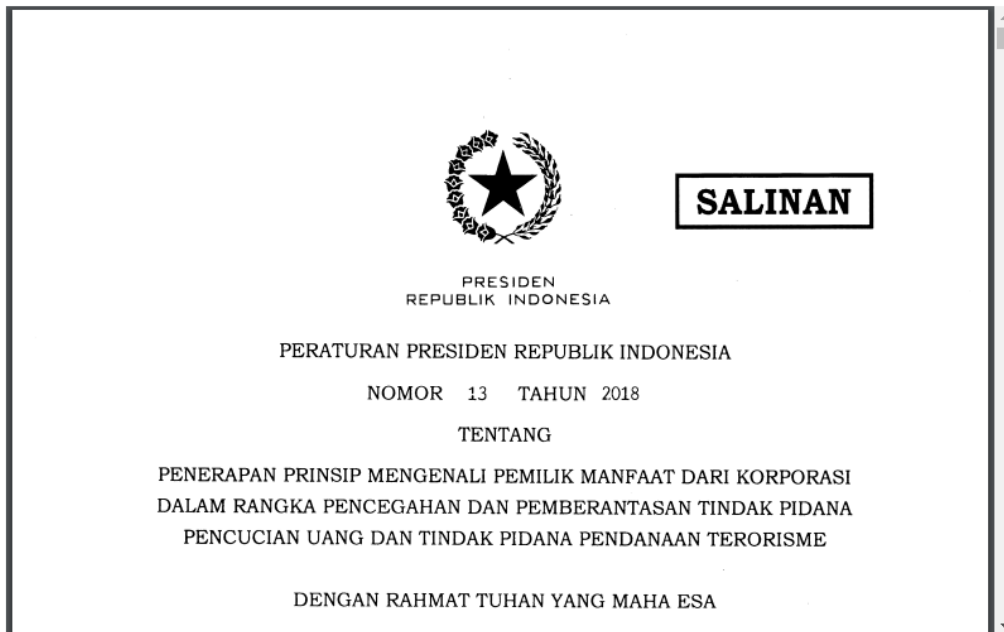
Printed on 2024/05/01 19:44

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☒ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



- ☒ Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- ☒ Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

[Tambah Data](#)

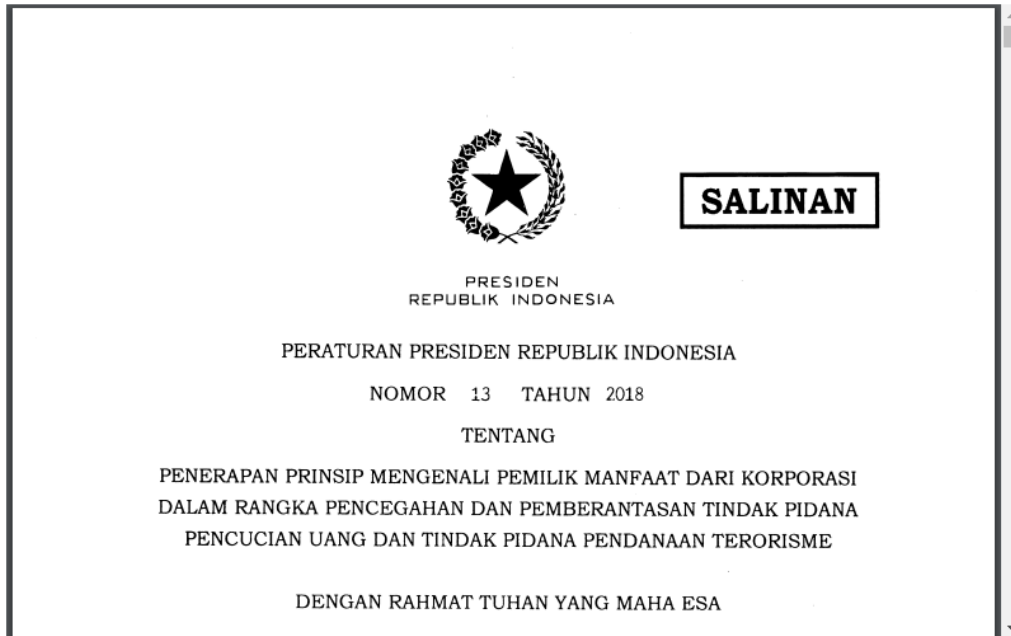
Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
------	-----------------	------------------------	-----------------	--------	------	----------	------

* jika data pemilik manfaat sudah ada pada transaksi sebelumnya

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☒ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.

DOWNLOAD

- ☒ Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- ☒ Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan
						Pemegang Saham

Untuk melakukan pelaporan perubahan atau pengkinian data pemilik manfaat korporasi dapat dilakukan melalui Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi (Beneficial Owner Application) atau melalui tautan berikut <http://bo.ahu.go.id>

Notaris Pengganti

☐ Apakah Anda Notaris Pengganti?

PERSYARATAN

Sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, Saya menyatakan :

- ☒ 1. Bahwa Data yang diisi pada format isian pendirian Perseroan sudah benar.
- ☒ 2. Bahwa Akta Perseroan yang saya buat sebelum mengisi format isian pendirian Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ☒ 3. Bahwa Data Perseroan yang diisi dengan dokumen fisik yang disimpan pada kantor saya telah sesuai.
- ☒ 4. Bahwa dokumen-dokumen untuk pendirian Perseroan telah lengkap sebelum saya mengisi format isian pendirian Perseroan.
- ☒ 5. Jika saya dalam proses pengisian data pada format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka saya bersedia menerima sanksi pidana, perdata dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEMBALI

LANJUTKAN

- Ubah data sesuai dengan kebutuhan, setelah itu ceklis persyaratan dan klik tombol Lanjutkan. Kemudian akan tampil pop up Perhatian!!!

Lanjutkan

Perhatian!!!

Saya, notaris **NOTARIS SABH2 S.H., S.H., S.E., M.Kn.** yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

- ☒ 1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.
- ☒ 2. Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- ☒ 3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengklik tombol setuju, Anda telah memperhatikan dan menyetujui serta siap melaksanakan peringatan ini.

Tidak Setuju

Setuju

1. Ceklis semua poin Pernyataan
 2. Klik tombol 
- Selanjutnya akan tampil pop up Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

- ☐ 1. Bahwa saya telah mengetahui data terakhir sebagaimana yang tersimpan pada database di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- ☐ 2. Bahwa saya telah membaca dengan cermat serta mengetahui seluruh susunan pemegang saham dan pengurus yang sah berdasarkan data yang tersimpan pada database di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- ☐ 3. Bahwa untuk perubahan yang dilakukan, telah menghadap kepada saya dan saya mengetahui pemegang saham yang sah atau secara sah mewakili mereka, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas.
- ☐ 4. Bahwa bila dikemudian hari, diketahui penghadap bukan pemegang saham yang sah atau bukan mewakili pemegang saham yang sah maka saya menyetujui data yang ada pada database di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai data terakhir sebelum perubahan yang saya lakukan.
- ☐ 5. Bahwa dengan menyetujui pernyataan ini berarti saya siap bertanggung jawab penuh dan saya menandatangani secara sah pernyataan ini.

Dengan mengklik tombol setuju Anda telah menandatangani pernyataan ini secara elektronik.

2

Tidak Setuju

Setuju

1. Ceklis semua poin Surat Pernyataan

2. Klik tombol 

• Kemudian tampil halaman **Pra Tinjau Perubahan Data Perseroan**

PRA TINJAU PERUBAHAN DATA PERSEROAN

Format Isian Perubahan Perseroan Terbatas

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan

Nama Singkatan

Jenis Perseroan

NPWP Perseroan *

Jangka Waktu Perseroan

Status Perseroan

KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi

Kabupaten

Maksud dan Tujuan

MAKSUD

TUJUAN

AKTA NOTARIS

Nama Notaris

Nomor Akta

Tanggal Akta

MODAL DASAR *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	4.000	Rp. 4.000.000

Total modal dasar Rp. 4.000.000

MODAL DITEMPATKAN *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	4.000	Rp. 4.000.000

Total modal ditempatkan Rp. 4.000.000

MODAL DISETOR *

4.000.000

☒ Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM *

Nama	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total
PT	Tanpa Klasifikasi	1.000	DIREKTUR	Rp. 1.000.000
PT	Tanpa Klasifikasi	1.000	BADAN HUKUM	Rp. 1.000.000
Masyarakat	Tanpa Klasifikasi	300		Rp. 300.000
PEMERINTAH	Tanpa Klasifikasi	700		Rp. 700.000
PT	Tanpa Klasifikasi	500	KOMISARIS	Rp. 500.000
Negara Republik Indonesia	Tanpa Klasifikasi	500		Rp. 500.000

TOTAL LEMBAR SAHAM 4.000

TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR Rp 4.000.000

Notaris Pengganti

JENIS PERUBAHAN

Persetujuan perubahan anggaran dasar

Pemberitahuan perubahan anggaran dasar

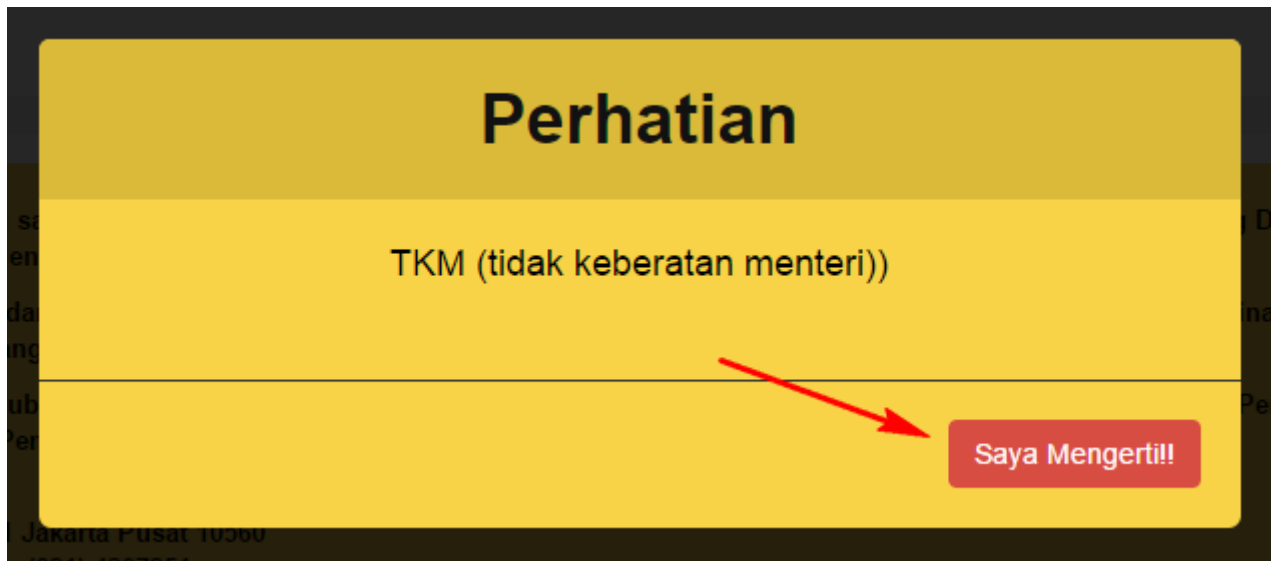
Pemberitahuan perubahan data Perseroan

KEMBALI

SAYA YAKIN

AHU ONLINE - <http://panduan.ahu.go.id/>

1. Klik tombol **Kembali** jika data belum sesuai.
2. Klik tombol **SAYA YAKIN**. Setelah itu akan tampil pop up tidak keberatan Menteri



- Klik tombol **Saya Mengerti!!**

Setelah itu tampil Halaman **Daftar Transaksi Perseroan**

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30 hari kalender dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**. Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun 2019 ▾

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Perubahan	PMDN FASILITAS		SUDAH BAYAR		Pratinjau & Cetak SK/SP Waktu Upload : 30 hari Tanggal Jatuh Tempo : 15 Mei 2020 Sisa Pratinjau : 7 hari Tanggal Habis Pratinjau : 15 Mei 2020 Tagihan PNRI

Pada halaman Daftar Transaksi Perseroan, terdapat beberapa fungsi diantaranya :

1. Tombol **Pratinjau & Cetak SK/SP** untuk melihat data pendirian. **PRATINJAU AKAN BERLAKU SELAMA 7 HARI**

2. Tombol **Tagihan PNRI** untuk mengunduh bukti pembayaran. * **Bukti Tagihan PNRI ini sebagai bukti pembayaran BNRI langsung ke pada pihak BNI, cukup hanya dengan menunjukkan bukti tagihan PNRI.**

**SURAT PERINTAH BAYAR BN/TBN
TERHADAP PERUBAHAN PERSEROAN**

No. Transaksi :
Virtual Account TBNRI & BNRI :
Nama NOTARIS :
Nama PERSEROAN :
Nama Singkatan :
Propinsi Wilayah Pendaftaran :
Kabupaten/Kota Pendaftaran :
Jenis Permohonan : Perubahan Perseroan
Biaya BNRI : RP 30.000
Biaya TBNRI : RP 550.000
Total : RP 580.000

Link Tagihan PNRI merupakan link untuk melakukan download Perintah Bayar BN/TBN RI ke PNRI. Link tersebut tetap akan tampil walaupun pembayaran telah dilakukan karena belum tersedianya Sistem Elektronik di PNRI sehingga antara Sistem AHU dan PNRI belum terhubung.

Untuk mengakses form Pratinjau, klik

Pratinjau & Cetak SK/SP

, maka akan tampil halaman pratinjau data perseroan.

1 2

Kembali Download PDF **Perbaharui Data** Upload Akta Hapus Transaksi

Menteri menyatakan tidak keberatan menteri.

Nomor Transaksi:

DATA PERSEROAN

Nomor SK	
Nama Perseroan	
Nama Singkatan	
Jenis Perseroan	PMDN FASILITAS
NPWP Perseroan	
Jangka Waktu Perseroan	TIDAK TERBATAS

PASTIKAN AKTA YANG DI UPLOAD SUDAH BENAR!

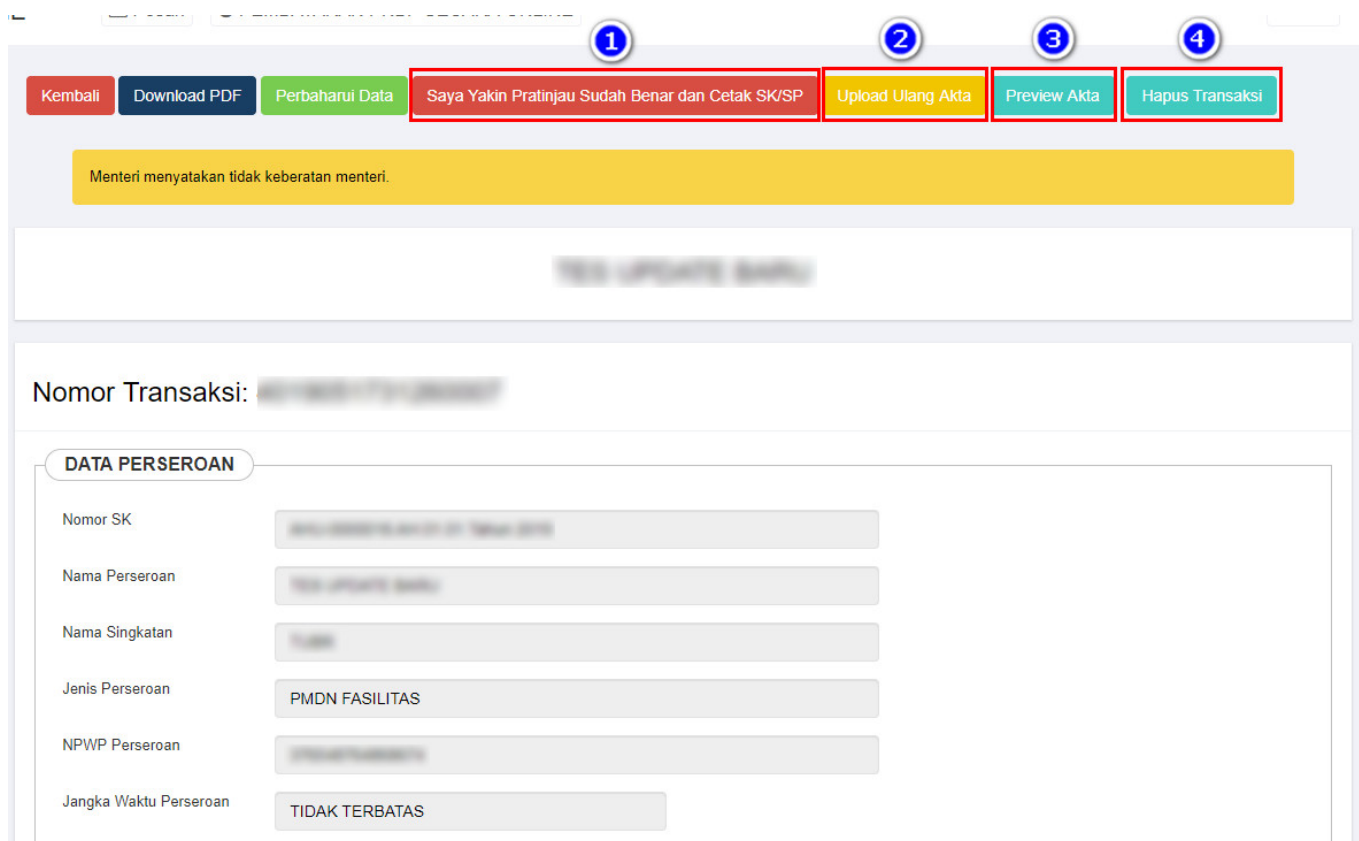
No preview available

Terhadap akta yang sudah di upload, tidak dapat dilakukan perbaikan
APAKAH AKTA YANG DI UPLOAD SUDAH BENAR ?

1

Lanjutkan

- Klik tombol **Lanjutkan** setelah itu akan tampil halaman dibawah ini:



Kembali Download PDF Perbaharui Data Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP Upload Ulang Akta Preview Akta Hapus Transaksi

Menteri menyatakan tidak keberatan menteri.

TEST UPDATE BAHU

Nomor Transaksi: 00000000000000000000

DATA PERSEROAN

Nomor SK 00000000000000000000

Nama Perseroan TEST UPDATE BAHU

Nama Singkatan TUBA

Jenis Perseroan PMDN FASILITAS

NPWP Perseroan 00000000000000000000

Jangka Waktu Perseroan TIDAK TERBATAS

1. Tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP** untuk mengakhiri transaksi.
 2. Tombol **Upload Ulang Akta** untuk mengulangi proses upload akta jika terjadi kesalahan upload file.
 3. Tombol **Preview Akta** untuk menampilkan file akta yang telah di upload.
 4. Tombol **Hapus Transaksi** untuk menghapus transaksi.
- Setelah klik tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP**, tampil halaman **Daftar Transaksi Perseroan**.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :

Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560

Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30** hari kalender **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**. Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun 2019 ▾

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Perubahan	PMDN FASILITAS		SUDAH BAYAR		Tagihan PNRI SK Perubahan SP Perubahan Anggaran Dasar SP Perubahan Data Perseroan Upload Akta Waktu Perbaikan : 89 hari

Terdapat beberapa SK & SP Perubahan Perseroan yang dapat di download, yaitu :

1. SK Perubahan

- Klik [SK Perubahan](#) untuk mendownload SK Perubahan Perseroan.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :

Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560

Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30** hari kalender **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**. Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun 2019 ▾

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Perubahan	PMDN FASILITAS		SUDAH BAYAR		Tagihan PNRI SK Perubahan SP Perubahan Anggaran Dasar SP Perubahan Data Perseroan Upload Akta Waktu Perbaikan : 89 hari

- Kemudian tampil SK Perubahan Perseroan seperti gambar dibawah ini.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [REDACTED]
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT [REDACTED]

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris [REDACTED] sesuai salinan akta nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] tentang Perubahan Anggaran Dasar PT [REDACTED] disingkat PT [REDACTED] tanggal [REDACTED] dengan Nomor Pendaftaran [REDACTED] telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT [REDACTED] disingkat PT [REDACTED];

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT [REDACTED] disingkat PT [REDACTED] - dengan NPWP [REDACTED] yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] yang dibuat oleh Notaris [REDACTED] yang berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal [REDACTED].

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED]
DAFTAR PERSEROAN NOMOR [REDACTED] TANGGAL [REDACTED]



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [REDACTED]
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT [REDACTED]

1. Modal Dasar : Rp. 4.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 4.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
[REDACTED]	DIREKTUR	-	1.000	Rp. 1.000.000
[REDACTED]	KOMISARIS	-	500	Rp. 500.000
PT [REDACTED]	BADAN HUKUM	-	1.000	Rp. 1.000.000
MASYARAKAT	-	-	300	Rp. 300.000
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	-	-	500	Rp. 500.000
PEMERINTAH	-	-	700	Rp. 700.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal [REDACTED].



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED]
DAFTAR PERSEROAN NOMOR [REDACTED]

TANGGAL [REDACTED]

2. SP Perubahan Anggaran Dasar

- Klik [SP Perubahan Anggaran Dasar](#) untuk mendownload SP Perubahan Anggaran Dasar.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30 hari kalender** **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**.
Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun 2019

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Perubahan	PMDN FASILITAS		SUDAH BAYAR		Tagihan PNRI SK Perubahan SP Perubahan Anggaran Dasar SP Perubahan Data Perseroan Upload Akta Waktu Perbaikan : 89 hari

- Kemudian tampil SP Perubahan Anggaran Dasar seperti gambar dibawah ini.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : [REDACTED]
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT [REDACTED]

Kepada Yth.
Notaris [REDACTED]
Jl. Kerajinan
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] yang dibuat oleh Notaris [REDACTED], berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal [REDACTED], mengenai perubahan Jenis Perseroan, **PT** [REDACTED] **disingkat PT** [REDACTED], berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal [REDACTED].

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED]

DAFTAR PERSEROAN [REDACTED]

TANGGAL [REDACTED]

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

3. SP Perubahan Data Perseroan

- Klik [SP Perubahan Data Perseroan](#) untuk mendownload SP Perubahan Data Perseroan.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :

Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560

Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30 hari kalender dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**. Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Perubahan	PMDN FASILITAS		SUDAH BAYAR		Tagihan PNRI SK Perubahan SP Perubahan Anggaran Dasar SP Perubahan Data Perseroan Upload Akta Waktu Perbaikan : 89 hari

- Kemudian tampil SP Perubahan Data Perseroan seperti gambar dibawah ini.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
 Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : [REDACTED]
 Lampiran :
 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
 Perubahan Data Perseroan
PT [REDACTED]

Kepada Yth.
 Notaris [REDACTED]
 Jl. Kerajinan
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] yang dibuat oleh Notaris [REDACTED], berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT** [REDACTED] **disingkat PT** [REDACTED], berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal [REDACTED].

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED]

DAFTAR PERSEROAN NOMOR [REDACTED] **TANGGAL** [REDACTED]

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

6. Perubahan Pending

Menu Perubahan Pending digunakan oleh Notaris untuk melakukan input data perubahan suatu PT (Perseroan Terbatas) yang tertunda.

- Untuk mengakses menu ini klik menu **Perseroan Terbatas → Perubahan Pending** seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

The screenshot shows the DITJEN AHU ONLINE interface. On the left sidebar, the 'Perubahan Pending' menu item is highlighted with a red box and a red arrow. The main content area displays the user's profile, including a photo, name, email, username, and status (notaris). Below the profile, there are buttons for 'Riwayat Permohonan', 'Edit Profil', 'Surat Keterangan', and 'Surat Keputusan'. Further down, there are buttons for 'Permohonan Cuti', 'Permohonan Perubahan Data Notaris', 'Pemberhentian Notaris', 'Permohonan Pindah Wilayah', and 'Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan'. The 'Perubahan Pending' menu item is highlighted in the sidebar.

- Kemudian tampil halaman **Permohonan Perubahan Pending Perseroan** dibawah ini.

The screenshot shows the 'PERMOHONAN PERUBAHAN PENDING PERSEROAN' form. It includes a list of checkboxes for selecting the type of change: 'NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN', 'NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN', 'NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN', and 'NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN'. Below the checkboxes, there are three input fields: 'NAMA PERSEROAN *', 'NOMOR SURAT *', and 'NOTARIS TERAKHIR *'. Each field has a placeholder text: 'MASUKKAN NAMA PERSEROAN', 'Masukkan NOMOR SURAT', and 'MASUKKAN NAMA NOTARIS TERAKHIR'. A red 'Cari' button is located at the bottom right of the form.

Pada halaman **Permohonan Perubahan Pending Perseroan** terdapat fitur untuk memesan nomor *voucher* perubahan perseroan sekaligus dengan beberapa ketentuan, diantaranya :

- Jika ingin memesan nomor *voucher* point 1 sampai 3, maka akan muncul *field* nomor voucher sesuai yang dipilih dan otomatis point 4 *disable* atau tidak bisa dipilih seperti gambar dibawah ini.

- ☒ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- ☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- ☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN D/

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN
PERUBAHAN DATA PERSEROAN

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSE

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

- Jika ingin memesan nomor *voucher* point 1 dan 4, maka akan muncul *field* nomor voucher sesuai yang dipilih dan otomatis point 2 dan 3 *disable* atau tidak bisa dipilih seperti gambar dibawah ini.

- ☒ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- ☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN D/

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

- Setelah itu lakukan pemesanan nomor voucher dengan cara klik **disini** pada field **Nomor Voucher Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan** untuk menampilkan halaman Pemesanan Nomor Voucher.

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM *

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

NAMA PEMOHON *

PT. ABC KAWASAN 123 456 789

EMAIL PEMOHON *

nama.anggota@perseroan.co.id

NOMOR HP *

081234567890

Pembelian voucher sebesar **Rp 1.000.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNBP yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

☒ Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI

BELI

Ceklis disclaimer dan klik tombol **BELI**, lalu tampil form Bukti Pemesanan Nomor Voucher

Cek Pemesanan Voucher
List Voucher



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
BADAN HUKUM
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

KODE VOUCHER	:	
BILL ID ^[1]	:	
NAMA PEMOHON	:	
NOMOR REKENING	:	
EMAIL PEMOHON	:	
NOMOR HP	:	
TANGGAL TRANSAKSI	:	
TANGGAL EXPIRED	:	
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	
TAGIHAN	:	Rp 1.000.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Download

Klik tombol **List Voucher**, maka akan tampil halaman Daftar Voucher

Daftar Voucher

Riwayat Transaksi

Tanggal Transaksi
Dari Sampai

Kode Voucher/Bill ID

Pelayanan Jasa Hukum
-- SEMUA --

Status
-- SEMUA --

Cari

* Keterangan :

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 959 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1			Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas		Rp. 1.000.000	Belum Bayar	Lihat

Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor voucher pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada link berikut ini

http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas#pembayaran_nomor_voucher

- Jika tagihan sudah terbayar, maka status pembayaran pada halaman Daftar Voucher akan berubah menjadi **Sudah Bayar**

Daftar Voucher

Riwayat Transaksi

Tanggal Transaksi
Dari Sampai

Kode Voucher/Bill ID

Pelayanan Jasa Hukum
-- SEMUA --

Status
-- SEMUA --

[Cari](#)

* Keterangan :

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 960 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ⁽¹⁾	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1			Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas		Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi

- Klik [Lanjutkan Transaksi](#) untuk menampilkan halaman **Permohonan Perubahan Pending Perseroan** dengan nomor voucher yang sudah dipesan

PERMOHONAN PERUBAHAN PENDING PERSEROAN

☒ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

820

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

NAMA PERSEROAN *

MASUKKAN NAMA PERSEROAN

NOMOR SURAT *

Masukkan NOMOR SURAT

NOTARIS TERAKHIR *

MASUKKAN NAMA NOTARIS TERAKHIR

❗ Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

[Cari](#)

- Kemudian lakukan pemesanan nomor voucher pada field **Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan** dengan cara klik **disini** , lalu tampil halaman Pemesanan Nomor Voucher

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas

--PILIH--

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

[BELI](#)

Pada halaman **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan** terdapat pilihan Modal Dasar, yaitu

--PILIH--

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

- Kemudian pilih Modal Dasar untuk perubahan Anggaran Dasar

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

Pembelian voucher sebesar **Rp 150.000**. Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNPB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

☒ Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

[BELI](#)

- Ceklis disclaimer dan klik tombol **BELI**
- Maka tampil form Bukti Pemesanan Nomor Voucher **Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan**

[Cek Pemesanan Voucher](#) [List Voucher](#)



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	:	
BILL ID ^[1]	:	
NAMA PEMOHON	:	
NOMOR REKENING	:	
EMAIL PEMOHON	:	
NOMOR HP	:	
TANGGAL TRANSAKSI	:	
TANGGAL EXPIRED	:	
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	
TAGIHAN	:	Rp 150.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

[Download](#) [Kirim Ulang](#)

- Klik tombol **List Voucher**, maka akan tampil halaman Daftar Voucher



- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor voucher pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada link berikut ini
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas#pembayaran_nomor_voucher
- Jika tagihan sudah terbayar, maka status pembayaran pada halaman Daftar Voucher akan berubah menjadi **Sudah Bayar**

Daftar Voucher

[Riwayat Transaksi](#)

Tanggal Transaksi

Dari

Sampai

Kode Voucher/Bill ID

PENCARIAN KODE VOUCHER

Pelayanan Jasa Hukum

-- SEMUA --

Status

-- SEMUA --

Cari

* Keterangan :

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 1011 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ⁽¹⁾	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1			Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas		Rp. 150.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi

- Klik [Lanjutkan Transaksi](#) untuk menampilkan halaman **Permohonan Perubahan Perseroan** dengan nomor voucher yang sudah dipesan

PERMOHONAN PERUBAHAN PENDING PERSEROAN

☒ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

820

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

820

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

NAMA PERSEROAN *

MASUKKAN NAMA PERSEROAN

NOMOR SURAT *

Masukkan NOMOR SURAT

NOTARIS TERAKHIR *

MASUKKAN NAMA NOTARIS TERAKHIR

❗ Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Cari

- Kemudian lakukan pengisian data pada halaman **Permohonan Perubahan Pending Perseroan** dengan mengisi
 - Nama Perseroan**
 - Nomor Surat**
 - Notaris Terakhir**
 - Lalu klik tombol

Cari

PERMOHONAN PERUBAHAN PENDING PERSEROAN

- ☒ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

820

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

NOMOR VOUCHER
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR PERSEROAN
DAN DATA PERSEROAN

820

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

NAMA PERSEROAN *

1

PT. BUKIT BARU

NOMOR SURAT *

2

0000000000000000

NOTARIS TERAKHIR *

3

NOTARIS TERAKHIR PT. BUKIT BARU

❗ Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Cari

4

- Setelah itu tampil halaman **Persyaratan Utama Perubahan**

Sistem sudah diperbaiki, bagi Notaris yang telah mencetak Tagihan, harap mencetak ulang.

- Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Rp. 1.600.000,-
- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
2. Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Pemberitahuan
- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
3. Perubahan data Perseroan harus bayar

☒ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

820

820

Cari

NAMA	JABATAN
PT	DIREKTUR
MA SYARAKAT	BADAN HUKUM
PEMERINTAH	
NEGARA	KOMISARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	

☒ V. NPWP

LANJUTKAN

- Ceklis Persyaratan Utama
- Ceklis disclaimer
- Klik tombol **LANJUTKAN** maka muncul popup disclaimer



- Kemudian klik tombol **Saya Yakin** lalu masuk ke halaman **Permohonan Perubahan Ringkasan Perseroan**.

Permohonan Perubahan PT [REDACTED] disingkat PT [REDACTED]

Ringkasan Perseroan

Jenis Perseroan PMA

Status Perseroan Tertutup

Jenis Perubahan

- ☒ Persetujuan perubahan anggaran dasar 1
- ☒ Pemberitahuan perubahan anggaran dasar 1
- ☒ Pemberitahuan perubahan data Perseroan 1

Akta Notaris yang dibuat untuk permohonan sekarang.

Nama Notaris: [REDACTED]

Nomor Akta: [REDACTED] Tanggal Akta: [REDACTED] Tambah

Tanggal RUPS / Berita Acara / Notulen Rapat

Tanggal [REDACTED]

Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kehadiran RUPS	NAMA	JABATAN
☒	[REDACTED]	DIREKTUR
☐	PT [REDACTED]	BADAN HUKUM
☒	MASYARAKAT [REDACTED]	
☒	PEMERINTAH	
☐	[REDACTED]	KOMISARIS
☐	NEGARA REPUBLIK INDONESIA	

☒ Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya

KEMBALI LANJUTKAN

Pada halaman **Permohonan Perubahan Ringkasan Perseroan** akan tampil menu fitur untuk jenis perubahan yang diantaranya ialah :

1. Jenis Perubahan yang telah otomatis tercekis terdiri dari 3 bagian diantaranya :

- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.
- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar.
- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

2. Masukkan Nomor Akta notaris yang dibuat untuk permohonan sekarang.
3. Masukkan Tanggal Akta notaris yang dibuat untuk permohonan sekarang.
4. Masukkan Tanggal RUPS/Berita Acara Rapat/Notulen Rapat yang disesuaikan dengan akta PT.
5. Ceklist Kehadiran RUPS pada Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.
6. Masukkan jumlah masyarakat yang hadir dalam RUPS
7. Ceklist jika notaris memberikan semua informasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Klik tombol **LANJUTKAN** maka akan keluar allert perhatian!!!



- Klik tombol **Saya Yakin** akan masuk ke halaman **Permohonan Perubahan**

Permohonan Perubahan

PT BUKU INDONESIA

Silahkan pilih jenis perubahan yang di inginkan:

Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri

- ☐ Nama
- ☐ Tempat kedudukan
- ☐ Maksud dan tujuan serta kegiatan
- ☐ Jangka waktu
- ☐ Peningkatan Modal dasar
- ☐ Pengurangan Modal dasar
- ☐ Pengurangan modal ditempatkan dan disetor
- ☐ Status Perseroan

Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan

- ☐ Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor
- ☐ Jenis Perseroan
- ☐ Pasal 1 ayat 1
- ☐ Pasal 1 ayat 2
- ☐ Pasal 4 ayat 1
- ☐ Pasal 4 Ayat 2
- ☐ Pasal 4 ayat 3
- ☐ Pasal 4 ayat 4
- ☐ Pasal 4 ayat 5
- ☐ Pasal 4 ayat 6
- ☐ Pasal 4 ayat 7
- ☐ Pasal 4 ayat 8
- ☐ Pasal 4 ayat 9
- ☐ Pasal 4 ayat 10
- ☐ Pasal 4 ayat 11
- ☐ Pasal 4 ayat 12
- ☐ Pasal 4 ayat 13
- ☐ Pasal 4 ayat 14
- ☐ Pasal 4 ayat 15
- ☐ Pasal 5
- ☐ Pasal 6
- ☐ Pasal 7
- ☐ Pasal 8
- ☐ Pasal 9
- ☐ Pasal 10
- ☐ Pasal 11
- ☐ Pasal 11 ayat 3
- ☐ Pasal 11 ayat 2.a(4)
- ☐ Pasal 12
- ☐ Pasal 13
- ☐ Pasal 14
- ☐ Pasal 14 Ayat 3
- ☐ Pasal 14 Ayat 5
- ☐ Pasal 15
- ☐ Pasal 16
- ☐ Pasal 17
- ☐ Pasal 18
- ☐ Pasal 19
- ☐ Pasal 20
- ☐ Pasal 21
- ☐ Pasal 22
- ☐ Pasal 23
- ☐ Pasal 24
- ☐ Pasal 25
- ☐ Pasal 26
- ☐ Pasal 27
- ☐ Pasal 28
- ☐ Pasal 29
- ☐ Pasal 30
- ☐ Pasal 31
- ☐ Pasal 32
- ☐ Pasal 33
- ☐ Pasal 34
- ☐ Pasal 35
- ☐ Pasal 36
- ☐ Pasal 37
- ☐ Pasal 38
- ☐ Pasal 39
- ☐ Pasal 40
- ☐ Pasal 41
- ☐ Pasal 42
- ☐ Pasal 43
- ☐ Pasal 44
- ☐ Pasal 45
- ☐ Pasal 46
- ☐ Pasal 47
- ☐ Pasal 48
- ☐ Pasal 49
- ☐ Pasal 50
- ☐ Pasal 51
- ☐ Pasal 52
- ☐ Pasal 53
- ☐ Pasal 54
- ☐ Pasal 55
- ☐ Pasal 56
- ☐ Pasal 57
- ☐ Pasal 58
- ☐ Pasal 59
- ☐ Pasal 60
- ☐ Pasal 61
- ☐ Pasal 62
- ☐ Pasal 63
- ☐ Pasal 64
- ☐ Pasal 65
- ☐ Pasal 66
- ☐ Pasal 67
- ☐ Pasal 68
- ☐ Pasal 69
- ☐ Pasal 70
- ☐ Pasal 71
- ☐ Pasal 72
- ☐ Pasal 73
- ☐ Pasal 74
- ☐ Pasal 75
- ☐ Pasal 76
- ☐ Pasal 77
- ☐ Pasal 78
- ☐ Pasal 79
- ☐ Pasal 80
- ☐ Pasal 81
- ☐ Pasal 82
- ☐ Pasal 83
- ☐ Pasal 84
- ☐ Pasal 85
- ☐ Pasal 86
- ☐ Pasal 87
- ☐ Pasal 88
- ☐ Pasal 89
- ☐ Pasal 90
- ☐ Pasal 91
- ☐ Pasal 92
- ☐ Pasal 93
- ☐ Pasal 94
- ☐ Pasal 95
- ☐ Pasal 96
- ☐ Pasal 97
- ☐ Pasal 98
- ☐ Pasal 99
- ☐ Pasal 100

Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan

- ☐ 1. Direksi dan Komisaris
- ☐ 2. Peralihan saham
- ☐ 3. Ganti nama pemegang saham
- ☐ 4. Pengangkatan Kembali
- ☐ 5. Alamat Lengkap Perseroan

KEMBALI

LANJUTKAN

Tampilan Form **Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri.**

Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri

☒ Nama

Persyaratan Perubahan Nama

☒ Bukti Persetujuan Pemakaian Nama

☒ Tempat kedudukan

Persyaratan Perubahan Tempat Kedudukan

☒ Surat keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung yang dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan setempat atau surat keterangan domisili dari kelurahan atau desa setempat

☒ Maksud dan tujuan serta kegiatan

Persyaratan Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

☒ 1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha harus sesuai dengan Nama Perseroan

☒ 2. Untuk kegiatan usaha khusus agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait seperti :

- Kementerian Pariwisata
- Kementerian ESDM
- Kementerian Komunikasi dan Informasi
- Kementerian Kesehatan terkait Rumah Sakit dan Apotik
- Kementerian Perhubungan
- Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Dan lain-lain

☒ Jangka waktu

☒ Peningkatan Modal dasar

Peringatan Perubahan Peningkatan Modal Dasar

Untuk kegiatan usaha khusus seperti Lembaga Keuangan, PMA, PT Terbuka agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait seperti :
Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Koordinasi Penanaman Modal

☐ Pengurangan Modal dasar

☒ Pengurangan modal ditempatkan dan disetor

☒ Permohonan

Pengumuman Surat Kabar yang telah dilakukan 7 hari setelah RUPS

☒ Setelah jangka waktu 60 hari

1. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor
2. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor
3. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Untuk kegiatan usaha khusus seperti Lembaga Keuangan, PMA, PT Terbuka agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait seperti :

- Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Koordinasi Penanaman Modal

Apabila ada keberatan yang tidak dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Tidak ada keberatan
30 hari (setelah masa pengumuman 60 hari di surat kabar) data akan di hapus

Tanggal RUPS

Tanggal

Pengumuman Surat Kabar

Tanggal Cetak

Nama Surat Kabar

☒ Status Perseroan

☒ Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pada form **Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri** :

1. Ceklis **Nama** jika ada perubahan pada Nama Perseroan
 - Ceklis Persyaratan Perubahan Nama
2. Ceklis **Tempat Kedudukan** jika ada perubahan pada Tempat Kedudukan Perseroan
 - Ceklis Persyaratan Perubahan Tempat Kedudukan
3. Ceklis **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan** jika ada perubahan pada Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan
 - Ceklis Persyaratan Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan
4. Ceklis **Jangka Waktu** jika ada perubahan pada Jangka Waktu Perseroan
5. Ceklis **Peningkatan Modal Dasar** jika ada Peningkatan Modal Dasar Perseroan
6. Ceklis **Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor** jika ada Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor pada Perseroan
 - Ceklis Permohonan
 - Ceklis Setelah jangka waktu 60 hari
 - Isi tanggal RUPS
 - Isi Tanggal Cetak Surat Kabar
 - Isi Nama Surat Kabar
7. Ceklis **Status Perseroan** jika ada perubahan pada Status Perseroan
 - Ceklis Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Tampilan form **Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan**.

Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan

☒ Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor

Peringatan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor

1. Bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal disetor/ditempatkan Perseroan
2. Bukti lainnya selain dengan uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan
3. Bukti lainnya selain dengan uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan benda tidak bergerak ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan
4. Bilaman PMA: Harus memiliki Izin Prinsip BKPM

☒ Jenis Perseroan

Persyaratan Perubahan Jenis Perseroan

☒ Izin Prinsip BKPM

☒ Pasal 1 ayat 1

☒ Pasal 1 ayat 2

☒ Persetujuan Dewan Komisaris

☒ Pasal 4 ayat 1 ⓘ

☐ Pasal 4 Ayat 2 ⓘ

- ☐ Pasal 4 ayat 3
- ☐ Pasal 4 ayat 4
- ☐ Pasal 4 ayat 5
- ☐ Pasal 4 ayat 6
- ☐ Pasal 4 ayat 7
- ☐ Pasal 4 ayat 8
- ☐ Pasal 4 ayat 9
- ☐ Pasal 4 ayat 10
- ☐ Pasal 4 ayat 11
- ☐ Pasal 4 ayat 12
- ☐ Pasal 4 ayat 13
- ☐ Pasal 4 ayat 14
- ☐ Pasal 4 ayat 15
- ☐ Pasal 5
- ☐ Pasal 6
- ☐ Pasal 7
- ☐ Pasal 8
- ☐ Pasal 9
- ☐ Pasal 10
- ☐ Pasal 11
- ☐ Pasal 11 ayat 3
- ☐ Pasal 11 ayat 2.a(4)
- ☐ Pasal 12
- ☐ Pasal 13
- ☐ Pasal 14
- ☐ Pasal 14 Ayat 3
- ☐ Pasal 14 Ayat 5
- ☐ Pasal 15
- ☐ Pasal 16
- ☐ Pasal 17
- ☐ Pasal 18
- ☐ Pasal 19
- ☐ Pasal 20
- ☐ Pasal 21
- ☐ Pasal 22
- ☐ Pasal 23
- ☐ Pasal 24
- ☐ Pasal 25
- ☐ Pasal 26
- ☐ Pasal 27
- ☐ Pasal 28
- ☐ Pasal 29
- ☐ Pasal 30
- ☐ Pasal 31
- ☐ Pasal 32
- ☐ Pasal 33
- ☐ Pasal 34
- ☐ Pasal 35
- ☐ Pasal 36
- ☐ Pasal 37
- ☐ Pasal 38
- ☐ Pasal 39
- ☐ Pasal 40
- ☐ Pasal 41
- ☐ Pasal 42
- ☐ Pasal 43
- ☐ Pasal 44
- ☐ Pasal 45
- ☐ Pasal 46
- ☐ Pasal 47
- ☐ Pasal 48
- ☐ Pasal 49
- ☐ Pasal 50
- ☐ Pasal 51
- ☐ Pasal 52
- ☐ Pasal 53
- ☐ Pasal 54
- ☐ Pasal 55
- ☐ Pasal 56
- ☐ Pasal 57
- ☐ Pasal 58
- ☐ Pasal 59
- ☐ Pasal 60
- ☐ Pasal 61
- ☐ Pasal 62
- ☐ Pasal 63
- ☐ Pasal 64
- ☐ Pasal 65
- ☐ Pasal 66
- ☐ Pasal 67
- ☐ Pasal 68
- ☐ Pasal 69
- ☐ Pasal 70
- ☐ Pasal 71
- ☐ Pasal 72
- ☐ Pasal 73
- ☐ Pasal 74
- ☐ Pasal 75
- ☐ Pasal 76
- ☐ Pasal 77
- ☐ Pasal 78
- ☐ Pasal 79
- ☐ Pasal 80
- ☐ Pasal 81
- ☐ Pasal 82
- ☐ Pasal 83
- ☐ Pasal 84
- ☐ Pasal 85
- ☐ Pasal 86
- ☐ Pasal 87
- ☐ Pasal 88
- ☐ Pasal 89
- ☐ Pasal 90
- ☐ Pasal 91
- ☐ Pasal 92
- ☐ Pasal 93
- ☐ Pasal 94
- ☐ Pasal 95
- ☐ Pasal 96
- ☐ Pasal 97
- ☐ Pasal 98
- ☐ Pasal 99
- ☐ Pasal 100

Pada form **Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan** :

1. Ceklis **Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor** jika ada Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan
2. Ceklis **Jenis Perseroan** jika ada perubahan pada Jenis Perseroan
 - Ceklis Persyaratan Perubahan Jenis Perseroan
3. Ceklis **Pasal** yang mengatur Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan

Tampilan form **Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan**.

Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan

☒ 1. Direksi dan Komisaris

Peringatan Perubahan Data Perseroan

Mohon untuk diperhatikan bahwa untuk beberapa jenis usaha memerlukan Persetujuan tertentu dari Instansi lain. Seperti:

- Fit and Proper Test untuk Jenis Usaha Bank dan Jasa Keuangan
- Izin ESDM untuk Perseroan yang menjalankan Kontrak Karya
- Untuk jenis Usaha lainnya mohon untuk diperhatikan dan di koordinasikan dengan Instansi lain

☒ 2. Peralihan saham

Persyaratan Perubahan Peralihan Saham

Bilamana Perseroan dengan status PMA, izin prinsip BKPM

Bilamana PT Tertutup, Akta pemindahan Hak atas Saham

Bilamana PT Tertutup, Daftar Pemegang Saham

☒ 3. Ganti nama pemegang saham

☒ 4. Pengangkatan Kembali

☒ 5. Alamat Lengkap Perseroan

Persyaratan Perubahan Lengkap Perseroan

☒ Surat keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau nama lain setempat

[KEMBALI](#)[LANJUTKAN](#)

Pada form **Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan** :

1. Ceklis **Direksi dan Komisaris** jika ada perubahan data Direksi dan Komisaris Perseroan
2. Ceklis **Peralihan Saham** jika ada perubahan Peralihan Saham Perseroan
3. Ceklis **Ganti Nama Pemegang Saham** jika ada perubahan Nama Pemegang Saham Perseroan
4. Ceklis **Alamat Lengkap Perseroan** jika ada perubahan Alamat Lengkap Perseroan
 - Ceklis Persyaratan Perubahan Lengkap perseroan

- Klik tombol **LANJUTKAN** maka akan keluar alert perhatian!!!



- Klik tombol **Saya Yakin** untuk menampilkan halaman **Format Isian Perubahan Perseroan Terbatas**

Format Isian Perubahan Perseroan Terbatas

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan

Nama Singkatan

Jenis Perseroan

PMDN FASILITAS

NPWP Perseroan *

Jangka Waktu Perseroan

TIDAK TERBATAS

Status Perseroan

tertutup

KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi

DKI JAKARTA

Kabupaten

JAKARTA SELATAN

DOMISILI PERSEROAN

Alamat Perseroan

RT

RW

Kecamatan

KEBAYORAN BARU

Kelurahan

MELAWAI

Kode Pos

Nomor Telepon

Maksud dan Tujuan

MAKSUD

REAL-ESTAT

TUJUAN

REAL-ESTAT

REAL-ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DIREWA DARI KAWASAN PERMUKAAN

REAL-ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DIREWA

REAL-ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DIREWA

MAKSUD

AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS

TUJUAN

AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS

AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI

AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI

AKTIVITAS ARSITEKTUR

Tambah Data

Hapus

AKTA NOTARIS

Nama Notaris

Nomor Akta

Tanggal Akta

MODAL DASAR *

Klasifikasi Saham

Harga Per Lembar

Jumlah Lembar Saham

Total

Tanpa Klasifikasi

Rp. 1.000

4.000

Rp. 4.000.000

Total modal dasar Rp. 4.000.000

MODAL DITEMPATKAN *

Klasifikasi Saham

Harga Per Lembar

Jumlah Lembar Saham

Total

Tanpa Klasifikasi

Rp. 1.000

4.000

Rp. 4.000.000

Total modal ditempatkan Rp. 4.000.000

MODAL DISETOR *

4.000.000

☒ Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM *

Tambah Data

Nama

Klasifikasi Saham

Jumlah Lembar Saham

Jabatan

Total

Aksi

Tanpa Klasifikasi

1.000

DIREKTUR

Rp. 1.000.000

Perbahani | Hapus

PT

Tanpa Klasifikasi

1.000

BADAN HUKUM

Rp. 1.000.000

Perbahani | Hapus

Masyarakat

Tanpa Klasifikasi

300

Rp. 300.000

Perbahani | Hapus

PEMERINTAH

Tanpa Klasifikasi

700

Rp. 700.000

Perbahani | Hapus

Tanpa Klasifikasi

500

KOMISARIS

Rp. 500.000

Perbahani | Hapus

Negara Republik Indonesia

Tanpa Klasifikasi

500

Rp. 500.000

Perbahani | Hapus

TOTAL LEMBAR SAHAM 4,000

TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR Rp 4,000,000

http://panduan.ahu.go.id/

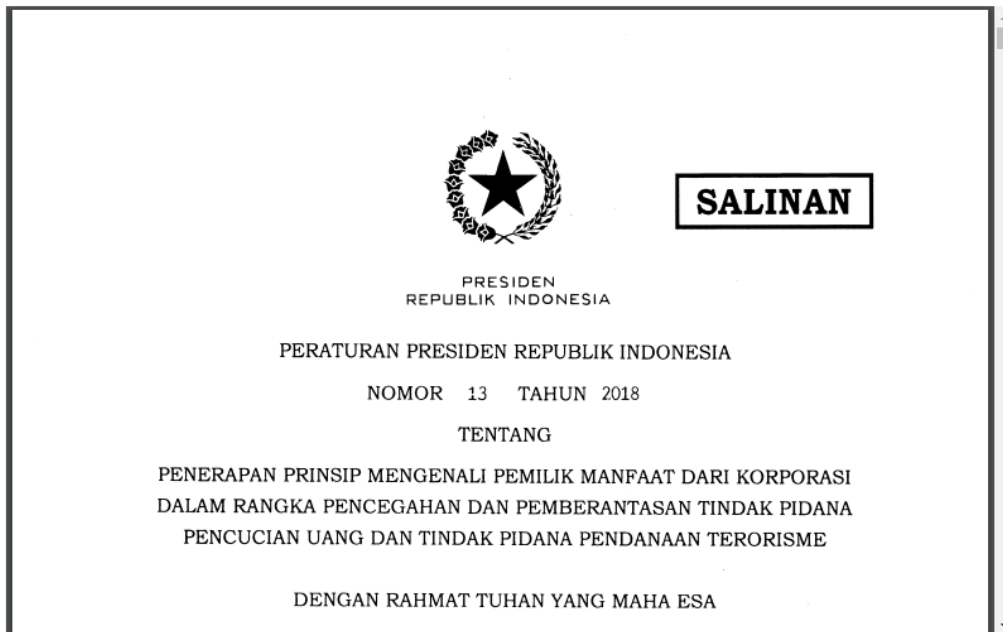
Printed on 2024/05/01 19:44

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☒ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



- ☒ Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- ☒ Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

[Tambah Data](#)

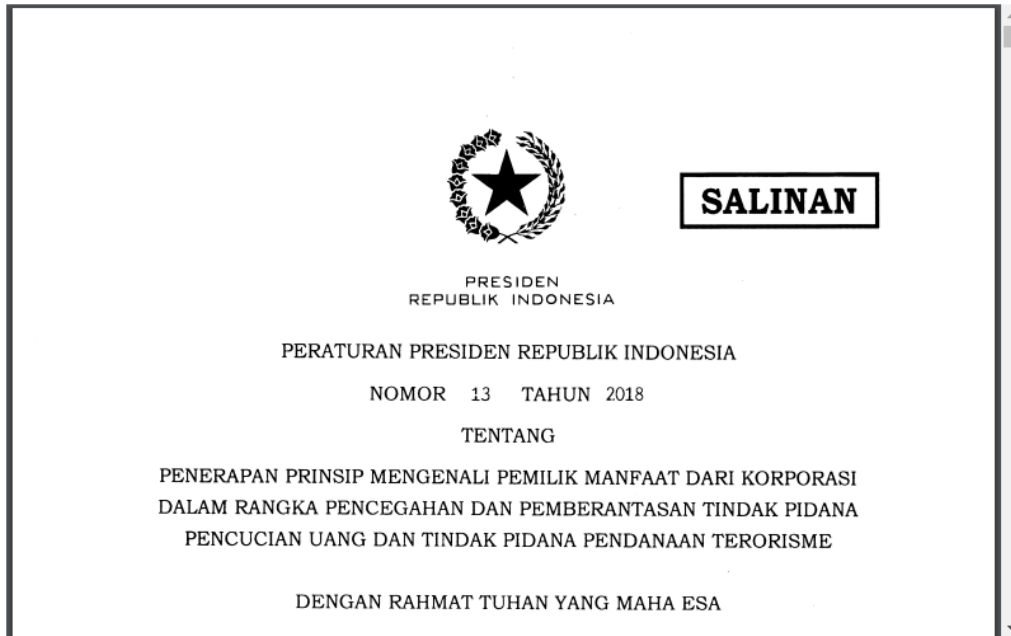
Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
------	-----------------	------------------------	-----------------	--------	------	----------	------

* jika data pemilik manfaat sudah ada pada transaksi sebelumnya

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☒ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.

DOWNLOAD

- ☒ Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- ☒ Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan
						Pemegang Saham

Untuk melakukan pelaporan perubahan atau pengkinian data pemilik manfaat korporasi dapat dilakukan melalui Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi (Beneficial Owner Application) atau melalui tautan berikut <http://bo.ahu.go.id>

Notaris Pengganti

☐ Apakah Anda Notaris Pengganti?

PERSYARATAN

Sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, Saya menyatakan :

☒

1. Bahwa Data yang diisi pada format isian pendirian Perseroan sudah benar.

☒

2. Bahwa Akta Perseroan yang saya buat sebelum mengisi format isian pendirian Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

☒

3. Bahwa Data Perseroan yang diisi dengan dokumen fisik yang disimpan pada kantor saya telah sesuai.

☒

4. Bahwa dokumen-dokumen untuk pendirian Perseroan telah lengkap sebelum saya mengisi format isian pendirian Perseroan.

☒

5. Jika saya dalam proses pengisian data pada format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka saya bersedia menerima sanksi pidana, perdata dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEMBALI

LANJUTKAN

- Ubah data sesuai dengan kebutuhan, setelah itu ceklis persyaratan dan klik tombol Lanjutkan. Kemudian akan tampil pop up Perhatian!!!

Lanjutkan

Perhatian!!!

Saya, notaris **NOTARIS SABH2 S.H., S.H., S.E., M.Kn.** yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

- ☒ 1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.
- ☒ 2. Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- ☒ 3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengklik tombol setuju, Anda telah memperhatikan dan menyetujui serta siap melaksanakan peringatan ini.

Tidak Setuju

Setuju

1. Ceklis semua poin Pernyataan
 2. Klik tombol 
- Selanjutnya akan tampil pop up Surat Pernyataan

Surat Pernyataan

- ☐ 1. Bahwa saya telah mengetahui data terakhir sebagaimana yang tersimpan pada database di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- ☐ 2. Bahwa saya telah membaca dengan cermat serta mengetahui seluruh susunan pemegang saham dan pengurus yang sah berdasarkan data yang tersimpan pada database di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- ☐ 3. Bahwa untuk perubahan yang dilakukan, telah menghadap kepada saya dan saya mengetahui pemegang saham yang sah atau secara sah mewakili mereka, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas.
- ☐ 4. Bahwa bila dikemudian hari, diketahui penghadap bukan pemegang saham yang sah atau bukan mewakili pemegang saham yang sah maka saya menyetujui data yang ada pada database di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai data terakhir sebelum perubahan yang saya lakukan.
- ☐ 5. Bahwa dengan menyetujui pernyataan ini berarti saya siap bertanggung jawab penuh dan saya menandatangani secara sah pernyataan ini.

Dengan mengklik tombol setuju Anda telah menandatangani pernyataan ini secara elektronik.

2

Tidak Setuju

Setuju

1. Ceklis semua poin Surat Pernyataan

2. Klik tombol 

- Kemudian tampil halaman **Pra Tinjau Perubahan Data Perseroan**

PRA TINJAU PERUBAHAN DATA PERSEROAN

Format Isian Perubahan Perseroan Terbatas

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan

Nama Singkatan

Jenis Perseroan

NPWP Perseroan *

Jangka Waktu Perseroan

Status Perseroan

KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi

Kabupaten

Maksud dan Tujuan

MAKSUD

TUJUAN

AKTA NOTARIS

Nama Notaris

Nomor Akta

Tanggal Akta

MODAL DASAR *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	4.000	Rp. 4.000.000

Total modal dasar Rp. 4.000.000

MODAL DITEMPATKAN *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	4.000	Rp. 4.000.000

Total modal ditempatkan Rp. 4.000.000

MODAL DISETOR *

4.000.000

☒ Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM *

Nama	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total
PT	Tanpa Klasifikasi	1.000	DIREKTUR	Rp. 1.000.000
PT	Tanpa Klasifikasi	1.000	BADAN HUKUM	Rp. 1.000.000
Masyarakat	Tanpa Klasifikasi	300		Rp. 300.000
PEMERINTAH	Tanpa Klasifikasi	700		Rp. 700.000
PT	Tanpa Klasifikasi	500	KOMISARIS	Rp. 500.000
Negara Republik Indonesia	Tanpa Klasifikasi	500		Rp. 500.000

TOTAL LEMBAR SAHAM 4.000

TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR Rp 4.000.000

Notaris Pengganti

JENIS PERUBAHAN

Persetujuan perubahan anggaran dasar

Pemberitahuan perubahan anggaran dasar

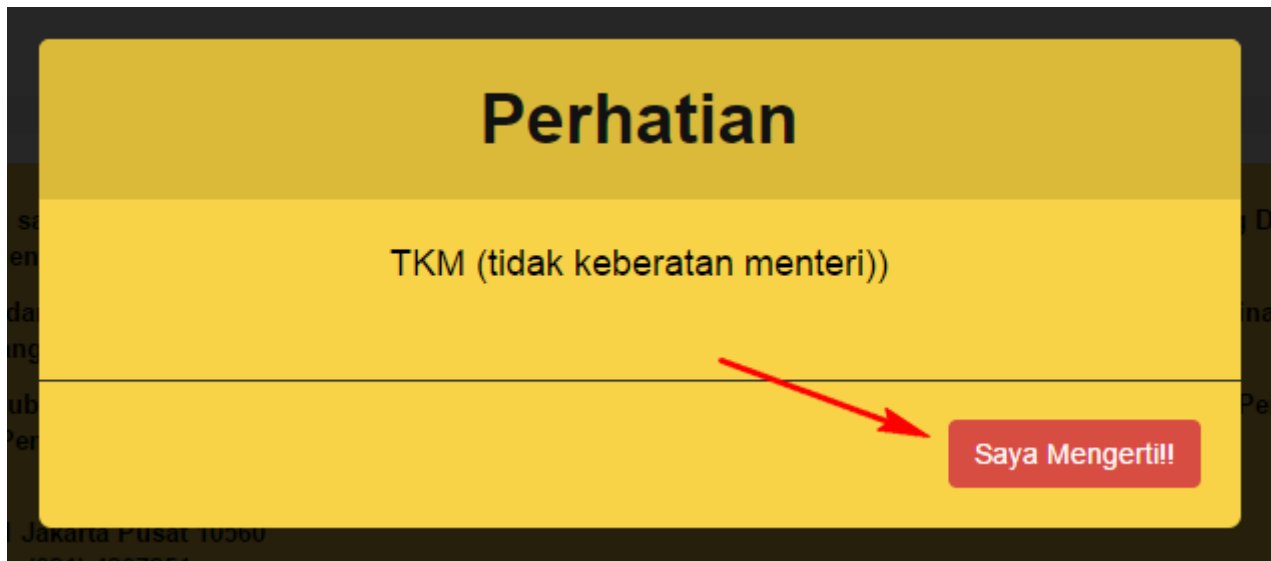
Pemberitahuan perubahan data Perseroan

KEMBALI

SAYA YAKIN

AHU ONLINE - <http://panduan.ahu.go.id/>

1. Klik tombol **Kembali** jika data belum sesuai.
2. Klik tombol **SAYA YAKIN**. Setelah itu akan tampil pop up tidak keberatan Menteri



- Klik tombol **Saya Mengerti!!**

Setelah itu tampil Halaman **Daftar Transaksi Perseroan**

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30 hari kalender dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**. Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun 2019 ▾

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Perubahan	PMDN FASILITAS		SUDAH BAYAR		Pratinjau & Cetak SK/SP Waktu Upload : 30 hari Tanggal Jatuh Tempo : 15 Mei 2020 Sisa Pratinjau : 7 hari Tanggal Habis Pratinjau : 15 Mei 2020 Tagihan PNRI

Pada halaman Daftar Transaksi Perseroan, terdapat beberapa fungsi diantaranya :

1. Tombol **Pratinjau & Cetak SK/SP** untuk melihat data pendirian. **PRATINJAU AKAN BERLAKU SELAMA 7 HARI**

2. Tombol **Tagihan PNRI** untuk mengunduh bukti pembayaran. * **Bukti Tagihan PNRI ini sebagai bukti pembayaran BNRI langsung ke pada pihak BNI, cukup hanya dengan menunjukkan bukti tagihan PNRI.**

**SURAT PERINTAH BAYAR BN/TBN
TERHADAP PERUBAHAN PERSEROAN**

No. Transaksi :
Virtual Account TBNRI & BNRI :
Nama NOTARIS :
Nama PERSEROAN :
Nama Singkatan :
Propinsi Wilayah Pendaftaran :
Kabupaten/Kota Pendaftaran :
Jenis Permohonan : Perubahan Perseroan
Biaya BNRI : RP 30.000
Biaya TBNRI : RP 550.000
Total : RP 580.000

Link Tagihan PNRI merupakan link untuk melakukan download Perintah Bayar BN/TBN RI ke PNRI. Link tersebut tetap akan tampil walaupun pembayaran telah dilakukan karena belum tersedianya Sistem Elektronik di PNRI sehingga antara Sistem AHU dan PNRI belum terhubung.

Untuk mengakses form Pratinjau, klik

Pratinjau & Cetak SK/SP

, maka akan tampil halaman pratinjau data perseroan.

1 2

Kembali Download PDF **Perbaharui Data** Upload Akta Hapus Transaksi

Menteri menyatakan tidak keberatan menteri.

Nomor Transaksi:

DATA PERSEROAN

Nomor SK	
Nama Perseroan	
Nama Singkatan	
Jenis Perseroan	PMDN FASILITAS
NPWP Perseroan	
Jangka Waktu Perseroan	TIDAK TERBATAS

1. Klik tombol **Perbaharui Data** jika masih ada perubahan data/Edit data
2. Jika sudah tidak ada perubahan data/Edit Klik tombol **Upload Akta** maka akan masuk ke halaman upload akta.

Unggah Akta *

1

Akta yang di upload sudah sesuai dengan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 13 ayat (4), pasal 25 ayat (4) dan pasal 28 ayat (4) permen hukum dan ham no 1 tahun 2016 tentang perubahan atas permen hukum dan ham no 4 tahun 2014 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas.

2

Akta yang akan di upload adalah keseluruhan akta, dari judul akta sampai ketentuan penutup dan telah ditandatangani dan diberi stempel oleh notaris

3

Kesalahan terhadap upload akta sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris

Choose Files

nama.pdf

nama.pdf pdf

Akta yang diupload berbentuk file pdf dengan kapasitas maksimal 10 MB
Waktu upload akta paling lambat adalah 30 hari kalender sejak pernyataan tidak keberatan menteri, sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (5) uu 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
Terhadap akta yang telah diupload, tidak dapat dilakukan perbaikan

3

Klik **disini** untuk melihat tutorial mempeprkecil ukuran upload akta dalam bentuk pdf.

Upload

1. Ceklis semua pernyataan diatas.
2. Klik tombol  lalu cari file akta yang akan di upload.
3. Klik tombol , maka akan tampil pop up preview seperti gambar dibawah ini.

PASTIKAN AKTA YANG DI UPLOAD SUDAH BENAR!

No preview available

Terhadap akta yang sudah di upload, tidak dapat dilakukan perbaikan
APAKAH AKTA YANG DI UPLOAD SUDAH BENAR ?

1

Lanjutkan

- Klik tombol **Lanjutkan** setelah itu akan tampil halaman dibawah ini:

TRANSKRIPSI HAPPI BUKAN

Unggah Akta *

1

- ☒ Akta yang di upload sudah sesuai dengan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 13 ayat (4), pasal 25 ayat (4) dan pasal 28 ayat (4) permen hukum dan ham no 1 tahun 2016 tentang perubahan atas permen hukum dan ham no 4 tahun 2014 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas.
- ☒ Akta yang akan di upload adalah keseluruhan akta, dari judul akta sampai ketentuan penutup dan telah ditandatangani dan diberi stempel oleh notaris
- ☒ Kesalahan terhadap upload akta sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris

2

Choose Files

1 file .pdf

3

Akta yang diupload berbentuk file pdf dengan kapasitas maksimal 10 MB
Waktu upload akta paling lambat adalah 30 hari kalender sejak pernyataan tidak keberatan menteri, sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (5) uu 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
Terhadap akta yang telah diupload, tidak dapat dilakukan perbaikan

Klik **disini** untuk melihat tutorial memepkecil ukuran upload akta dalam bentuk pdf.

Upload

1. Tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP** untuk mengakhiri transaksi.
 2. Tombol **Upload Ulang Akta** untuk mengulangi proses upload akta jika terjadi kesalahan upload file.
 3. Tombol **Preview Akta** untuk menampilkan file akta yang telah di upload.
 4. Tombol **Hapus Transaksi** untuk menghapus transaksi.
- Setelah klik tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP**, tampil halaman **Daftar Transaksi Perseroan**.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :

Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560

Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30** hari kalender **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**. Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Perubahan	PMDN FASILITAS		SUDAH BAYAR		Tagihan PNRI SK Perubahan SP Perubahan Anggaran Dasar SP Perubahan Data Perseroan Upload Akta Waktu Perbaikan : 89 hari

Terdapat beberapa SK & SP Perubahan Perseroan yang dapat di download, yaitu :

1. SK Perubahan

- Klik [SK Perubahan](#) untuk mendownload SK Perubahan Perseroan.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :

Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560

Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30** hari kalender **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**. Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun 2019 ▾

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Perubahan	PMDN FASILITAS		SUDAH BAYAR		Tagihan PNRI SK Perubahan SP Perubahan Anggaran Dasar SP Perubahan Data Perseroan Upload Akta Waktu Perbaikan : 89 hari

- Kemudian tampil SK Perubahan Perseroan seperti gambar dibawah ini.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [REDACTED]
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT [REDACTED]

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris [REDACTED] sesuai salinan akta nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] tentang Perubahan Anggaran Dasar PT [REDACTED] disingkat PT [REDACTED] tanggal [REDACTED] dengan Nomor Pendaftaran [REDACTED] telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT [REDACTED] disingkat PT [REDACTED];

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT [REDACTED] disingkat PT [REDACTED] - dengan NPWP [REDACTED] yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] yang dibuat oleh Notaris [REDACTED] yang berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal [REDACTED].

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED]
DAFTAR PERSEROAN NOMOR [REDACTED] TANGGAL [REDACTED]



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [REDACTED]
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT [REDACTED]

1. Modal Dasar : Rp. 4.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 4.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
[REDACTED]	DIREKTUR	-	1.000	Rp. 1.000.000
[REDACTED]	KOMISARIS	-	500	Rp. 500.000
PT [REDACTED]	BADAN HUKUM	-	1.000	Rp. 1.000.000
MASYARAKAT	-	-	300	Rp. 300.000
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	-	-	500	Rp. 500.000
PEMERINTAH	-	-	700	Rp. 700.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal [REDACTED].



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED]
DAFTAR PERSEROAN NOMOR [REDACTED]

TANGGAL [REDACTED]

2. SP Perubahan Anggaran Dasar

- Klik [SP Perubahan Anggaran Dasar](#) untuk mendownload SP Perubahan Anggaran Dasar.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30 hari kalender** **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**.
Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun 2019

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Perubahan	PMDN FASILITAS		SUDAH BAYAR		Tagihan PNRI SK Perubahan SP Perubahan Anggaran Dasar SP Perubahan Data Perseroan Upload Akta Waktu Perbaikan : 89 hari

- Kemudian tampil SP Perubahan Anggaran Dasar seperti gambar dibawah ini.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT

Kepada Yth.
Notaris
Jl. Kerajinan
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor
Tanggal
yang dibuat oleh Notaris
, berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal
, mengenai perubahan Jenis Perseroan, **PT** **disingkat PT**
, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal
.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL

DAFTAR PERSEROAN

TANGGAL

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

3. SP Perubahan Data Perseroan

- Klik [SP Perubahan Data Perseroan](#) untuk mendownload SP Perubahan Data Perseroan.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :

Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560

Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30** hari kalender **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**. Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun 2019 ▾

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Perubahan	PMDN FASILITAS		SUDAH BAYAR		Tagihan PNRI SK Perubahan SP Perubahan Anggaran Dasar SP Perubahan Data Perseroan Upload Akta Waktu Perbaikan : 89 hari

- Kemudian tampil SP Perubahan Data Perseroan seperti gambar dibawah ini.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
 Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : [REDACTED]
 Lampiran :
 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
 Perubahan Data Perseroan
PT [REDACTED]

Kepada Yth.
 Notaris [REDACTED]
 Jl. Kerajinan
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] yang dibuat oleh Notaris [REDACTED], berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT [REDACTED] disingkat PT [REDACTED]**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal [REDACTED].

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED]

DAFTAR PERSEROAN NOMOR [REDACTED] TANGGAL [REDACTED]

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

7. Penyesuaian UU 2007

Penyesuaian oleh Notaris

1. Masuk ke halaman Penyesuaian UU 2007 melalui menu di sebelah kiri

≡ DITJEN AHU ONLINE Pesan SABH

Industri

Daftar Permohonan

Wasiat

Notaris Pengganti

Perseroan Terbatas

Pesan Nama

Pendirian

Perubahan

Penyesuaian UU 2007

Merger

Akuisisi

Pembubaran

Transaksi PT Pending 2013

Daftar Transaksi Perseroan

FAQ

Peraturan Perundangan

Informasi PNBSP:
Kami memohon maaf. Terjadi kesalahan penginputan penagihan PNBSP. Sistem sudah diperbaiki, bagi Notaris yang telah mencetak Tagihan, harap mencetak ulang.

Perincian PNBSP sbb:

1. Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Persetujuan Menteri
 - Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan Rp. 1.000.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
2. Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Pemberitahuan
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
3. Perubahan data Perseroan gratis tidak dipungut biaya

PERMOHONAN PENYESUAIAN PERSEROAN

NAMA PERSEROAN *

NOMOR SK TERAKHIR *

2. Masukkan Nama Perseroan dan Nomor SK Terakhir

≡ DITJEN AHU ONLINE Pesan SABH

Beranda

Daftar Permohonan

Wasiat

Perseroan Terbatas

Yayasan

Perkumpulan

Notaris Pengganti

Login SABH

Informasi PNBSP:
Kami memohon maaf. Terjadi kesalahan penginputan penagihan PNBSP. Sistem sudah diperbaiki, bagi Notaris yang telah mencetak Tagihan, harap mencetak ulang.

Perincian PNBSP sbb:

1. Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Persetujuan Menteri
 - Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan Rp. 1.000.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
2. Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Pemberitahuan
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
3. Perubahan data Perseroan gratis tidak dipungut biaya

PERMOHONAN PENYESUAIAN PERSEROAN

NAMA PERSEROAN 1

NOMOR SK TERAKHIR 2

3

1. Masukkan Nama Perseroan.
2. Masukkan Nomor SK Terakhir.
3. Klik tombol maka akan tampil halaman persyaratan penyesuaian.

Informasi PNBP:
Kami memohon maaf. Terjadi kesalahan penginputan penagihan PNBP.
Sistem sudah diperbaiki, bagi Notaris yang telah mencetak Tagihan, harap mencetak ulang.

Perincian PNBP sbb:

1. Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Persetujuan Menteri
 - Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan Rp. 1.000.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
2. Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Pemberitahuan
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
3. Perubahan data Perseroan gratis tidak dipungut biaya

PERMOHONAN PENYESUAIAN PERSEROAN

NAMA PERSEROAN

NOMOR SK TERAKHIR

Cari

NOMOR SK TERAKHIR:

Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham
------	---------	---------------------

Persyaratan Utama

- I. ☐ Berita acara rapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution)
☐ RUPS
- ☐ II. Akta Notaris dalam bahasa Indonesia
- ☐ III. Tanggal RUPS / Berita Acara Rapat / Notulen Rapat
- ☐ IV. Keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau keterangan domisili dari kelurahan/desa atau nama lain setempat
- ☐ V. NPWP

☐ Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesanggupan saya untuk memenuhi semua Persyaratan Utama diatas.

LANJUTKAN

1. Ceklist semua persyaratan utama.
2. Ceklist jika telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Klik tombol **LANJUTKAN** maka akan keluar allert perhatian!!!

Perhatian !!!

Apakah Anda yakin bahwa tidak ada kesalahan pengisian?

Saya Yakin

Kembali

- Klik tombol **Kembali** akan tampil ke permohonan perubahan awal.
- Klik tombol **Saya Yakin**

3. Masuk ke halaman jenis Permohonan Penyesuaian

Permohonan Penyesuaian

PT SEMEN GUN

Ringkasan Perseroan

Jenis Perseroan : PMDN NON FASILITAS / UMUM

Status Perseroan : Tertutup

Jenis Perubahan

☒ Penyesuaian Undang-Undang PT Tahun 2007

Persetujuan perubahan anggaran dasar ⓘ

Pemberitahuan perubahan anggaran dasar ⓘ

Pemberitahuan perubahan data Perseroan ⓘ

Akta Notaris Terakhir

Nomor Akta: Tanggal Akta: **Tambah Data**

Tanggal

RUPS / Berita Acara Rapat / Notulen Rapat:

☐ Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesanggupan saya untuk memenuhi semua Persyaratan Utama diatas.

KEMBALI **LANJUTKAN**

1. Otomatis terceklist Jenis perubahan Penyesuaian Undang-Undang PT Tahun 2007.
2. Masukkan Nomor Akta Terakhir.
3. Masukkan Tanggal AKta.
4. Klik tombol **Tambah Data** jika nomor akta lebih dari satu.
5. Masukkan Tanggal RUPS/Berita Acara Rapat/Notulen Rapat.
6. Ceklist jika informasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Klik tombol **Kembali** jika ada data yang tidak sesuai
8. Klik tombol **LANJUTKAN** maka akan keluar allert perhatian!!!



- Klik tombol **Kembali** akan tampil ke permohonan penyesuaian awal.
- Klik tombol **Saya Yakin**

4. Masuk ke halaman Permohonan Penyesuaian PT

Permohonan Penyesuaian

PT BERNAMA SAMA

Silahkan pilih jenis perubahan yang di inginkan:

Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri

- ☐ Nama
- ☐ Tempat kedudukan
- ☐ Maksud dan tujuan serta kegiatan
- ☐ Jangka waktu
- ☐ Peningkatan Modal dasar
- ☐ Pengurangan Modal dasar
- ☐ Pengurangan modal ditempatkan dan disetor
- ☐ Status Perseroan
- ☐ Jenis Perseroan
- ☐ Direksi dan Komisaris
- ☐ Peralihan saham
- ☐ Ganti nama pemegang saham
- ☐ Alamat Lengkap Perseroan

KEMBALI **LANJUTKAN**

- Ceklist jenis perubahan yang diinginkan, seperti tampilan dibawah ini :

Permohonan Penyesuaian

PT SEMEN GUN

Silahkan pilih jenis perubahan yang di inginkan:

Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri

☒ Nama

Persyaratan Perubahan Nama

☒ Bukti Persetujuan Pemakaian Nama

☒ Tempat kedudukan

Persyaratan Perubahan Tempat Kedudukan

☒ Surat keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung yang dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan setempat atau surat keterangan domisili dari kelurahan atau desa setempat

☒ Maksud dan tujuan serta kegiatan

Persyaratan Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

☒ 1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha harus sesuai dengan Nama Perseroan

☒ 2. Untuk kegiatan usaha khusus agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait seperti :

- Kementerian Pariwisata
- Kementerian ESDM
- Kementerian Komunikasi dan Informasi
- Kementerian Kesehatan terkait Rumah Sakit dan Apotik
- Kementerian Perhubungan
- Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Dan lain-lain

☒ Jangka waktu

☒ Peningkatan Modal dasar

☒ Permohonan Pengumuman Surat Kabar yang telah dilakukan 7 hari setelah RUPS

☒ Setelah jangka waktu 60 hari

1. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor
2. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor
3. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Untuk kegiatan usaha khusus seperti Lembaga Keuangan, PMA, PT Terbuka agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait seperti

- Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Koordinasi Penanaman Modal

Apabila ada keberatan yang tidak dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Tidak ada keberatan

30 hari (setelah masa pengumuman 60 hari di surat kabar) data akan di hapus

☐ Pengurangan Modal dasar

☐ Pengurangan modal ditempatkan dan disetor

☒ Status Perseroan

☒ Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

☒ Jenis Perseroan

Persyaratan Perubahan Jenis Perseroan

☒ Izin Prinsip BKPM

☒ Direksi dan Komisaris

Peringatan Perubahan Data Perseroan

Mohon untuk diperhatikan bahwa untuk beberapa jenis usaha memerlukan Persetujuan tertentu dari Instansi lain. Seperti:

- Fit and Proper Test untuk Jenis Usaha Bank dan Jasa Keuangan
- Izin ESDM untuk Perseroan yang menjalankan Kontak Karyawan
- Untuk Jenis Usaha lainnya mohon untuk diperhatikan dan di koordinasikan dengan Instansi lain

☒ Peralihan saham

Persyaratan Perubahan Peralihan Saham

Bilamana Perseroan dengan status PMA, izin prinsip BKPM

Bilamana PT Tertutup, Akta pemindahan Hak atas Saham

Bilamana PT Tertutup, Daftar Pemegang Saham

☒ Ganti nama pemegang saham

☒ Alamat Lengkap Perseroan

Persyaratan Perubahan Lengkap Perseroan

☒ Surat keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau nama lain setempat

1. Klik tombol **Kembali** jika ada data yang tidak sesuai
2. Klik tombol **LANJUTKAN** maka akan keluar allert perhatian!!!



5. Masuk ke halaman Isian Penyesuaian Perseroan Terbatas

Format Isian Perubahan Perseroan Terbatas

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan

Nama Singkatan

Jenis Perseroan

PMON FASILITAS

NPWP Perseroan *

Jangka Waktu Perseroan

TIDAK TERBATAS

Status Perseroan

tertutup

KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi

DKI JAKARTA

Kabupaten

JAKARTA SELATAN

DOMISILI PERSEROAN

Alamat Perseroan

RT

RW

Kecamatan

KEBAYORAN BARU

Kelurahan

MELAWAI

Kode Pos

Nomor Telepon

Maksud dan Tujuan

MAKSUD

REAL-ESTAT

TUJUAN

REAL-ESTAT

REAL-ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DIREWA DARI KAWASAN PERMUKAAN

REAL-ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DIREWA

REAL-ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DIREWA

MAKSUD

AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS

TUJUAN

AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS

AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI

AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI

AKTIVITAS ARSITEKTUR

Tambah Data

Hapus

AKTA NOTARIS

Nama Notaris

Nomor Akta

Tanggal Akta

MODAL DASAR *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	4.000	Rp. 4.000.000

Total modal dasar Rp. 4.000.000

MODAL DITEMPATKAN *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	4.000	Rp. 4.000.000

Total modal ditempatkan Rp. 4.000.000

MODAL DISETOR *

4.000.000

☒ Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM *

Tambah Data

Nama	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total	Aksi
PT	Tanpa Klasifikasi	1.000	DIREKTUR	Rp. 1.000.000	Perbahani Hapus
PT	Tanpa Klasifikasi	1.000	BADAN HUKUM	Rp. 1.000.000	Perbahani Hapus
Masyarakat	Tanpa Klasifikasi	300		Rp. 300.000	Perbahani Hapus
PEMERINTAH	Tanpa Klasifikasi	700		Rp. 700.000	Perbahani Hapus
PT	Tanpa Klasifikasi	500	KOMISARIS	Rp. 500.000	Perbahani Hapus
Negara Republik Indonesia	Tanpa Klasifikasi	500		Rp. 500.000	Perbahani Hapus

TOTAL LEMBAR SAHAM 4,000

TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR Rp 4,000,000

http://panduan.ahu.go.id/

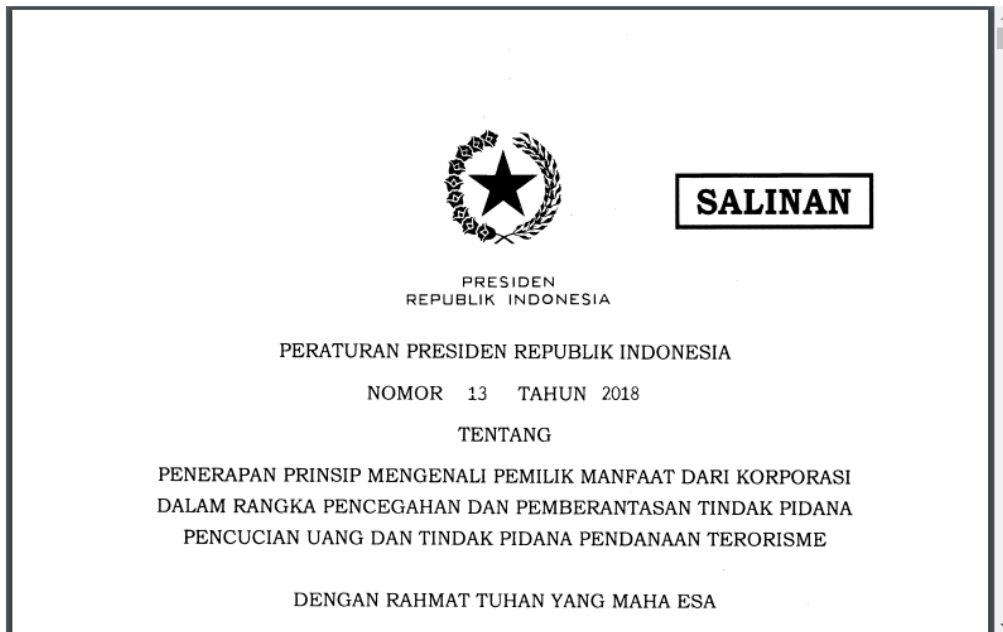
Printed on 2024/05/01 19:44

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☒ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



- ☒ Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- ☒ Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

[Tambah Data](#)

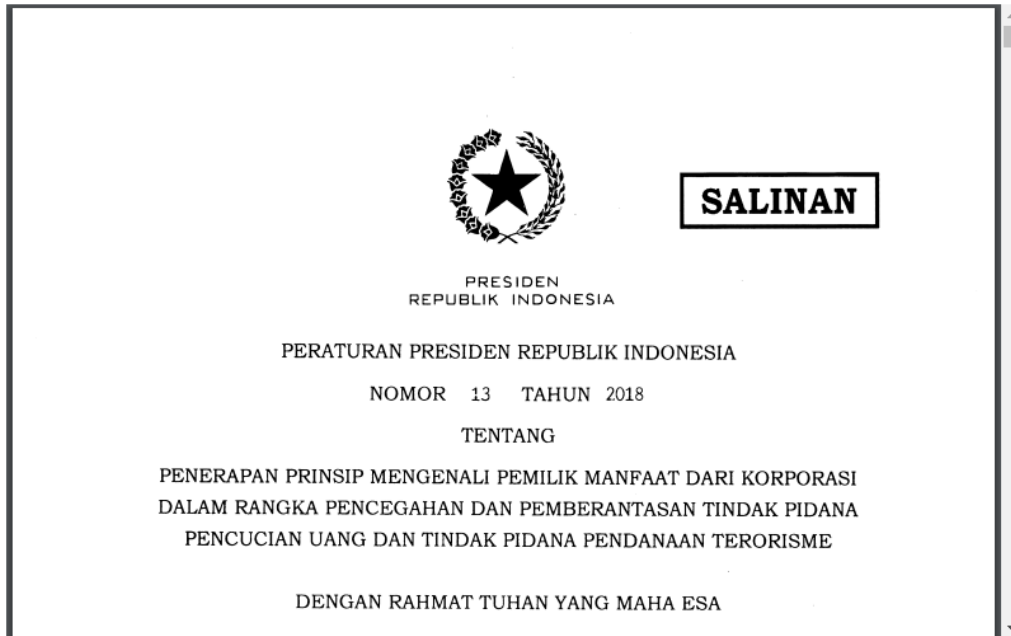
Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
------	-----------------	------------------------	-----------------	--------	------	----------	------

* jika data pemilik manfaat sudah ada pada transaksi sebelumnya

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☒ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.

DOWNLOAD

- ☒ Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- ☒ Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan
						Pemegang Saham

Untuk melakukan pelaporan perubahan atau pengkinian data pemilik manfaat korporasi dapat dilakukan melalui Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi (Beneficial Owner Application) atau melalui tautan berikut <http://bo.ahu.go.id>

Notaris Pengganti

☐ Apakah Anda Notaris Pengganti?

PERSYARATAN

Sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, Saya menyatakan :

- ☒ 1. Bahwa Data yang diisi pada format isian pendirian Perseroan sudah benar.
- ☒ 2. Bahwa Akta Perseroan yang saya buat sebelum mengisi format isian pendirian Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ☒ 3. Bahwa Data Perseroan yang diisi dengan dokumen fisik yang disimpan pada kantor saya telah sesuai.
- ☒ 4. Bahwa dokumen-dokumen untuk pendirian Perseroan telah lengkap sebelum saya mengisi format isian pendirian Perseroan.
- ☒ 5. Jika saya dalam proses pengisian data pada format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka saya bersedia menerima sanksi pidana, perdata dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEMBALI

LANJUTKAN

- Klik tombol

Lanjutkan

6. Masuk ke halaman Pra Tinjau Penyesuaian Data Perseroan

PRA TINJAU PERUBAHAN DATA PERSEROAN

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan

PMDN FASILITAS

NPWP Perseroan *

Jangka Waktu Perseroan

Status Perseroan

KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi

Kabupaten

Maksud dan Tujuan *

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan

AKTA NOTARIS

Nomor Akta

Tanggal Akta

MODAL DASAR *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp 1.000.000	125.000	Rp 125.000.000.000

Total modal dasar Rp 125.000.000.000

MODAL DITEMPATKAN *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp 1.000.000	65.000	Rp 65.000.000.000

Total modal ditempatkan Rp 65.000.000.000

MODAL DISETOR *

Rp 65.000.000.000

☒ Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM *

Nama	Modal ditempatkan	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total
	Tanpa Klasifikasi	10.000	PRESIDEN DIREKTUR	Rp 10.000.000.000
	Tanpa Klasifikasi	10.000	KOMISARIS INDEPENDEN	Rp 10.000.000.000

Selain Perseroan BUMN dan BUMD pemegang saham wajib lebih dari satu.

Notaris Pengganti

JENIS PERUBAHAN

Persetujuan perubahan anggaran dasar

Pemberitahuan perubahan anggaran dasar

Pemberitahuan perubahan data Perseroan

1

2

KEMBALI

SAYA YAKIN

1. Klik tombol **Kembali** jika data belum sesuai.
2. Klik tombol **SAYA YAKIN**

6. Masuk ke halaman daftar transaksi perseroan

DITJEN AHU ONLINE
Pesan
SABH

Beranda
Daftar Permohonan
Wasiat
Perseroan Terbatas
Yayasan
Perkumpulan
Notaris Pengganti
Login SABH

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :
 Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
 Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Daftar Transaksi Perseroan

No.	NOMOR TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	JENIS PERSEROAN	NAMA PERSEROAN	STATUS TRANSAKSI	TANGGAL TRANSAKSI	Download
1	4014051631260004	Perubahan	PMDN FASILITAS	PT. LESTARI BAKTI	BELUM BAYAR	16 Mei 2014	- Tagihan - Permohonan
2	4014051636400011	Penggabungan	PMDN FASILITAS	PT. LESTARI BAKTI	SUDAH BAYAR	16 Mei 2014	- SK Perubahan - SP Perubahan Anggaran Dasar - SP Perubahan Data Perseroan - SP Penggabungan Perseroan

- Klik dan download tagihan bukti perubahan perseroan



DITJEN AHU

BUKTI PERUBAHAN PERSEROAN

No. Transaksi	:	[REDACTED]
Nama NOTARIS	:	[REDACTED]
Nama PERSEROAN	:	[REDACTED]
Propinsi Wilayah Pendaftaran	:	DKI JAKARTA
Kabupaten/Kota Pendaftaran	:	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Jenis Permohonan	:	Perubahan Perseroan
Biaya PNPB	:	RP 1.000.000
Biaya TBNRI	:	RP 550.000
Biaya BNRI	:	RP 30.000

- Klik dan download permohonan perubahan perseroan

BUKTI PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

Nama NOTARIS	:	[REDACTED]
Nama PERSEROAN	:	[REDACTED]
Propinsi Wilayah	:	JAWA BARAT
Kabupaten/Kota	:	KOTA BEKASI

8. Ketika status transaksi sudah bayar perubahan PT tersebut, maka akan muncul SK Perubahan

- SK Perubahan dan Lampirannya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-00002.40.27.2014
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris [REDACTED] sesuai Akta Nomor 12 Tanggal 01 Mei 2014 tentang Perubahan Badan Hukum [REDACTED] tanggal 19 Mei 2014 dengan Nomor Pendaftaran [REDACTED] telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Perubahan Badan Hukum Perseroan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum [REDACTED]

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Menyetujui Perubahan Badan Hukum - [REDACTED] - dengan NPWP [REDACTED] yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.12 Tanggal 01 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris [REDACTED] yang berkedudukan di KOTA PALEMBANG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2014
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-00002.40.27.2014 TANGGAL 19 Mei 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-00002.40.27.2014
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Modal Dasar : Rp. 125.000.000.000,00
 2. Modal Ditempatkan : Rp. 65.000.000.000,00
 3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
	PRESIDEN DIREKTUR	-	10.000	Rp 10.000.000.000
	KOMISARIS INDEPENDEN	-	10.000	Rp 10.000.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2014
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-00002.40.27.2014 TANGGAL 19 Mei 2014

8. Penyesuaian Pending UU 2007

1. Masuk ke halaman Penyesuaian PT menu

di sebelah kiri

DITJEN AHU ONLINE Pesan

Notaris SABH ganti
Email: erlina@docotel.co.id
Username: SABH

Profil Notaris

Nama Lengkap	: Notaris SABH ganti	Nama Kecil	: PRANUDIO TRI YUDHO
Dahulu bernama / Alias	: YUDHO	Nomor Induk Kependudukan	: 6345264765334534
Nomor NPWP	: 1.123.123.1-001	Tanggal Lahir	: 13 December 1950
Tempat Lahir	: JAKARTA	Nomor Akta Lahir / Tanda Kenal Lahir	: AHU-NO-AKTA.XXII
Tanggal Terbit Akta Lahir / Tanda Kenal Lahir	: 01 November 2030	Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status Perkawinan	: Lajang	Agama	: ISLAM
Email Alternatif	: notariat@docotel.com	Email	: erlina@docotel.co.id
		Nomor Handphone	: 081317496921

Nomor SK Kehakiman	: 1-ISTIMEWA	Tanggal SK Kehakiman	: 2009-06-02
Nomor SK Pelantikan	: A.42/GSB/HUK-III/2000	Tanggal SK Pengangkatan	: 24 February 2014
Nomor SK Pengangkatan	: AHU-00353.AH.02.02.TAHUN 2014	Nomor SK MENDAGRI	: 1-ISTIMEWA
Tanggal SK MENDAGRI	: 2009-06-02	No Sertifikat SABH	: JD/KJ/78/0XOXO
Tanggal Sertifikat SABH	: 10 June 2008	Nomor Sertifikat Kode Etik	: JNDK/XOXO/839374/OXOX
Tanggal Sertifikat Kode Etik	: 17 August 2005	Wilayah Jabatan Notaris	: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

2. Masukkan Nama Perseroan, Nomor Surat dan Notaris Terakhir

DITJEN AHU ONLINE Pesan

PERMOHONAN PENYESUAIAN PENDING PERSEROAN

NAMA PERSEROAN *

MASUKKAN NAMA PERSEROAN 1

NOMOR SURAT *

Masukkan NOMOR SURAT 2

Cari 3

1. Masukkan Nama Perseroan yang pending.
2. Masukkan Nomor Surat yang tertera pada surat yang dikirim oleh Kementerian.
3. Tekan tombol **Cari** maka akan tampil halaman persyaratan utama perubahan.

PERMOHONAN PENYESUAIAN PENDING PERSEROAN

NAMA PERSEROAN

LAK TIGER & TIGER

NOMOR SURAT *

AHU2.AH.01.01-651

Cari

NOMOR SK TERAKHIR:

C-20664 HT.01.04.TH.2006

Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Nama

Jabatan

Nama Pemegang Saham

Komisaris

Nama Komisaris

Direktur

Nama Komisaris Utama

Komisaris Utama

Nama Direktur Utama

Direktur Utama

Persyaratan Utama

- I. ☐ Berita acara rapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution)
☐ RUPS

☐ II. Akta Notaris dalam bahasa Indonesia

☐ III. Tanggal RUPS / Berita Acara Rapat / Notulen Rapat

☐ IV. Keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau keterangan domisili dari kelurahan/desa atau nama lain setempat

☐ V. NPWP

☐ Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesanggupan saya untuk memenuhi semua Persyaratan Utama diatas.

LANJUTKAN

LANJUTKAN

- Setelah persyaratan sudah di ceklist semua, Klik tombol LANJUTKAN maka akan keluar allert perhatian!!! yang meyakinkan notaris tidak ada kesalahan dalam pengisiannya.

Perhatian !!!

Apakah Anda yakin bahwa tidak ada kesalahan pengisian?

Saya Yakin

Kembali

- Klik tombol Kembali akan tampil ke persyaratan utama perubahan awal.

- Klik tombol **Saya Yakin** akan masuk ke halaman permohonan perubahan ringkasan perseroan.

Permohonan Penyesuaian

PT LIA TOURS & TRAVEL

Ringkasan Perseroan

Jenis Perseroan : PMDN NON FASILITAS / UMUM

Status Perseroan : Tertutup

Jenis Perubahan

☒ Penyesuaian Undang-Undang PT Tahun 2007
Persetujuan perubahan anggaran dasar ⓘ
Pemberitahuan perubahan anggaran dasar ⓘ
Pemberitahuan perubahan data Perseroan ⓘ

Akta Notaris Terakhir

Nomor Akta: Tanggal Akta:

Tanggal

RUPS / Berita Acara Rapat /
Notulen Rapat:

☐ Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesanggupan saya untuk memenuhi semua Persyaratan Utama diatas.

KEMBALI **LANJUTKAN**

* Perhatikan pada Akta Notaris

- Pada akta notaris untuk nomor akta dan tanggal akta sudah otomatis terisi sesuai dengan data PT Pending.

-Jika data sudah terisi semua lalu tekan tombol **LANJUTKAN** untuk melanjutkan proses perubahan.

3. Tampil Permohonan Perubahan

- Tampilan form perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan.

Permohonan Penyesuaian

PT SEMEN GUN

Silahkan pilih jenis perubahan yang di inginkan:

Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri

☒ Nama

Persyaratan Perubahan Nama

☒ Bukti Persetujuan Pemakaian Nama

☒ Tempat kedudukan

Persyaratan Perubahan Tempat Kedudukan

☒ Surat keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung yang dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan setempat atau surat keterangan domisili dari kelurahan atau desa setempat

☒ Maksud dan tujuan serta kegiatan

Persyaratan Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

☒ 1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha harus sesuai dengan Nama Perseroan

☒ 2. Untuk kegiatan usaha khusus agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait seperti :

- Kementerian Pariwisata
- Kementerian ESDM
- Kementerian Komunikasi dan Informasi
- Kementerian Kesehatan terkait Rumah Sakit dan Apotik
- Kementerian Perhubungan
- Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Dan lain-lain

☒ Jangka waktu

☒ Peningkatan Modal dasar

☒ Permohonan
Pengumuman Surat Kabar yang telah dilakukan 7 hari setelah RUPS

☒ Setelah jangka waktu 60 hari

1. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor
2. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor
3. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Untuk kegiatan usaha khusus seperti Lembaga Keuangan, PMA, PT Terbuka agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait seperti

- Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Koordinasi Penanaman Modal

Apabila ada keberatan yang tidak dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Tidak ada keberatan

30 hari (setelah masa pengumuman 60 hari di surat kabar) data akan di hapus

☐ Pengurangan Modal dasar

☐ Pengurangan modal ditempatkan dan disetor

☒ Status Perseroan

☒ Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

☒ Jenis Perseroan

Persyaratan Perubahan Jenis Perseroan

☒ Izin Prinsip BKPM

☒ Direksi dan Komisaris

Peringatan Perubahan Data Perseroan

Mohon untuk diperhatikan bahwa untuk beberapa jenis usaha memerlukan Persetujuan tertentu dari Instansi lain. Seperti:

- Fit and Proper Test untuk Jenis Usaha Bank dan Jasa Keuangan
- Izin ESDM untuk Perseroan yang menjalankan Kontak Karyawan
- Untuk Jenis Usaha lainnya mohon untuk diperhatikan dan di koordinasikan dengan Instansi lain

☒ Peralihan saham

Persyaratan Perubahan Peralihan Saham

Bilamana Perseroan dengan status PMA, izin prinsip BKPM

Bilamana PT Tertutup, Akta pemindahan Hak atas Saham

Bilamana PT Tertutup, Daftar Pemegang Saham

☒ Ganti nama pemegang saham

☒ Alamat Lengkap Perseroan

Persyaratan Perubahan Lengkap Perseroan

☒ Surat keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau nama lain setempat

1

KEMBALI

2

LANJUTKAN

http://panduan.ahu.go.id/

Printed on 2024/05/01 19:44

- Jika permohonan perubahan sudah diceklis, Klik tombol **LANJUTKAN** maka akan keluar allert perhatian!!!



- Klik tombol **Saya Yakin**

4. Masuk ke halaman Format Isian Perubahan Perseroan

Format Isian Perubahan Perseroan Terbatas

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan

Nama Singkatan

Jenis Perseroan

PMON FASILITAS

NPWP Perseroan *

Jangka Waktu Perseroan

TIDAK TERBATAS

Status Perseroan

tertutup

KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi

DKI JAKARTA

Kabupaten

JAKARTA SELATAN

DOMISILI PERSEROAN

Alamat Perseroan

RT

RW

Kecamatan

KEBAYORAN BARU

Kelurahan

MELAWAI

Kode Pos

Nomor Telepon

Maksud dan Tujuan

MAKSUD

REAL-ESTAT

Batal Hapus

TUJUAN

REAL-ESTAT

REAL-ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DIREWA DARI KAWASAN PERMUKAAN

REAL-ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DIREWA

REAL-ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DIREWA

MAKSUD

AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS

Hapus

TUJUAN

AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS

AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI

AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI

AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI

AKTIVITAS ARSITEKTUR

Tambah Data

AKTA NOTARIS

Nama Notaris

Nomor Akta

Tanggal Akta

MODAL DASAR *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	4.000	Rp. 4.000.000

Total modal dasar Rp. 4.000.000

MODAL DITEMPATKAN *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	4.000	Rp. 4.000.000

Total modal ditempatkan Rp. 4.000.000

MODAL DISETOR *

4.000.000

☒ Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM *

Tambah Data

Nama	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total	Aksi
PT	Tanpa Klasifikasi	1.000	DIREKTUR	Rp. 1.000.000	Perbahani Hapus
PT	Tanpa Klasifikasi	1.000	BADAN HUKUM	Rp. 1.000.000	Perbahani Hapus
Masyarakat	Tanpa Klasifikasi	300		Rp. 300.000	Perbahani Hapus
PEMERINTAH	Tanpa Klasifikasi	700		Rp. 700.000	Perbahani Hapus
PT	Tanpa Klasifikasi	500	KOMISARIS	Rp. 500.000	Perbahani Hapus
Negara Republik Indonesia	Tanpa Klasifikasi	500		Rp. 500.000	Perbahani Hapus

TOTAL LEMBAR SAHAM 4.000

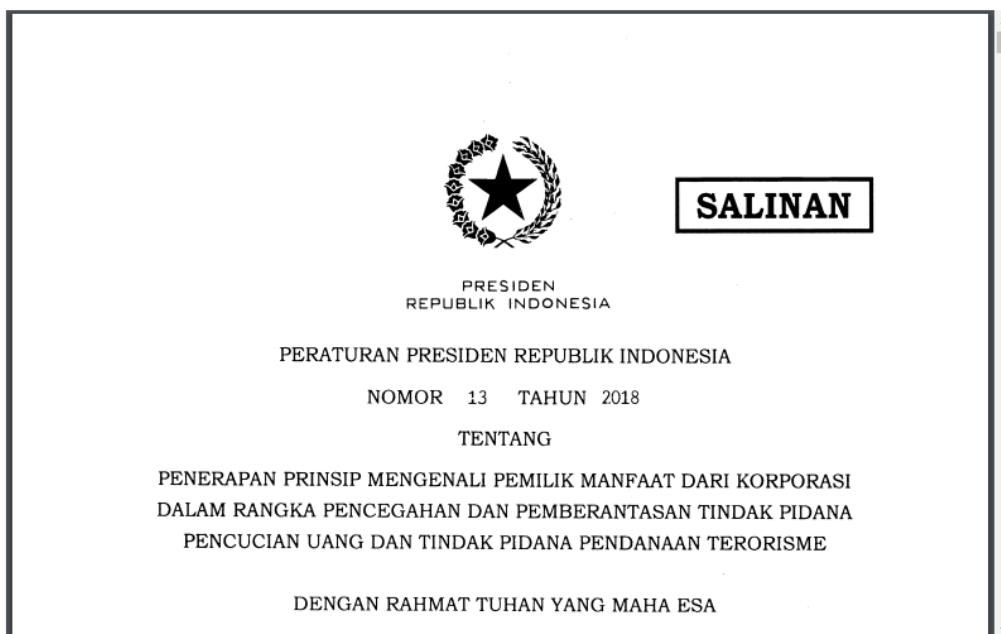
TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR Rp 4.000.000

AHU ONLINE - <http://panduan.ahu.go.id/>

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☒ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.

DOWNLOAD

- ☒ Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- ☒ Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Tambah Data

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
------	-----------------	------------------------	-----------------	--------	------	----------	------

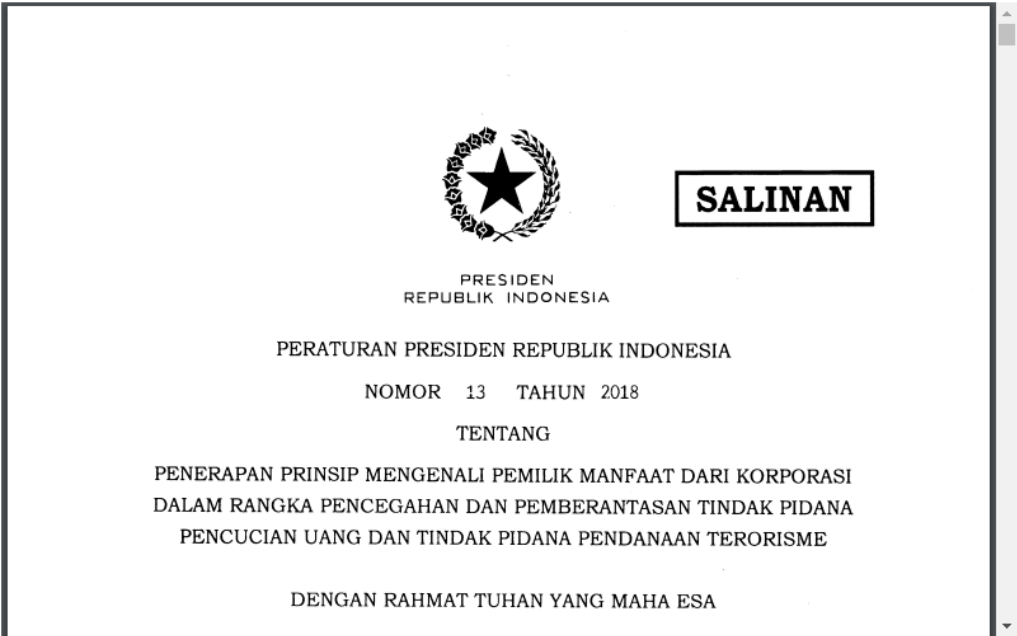
* jika data pemilik manfaat sudah ada pada transaksi sebelumnya

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☒ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



DOWNLOAD

- ☒ Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- ☒ Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan
...	...	...	...	...	...	Pemegang Saham

Untuk melakukan pelaporan perubahan atau pengkinian data pemilik manfaat korporasi dapat dilakukan melalui Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi (Beneficial Owner Application) atau melalui tautan berikut <http://bo.ahu.go.id>

Notaris Pengganti

☐ Apakah Anda Notaris Pengganti?

PERSYARATAN

Sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, Saya menyatakan :

- ☒ 1. Bahwa Data yang diisi pada format isian pendirian Perseroan sudah benar.
- ☒ 2. Bahwa Akta Perseroan yang saya buat sebelum mengisi format isian pendirian Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ☒ 3. Bahwa Data Perseroan yang diisi dengan dokumen fisik yang disimpan pada kantor saya telah sesuai.
- ☒ 4. Bahwa dokumen-dokumen untuk pendirian Perseroan telah lengkap sebelum saya mengisi format isian pendirian Perseroan.
- ☒ 5. Jika saya dalam proses pengisian data pada format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka saya bersedia menerima sanksi pidana, perdata dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEMBALI

LANJUTKAN

- Klik tombol

Lanjutkan

5. Masuk ke halaman Pra Tinjau Perubahan Data Perseroan

PRA TINJAU PERUBAHAN DATA PERSEROAN

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan

Jenis Perseroan

NPWP Perseroan *

Jangka Waktu Perseroan

Status Perseroan

KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi

Kabupaten

Maksud dan Tujuan *

Maksud dan Tujuan

AKTA NOTARIS

Nomor Akta

Tanggal Akta

MODAL DASAR *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp 1.000.000	50.000	Rp 50.000.000.000

Total modal dasar Rp 50.000.000.000

MODAL DITEMPATKAN *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp 1.000.000	25.000	Rp 25.000.000.000

Total modal ditempatkan Rp 25.000.000.000

MODAL DISETOR *

Rp 25.000.000.000

☒ Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM *

Nama	Modal ditempatkan	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total
	Tanpa Klasifikasi	500	DIREKTUR UTAMA	Rp 500.000.000
	Tanpa Klasifikasi	1.000	KOMISARIS	Rp 1.000.000.000

Selain Perseroan BUMN dan BUMD pemegang saham wajib lebih dari satu.

Notaris Pengganti

JENIS PERUBAHAN

Persetujuan perubahan anggaran dasar

Pemberitahuan perubahan anggaran dasar

Pemberitahuan perubahan data Perseroan

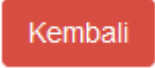
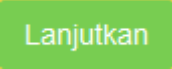
1

KEMBALI

SAYA YAKIN

2

- Fungsi halaman pratinjau adalah untuk dilihat kembali adanya data yang tidak sesuai dengan akta pada saat penginputan atau data yang salah saat melakukan penginputan sebelum tersimpan.

1. Klik tombol  jika data tidak sesuai.
2. Klik tombol 

6. Masuk ke halaman daftar transaksi perseroan

* Pada Penyesuaian PT Pending, secara otomatis langsung download SK Penyesuaian tanpa ada tagihan

≡ DITJEN AHU ONLINE   SABH

Beranda
Daftar Permohonan
Waslat +
Perseroan Terbatas +
Yayasan +
Perkumpulan +
Notaris Pengganti

Daftar Transaksi Perseroan

Tampilkan 10 records 17 yang tersedia secara otomatis

No.	Nomor Transaksi	JENIS TRANSAKSI	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1	4014071636250005	Perubahan	PMDN FASILITAS	PT. BUKIT BARU BANGUN		16 Juli 2014	SP Perubahan Anggaran Dasar SP Perubahan Data Perseroan
2	4014071662500003	Pembubaran	PMDN NON FASILITAS / UMUM	PT. BUKIT BARU BANGUN		16 Juli 2014	SP Pembubaran
3	4014071631270002	Perubahan	PMDN NON FASILITAS / UMUM	PT. BUKIT BARU BANGUN	SUDAH BAYAR	16 Juli 2014	SK Perubahan
4	4014071636200002	Perubahan	PMDN NON FASILITAS / UMUM	PT. BUKIT BARU BANGUN	SUDAH BAYAR	16 Juli 2014	SK Perubahan
5	4014071634220004	Perubahan	PMDN NON FASILITAS / UMUM	PT. BUKIT BARU BANGUN		16 Juli 2014	SP Perubahan Data Perseroan

9. Merger

Menu Merger digunakan oleh Notaris untuk melakukan penggabungan terhadap 2 (dua) PT (Perseroan Terbatas).

- Untuk mengakses menu ini klik menu **Perseroan Terbatas** → **Merger** seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

≡ DITJEN AHU ONLINE Pesan PEMBAYARAN PNBP SECARA ONLINE

Beranda Notaris

Fidusia

Wasiat

Notaris Pengganti

Perseroan Terbatas

Pesan Nama dan Pendirian

Pendirian

Pendirian Pending

Perubahan

Perubahan Pending **new**

Merger

Penyesuaian UU 2007

Penyesuaian Pending UU 2007 **new**

Akuisisi

Riwayat Permohonan

Edit Profil

Surat Keterangan

Surat Keputusan

Permohonan Cuti

Permohonan Perubahan Data Notaris

Pemberhentian Notaris

Permohonan Pindah Wilayah

Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan

Nama : [REDACTED]

Email : [REDACTED]

Username : [REDACTED]

Status : notaris

Profil Notaris

Informasi KTA

Nomor KTA : [REDACTED]

No Rekening : [REDACTED]

- Kemudian tampil halaman **Permohonan Merger Perseroan** dibawah ini.

PERMOHONAN MERGER PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NAMA PERSEROAN *

MASUKKAN NAMA PERSEROAN

NOMOR SK TERAKHIR *

Masukkan NOMOR SK TERAKHIR

Nomor SK merupakan Nomor Surat Keputusan Menteri. Bukan Nomor Surat Pemberitahuan.

NOTARIS TERAKHIR *

MASUKKAN NAMA NOTARIS TERAKHIR

Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Cari

Pada halaman **Permohonan Merger Perseroan** terdapat fitur untuk memesan nomor *voucher* perubahan perseroan sekaligus dengan beberapa ketentuan, diantaranya :

- Jika ingin memesan nomor *voucher* point 1 sampai 3, maka akan muncul *field* nomor *voucher* sesuai yang dipilih dan otomatis point 4 *disable* atau tidak bisa dipilih seperti gambar dibawah ini.

- ☒ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- ☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- ☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN D/

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN
PERUBAHAN DATA PERSEROAN

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSE

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

- Jika ingin memesan nomor *voucher* point 1 dan 4, maka akan muncul *field* nomor *voucher* sesuai yang dipilih dan otomatis point 2 dan 3 *disable* atau tidak bisa dipilih seperti gambar dibawah ini.

- ☒ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- ☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN D/

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

Untuk melakukan pemesanan Nomor *Voucher* Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan dengan cara :

1. ceklis **Nomor *Voucher* Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**
2. lalu tampil kolom pengisian Nomor *Voucher*

PERMOHONAN MERGER PERSEROAN

- ☒ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR P

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

3. klik **disini**
4. kemudian tampil *form* **Pemesanan Nomor *Voucher* Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas**

Cek Nomor Voucher

Daftar Voucher

Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM *

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

Pembelian voucher sebesar **Rp 1.000.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNBP yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

☒ Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI

- Ceklis *disclaimer* dan klik tombol

BELI

, lalu tampil form **Bukti Pemesanan Nomor Voucher**

Cek Pemesanan Voucher

List Voucher



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
BADAN HUKUM
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

KODE VOUCHER	:	12345678901234567890
BILL ID ^[1]	:	12345678901234567890
NAMA PEMOHON	:	PT. ABCD KAWAN BUKU BUKU BUKU
NOMOR REKENING	:	001111111111
EMAIL PEMOHON	:	abcde.anggrawan@gmail.com
NOMOR HP	:	081234567890
TANGGAL TRANSAKSI	:	17 Nov 2019 15:45:45
TANGGAL EXPIRED	:	31 Nov 2019 23:59:59
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	
TAGIHAN	:	Rp 1.000.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Download

- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor *voucher* pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada point **Pembayaran Nomor Voucher**

- Jika tagihan sudah terbayar, klik tombol **List Voucher**, maka akan tampil halaman **Daftar Voucher**

Daftar Voucher

Riwayat Transaksi

Tanggal Transaksi: Dari Sampai Kode Voucher/Bill ID: Pelayanan Jasa Hukum: Status:

*** Keterangan :**

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 960 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1			Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas		Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi

- Klik **Lanjutkan Transaksi** untuk menampilkan halaman **Permohonan Merger Perseroan** dengan nomor *voucher* yang sudah dipesan

PERMOHONAN MERGER PERSEROAN

☒ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

Untuk melakukan pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan dengan cara :

- ceklis **Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**
- lalu tampil kolom pengisian Nomor Voucher

PERMOHONAN MERGER PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

- klik **disini**
- kemudian tampil form **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran**

Dasar Perseroan

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

--PILIH--

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

[BELI](#)

Pada halaman **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan** terdapat pilihan Modal Dasar, yaitu :

--PILIH--

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

- Kemudian pilih **Modal Dasar** untuk Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

Pembelian voucher sebesar **Rp 150.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNPB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

☒ Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI

- Ceklis *disclaimer* dan klik tombol **BELI**
- Maka tampil *form* **Bukti Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas**

[Cek Pemesanan Voucher](#) [List Voucher](#)



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
**Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas**
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua
Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	:	-
BILL ID ^[1]	:	XXXXXXXXXXXX
NAMA PEMOHON	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOMOR REKENING	:	XXXXXXXXXXXX
EMAIL PEMOHON	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOMOR HP	:	XXXXXXXXXXXX
TANGGAL TRANSAKSI	:	18 Agustus 2019 10:00:00
TANGGAL EXPIRED	:	21 Agustus 2019 23:59:59
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	
TAGIHAN	:	Rp 150.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

[Download](#) [Kirim Ulang](#)

- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor *voucher* pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada point **Pembayaran Nomor Voucher**.
- Jika tagihan sudah terbayar, klik tombol [List Voucher](#), maka akan tampil halaman **Daftar Voucher**

Daftar Voucher

Riwayat Transaksi

Tanggal Transaksi
 Dari Sampai

Kode Voucher/Bill ID

Pelayanan Jasa Hukum

Status

*** Keterangan :**

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 1121 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1			Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas		Rp. 150.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi

- Klik [Lanjutkan Transaksi](#) untuk menampilkan halaman **Permohonan Merger Perseroan** dengan nomor *voucher* yang sudah dipesan

PERMOHONAN MERGER PERSEROAN

NOMOR VOUCHER
 PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
 ANGGARAN DASAR PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☒ **NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN**
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

820

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

Untuk melakukan pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dapat dilakukan dengan cara :

- ceklis **Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan**
- lalu tampil kolom pengisian Nomor Voucher

PERMOHONAN MERGER PERSEROAN

NOMOR VOUCHER
 PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
 DATA PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☒ **NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN**
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

- klik [disini](#)
- kemudian tampil form **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas**

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas

--PILIH--

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

[BELI](#)

Pada halaman **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas** terdapat pilihan Modal Dasar, yaitu :

--PILIH--

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

- Kemudian pilih **Modal Dasar** untuk Perubahan Data Perseroan Terbatas

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

Pembelian voucher sebesar **Rp 150.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNPB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

☒ Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

[BELI](#)

- Ceklis *disclaimer* dan klik tombol **BELI**
- Maka tampil *form* **Bukti Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas**

Cek Pemesanan Voucher

List Voucher



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	:	-
BILL ID ^[1]	:	XXXXXXXXXXXX
NAMA PEMOHON	:	PT. ABCD, Jalan No. 123, Jakarta
NOMOR REKENING	:	XXXXXXXXXX
EMAIL PEMOHON	:	XXXXXXXXXX@XXXXXX.CO.ID
NOMOR HP	:	XXXXXXXXXX
TANGGAL TRANSAKSI	:	14 Agustus 2019 10:00:00
TANGGAL EXPIRED	:	14 Agustus 2019 23:59:59
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	
TAGIHAN	:	Rp 150.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Kirim Ulang

Download

- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor *voucher* pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada point **Pembayaran Nomor Voucher**.
- Jika tagihan sudah terbayar, klik tombol **List Voucher**, maka akan tampil halaman **Daftar Voucher**

Daftar Voucher

Riwayat Transaksi

Tanggal Transaksi
 Dari Sampai

Kode Voucher/Bill ID

Pelayanan Jasa Hukum

Status

*** Keterangan :**

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 1122 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1	820		Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas		Rp. 150.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi

- Klik [Lanjutkan Transaksi](#) untuk menampilkan halaman **Permohonan Merger Perseroan** dengan nomor *voucher* yang sudah dipesan

PERMOHONAN MERGER PERSEROAN

NOMOR VOUCHER
 PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
 DATA PERSEROAN

820

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

☐ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

Untuk melakukan pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan dapat dilakukan dengan cara :

- ceklis **Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan**
- lalu tampil kolom pengisian Nomor Voucher

PERMOHONAN MERGER PERSEROAN

NOMOR VOUCHER
 PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
 ANGGARAN DASAR PERSEROAN
 DAN DATA PERSEROAN

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGG/

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

☐ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

- klik [disini](#)
- kemudian tampil form **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dan Data Perseroan Terbatas**

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas

--PILIH--

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

[BELI](#)

Pada halaman **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dan Data Perseroan Terbatas** terdapat pilihan Modal Dasar, yaitu:

--PILIH--

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

- Kemudian pilih **Modal Dasar** untuk Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

Pembelian voucher sebesar **Rp 150.000**. Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNPB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

☒ Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

[BELI](#)

- Ceklis *disclaimer* dan klik tombol [BELI](#)
- Maka tampil form **Bukti Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran**

Dasar Perseroan Terbatas Dan Data Perseroan Terbatas

[Cek Pemesanan Voucher](#) [List Voucher](#)



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	:	
BILL ID ^[1]	:	
NAMA PEMOHON	:	
NOMOR REKENING	:	
EMAIL PEMOHON	:	
NOMOR HP	:	
TANGGAL TRANSAKSI	:	
TANGGAL EXPIRED	:	
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	
TAGIHAN	:	Rp 150.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

[Download](#) [Kirim Ulang](#)

- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor *voucher* pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada point **Pembayaran Nomor Voucher**.
- Jika tagihan sudah terbayar, klik tombol [List Voucher](#), maka akan tampil halaman **Daftar Voucher**

Daftar Voucher

[Riwayat Transaksi](#)

Tanggal Transaksi
 Dari Sampai

Kode Voucher/Bill ID

Pelayanan Jasa Hukum

Status

*** Keterangan :**

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 1011 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^(*)	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1			Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas		Rp. 150.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi

- Klik [Lanjutkan Transaksi](#) untuk menampilkan halaman **Permohonan Merger Perseroan** dengan nomor voucher yang sudah dipesan

PERMOHONAN MERGER PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER
 PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
 ANGGARAN DASAR PERSEROAN
 DAN DATA PERSEROAN

820

• Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik disini untuk pembelian voucher.

- Kemudian lakukan pengisian data pada halaman **Permohonan Merger Perseroan** dengan mengisi

- Nama Perseroan**
- Nomor SK Terakhir**
- Notaris Terakhir**
- Lalu klik tombol

PERMOHONAN MERGER PERSEROAN

- ☐ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- ☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
DATA PERSEROAN

820

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

NAMA PERSEROAN

HALO HALO BANDUNG

NOMOR SK TERAKHIR

AHU-

Nomor SK merupakan Nomor Surat Keputusan Menteri. Bukan Nomor Surat Pemberitahuan.

NOTARIS TERAKHIR

NOTARIS TERAKHIR

❗ Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Cari

- Setelah itu tampil halaman **Persyaratan Utama Permohonan Merger Perseroan**

PERMOHONAN MERGER PERSEROAN

- ☐ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- ☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
DATA PERSEROAN

820

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

NAMA PERSEROAN

PT. ABC KAWASAN BANGKALAN

NOMOR SK TERAKHIR

AHU-

Nomor SK merupakan Nomor Surat Keputusan Menteri. Bukan Nomor Surat Pemberitahuan.

NOTARIS TERAKHIR

NOTARIS BANGKALAN, KAW. BANGKALAN, KAW.

❗ Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Cari

NOMOR SK TERAKHIR: AHU-1000017/2024/01/01 Tahun 2024

Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham
NEGARA REPUBLIK INDONESIA		Tanpa Klasifikasi : 30
		Tanpa Klasifikasi : 120
	DIREKTUR	
	DIREKTUR	
	PRESIDEN KOMISARIS	
	KOMISARIS INDEPENDEN	

Persyaratan Utama

- I. ☒ Berita acara rapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution)
☐ RUPS
- ☒ II. Akta Notaris dalam bahasa Indonesia
- ☒ III. Tanggal RUPS / Berita Acara Rapat / Notulen Rapat
- ☒ IV. Keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau keterangan domisili dari kelurahan/desa atau nama lain setempat
- ☒ V. NPWP

☒ Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya

LANJUTKAN

1. Ceklis Persyaratan Utama
2. Ceklis *disclaimer*
3. Klik tombol **LANJUTKAN** maka muncul popup *disclaimer*



- Kemudian klik tombol **Saya Yakin**, lalu masuk ke halaman **Ringkasan Perseroan**.

PERMOHONAN MERGER PERSEROAN

PT HALO HALO BANDUNG disingkat PT H

Ringkasan Perseroan

Jenis Perseroan : SWASTA NASIONAL

Status Perseroan : Tertutup

Jenis Penyesuaian

☒ Penggabungan
☐ Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar ⓘ
☐ Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ⓘ
☒ Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ⓘ

☒ Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesanggupan saya untuk memenuhi semua Persyaratan Utama diatas.

KEMBALI **LANJUTKAN**

Pada halaman **Ringkasan Perseroan** terdapat :

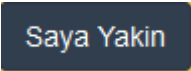
1. **Jenis Perseroan**, **Status Perseroan** dan **Jenis Penyesuaian** telah otomatis terceklis sesuai dengan pemesanan nomor *voucher* sebelumnya.
2. Ceklis *disclaimer*
3. Lalu klik tombol **LANJUTKAN** maka akan muncul popup perhatian!!!



- Klik tombol **Saya Yakin** maka akan tampil halaman **Permohonan Merger Perseroan untuk Pengisian data penggabungan Perseroan**.

- Klik tombol **Tambah Perseroan**
- Kemudian **isikan Perseroan** yang ingin dilakukan penggabungan
- Isikan **Nomor Akta Penggabungan**
- Isikan **Tanggal Akta Penggabungan**
- Ceklis *disclaimer*
- Lalu klik tombol **LANJUTKAN** maka akan muncul popup perhatian!!!



- Klik tombol  maka akan tampil halaman **Permohonan Merger untuk Pengisian data RUPS**

Permohonan Merger

PT **HALO HALO BANDUNG** disingkat PT H

Tanggal

RUPS / Berita Acara
Rapat / Notulen Rapat:

1

Pengumuman Surat Kabar

Tanggal Cetak:

Nama Surat Kabar:

Tanggal Efektif:

Tambah

2

Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kehadiran RUPS	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham
☒	NEGARA REPUBLIK INDONESIA		Tanpa Klasifikasi : 30
☒			Tanpa Klasifikasi : 120
☐		DIREKTUR	
☒		PRESIDEN KOMISARIS	
☒		KOMISARIS INDEPENDEN	

3

Persyaratan Utama

● Perseroan Tertutup

☒ Langsung kepada pemegang saham, Akta Pemindahan Hak Atas Saham

● Akta Notaris

○ Akta dibawah tangan

☒ Melalui Direksi☒ a. Pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut☒ b. Rancangan Pengambilalihan (akuisisi)☒ c. Akta Pemindahan Hak Atas Saham

● Akta Notaris

○ Akta di bawah tangan

○ Perseroan Terbuka

4

5



Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya

KEMBALI

LANJUTKAN

6

1. Isikan **Tanggal RUPS**
2. Isikan **Pengumuman Surat Kabar**
3. Ceklis **Kehadiran RUPS**
4. Ceklis **Persyaratan Utama**
5. Ceklis *disclaimer*
6. Lalu klik tombol **LANJUTKAN** maka akan muncul popup perhatian!!!



- Klik tombol **Saya Yakin** maka akan tampil halaman **Permohonan Perubahan**

Permohonan Perubahan

PT **PT HILLO HILLO BANDUNG** disingkat PT **HH**

Silahkan pilih jenis perubahan yang di inginkan:

Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan

- ☒ 1. Direksi dan Komisaris
- ☐ 2. Peralihan saham
- ☒ 3. Ganti nama pemegang saham
- ☐ 4. Alamat Lengkap Perseroan

Peringatan Perubahan Data Perseroan

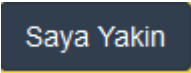
Mohon untuk diperhatikan bahwa untuk beberapa jenis usaha memerlukan Persetujuan tertentu dari Instansi lain. Seperti:

- Fit and Proper Test untuk Jenis Usaha Bank dan Jasa Keuangan
- Izin ESDM untuk Perseroan yang menjalankan Kontrak Karya
- Untuk Jenis Usaha lainnya mohon untuk diperhatikan dan di koordinasikan dengan Instansi lain

KEMBALI **LANJUTKAN**

1. Pada halaman Permohonan Perubahan, pilih jenis perubahan yang diinginkan
2. Klik tombol **LANJUTKAN** maka akan muncul popup perhatian!!!



- Klik tombol  akan masuk ke halaman **Format Isian Merger Perseroan Terbatas**

Format Isian Merger Perseroan Terbatas

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan

Nama Singkatan

Jenis Perseroan

NPWP Perseroan *

Jangka Waktu Perseroan

Status Perseroan

KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi

Kabupaten

DOMISILI PERSEROAN

Alamat

RT

RW

Kecamatan

Kelurahan/Desa

Kode Pos

Nomor Telepon

Maksud dan Tujuan

MAKSUD

TUJUAN

MAKSUD

TUJUAN

MAKSUD

TUJUAN

AKTA PENGABUGAN

Nomor Akta

Nomor Akta

Tanggal Akta

MODAL DASAR *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 10.000	400	Rp. 4.000.000

Total modal dasar Rp. 4.000.000

MODAL DITEMPATKAN *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 10.000	150	Rp. 1.500.000

Total modal ditempatkan Rp. 1.500.000

MODAL DISETOR *

Rp. 1.500.000

☒ Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM *

Tambah Data

Nama	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total	Aksi
Negara Republik Indonesia	Tanpa Klasifikasi	30		Rp. 300.000	Perbahasil Hapus
DIREKTUR	Tanpa Klasifikasi	100	DIREKTUR	Rp. 1.000.000,00	Perbahasil Hapus
	Tanpa Klasifikasi	20	KOMISARIS	Rp. 200.000,00	Perbahasil Hapus

Selain Perseroan BUMN dan BUMD pemegang saham wajib lebih dari satu.

DAFTAR PERSEROAN

Perseroan Yang Di Merger

Nama Perseroan

Nomor SK Terakhir

Perseroan Yang Menerima Merger

Nama Perseroan

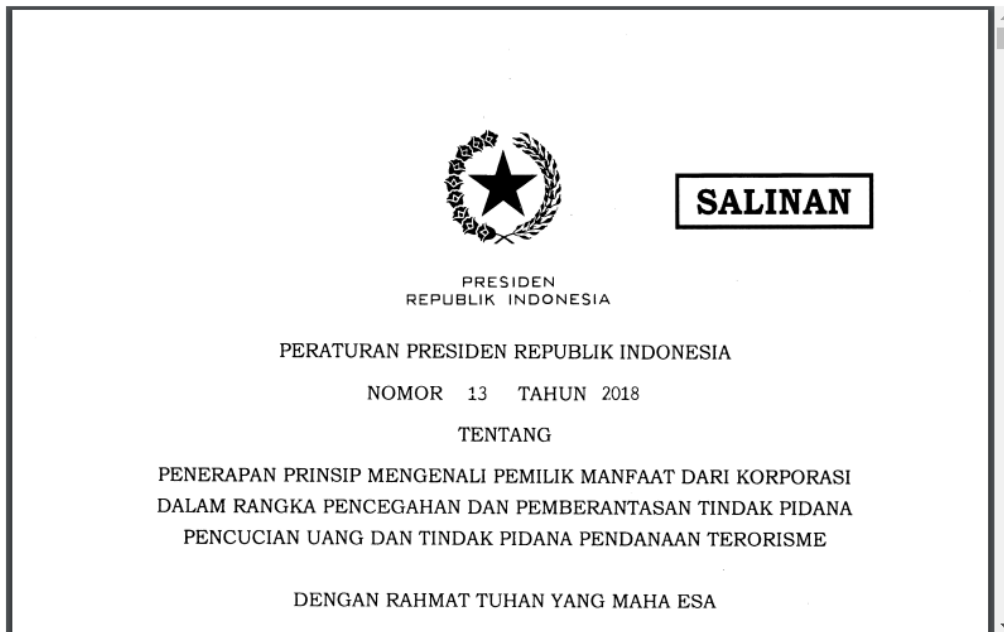
Nomor SK Terakhir

AHU ONLINE - <http://panduan.ahu.go.id/>

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☒ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.

DOWNLOAD

- ☒ Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- ☒ Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Tambah Data

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
------	-----------------	------------------------	-----------------	--------	------	----------	------

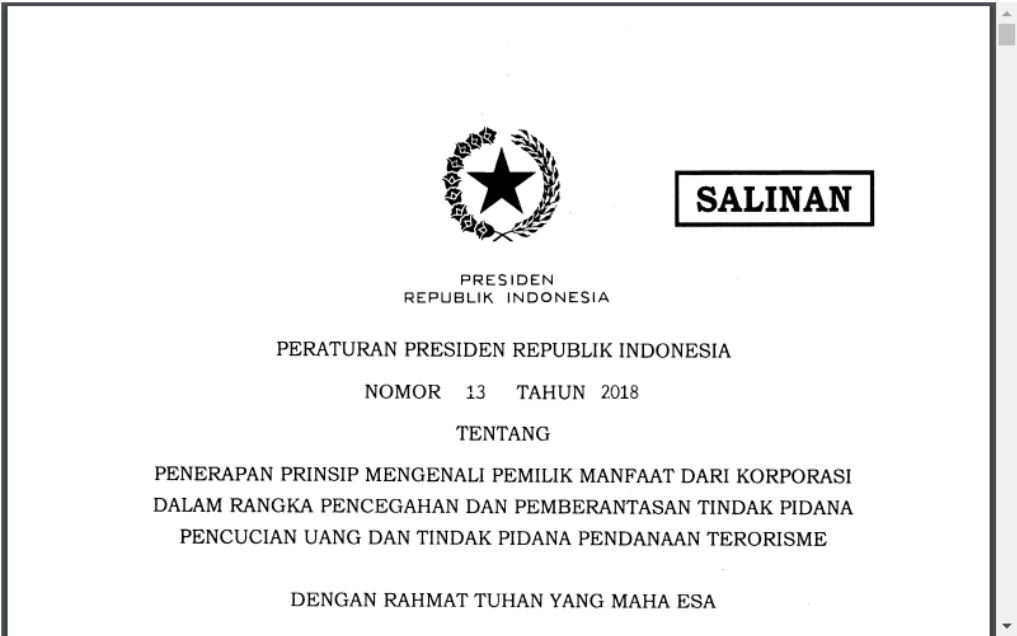
* jika data pemilik manfaat sudah ada pada transaksi sebelumnya

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☒ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



DOWNLOAD

- ☒ Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- ☒ Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan
...	...	...	...	...	...	Pemegang Saham

Untuk melakukan pelaporan perubahan atau pengkinian data pemilik manfaat korporasi dapat dilakukan melalui Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi (Beneficial Owner Application) atau melalui tautan berikut <http://bo.ahu.go.id>

Notaris Pengganti

☐ Apakah Anda Notaris Pengganti?

PERSYARATAN

Sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, Saya menyatakan :

- ☒ 1. Bahwa Data yang diisi pada format isian pendirian Perseroan sudah benar.
- ☒ 2. Bahwa Akta Perseroan yang saya buat sebelum mengisi format isian pendirian Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ☒ 3. Bahwa Data Perseroan yang diisi dengan dokumen fisik yang disimpan pada kantor saya telah sesuai.
- ☒ 4. Bahwa dokumen-dokumen untuk pendirian Perseroan telah lengkap sebelum saya mengisi format isian pendirian Perseroan.
- ☒ 5. Jika saya dalam proses pengisian data pada format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka saya bersedia menerima sanksi pidana, perdata dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEMBALI

LANJUTKAN

- Ubah data sesuai dengan jenis perubahan yang dipilih
- Ceklis persyaratan dan klik tombol **Lanjutkan**
- Kemudian akan tampil halaman **Pra Tinjau Merger Data Perseroan**

PRA TINJAU MERGER DATA PERSEROAN

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan

Nama Singkatan

Jenis Perseroan

NPWP Perseroan *

Jangka Waktu Perseroan

Status Perseroan

KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi

Kabupaten

DOMISILI PERSEROAN

Alamat

RT

RW

Kecamatan

Kode Pos

Nomor Telepon

Maksud dan Tujuan

MAKSUD

TUJUAN

MAKSUD

TUJUAN

MAKSUD

TUJUAN

AKTA PENGABUNGAN

Nomor Akta

Nomor Akta

Tanggal Akta

MODAL DASAR *

Klasifikasi Saham

Harga Per Lembar

Jumlah Lembar Saham

Total

MODAL DITEMPAHKAN *

Klasifikasi Saham

Harga Per Lembar

Jumlah Lembar Saham

Total

MODAL DISETOR *

Rp. 1.500.000

☒ Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM *

Nama

Klasifikasi Saham

Jumlah Lembar Saham

Jabatan

Total

DAFTAR PERSEROAN

Perseroan Yang Di Merger

Perseroan Yang Menerima Merger

Notaris Pengganti

JENIS PERUBAHAN

Pemberitahuan perubahan data Perseroan

Direksi dan Komisaris Ganti nama pemegang saham

KIRIM ULANG

SAYA YAKIN

AHU ONLINE - <http://panduan.ahu.go.id/>

- Klik tombol **SAYA YAKIN**. Setelah itu akan tampil halaman **Daftar Transaksi Perseroan**

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30** hari kalender **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**. Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun 2019 ▾

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Penggabungan	SWASTA NASIONAL		SUDAH BAYAR		Pratinjau & Cetak SK/SP Waktu Upload : 30 hari Tanggal Jatuh Tempo : Sisa Pratinjau : 7 hari Tanggal Habis Pratinjau :

- Klik tombol **Pratinjau & Cetak SK/SP** untuk melihat data penggabungan. **PRATINJAU AKAN BERLAKU SELAMA 7 HARI**

Kembali

Download PDF

Perubahan Data

Upload Akta

Logus Transaksi

Mentor menyatakan tidak keberatan mentor:

PT ABCD - PT BHIKIDUKA

Nomor Transaksi: 4011308198644200001

DATA PERSEROAN

Nomor SK

AHU-000000000000000000000000

Nama Perseroan

PT ABCD - PT BHIKIDUKA

Nama Singkatan

PT

Jenis Perseroan

NPWP Perseroan

000000000000000000000000

Jangka Waktu Perseroan

TIDAK TERBATAS

Status Perseroan

tertutup

KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi

KALIMANTAN TIMUR

Kabupaten

KABUPATEN KUTAI BARAT

DOMISILI PERSEROAN

Alamat

XX

RT

5

RW

5

Kecamatan

NYUATAN

Kelurahan

MAJUT

Kode POS

76000

Nomor Telepon

081234567890

Email

info@abcd.com

Tahun Buku

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD TUJUAN

PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI
PETERNAKAN
PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA
PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA

MAKSUD TUJUAN

PENGLOLAAN AIR LIMBAH, PENGLOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI
PENGLOLAAN AIR LIMBAH
PENGLOLAAN AIR LIMBAH
PENGUMPULAN AIR LIMBAH
PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA

MAKSUD TUJUAN

REAL ESTAT
REAL ESTAT
REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARWISATA
REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA

AKTA NOTARIS

Nama

NOTARIS BERNAMA SUDH, S.H., S.H., S.H.

Nomor Akta

000000000000000000000000

Tanggal Akta

2024-05-01

MODAL DASAR

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 10.000	400	Rp. 4.000.000

Total modal dasar Rp. 4.000.000

MODAL DITEMPATKAN

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 10.000	150	Rp. 1.500.000

Total modal ditempatkan Rp. 1.500.000

MODAL DISETOR

Rp. 1.500.000

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Pemanggu Jawab	Modal ditempatkan	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total
Negara Republik Indonesia	Tidak	Tanpa Klasifikasi	30		Rp. 300.000
DIREKTUR	Tidak	Tanpa Klasifikasi	100	DIREKTUR	Rp. 1.000.000
MANAJER	Ya	Tanpa Klasifikasi	20	KOMISARIS	Rp. 200.000

Pemilik Manfaat

No	Pemilik Manfaat	Data Pemilik Manfaat	Kriteria Pemilik Manfaat
1	DIREKTUR	Tipe Pemilik Manfaat: Perseroan Nama: DIREKTUR NIK: 11111111111111111111 Tanggal Lahir: 1999-05-01 Alamat: 000000 Kewarganegaraan: WNI NPWP: 11111111111111111111 Hubungan: Pemegang Saham	a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar c. Menikmati keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota dewan dan anggota dewan komisaris

DAFTAR PERSEROAN

Perseroan Yang Di Merger

Nama Perseroan

Nomor SK Terakhir

000000000000000000000000

AHU-000000000000000000000000

Perseroan Yang Menerima Merger

Nama Perseroan

Nomor SK Terakhir

PT 000000000000000000000000 diangkut PT 000000000000000000000000

AHU-000000000000000000000000

Kembali

AHU ONLINE - <http://panduan.ahu.go.id/>

1. Tombol **Perbaharui Data** untuk melakukan perubahan data/Edit data
2. Jika sudah tidak ada perubahan data/Edit data, Klik tombol **Upload Akta** maka akan masuk ke halaman **Upload Akta**

The screenshot shows the 'Unggah Akta' (Upload Deed) form. It includes a title bar 'Unggah Akta *', a list of three terms and conditions with checkboxes, a 'Choose File' button, a file upload area, and an 'Upload' button. Numbered annotations are as follows:

- 1**: Points to the first checkbox in the terms and conditions list.
- 2**: Points to the 'Choose File' button.
- 3**: Points to the 'Upload' button.

Unggah Akta *

☒ Akta yang di upload sudah sesuai dengan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 13 ayat (4), pasal 25 ayat (4) dan pasal 28 ayat (4) permen hukum dan ham no 1 tahun 2016 tentang perubahan atas permen hukum dan ham no 4 tahun 2014 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas.

☒ Akta yang akan di upload adalah keseluruhan akta, dari judul akta sampai ketentuan penutup dan telah ditandatangani dan diberi stempel oleh notaris

☒ Kesalahan terhadap upload akta sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris

Choose File .pdf

.pdf

Akta yang diupload berbentuk file pdf dengan kapasitas maksimal 10 MB
Waktu upload akta paling lambat adalah 30 hari kalender sejak pernyataan tidak keberatan menteri, sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (5) uu 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
Terhadap akta yang telah diupload, tidak dapat dilakukan perbaikan

Klik **disini** untuk melihat tutorial memeprekecil ukuran upload akta dalam bentuk pdf.

Upload

1. Ceklis semua pernyataan diatas.
2. Klik tombol **Choose Files** lalu cari file akta yang akan di upload.
3. Klik tombol **Upload** , maka akan tampil pop up *preview* seperti gambar dibawah ini.

PASTIKAN AKTA YANG DI UPLOAD SUDAH BENAR!

No preview available

Terhadap akta yang sudah di upload, tidak dapat dilakukan perbaikan
APAKAH AKTA YANG DI UPLOAD SUDAH BENER ?

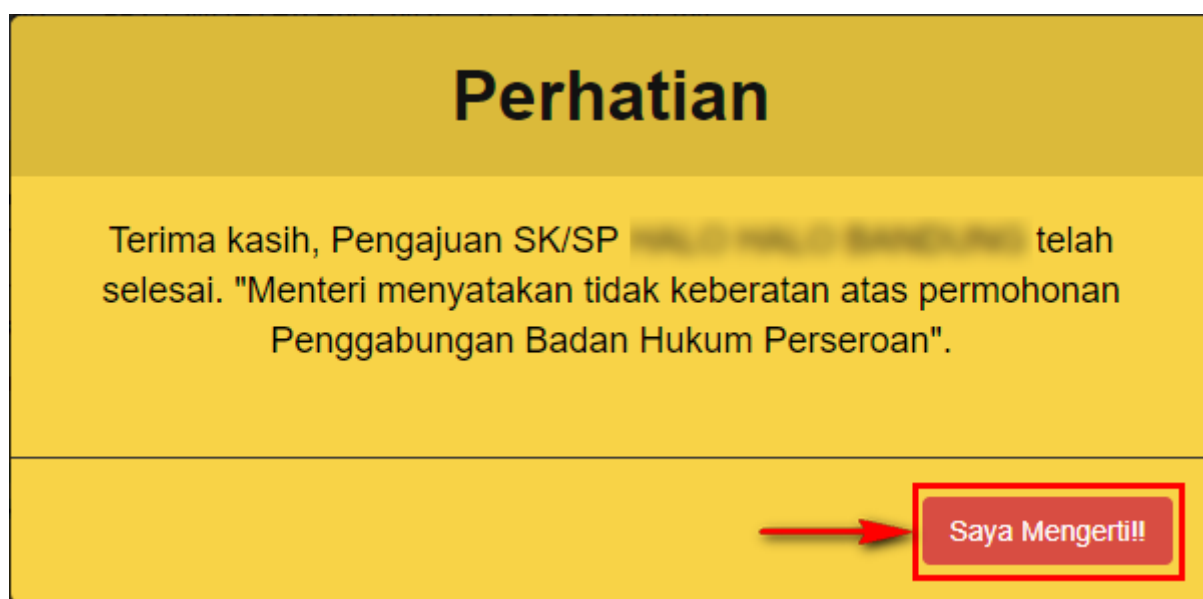
1

Lanjutkan

- Klik tombol **Lanjutkan** setelah itu akan tampil halaman dibawah ini:

[Kembali](#)

1. Tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP** untuk mengakhiri transaksi.
 2. Tombol **Upload Ulang Akta** untuk mengulangi proses upload akta jika terjadi kesalahan upload file.
 3. Tombol **Preview Akta** untuk menampilkan file akta yang telah di upload.
 4. Tombol **Hapus Transaksi** untuk menghapus transaksi.
- Setelah klik tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP**, akan muncul popup Perhatian



- Klik tombol **Saya Mengerti!!**, lalu akan tampil halaman **Daftar Transaksi Perseroan**

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :

Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560

Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30 hari kalender dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**. Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun 2019 ▾

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Penggabungan	SWASTA NASIONAL		SUDAH BAYAR		SP Perubahan Data Perseroan SP Penggabungan Perseroan Upload Akta Waktu Perbaikan : 89 hari

- Setelah itu terdapat **SP Perubahan Data Perseroan** dan **SP Penggabungan Perseroan** yang dapat di *download*, yaitu :

1. SP Perubahan Data Perseroan

- Klik [SP Perubahan Data Perseroan](#) untuk mendownload SP Perubahan Data Perseroan
- Kemudian tampil **SP Perubahan Data Perseroan** seperti gambar dibawah ini



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

Kepada Yth.
Jl. Kerajinan
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] yang dibuat oleh Notaris [REDACTED], berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Ganti Nama Pemegang Saham, **PT [REDACTED]** disingkat **PT [REDACTED]**, berkedudukan di KABUPATEN KUTAI BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal [REDACTED].

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED]
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU- [REDACTED] TANGGAL [REDACTED]

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

2. SP Penggabungan Perseroan

- Klik [SP Penggabungan Perseroan](#) untuk mendownload SP Penggabungan Perseroan
- Kemudian tampil **SP Penggabungan Perseroan** seperti gambar dibawah ini



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
 Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-
 Lampiran :
 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
 Penggabungan Perseroan
PT

Kepada Yth.
 Jl. Kerajinan
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Penggabungan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor , Tanggal yang dibuat oleh Notaris , berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal , mengenai Pemberitahuan Penggabungan Perseroan **PT** **Tbk**, kedalam **PT** **disingkat PT** , berkedudukan di KABUPATEN KUTAI BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan berlaku efektif tanggal .



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal .

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU- **TANGGAL**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

10. Akuisisi

Menu Akuisisi digunakan oleh Notaris untuk melakukan pengambilalihan terhadap suatu PT (Perseroan Terbatas).

- Untuk mengakses menu ini klik menu **Perseroan Terbatas → Akuisisi** seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

≡ DITJEN AHU ONLINE Pesan PEMBAYARAN PNBP SECARA ONLINE

Fidusia

Wasiat +

Notaris Pengganti

Perseroan Terbatas

Pesan Nama dan Pendirian

Pendirian

Pendirian Pending

Perubahan

Perubahan Pending **new**

Merger

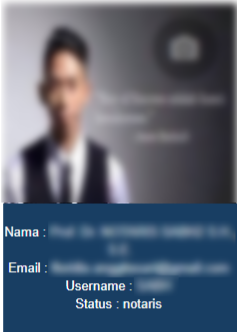
Penyesuaian UU 2007

Penyesuaian Pending UU 2007 **new**

Akuisisi

Pembubaran

Pembubaran Pending



Nama : [REDACTED]
Email : [REDACTED]
Username : [REDACTED]
Status : notaris

Riwayat Permohonan

Edit Profil

Surat Keterangan

Surat Keputusan

Permohonan Cuti

Permohonan Perubahan Data Notaris

Pemberhentian Notaris

Permohonan Pindah Wilayah

Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan

Profil Notaris

Informasi KTA

Nomor KTA : [REDACTED]
No Rekening : [REDACTED]

- Kemudian tampil halaman **Permohonan Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan** dibawah ini

PERMOHONAN PENGAMBILALIHAN(AKUISISI) PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NAMA PERSEROAN *

NOMOR SK TERAKHIR *
 Nomor SK merupakan Nomor Surat Keputusan Menteri. Bukan Nomor Surat Pemberitahuan.

NOTARIS TERAKHIR *
 ⓘ Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Cari

Pada halaman **Permohonan Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan** terdapat fitur untuk memesan nomor *voucher* perubahan perseroan sekaligus dengan beberapa ketentuan, diantaranya :

- Jika ingin memesan nomor *voucher* point 1 sampai 3, maka akan muncul *field* nomor *voucher* sesuai yang dipilih dan otomatis point 4 *disable* atau tidak bisa dipilih seperti gambar dibawah ini.

☒ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN ☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN ☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN	MASUKKAN NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN D/ ❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik disini untuk pembelian voucher.
NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN	MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN ❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik disini untuk pembelian voucher.
NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN	MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSE ❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, klik disini untuk pembelian voucher.

- Jika ingin memesan nomor *voucher* point 1 dan 4, maka akan muncul *field* nomor *voucher* sesuai yang dipilih dan otomatis point 2 dan 3 *disable* atau tidak bisa dipilih seperti gambar dibawah ini.

☒ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN ☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN	MASUKKAN NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN D/ ❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik disini untuk pembelian voucher.
NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN	MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN ❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik disini untuk pembelian voucher.

Untuk melakukan pemesanan Nomor *Voucher* Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan dengan cara :

1. ceklis **Nomor *Voucher* Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**
2. lalu tampil kolom pengisian Nomor *Voucher*

PERMOHONAN PENGAMBILALIHAN(AKUISISI) PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN	☒ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN
	MASUKKAN NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGAR ❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik disini untuk pembelian voucher.

3. klik **disini**
4. kemudian tampil *form* **Pemesanan Nomor *Voucher* Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas**

Cek Nomor Voucher
Daftar Voucher
Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM *

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Pembelian voucher sebesar **Rp 1.000.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNBP yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

☒ Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI

- Ceklis *disclaimer* dan klik tombol BELI, lalu tampil form **Bukti Pemesanan Nomor Voucher**

Cek Pemesanan Voucher
List Voucher



DIREKTORAT JENDERAL AHU

BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER

BADAN HUKUM

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

KODE VOUCHER	:	_____
BILL ID ^[1]	:	_____
NAMA PEMOHON	:	_____
NOMOR REKENING	:	_____
EMAIL PEMOHON	:	_____
NOMOR HP	:	_____
TANGGAL TRANSAKSI	:	17 Mei 2024 15:46:45
TANGGAL EXPIRED	:	24 Mei 2024 23:59:59
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	
TAGIHAN	:	Rp 1.000.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :

1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.

2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Download

- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor *voucher* pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada point **Pembayaran Nomor Voucher**

- Jika tagihan sudah terbayar, klik tombol **List Voucher**, maka akan tampil halaman **Daftar Voucher**

Daftar Voucher

Riwayat Transaksi

Tanggal Transaksi: Dari Sampai Kode Voucher/Bill ID: Pelayanan Jasa Hukum: Status:

*** Keterangan :**

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 960 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1			Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas		Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi

- Klik [Lanjutkan Transaksi](#) untuk menampilkan halaman **Pemohonan Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan** dengan nomor *voucher* yang sudah dipesan

PERMOHONAN PENGAMBILALIHAN(AKUISISI) PERSEROAN

☒ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

Untuk melakukan pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan dengan cara :

- ceklis **Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**
- lalu tampil kolom pengisian Nomor Voucher

PERMOHONAN PENGAMBILALIHAN(AKUISISI) PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

- klik [disini](#)
- kemudian tampil form **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran**

Dasar Perseroan

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

--PILIH--

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

[BELI](#)

Pada halaman **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan** terdapat pilihan Modal Dasar, yaitu :

--PILIH--

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

- Kemudian pilih **Modal Dasar** untuk Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

Pembelian voucher sebesar **Rp 150.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNPB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

☒ Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI

- Ceklis *disclaimer* dan klik tombol **BELI**
- Maka tampil *form* **Bukti Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas**

[Cek Pemesanan Voucher](#) [List Voucher](#)



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
**Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas**
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua
Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	:	-
BILL ID ^[1]	:	XXXXXXXXXXXX
NAMA PEMOHON	:	PT. ABCD, Jalan No. 123, Jakarta
NOMOR REKENING	:	0011111111
EMAIL PEMOHON	:	info@abcd.co.id
NOMOR HP	:	08123456789
TANGGAL TRANSAKSI	:	15 Agustus 2019 10:00:00
TANGGAL EXPIRED	:	31 Agustus 2019 23:59:59
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	
TAGIHAN	:	Rp 150.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

[Download](#) [Kirim Ulang](#)

- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor *voucher* pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada point **Pembayaran Nomor Voucher**.
- Jika tagihan sudah terbayar, klik tombol [List Voucher](#), maka akan tampil halaman **Daftar Voucher**

Daftar Voucher

Riwayat Transaksi

Tanggal Transaksi
 Dari Sampai

Kode Voucher/Bill ID

Pelayanan Jasa Hukum

Status

*** Keterangan :**

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 1121 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1			Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas		Rp. 150.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi

- Klik [Lanjutkan Transaksi](#) untuk menampilkan halaman **Permohonan Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan** dengan nomor *voucher* yang sudah dipesan

PERMOHONAN PENGAMBILALIHAN(AKUISISI) PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☒ **NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN**
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

Untuk melakukan pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dapat dilakukan dengan cara :

1. ceklis **Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan**
2. lalu tampil kolom pengisian Nomor Voucher

PERMOHONAN PENGAMBILALIHAN(AKUISISI) PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☒ **NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN**
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

3. klik [disini](#)
4. kemudian tampil form **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas**

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas

--PILIH--

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

[BELI](#)

Pada halaman **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas** terdapat pilihan Modal Dasar, yaitu :

--PILIH--

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

- Kemudian pilih **Modal Dasar** untuk Perubahan Data Perseroan Terbatas

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

Pembelian voucher sebesar **Rp 150.000**. Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNPB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

☒ Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

[BELI](#)

- Ceklis *disclaimer* dan klik tombol **BELI**
- Maka tampil *form* **Bukti Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas**

Cek Pemesanan Voucher

List Voucher



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	:	-
BILL ID ^[1]	:	XXXXXXXXXXXX
NAMA PEMOHON	:	PT. ABCD, Jalan No. 123, Jakarta
NOMOR REKENING	:	XXXXXXXXXX
EMAIL PEMOHON	:	XXXXXXXXXX@XXXXXX.CO.ID
NOMOR HP	:	XXXXXXXXXX
TANGGAL TRANSAKSI	:	14 Agustus 2019 10:00:00
TANGGAL EXPIRED	:	31 Agustus 2019 23:59:59
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	
TAGIHAN	:	Rp 150.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Kirim Ulang

Download

- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor *voucher* pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada point **Pembayaran Nomor Voucher**.
- Jika tagihan sudah terbayar, klik tombol **List Voucher**, maka akan tampil halaman **Daftar Voucher**

Daftar Voucher

Riwayat Transaksi

Tanggal Transaksi
 Dari Sampai

Kode Voucher/Bill ID

Pelayanan Jasa Hukum

Status

[Cari](#)

*** Keterangan :**

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 1122 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1	820 [REDACTED]	[REDACTED]	Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas	[REDACTED]	Rp. 150.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi

- Klik [Lanjutkan Transaksi](#) untuk menampilkan halaman **Permohonan Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan** dengan nomor *voucher* yang sudah dipesan

PERMOHONAN PENGAMBILALIHAN(AKUISISI) PERSEROAN

NOMOR VOUCHER
 PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
 DATA PERSEROAN

820 [REDACTED]

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

Untuk melakukan pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan dapat dilakukan dengan cara :

1. ceklis **Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan**
2. lalu tampil kolom pengisian Nomor Voucher

PERMOHONAN PENGAMBILALIHAN(AKUISISI) PERSEROAN

NOMOR VOUCHER
 PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
 ANGGARAN DASAR PERSEROAN
 DAN DATA PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
☒ **NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN**

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGG/

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

3. klik **disini**
4. kemudian tampil form **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dan Data Perseroan Terbatas**

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas

--PILIH--

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

[BELI](#)

Pada halaman **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dan Data Perseroan Terbatas** terdapat pilihan Modal Dasar, yaitu:

--PILIH--

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

- Kemudian pilih **Modal Dasar** untuk Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas

[Cek Nomor Voucher](#) [Daftar Voucher](#) [Sudah Punya Voucher](#)

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

Pembelian voucher sebesar **Rp 150.000**. Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNPB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

☒ Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

[BELI](#)

- Ceklis *disclaimer* dan klik tombol

[BELI](#)

- Maka tampil *form* **Bukti Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dan Data Perseroan Terbatas**

[Cek Pemesanan Voucher](#) [List Voucher](#)



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	:	
BILL ID ^[1]	:	
NAMA PEMOHON	:	
NOMOR REKENING	:	
EMAIL PEMOHON	:	
NOMOR HP	:	
TANGGAL TRANSAKSI	:	
TANGGAL EXPIRED	:	
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	
TAGIHAN	:	Rp 150.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

[Download](#) [Kirim Ulang](#)

- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor *voucher* pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada point **Pembayaran Nomor Voucher**.
- Jika tagihan sudah terbayar, klik tombol [List Voucher](#), maka akan tampil halaman **Daftar Voucher**

Daftar Voucher

[Riwayat Transaksi](#)

Tanggal Transaksi

Dari Sampai

Kode Voucher/Bill ID

Pelayanan Jasa Hukum

-- SEMUA --

Status

-- SEMUA --

[Cari](#)

*** Keterangan :**

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 1011 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^(*)	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1			Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas		Rp. 150.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi

- Klik [Lanjutkan Transaksi](#) untuk menampilkan halaman **Permohonan Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan** dengan nomor *voucher* yang sudah dipesan

PERMOHONAN PENGAMBILALIHAN(AKUISISI) PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

• Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

- Kemudian lakukan pengisian data pada halaman **Permohonan Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan** dengan mengisi
 1. **Nama Perseroan**
 2. **Nomor SK Terakhir**
 3. **Notaris Terakhir**
 4. Lalu klik tombol [Cari](#)

PERMOHONAN PENGAMBILALIHAN(AKUISISI) PERSEROAN

- ☐ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- ☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- ☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
DATA PERSEROAN

820

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

NAMA PERSEROAN

PERSEROAN TERBATAS

NOMOR SK TERAKHIR

AHU-

Nomor SK merupakan Nomor Surat Keputusan Menteri. Bukan Nomor Surat Pemberitahuan.

NOTARIS TERAKHIR

NOTARIS TERAKHIR

❗ Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Cari

- Setelah itu tampil halaman **Persyaratan Utama Permohonan Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan**

PERMOHONAN PENGAMBILALIHAN(AKUISISI) PERSEROAN

- ☐ NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
☒ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
☐ NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
DATA PERSEROAN

820

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

NAMA PERSEROAN

NOMOR SK TERAKHIR

AHU-

Nomor SK merupakan Nomor Surat Keputusan Menteri. Bukan Nomor Surat Pemberitahuan.

NOTARIS TERAKHIR

❗ Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Cari

NOMOR SK TERAKHIR: AHU-

Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham
		Tanpa Klasifikasi : 1000000000
	DIREKTUR	Tanpa Klasifikasi : 1000000000
	KOMISARIS	Tanpa Klasifikasi : 1000000000

Persyaratan Utama

- I. ☒ Berita acara rapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution)
☐ RUPS
- ☒ II. Akta Notaris dalam bahasa Indonesia
- ☒ III. Tanggal RUPS / Berita Acara Rapat / Notulen Rapat
- ☒ IV. Keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau keterangan domisili dari kelurahan/desa atau nama lain setempat
- ☒ V. NPWP

☒ Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya

LANJUTKAN

1. Ceklis Persyaratan Utama
2. Ceklis *disclaimer*

3. Klik tombol **LANJUTKAN** maka muncul popup *disclaimer*



- Kemudian klik tombol **Saya Yakin**, lalu masuk ke halaman **Permohonan Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan untuk pengisian akta notaris dan data RUPS**

Permohonan Pengambilalihan(Akuisisi)

PT **KURNIA LAGI LAGI** Tbk

Ringkasan Perseroan

Jenis Perseroan : SWASTA NASIONAL

Status Perseroan : Terbuka

Jenis Perubahan

☒ Pemberitahuan perubahan data Perseroan 

Akta Notaris yang dibuat untuk permohonan sekarang.

Nama Akta Notaris:

Nomor Akta:

Tanggal Akta:

Tanggal

RUPS / Berita Acara
Rapat / Notulen Rapat:

Pengumuman Surat Kabar

Tanggal Cetak:

Nama Surat Kabar:

Tambah

Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kehadiran RUPS	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham
☒			Tanpa Klasifikasi : 1000000000
☒		DIREKTUR	Tanpa Klasifikasi : 1000000000
☒		KOMISARIS	Tanpa Klasifikasi : 1000000000

Persyaratan Utama

- ☒ Perseroan Tertutup
- ☐ Langsung kepada pemegang saham, Akta Pemindahan Hak Atas Saham
 - ☐ Akta Notaris
 - ☐ Akta dibawah tangan
- ☒ Melalui Direksi
- ☒ a. Pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut
 - ☒ b. Rancangan Pengambilalihan (akuisisi)
 - ☒ c. Akta Pemindahan Hak Atas Saham
 - ☒ Akta Notaris
 - ☐ Akta di bawah tangan
- ☐ Perseroan Terbuka

☒ Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesanggupan saya untuk memenuhi semua Persyaratan Utama diatas.

KEMBALI

LANJUTKAN

Pada halaman tersebut, terdapat :

1. **Jenis Perubahan** yang telah otomatis terceklis sesuai dengan pemesanan nomor *voucher* sebelumnya
2. Isikan **Nomor Akta**
3. Isikan **Tanggal Akta**
4. Isikan **Tanggal RUPS**
5. Isikan **Pengumuman Surat Kabar**
6. Ceklis **Kehadiran RUPS**
7. Ceklis **Persyaratan Utama**
8. Ceklis *disclaimer*
9. Lalu klik tombol **LANJUTKAN** maka akan muncul popup perhatian!!!



- Klik tombol **Saya Yakin** maka akan tampil halaman **Permohonan Pengambilalihan (Akuisisi)**

Permohonan Pengambilalihan(Akuisisi)

PT **KURNIA LAGI LAGI** Tbk

Silahkan pilih jenis perubahan yang di inginkan:

Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan

- ☐ 1. Direksi dan Komisaris
- ☒ 2. Peralihan saham
- ☒ 3. Ganti nama pemegang saham

Persyaratan Perubahan Peralihan Saham

Bilamana Perseroan dengan status PMA, izin prinsip BKPM

Bilamana PT Tertutup, Akta pemindahan Hak atas Saham

Bilamana PT Tertutup, Daftar Pemegang Saham

KEMBALI LANJUTKAN

1. pilih jenis perubahan yang diinginkan
2. Klik tombol **LANJUTKAN** maka akan muncul popup perhatian!!!



- Klik tombol **Saya Yakin** akan masuk ke halaman **Format Isian Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Terbatas**

Format Isian Perubahan Perseroan Terbatas

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan

PT. JAKARTASATI BARU

Nama Singkatan

PT. JAKB

Jenis Perseroan

PMON FASILITAS

NPWP Perseroan *

0000000000

Jangka Waktu Perseroan

TIDAK TERBATAS

Status Perseroan

tertutup

KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi

DKI JAKARTA

Kabupaten

JAKARTA SELATAN

DOMISILI PERSEROAN

Alamat Perseroan

Jalan Jendral Sudirman No. 100 Jakarta Selatan

RT

001

RW

001

Kecamatan

KEBAYORAN BARU

Kelurahan

MELAWAI

Kode Pos

12160

Nomor Telepon

021-12345678

Maksud dan Tujuan

MAKSUD

REAL-ESTAT

Batal Hapus

TUJUAN

REAL-ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DARI KAWASAN PERMUKAAN
REAL-ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
REAL-ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA

MAKSUD

AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS

Hapus

TUJUAN

AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS
AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI
AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI
AKTIVITAS ARSITEKTUR

Tambah Data

AKTA NOTARIS

Nama Notaris

NOTARIS BERNAMA S.H., B.E., S.H., S.E.

Nomor Akta

00000000

Tanggal Akta

12/12/2019

MODAL DASAR *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	4.000	Rp. 4.000.000

Total modal dasar Rp. 4.000.000

MODAL DITEMPATKAN *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000	4.000	Rp. 4.000.000

Total modal ditempatkan Rp. 4.000.000

MODAL DISETOR *

4.000.000

☒ Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM *

Tambah Data

Nama	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total	Aksi
PT. JAKB	Tanpa Klasifikasi	1.000	DIREKTUR	Rp. 1.000.000	Perbahasil Hapus
PT. JAKB	Tanpa Klasifikasi	1.000	BADAN HUKUM	Rp. 1.000.000	Perbahasil Hapus
Masyarakat	Tanpa Klasifikasi	300		Rp. 300.000	Perbahasil Hapus
PEMERINTAH	Tanpa Klasifikasi	700		Rp. 700.000	Perbahasil Hapus
PT. JAKB	Tanpa Klasifikasi	500	KOMISARIS	Rp. 500.000	Perbahasil Hapus
Negara Republik Indonesia	Tanpa Klasifikasi	500		Rp. 500.000	Perbahasil Hapus

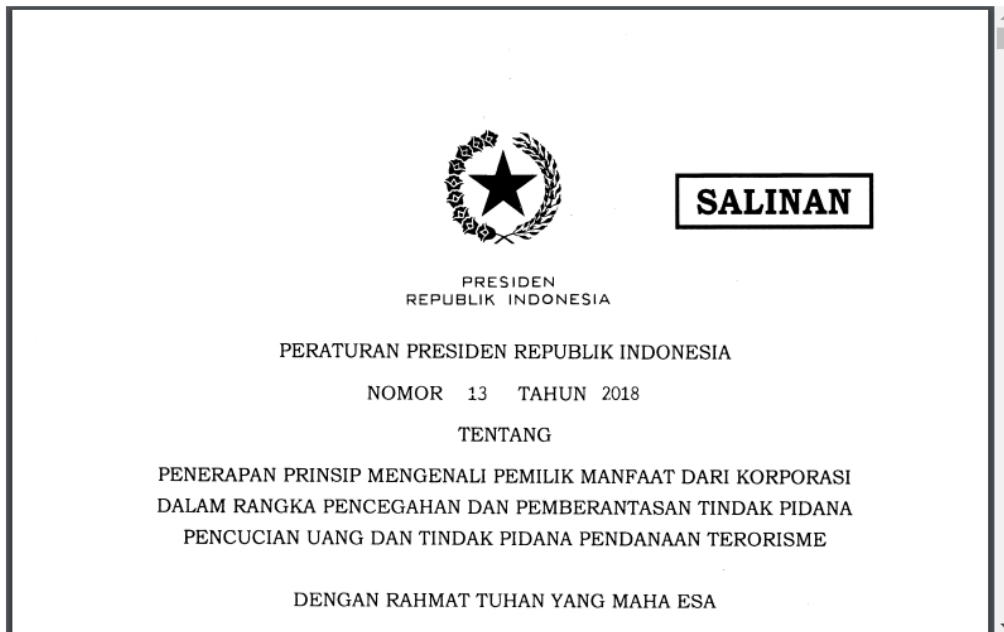
TOTAL LEMBAR SAHAM 4,000
TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR Rp 4,000,000

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☒ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



- ☒ Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- ☒ Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

[Tambah Data](#)

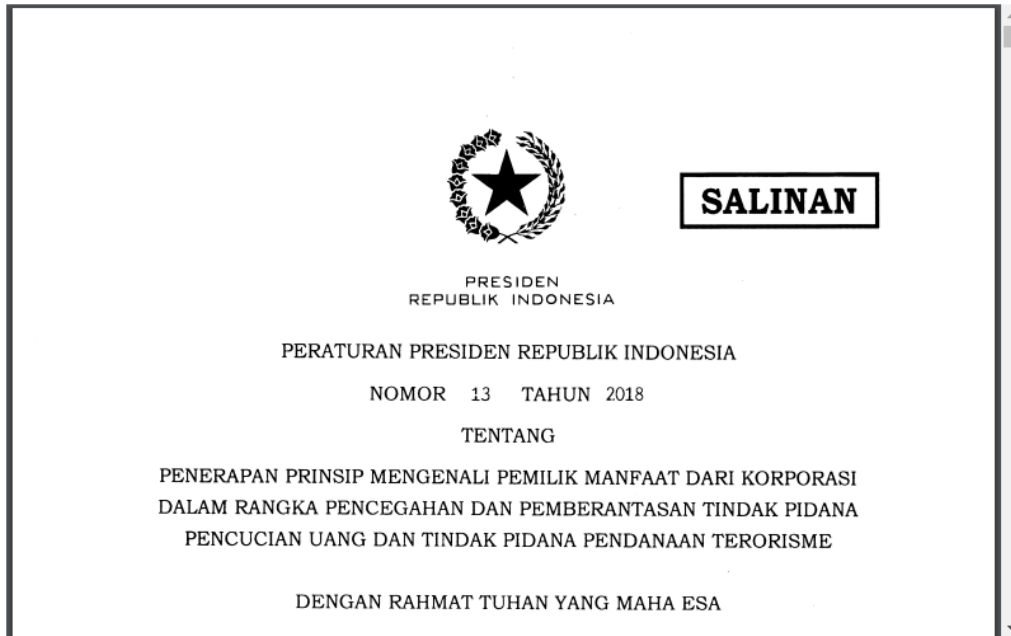
Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
------	-----------------	------------------------	-----------------	--------	------	----------	------

* jika data pemilik manfaat sudah ada pada transaksi sebelumnya

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

☒ Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.

DOWNLOAD

- ☒ Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- ☒ Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan
						Pemegang Saham

Untuk melakukan pelaporan perubahan atau pengkinian data pemilik manfaat korporasi dapat dilakukan melalui Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi (Beneficial Owner Application) atau melalui tautan berikut <http://bo.ahu.go.id>

Notaris Pengganti

☐ Apakah Anda Notaris Pengganti?

PERSYARATAN

Sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, Saya menyatakan :

- ☒ 1. Bahwa Data yang diisi pada format isian pendirian Perseroan sudah benar.
- ☒ 2. Bahwa Akta Perseroan yang saya buat sebelum mengisi format isian pendirian Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ☒ 3. Bahwa Data Perseroan yang diisi dengan dokumen fisik yang disimpan pada kantor saya telah sesuai.
- ☒ 4. Bahwa dokumen-dokumen untuk pendirian Perseroan telah lengkap sebelum saya mengisi format isian pendirian Perseroan.
- ☒ 5. Jika saya dalam proses pengisian data pada format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka saya bersedia menerima sanksi pidana, perdata dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEMBALI

LANJUTKAN

1. Ubah data sesuai dengan jenis perubahan yang dipilih
2. Ceklis persyaratan dan klik tombol

Lanjutkan
3. Kemudian akan tampil halaman **Pra Tinjau Akuisisi Data Perseroan**

PRA TINJAU AKUISISI DATA PERSEROAN

Kotak isian yang bertanda * wajib diisi

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan	PT. LAMPUNG AIR
Jenis Perseroan	SWASTA NASIONAL
NPWP Perseroan *	0000000000
Jangka Waktu Perseroan	TIDAK TERBATAS
Status Perseroan	terbuka

KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi	LAMPUNG	Kabupaten	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
----------	--------------------------------------	-----------	---

Maksud dan Tujuan

MAKSUD	PENGLOLAAN AIR, PENGLOLAAN AIR LIMBAH, PENGLOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI
TUJUAN	PENGLOLAAN AIR PENGLOLAAN AIR PENGLOLAAN AIR PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM

AKTA NOTARIS

Nama Akta Notaris	NOTARIS SABH2 S.H., S.E. S.H., S.E.		
Nomor Akta	0000000000	Tanggal Akta	2020-02-20

MODAL DASAR *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1	4.000.000.000	Rp. 4.000.000.000

Total modal dasar Rp. 4.000.000.000

MODAL DITEMPATKAN *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1	3.000.000.000	Rp. 3.000.000.000

Total modal ditempatkan Rp. 3.000.000.000

MODAL DISETOR *

Rp. 3.000.000.000
☒ Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM *

Nama	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total
PT. LAMPUNG AIR	Tanpa Klasifikasi	1.000.000.000		Rp. 1.000.000.000
DIREKTUR	Tanpa Klasifikasi	1.000.000.000	DIREKTUR	Rp. 1.000.000.000
KOMISARIS	Tanpa Klasifikasi	1.000.000.000	KOMISARIS	Rp. 1.000.000.000

Selain Perseroan BUMN dan BUMD pemegang saham wajib lebih dari satu.

Notaris Pengganti

JENIS PERUBAHAN

Pemberitahuan perubahan data Perseroan - Peralihan saham. Ganti nama pemegang saham
--

KEMBALI

SAYA YAKIN



- Klik tombol **SAYA YAKIN**. Setelah itu akan tampil halaman **Daftar Transaksi Perseroan**

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :

Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560

Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30 hari kalender dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**. Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun 2019 ▾

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Pengambilalihan (Akuisisi)	SWASTA NASIONAL		SUDAH BAYAR		Pratinjau & Cetak SK/SP Waktu Upload : 30 hari Tanggal Jatuh Tempo : Sisa Pratinjau : 7 hari Tanggal Habis Pratinjau :

- Klik tombol **Pratinjau & Cetak SK/SP** untuk melihat data akuisisi. PRATINJAU AKAN BERLAKU SELAMA 7 HARI

KembaliDownload PDFPerbaharu DataUpload AktaHapus Transaksi

Menyeri menyatakan idak keberatan menyeri

Nomor Transaksi: 40190420142200003

DATA PERSEROAN

Nomor SK

AHU-000000-00-00-00-000000

Nama Perseroan

PERSEROAN TERBATAS

Jenis Perseroan

SWASTA NASIONAL

NPWP Perseroan

0000000000000000

Jangka Waktu Perseroan

TIDAK TERBATAS

Status Perseroan

terbuka

KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi

LAMPUNG

Kabupaten

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DOMISILI PERSEROAN

Alamat

Tan

RT

00

RW

00

Kecamatan

PADANG RATU

Kelurahan

PURWOREJO

Kode POS

34000

Nomor Telepon

081234567890

Email

perseroan@perseroan.co.id

Tahun Buku

2020

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

PENGLOLAN AIR, PENGLOLAN AIR LIMBAH, PENGLOLAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI

TUJUAN

PENGLOLAN AIR

PENGLOLAN AIR

PENGLOLAN AIR

PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM

AKTA NOTARIS

Nama

NOTARIS PERSEROAN TERBATAS

Nomor Akta

0000000000

Tanggal Akta

00-00-0000

MODAL DASAR

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1	4.000.000.000	Rp. 4.000.000.000

Total modal dasar Rp. 4.000.000.000

MODAL DITEMPATKAN

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1	3.000.000.000	Rp. 3.000.000.000

Total modal ditempatkan Rp. 3.000.000.000

MODAL DISETOR

Rp. 3.000.000.000

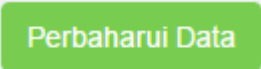
PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Penanggung Jawab	Modal ditempatkan	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total
DIREKTUR	Tidak	Tanpa Klasifikasi	1000000000	DIREKTUR	Rp. 1.000.000.000
KOMISARIS	Ya	Tanpa Klasifikasi	1000000000	KOMISARIS	Rp. 1.000.000.000
KOMISARIS	Tidak	Tanpa Klasifikasi	1000000000	KOMISARIS	Rp. 1.000.000.000

Pemilik Manfaat

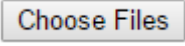
No	Pemilik Manfaat	Data Pemilik Manfaat	Kriteria Pemilik Manfaat
Tidak Ada			

Kembali

1. Tombol  untuk melakukan perubahan data/Edit data
2. Jika sudah tidak ada perubahan data/Edit data, Klik tombol  maka akan masuk ke halaman **Upload Akta**



Upload Akta

1. Ceklis semua pernyataan diatas.
2. Klik tombol  lalu cari file akta yang akan di upload.
3. Klik tombol , maka akan tampil pop up *preview* seperti gambar dibawah ini.

PASTIKAN AKTA YANG DI UPLOAD SUDAH BENAR!

No preview available

Terhadap akta yang sudah di upload, tidak dapat dilakukan perbaikan
APAKAH AKTA YANG DI UPLOAD SUDAH BENAR ?

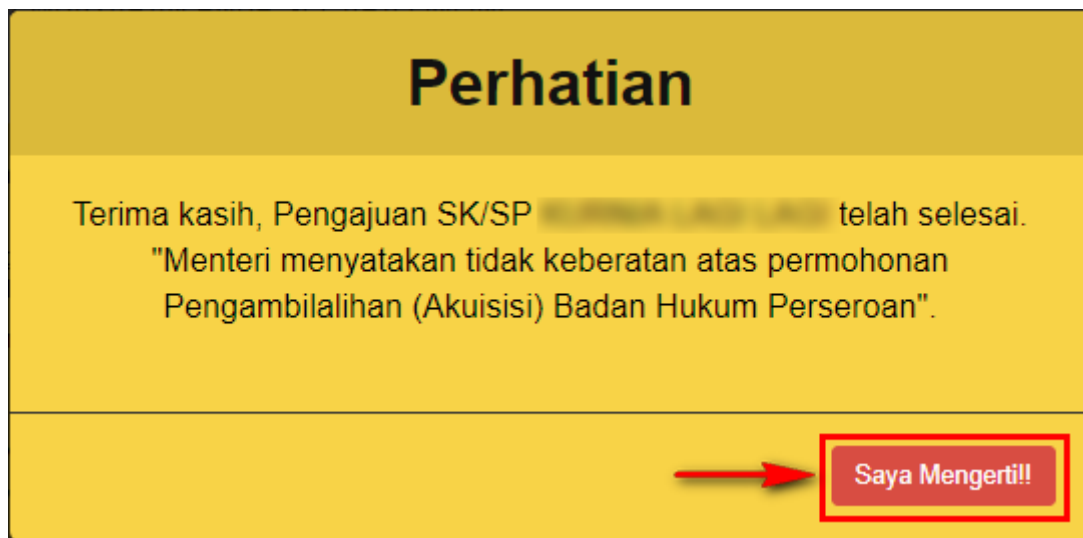
1

Lanjutkan

- Klik tombol **Lanjutkan** setelah itu akan tampil halaman dibawah ini:

AHU ONLINE - <http://panduan.ahu.go.id/>

1. Tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP** untuk mengakhiri transaksi.
 2. Tombol **Upload Ulang Akta** untuk mengulangi proses upload akta jika terjadi kesalahan upload file.
 3. Tombol **Preview Akta** untuk menampilkan file akta yang telah di upload.
 4. Tombol **Hapus Transaksi** untuk menghapus transaksi.
- Setelah klik tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP**, akan muncul popup Perhatian



- Klik tombol **Saya Mengerti!!**, lalu akan tampil halaman **Daftar Transaksi Perseroan**

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :

Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560

Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30 hari kalender dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**. Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun 2019 ▾

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Pengambilalihan (Akuisisi)	SWASTA NASIONAL		SUDAH BAYAR		SP Perubahan Data Perseroan Upload Akta Waktu Perbaikan : 89 hari

- Setelah itu terdapat **SP Perubahan Data Perseroan** yang dapat di *download*
- klik [SP Perubahan Data Perseroan](#)
- Kemudian tampil **SP Perubahan Data Perseroan** seperti gambar dibawah ini



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT Tbk

Kepada Yth.
Jl. Kerajinan
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor Tanggal yang dibuat oleh Notaris , berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, mengenai perubahan Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham, **PT Tbk**, berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal .

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU- TANGGAL

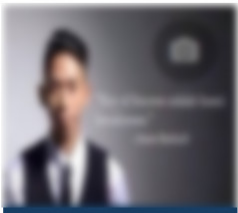
11. Pembubaran

Pembubaran dapat dilakukan oleh Notaris. Login terlebih dahulu sebagai notaris, klik menu **Perseroan Terbatas → Pembubaran**

≡ DITJEN AHU ONLINE Pesan 2 PEMBAYARAN PNBP SECARA ONLINE

Perseroan Terbatas

- Pesan Nama dan Pendirian
- Pendirian
- Pendirian Pending
- Perubahan
- Perubahan Pending new
- Merger
- Penyesuaian UU 2007
- Penyesuaian Pending UU 2007 new
- Akuisisi
- Pembubaran**
- Pembubaran Pending
- Transaksi PT Pending 2013
- Daftar Transaksi Perseroan
- FAQ
- Peraturan Perundangan



Nama :
Email :
Username : SABH
Status : notaris

Riwayat Permohonan Edit Profil Surat Keterangan Surat Keputusan

Permohonan Cuti Permohonan Perubahan Data Notaris Pemberhentian Notaris

Permohonan Pindah Wilayah Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan

Profil Notaris

Informasi KTA

Nomor KTA :
No Rekening :

- Tampil halaman Permohonan Dasar Pembubaran

PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN

☒ Dasar Pembubaran

- ☐ Pembubaran berdasarkan RUPS
- ☐ Pembubaran berdasarkan jangka waktu
- ☐ Pembubaran berdasarkan dicabutnya kepailitan
- ☐ Pembubaran berdasarkan harta pailit Perseroan
- ☐ Pembubaran berdasarkan dicabutnya izin usaha Perseroan
- ☐ Penetapan Pengadilan

Lanjutkan

1. Ceklis Dasar Pembubaran
2. Pilih alasan Pembubaran
3. Klik tombol **Lanjutkan**

- Kemudian tampil form Permohonan Pembubaran Perseroan seperti dibawah ini

PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN : Pembubaran berdasarkan dicabutnya izin usaha Perseroan

NOMOR VOUCHER
Pemberitahuan Pembubaran Perseroan *

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN

NAMA PERSEROAN *

MASUKKAN NAMA PERSEROAN

NOMOR SK TERAKHIR *

MASUKKAN NOMOR SK TERAKHIR

NOTARIS TERAKHIR

MASUKKAN NAMA NOTARIS TERAKHIR

1 Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Pembubaran Perseroan Terbatas Tahap Pertama, klik **disini** untuk pembelian voucher.

Nomor SK merupakan Nomor Surat Keputusan Menteri. Bukan Nomor Surat Pemberitahuan.

1 Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Kembali

Cari

- Jika belum memesan nomor voucher, klik **disini** untuk menampilkan halaman pesan Nomor Voucher Pembubaran Perseroan

Cek Nomor Voucher

Daftar Voucher

Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM *

Pemberitahuan Pembubaran Perseroan Terbatas Tahap Pertama

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

Pembelian voucher sebesar **Rp 250.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNBP yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

☒ Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI

- Ceklis disclaimer dan klik tombol **BELI**. Maka tampil halaman Bukti Pemesanan Nomor Voucher Pembubaran Perseroan

Cek Pemesanan Voucher
List Voucher



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
BADAN HUKUM
Pemberitahuan Pembubaran Perseroan Terbatas Tahap Pertama

KODE VOUCHER	:	
BILL ID ^[1]	:	
NAMA PEMOHON	:	
NOMOR REKENING	:	
EMAIL PEMOHON	:	
NOMOR HP	:	
TANGGAL TRANSAKSI	:	
TANGGAL EXPIRED	:	
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	
TAGIHAN	:	Rp 250.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :
 1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
 2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Download
Kirim Ulang

- Klik tombol List Voucher, untuk menampilkan halaman Daftar Voucher

Daftar Voucher

Riwayat Transaksi

Tanggal Transaksi
 Dari Sampai

Kode Voucher/Bill ID

Pelayanan Jasa Hukum

Status

Cari

* Keterangan :
 1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
 2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
 3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
 4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 1002 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1			Pemberitahuan Pembubaran Perseroan Terbatas Tahap Pertama		Rp. 250.000	Gagal Kirim Notifikasi Kirim Ulang	Lihat

- Setelah itu lakukan Pembayaran tagihan Pemesanan Nomor Voucher pada aplikasi YAP! seperti yang sudah dijelaskan pada link berikut
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas#pembayaran_nomor_voucher

- Jika sudah melakukan pembayaran, status pembayaran berubah menjadi **Sudah Bayar**

Daftar Voucher

Riwayat Transaksi

Tanggal Transaksi

Dari

Sampai

Kode Voucher/Bill ID

PENCARIAN KODE VOUCHER

Pelayanan Jasa Hukum

-- SEMUA --

Status

-- SEMUA --

Cari

*** Keterangan :**

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di Ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 1002 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ⁽¹⁾	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1			Pemberitahuan Pembubaran Perseroan Terbatas Tahap Pertama		Rp. 250.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi

- Klik tombol **Lanjutkan Transaksi**, kemudian tampil halaman Permohonan Pembubaran Perseroan dengan Nomor Voucher yang sudah terisi.

PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN : Pembubaran berdasarkan dicabutnya izin usaha Perseroan

NOMOR VOUCHER
Pemberitahuan Pembubaran Perseroan

820

*** Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Pembubaran Perseroan Terbatas Tahap Pertama, klik **disini** untuk pembelian voucher.**

NAMA PERSEROAN *

NOMOR SK TERAKHIR *

Nomor SK merupakan Nomor Surat Keputusan Menteri. Bukan Nomor Surat Pemberitahuan.

NOTARIS TERAKHIR

*** Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.**

Kembali

Cari

- Pada form tersebut isikan beberapa field seperti
 1. Nama Perseroan
 2. Nomor SK Terakhir
 3. Notaris Terakhir
 4. Setelah itu klik tombol **Cari**. Kemudian tampil halaman Persyaratan Utama Pembubaran

PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN : Pembubaran berdasarkan dicabutnya izin usaha Perseroan

NOMOR VOUCHER

Pemberitahuan Pembubaran Perseroan

820

NAMA PERSEROAN

NOMOR SK TERAKHIR

NOTARIS TERAKHIR

❗ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Pembubaran Perseroan Terbatas Tahap Pertama, klik **disini** untuk pembelian voucher.

Nomor SK merupakan Nomor Surat Keputusan Menteri. Bukan Nomor Surat Pemberitahuan.

❗ Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Kembali

Cari

NOMOR SK TERAKHIR:

Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham
	KOMISARIS	SERI A : 250
	DIREKTUR	SERI B : 250

Persyaratan Utama

☒ RUPS

☒ a. Akta Notaris dalam bahasa Indonesia

☒ b. Tanggal RUPS

☒ c. Keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau keterangan domisili dari kelurahan/desa atau nama lain setempat

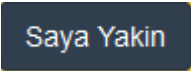
☒ d. NPWP

☒ Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesanggupan saya untuk memenuhi semua Persyaratan Utama diatas.

LANJUTKAN

- Ceklis semua Persyaratan Utama
- Ceklis disclaimer
- Klik tombol **LANJUTKAN**. Lalu muncul popup disclaimer seperti dibawah ini



- Klik tombol  untuk menampilkan halaman Permohonan Pembubaran Ringkasan Perseroan

PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN

PT **PT [REDACTED]**

Ringkasan Perseroan

Jenis Perseroan : PMDN FASILITAS

Status Perseroan : Tertutup

Akta Notaris yang dibuat untuk permohonan sekarang.

Nomor Akta:

Tanggal Akta:

Tanggal

RUPS:

Pengumuman Surat Kabar

Pengumuman Surat Kabar

Tanggal Cetak:

Nama Surat Kabar:

Tambah

Notaris Pengganti

☐ Apakah Anda Notaris Pengganti?

Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

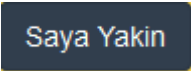
Kehadiran RUPS	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham
☒	IRMA	KOMISARIS	SERI A : 250
☒	RIRIN	DIREKTUR	SERI B : 250
☒ Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesanggupan saya untuk memenuhi semua Persyaratan Utama diatas.			

KEMBALI

LANJUTKAN

- Isikan data Permohonan Pembubaran
- Ceklis Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
- Ceklis disclaimer
- Klik tombol **LANJUTKAN**. Lalu muncul popup disclaimer seperti dibawah ini



- Klik tombol  untuk menampilkan halaman Pratinjau Pembubaran Perseroan

PRA TINJAU PEMBUBARAN PERSEROAN

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan

PT. ABCD EFGHIJ KLMN

Jenis Perseroan

PMDN FASILITAS

NPWP Perseroan *

Jangka Waktu Perseroan

TIDAK TERBATAS

Status Perseroan

tertutup

KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi

DKI JAKARTA

Kabupaten

JAKARTA UTARA

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan *

Maksud dan Tujuan

AKTA PEMBUBARAN

Notaris Akta

NOTARIS NAMA S.N. S.N. S.N. S.N.

Nomor Akta

0000000000

Tanggal Akta

00/00/0000

MODAL DASAR *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
SERI A	Rp 100.000	250	Rp 25.000.000
SERI B	Rp 100.000	250	Rp 25.000.000

Total modal dasar Rp 50.000.000

MODAL DITEMPATKAN *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
SERI A	Rp 100.000	250	Rp 25.000.000
SERI B	Rp 100.000	250	Rp 25.000.000

Total modal ditempatkan Rp 50.000.000

MODAL DISETOR *

Rp 50.000.000

☒ Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM *

Nama	Modal ditempatkan	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total
	SERI A	250	KOMISARIS	Rp 25.000.000
	SERI B	250	DIREKTUR	Rp 25.000.000

Selain Perseroan BUMN dan BUMD pemegang saham wajib lebih dari satu.

Notaris Pengganti

JENIS PEMBUBARAN

Dasar Pembubaran : Pembubaran berdasarkan dicabutnya izin usaha Perseroan

KEMBALI

SAYA YAKIN

SAYA YAKIN

- Klik tombol . Maka tampil halaman Daftar Transaksi Perseroan

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :

Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560

Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah 30 hari kalender **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**. Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun 2019 ▼

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Pembubaran	PMDN FASILITAS		SUDAH BAYAR		1 2 - Tagihan PNRI - Pratinjau & Cetak SK/SP - Waktu Upload : 30 hari - Tanggal Jatuh Tempo : 30 Jan 2020 - Sisa Pratinjau : 7 hari - Tanggal Habis Pratinjau : 27 Jan 2020

- Link **Tagihan PNRI** digunakan untuk mendownload Surat Perintah Bayar terhadap Pembubaran Perseroan

SURAT PERINTAH BAYAR BN/TBN TERHADAP PEMBUBARAN PERSEROAN

FORCE FORCE SALE

No. Transaksi	:	XXXXXXXXXXXX
Virtual Account TBNRI & BNRI	:	XXXXXXXXXXXX
Nama NOTARIS	:	NOTARIS XXXXX XXXX, S.S., S.H.
Nama PERSEROAN	:	XXXX XXXX SALE
Propinsi Wilayah Pendaftaran	:	DI JAWA
Kabupaten/Kota Pendaftaran	:	JAKARTA UTARA
Jenis Permohonan	:	Pembubaran Perseroan
Biaya BNRI	:	RP 30.000
Biaya TBNRI	:	RP 0
Total	:	RP 30.000

Link Tagihan PNRI merupakan link untuk melakukan download Perintah Bayar BN/TBN RI ke PNRI. Link tersebut tetap akan tampil walaupun pembayaran telah dilakukan karena belum tersedianya Sistem Elektronik di PNRI sehingga antara Sistem AHU dan PNRI belum terhubung.

2 Link **Pratinjau & Cetak SK/SP** untuk menampilkan halaman pratinjau Data Perseroan

Kembali
Download PDF
Upload Akta

Menteri menyatakan tidak keberatan menteri.

FORCE FORCE SALE

Nomor Transaksi: XXXXXXXXXXXXXXX

DATA PERSEROAN

Nomor SK	XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Nama Perseroan	XXXX XXXX SALE
Jenis Perseroan	PMDN FASILITAS
NPWP Perseroan	
Jangka Waktu Perseroan	TIDAK TERBATAS
Status Perseroan	tertutup

- Klik tombol **Upload Akta**, kemudian tampil halaman upload akta seperti dibawah ini

UNDAH UNDAH BALE

Unggah Akta *

☒

Akta yang di upload sudah sesuai dengan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 13 ayat (4), pasal 25 ayat (4) dan pasal 28 ayat (4) permen hukum dan ham no 1 tahun 2016 tentang perubahan atas permen hukum dan ham no 4 tahun 2014 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas.

☒

Akta yang akan di upload adalah keseluruhan akta, dari judul akta sampai ketentuan penutup dan telah ditandatangani dan diberi stempel oleh notaris

☒

Kesalahan terhadap upload akta sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris

Choose File

.pdf

.pdf

Akta yang diupload berbentuk file pdf dengan kapasitas maksimal 10 MB
Waktu upload akta paling lambat adalah 30 hari kalender sejak pernyataan tidak keberatan menteri, sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (5) uu 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
Terhadap akta yang telah diupload, tidak dapat dilakukan perbaikan

Klik **disini** untuk melihat tutorial memepkecil ukuran upload akta dalam bentuk pdf.

Upload

- Ceklis syarat dan ketentuan Akta yang akan diunggah
- Klik tombol **Choose File** untuk memilih file Akta
- Klik tombol **Upload**, maka tampil halaman pratinjau setelah upload akta Pembubaran

Kembali

Download PDF

Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP

Upload Ulang Akta

Preview Akta

Menteri menyatakan tidak keberatan menteri.

UNDAH UNDAH BALE

Nomor Transaksi: 1582184837

DATA PERSEROAN

Nomor SK

1582184837

Nama Perseroan

UNDAH UNDAH BALE

Jenis Perseroan

PMDN FASILITAS

NPWP Perseroan

Jangka Waktu Perseroan

TIDAK TERBATAS

Status Perseroan

tertutup

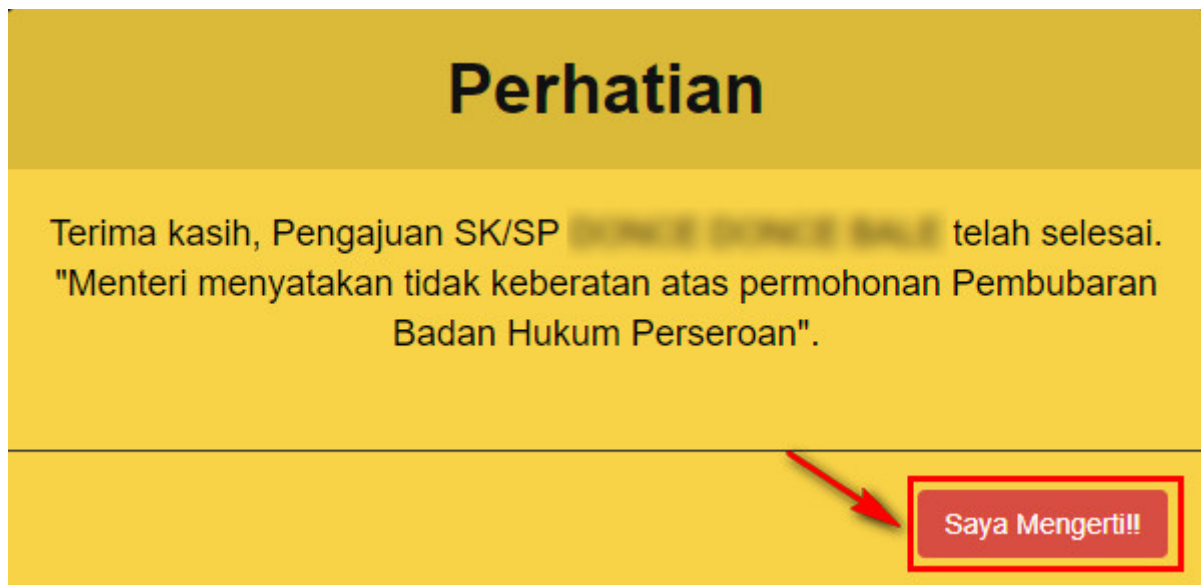
http://panduan.ahu.go.id/

Printed on 2024/05/01 19:44

- Untuk mengakhiri transaksi Pembubaran Perseroan, klik tombol

Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP

, kemudian muncul popup notifikasi selesai mengajukan pembubaran.



- Klik tombol **Saya Mengerti!!**, setelah itu tampil halaman Daftar Transaksi Perseroan dengan data Perseroan yang telah dilakukan Pembubaran

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :

Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560

Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30** hari kalender **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**. Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Pembubaran	PMDN FASILITAS		SUDAH BAYAR		Tagihan PNRI Informasi Upload Akta • Waktu Perbaikan : 89 hari

12. Pembubaran Pending

1. Masuk ke halaman Pembubaran Pending melalui menu di sebelah kiri

≡ DITJEN AHU ONLINE Pesan SABH

Beranda

Daftar Permohonan

Wasiat

Perseroan Terbatas

Pesan Nama

Pendirian

Perubahan

Merger

Penyesuaian

Akuisisi

Pembubaran

Transaksi PT Pending 2013

Daftar Transaksi Perseroan

Pendirian Pending

Perubahan Pending

Penyesuaian Pending UU/2007

Pembubaran Pending

Hj. SABH UNYU
Email: edo@docotel.co.id
Username: SABH

Profil Notaris

Riwayat Permohonan

Edit Profil

Surat Keputusan

Surat Keterangan

Daftar Permohonan

Permohonan Cuti

Permohonan Pindah Wilayah

Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan

Permohonan Perubahan Nama

Permohonan Penambahan Gelar Haji

Permohonan Perubahan Gelar Akademik

Permohonan Singkat Nama

Permohonan Pengunduran Diri

Permohonan Pensiun

Protokol

Mohon Isi No SK Pelantikan anda

Kolom dengan tanda * harus diisi.

Nomor SK Pelantikan / Berita Acara Sumpah

Tanggal SK Pelantikan / Berita Acara Sumpah

Simpan

Profil Notaris

Nama Lengkap	: Hj. SABH UNYU	Nama Kecil	: PRANUDIO TRI YUDHO
Dahulu bernama / Alias	: YUDHO AMIN RAIS	Nomor Induk Kependudukan	: 6345264765378892
Nomor NPWP	: 1.123.123.1-001	Tanggal Lahir	: 01 January 1950
Tempat Lahir	: JAKARTA	Nomor Akta Lahir / Tanda Kenal Lahir	: AHU-NO.AKTA.XXIII
Tanggal Terbit Akta Lahir / Tanda Kenal Lahir	: 01 January 1970	Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status Perkawinan	: Lajang	Agama	: ISLAM
		Email	: edo@docotel.co.id

2. Masuk ke halaman Permohonan Dasar Pembubaran

≡ DITJEN AHU ONLINE Pesan SABH

Beranda

Daftar Permohonan

Wasiat

Perseroan Terbatas

Yayasan

Perkumpulan

Notaris Pengganti

PERMOHONAN PEMBUBARAN PENDING PERSEROAN

☐ Dasar Pembubaran

☐ Pembubaran berdasarkan RUPS

☐ Pembubaran berdasarkan jangka waktu

☐ Pembubaran berdasarkan dicabutnya kepaillitan

☐ Pembubaran berdasarkan harta pailit Perseroan

☐ Pembubaran berdasarkan dicabutnya izin usaha Perseroan

Lanjutkan

1. Wajib ceklist dasar pembubaran
2. Ceklist salah satu dasar pembubaran untuk PT tersebut
3. Klik tombol **LANJUTKAN**

Headline

≡ DITJEN AHU ONLINE Pesan SABH

PERMOHONAN PEMBUBARAN PENDING PERSEROAN : Pembubaran berdasarkan RUPS

NAMA PERSEROAN *

NOMOR SURAT *

NOTARIS TERAKHIR *

ⓘ Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pembentukan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pembentukan Perubahan Data Perseroan.

Kembali Cari

1. Masukkan Nama Perseroan yang pending.
 2. Masukkan Nomor Surat yang tertera pada surat yang dikirim oleh Kementrian.
 3. Tekan tombol Cari maka akan tampil halaman persyaratan utama perubahan.
- Setelah persyaratan sudah di ceklist semua, Klik tombol LANJUTKAN maka akan keluar allert perhatian!!! yang meyakinkan notaris tidak ada kesalahan dalam pengisiannya.



- Klik tombol Kembali akan tampil ke persyaratan utama perubahan awal.
- Klik tombol Saya Yakin akan masuk ke halaman permohonan perubahan ringkasan perseroan.

Beranda
Daftar Permohonan
Wasiat +
Perseroan Terbatas +
Perseroan Terbatas +
Perseroan Terbatas +
Yayasan +
Perseroan Terbatas +
Yayasan +
Perseroan Terbatas +
Yayasan +
Perseroan Terbatas +
Yayasan +
Perkumpulan +
Notaris Pengganti

PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN

Ringkasan Perseroan

Jenis Perseroan : PMDN NON FASILITAS / UMUM

Status Perseroan : Tertutup

Akta Notaris yang dibuat untuk permohonan sekarang.

Nomor Akta: 08

Tanggal Akta: 01-01-2014

Tanggal RUPS:

Pengumuman Surat Kabar

Tanggal Cetak:

Nama Surat Kabar:

Tambah

Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kehadiran RUPS	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham
☐		KOMISARIS UTAMA	Tanpa Klasifikasi : 9000000
☐		KOMISARIS	Tanpa Klasifikasi : 111000000

☐ Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesanggupan saya untuk memenuhi semua Persyaratan Utama diatas.

KEMBALI

LANJUTKAN

* Perhatikan pada Akta Notaris

- Pada akta notaris untuk nomor akta dan tanggal akta sudah otomatis terisi sesuai dengan data PT Pending.

-Jika data sudah terisi semua lalu tekan tombol **LANJUTKAN** untuk melanjutkan proses perubahan.

6. Masuk ke halaman Pra Tinjau Pembubaran Perseroan

PRA TINJAU PEMBUBARAN PERSEROAN

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan

Nama Singkatan

Jenis Perseroan

NPWP Perseroan *

Jangka Waktu Perseroan

Status Perseroan

KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi

Kabupaten

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan *

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan

AKTA PEMBUBARAN

Nomor Akta

Tanggal Akta

MODAL DASAR *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp 12	12.000.000	Rp 144.000.000

Total modal dasar Rp 144.000.000

MODAL DITEMPATKAN *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp 12	10.000.000	Rp 120.000.000

Total modal ditempatkan Rp 120.000.000

MODAL DISETOR *

Rp 120.000.000

☒ Dalam bentuk uang.

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM *

Nama	Modal ditempatkan	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total
wera	Tanpa Klasifikasi	9.000.000	KOMISARIS UTAMA	Rp 108.000.000
wera	Tanpa Klasifikasi	111.000.000	KOMISARIS	Rp 1.332.000.000

Selain Perseroan BUMN dan BUMD pemegang saham wajib lebih dari satu.

JENIS PEMBUBARAN

Dasar Pembubaran : Pembubaran berdasarkan jangka waktu

1. Klik tombol **Kembali** jika data belum sesuai.
2. Klik tombol **SAYA YAKIN**

7. Masuk ke halaman Daftar Transaksi Perseroan

DITJEN AHU ONLINE

Pesan

SABH

Beranda

Daftar Permohonan

Wasiat

Perseroan Terbatas

Yayasan

Perkumpulan

Notaris Pengganti

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Daftar Transaksi Perseroan

No.	Nomor Transaksi	JENIS TRANSAKSI	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1	4014061236500009	Pembubaran	PMDN NON FASILITAS / UMUM	PMDN NON FASILITAS / UMUM	BELUM BAYAR	12 Juni 2014	- Tagihan
2	4014061236500009	Pembubaran	PMDN NON FASILITAS / UMUM	PMDN NON FASILITAS / UMUM	SUDAH BAYAR	12 Juni 2014	- Pratinjau - SK Pengesahan

- Klik dan download tagihan bukti Pembubaran

**DITJEN AHU****BUKTI PEMBUBARAN PERSEROAN**

No. Transaksi	:	[REDACTED]
Nama NOTARIS	:	Notaris [REDACTED]
Nama PERSEROAN	:	[REDACTED]
Propinsi Wilayah Pendaftaran	:	BANTEN
Kabupaten/Kota Pendaftaran	:	KABUPATEN TANGERANG
Jenis Permohonan	:	Pembubaran Perseroan
Biaya PNPB	:	RP 0
Biaya TBNRI	:	RP 0
Biaya BNRI	:	RP 30.000

From:

<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:

http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas&rev=1582184837Last update: **2020/02/20 07:47**